PMII dan DIALEKTIKA SOSIAL

Antara Spirit Perlawanan dan Etika Perubahan

Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
Dr. Ubaidillah, M.Ag
M. Riki Rahmatullah, S.E

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Haji Achmad Siddiq

JEMBER – INDONESIA

PMII DAN DIALEKTIKA SOSIAL: Antara Spirit Perlawanan dan Etika Perubahan

Penulis:

Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
Dr. Ubaidillah, M.Pd.I
M. Riki Rahmatullah, S.E

Editor:
Erik Estrada

UIN KHAS PRESS

PMII DAN DIALEKTIKA SOSIAL: *Antara Spirit Perlawanan dan Etika Perubahan*

© UIN KHAS Press, 2025

Penulis : Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
Dr. Ubaidillah, M.Pd.I
M. Riki Rahmatullah, S.E
Editor : Erik Estrada
Cover & Layout : Ahmad Kamil

Cetakan Pertama, Agustus 2025
viii+297 hlm, 15 x 23 cm

ISBN : 978-623-89762-6-3
IKAPI : NO. 427/JTI/2024

All Right Reserved
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh

UIN KHAS PRESS

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68136
Website: https://press.uinkhas.ac.id
Email: uinkhaspress@gmail.com / uinkhaspress@uinkhas.ac.id
Phone: (0331) 487550, (0331) 427005

KATA PENGANTAR

Dalam setiap denyut sejarah bangsa, selalu ada sekelompok anak muda yang memilih tidak sekadar menjadi saksi, tetapi pelaku. Mereka yang menolak tunduk pada arus ketidakadilan dan berani merintis jalan perubahan, meski terjal dan penuh luka. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir dari rahim sejarah itu—dari ikhtiar untuk memadukan iman dan ilmu, nasionalisme dan spiritualitas, serta kritik sosial dan etika perjuangan.

Buku ini hadir sebagai upaya reflektif dan futuristik dalam membaca ulang arah gerak PMII di tengah dinamika zaman yang semakin kompleks. Di era ketika semangat perlawanan kerap terkooptasi oleh pragmatisme, dan idealisme diuji oleh godaan kekuasaan, PMII ditantang untuk memulihkan kembali ruh perjuangannya: menjadi kekuatan moral, intelektual, dan sosial yang berpihak pada rakyat.

Sebagai wadah kaderisasi dan pembentukan intelektual organik, PMII tidak hanya dituntut untuk kritis terhadap struktur ketimpangan, tetapi juga visioner dalam menyusun jalan emansipasi sosial. Dari kampus ke kampung, dari ruang wacana ke ruang aksi, PMII harus mampu mengartikulasikan Islam sebagai kekuatan pembebas, rakyat sebagai subjek perubahan, dan keadilan sebagai cita utama.

Semoga buku ini menjadi bahan renungan, diskusi, dan penyulut semangat baru bagi para kader, alumni, serta seluruh elemen gerakan mahasiswa yang merindukan perubahan hakiki. Karena sejarah tak akan berubah oleh retorika belaka, tetapi oleh keberanian melangkah dalam kesadaran, cinta, dan tanggung jawab sosial.

Jember, 17 Agustus 2025,

Penulis

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ~ IV

Bab I
PMII Dalam Konteks Gerakan Sosial: Antara Kampus Dan Rakyat ~ 1

A. Sejarah Singkat Dan Visi Ideologis PMII ~ 2
B. PMII Sebagai Gerakan Intelektual Dan Sosial ~ 9
C. Gerakan Sosial Sebagai Dialektika: Teori Dan Praktik ~ 19
D. PMII Sebagai Mediator Antara Suara Rakyat Dan Ruang Akademik ~ 28

Bab II
Spirit Perlawanan: Warisan Ideologis Dan Gerakan Kebangsaan ~ 39

A. Perlawanan Sebagai Sikap Ideologis Dan Teologis ~ 40
B. Sejarah Perlawanan Pmii Terhadap Ketidak-Adilan: Dari Spirit Moral Ke Gerakan Struktural ~ 44
C. Pmii Dalam Transisi Orde: Orde Baru, Reformasi, Dan Era Oligarki ~ 52
D. Perlawanan Hari Ini: Dari Demonstrasi Ke Advokasi Struktural ~ 61

Bab III

Etika Perubahan: Islam, Kemanusiaan, Dan Tanggung Jawab Sosial ~ 69

A. Islam Sebagai Agama Transformatif: Dari Spiritualitas Menuju Keadilan Sosial ~ 70

B. Ahlussunnah Wal Jama'ah Dan Nilai-Nilai Sosial: Etika Komunitas, Keseimbangan, Dan Keadilan ~ 79

C. Etika Sosial Dalam Tradisi Pmii: Tidak Hanya Melawan, Tapi Membangun ~ 88

D. Menggagas Perubahan Yang Berakar Pada Etika Dan Spiritualitas ~ 96

Bab IV

Gerakan Mahasiswa Dan Krisis Sosial Indonesia ~103

A. Ketimpangan Ekonomi Dan Marginalisasi Rakyat Kecil: Sebuah Luka Struktural Bangsa ~ 103

B. Komodifikasi Pendidikan Dan Kemunduran Demokrasi: Dari Kritis Ke Komersial, Dari Rakyat Ke Elit ~ 114

C. Pmii Sebagai Respons Terhadap Krisis Multidimensi: Dari Gerakan Moral Ke Gerakan Peradaban ~ 123

D. Peran Mahasiswa Dalam Membangun Kesadaran Kritis Publik: Dari Intelektual Organik Menuju Agen Transformasi ~ 130

Bab V

Paradigma Dua Kaki: Menyatukan Basis Intelektual Dan Basis Sosial ~ 141

A. Intelektualisme Organik: Dari Kampus Ke Lapangan ~ 141

B. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Jalan Dakwah Sosial ~ 148

C. Membangun Literasi Kritis Dalam Kalangan Akar Rumput ~ 157

D. Pmii Sebagai Pelopor Gerakan Yang Berbasis Ilmu Dan Aksi ~ 166

Bab VI

Strategi Gerakan: Refleksi, Aksi, Dan Transformasi ~ 173

A. Pendekatan Advokasi, Budaya, Dan Pendidikan Alternatif ~ 173

B. Aksi Simbolik Dan Kerja Basis: Dari Aksi Massa Ke Aksi Sosial ~ 183

C. Membangun Jejaring Solidaritas: Lintas Komunitas Dan Generasi ~ 192

D. Transformasi Sosial Bukan Revolusi Instan, Tapi Kerja Konsisten ~ 201

Bab VII

Tantangan Gerakan: Koptaksi Politik, Kejenuhan Kader, Dan Krisis Nilai ~ 211

A. Godaan Pragmatisme Dalam Tubuh Gerakan ~ 212

B. Kaderisasi Yang Stagnan Dan Kehilangan Arah Ideologis ~ 220

C. Perluasan Medan Juang: Media Sosial, Desa, Dan Ekosistem Digital ~ 230

D. Membangun Kembali Integritas Dan Semangat Perjuangan ~ 233

Bab VIII
Menuju Gerakan Emansipatoris: Manifesto Sosial Pmii Untuk Indonesia ~ 237

A. Arah Baru Perjuangan Pmii Dalam Abad Ke-21 ~ 237
B. Islam, Rakyat, Dan Keadilan Sebagai Trisula Gerakan ~ 257
C. Menyusun Kembali Roadmap Perubahan Sosial ~ 273
D. Pmii Sebagai Kekuatan Yang Tidak Sekadar Mengkritik, Tapi Menggugah ~ 282

Penutup ~ 287

Seruan Kader Untuk Masa Depan Rakyat ~ 287

Daftar Pustaka ~ 292

BAB I

PMII DALAM KONTEKS GERAKAN SOSIAL: ANTARA KAMPUS DAN RAKYAT

Di balik hiruk-pikuk kehidupan kampus yang kian teknokratis dan kompetitif, masih tersisa ruang-ruang sunyi tempat idealisme menyala dan kepedulian sosial berakar. Di sanalah PMII tumbuh, bukan sekadar sebagai organisasi kemahasiswaan, tetapi sebagai ruh perlawanan yang hidup dari keresahan dan kepedihan rakyat. PMII bukan hanya hadir untuk menjawab pertanyaan akademik, melainkan untuk merespons jeritan keadilan yang tak terdengar di lorong kekuasaan.

Bab ini akan mengajak kita menelusuri jejak PMII sebagai gerakan sosial yang bergerak di dua kutub penting: kampus sebagai pusat refleksi intelektual, dan masyarakat sebagai medan perjuangan konkret. Di sinilah dialektika itu terjadi—antara teori dan praksis, antara nalar kritis dan aksi nyata, antara mimbar akademik dan tanah berlumpur tempat rakyat berdiri.

PMII berdiri bukan untuk memuja kekuasaan, melainkan untuk mengawalnya dengan nurani. Dan di tengah krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara, PMII ditantang untuk kembali menjadi jembatan yang menghubungkan harapan rakyat dengan mimpi-mimpi perubahan. Sebab di titik pertemuan antara kampus dan rakyat, suara perubahan selalu menemukan gaungnya.

A. SEJARAH SINGKAT DAN VISI IDEOLOGIS PMII

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir pada 17 April 1960 di Surabaya, bukan semata sebagai kelahiran organisasi kemahasiswaan, tetapi sebagai manifestasi dari kesadaran historis yang mendalam—yakni perlunya ruang perjuangan yang merdeka, progresif, dan berpihak pada rakyat dalam tubuh mahasiswa Islam. Lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), PMII awalnya didirikan untuk memperkuat kaderisasi intelektual muda NU dalam lingkungan akademik yang saat itu mulai dibanjiri arus ideologi sekuler, sosialis, bahkan liberal.

Namun, kelahiran PMII tidak bisa dimaknai hanya sebagai kelanjutan struktural dari NU di kampus. Ia hadir sebagai subjek historis yang hidup dan berkembang melalui dialektika zaman. Seiring dinamika politik dan sosial yang terus berubah, PMII menjelma menjadi entitas yang lebih otonom dan transformatif. Ia tidak lagi semata menjadi perpanjangan ideologi keagamaan, tetapi membentuk dirinya sebagai gerakan sosial-intelektual yang menjembatani nilai-nilai Islam, semangat keilmuan, dan komitmen kebangsaan dalam satu tarikan napas perjuangan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hans-Georg Gadamer dalam teori *hermeneutika historis*, identitas sebuah gerakan tidak statis, melainkan terus ditafsirkan ulang sesuai konteks zaman (Gadamer, *Truth and Method*, 1975). PMII menjalani proses ini—membaca ulang teks-teks tradisi, merefleksikan realitas sosial, dan merumuskan praksis gerakan yang kontekstual. Dalam perjalanan panjangnya, PMII tidak hanya menjadi ruang kaderisasi, melainkan ruang perjumpaan dialektis antara Islam dan modernitas, antara tradisi dan transformasi.

Dalam semangat ini, PMII tidak mengusung Islam sebagai simbol kuasa, tetapi sebagai etika pembebasan. Islam tidak dipahami sekadar sebagai doktrin normatif,

melainkan sebagai kekuatan transformatif yang memihak pada keadilan, kemanusiaan, dan kaum tertindas. Maka tidak mengherankan bila PMII memposisikan dirinya sebagai pembela rakyat, pengkritik kekuasaan, dan pencari keadilan sosial. Dalam hal ini, PMII mengambil posisi sebagai *intellectual movement*—gerakan yang tidak hanya mengadvokasi perubahan, tetapi juga mengartikulasikan makna keadilan secara filosofis dan praksis.

Sebagaimana digarisbawahi oleh Ali Shariati, gerakan Islam haruslah menjadi alat untuk membebaskan umat dari dominasi struktural dan kebodohan sistemik (Shariati, *Religion vs. Religion*, 1979). PMII mengemban misi ini dengan caranya sendiri—dengan pendekatan yang inklusif, moderat, dan berbasis pada tradisi Aswaja (Ahlussunnah wal Jama'ah) yang tidak jumud, melainkan terbuka pada dialektika zaman.

Dengan demikian, PMII bukan hanya sebuah organisasi mahasiswa, tetapi sebuah medan tafsir historis, tempat ide-ide besar diuji di tengah tantangan praksis, dan tempat keberpihakan moral diuji dalam realitas politik yang kompleks. PMII adalah ruang di mana gagasan tidak sekadar dikaji, tetapi diperjuangkan; tempat di mana keberislaman tidak hanya menjadi identitas, tetapi menjadi sumber inspirasi etika dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab.

Secara historis, kelahiran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tidak dapat dilepaskan dari konstelasi politik dan sosial pasca-kemerdekaan Indonesia yang tengah bergolak. Pada dekade 1950-an hingga awal 1960-an, kampus-kampus di Indonesia tidak sekadar menjadi pusat pembelajaran akademik, tetapi menjelma sebagai arena pertarungan ideologis yang intens. Tiga kekuatan besar saling berebut pengaruh di ruang-ruang mahasiswa: nasionalisme sekuler, Islamisme skripturalis,

dan komunisme revolusioner. Masing-masing membawa proyek peradaban yang berbeda, dan dalam konteks itu, PMII hadir sebagai sintesis yang bernalar dan membumi.

PMII memposisikan dirinya sebagai kekuatan Islam yang inklusif, rasional, dan nasionalis, sekaligus kritis terhadap segala bentuk hegemoni ideologis. Ia menolak politik identitas yang eksklusif, baik dalam bentuk fundamentalisme agama maupun ekstremisme kiri yang menjadikan manusia semata objek mobilisasi politik. Sebaliknya, PMII menegaskan Islam sebagai nilai yang hidup—sebuah sumber etika sosial yang mendorong pembebasan, bukan dominasi.

Sikap PMII mencerminkan pendekatan dialektis terhadap realitas zamannya: tidak larut dalam arus pragmatisme kekuasaan, tetapi juga tidak jumud dalam romantisme ideologis. PMII berusaha menjaga jarak kritis terhadap kekuatan-kekuatan politik yang berusaha meng instrumentalisasi agama maupun meminggirkan nilai-nilai spiritual dalam pembangunan bangsa. Dalam kata lain, PMII tampil sebagai "penjaga akal sehat" di tengah fragmentasi politik dan ideologisasi kampus.

Sejarawan Ahmad Syafii Maarif (1995) menegaskan bahwa PMII adalah salah satu kekuatan penting dalam membangun model keislaman yang berakar pada realitas Indonesia—yakni Islam yang tidak terasing dari kebangsaan dan tidak alergi terhadap perubahan sosial. Senada dengan itu, peneliti Islam kontemporer Muhammad Noor (2010) melihat PMII sebagai bagian dari gerakan Islam progresif yang menolak dikotomi antara Islam dan modernitas, antara iman dan ilmu, antara tradisi dan transformasi.

Dengan posisi tersebut, PMII tidak hanya merepresentasikan mahasiswa NU, tetapi menjadi ruang dialog yang lebih luas bagi anak-anak muda Islam untuk berpikir kritis, bersikap inklusif, dan berkomitmen pada perubahan sosial

yang adil. Inilah kekuatan sejati PMII: ia tumbuh bukan karena doktrin, melainkan karena dialektika—antara nilai, akal, dan tindakan.

Secara idec ologis, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) meletakkan pijakan gerakannya pada pondasi Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja), bukan semata sebagai identitas teologis, melainkan sebagai paradigma keberislaman yang hidup dan kontekstual. Dalam hal ini, Aswaja tidak direduksi menjadi sekadar pilihan mazhab fikih, tetapi dimaknai secara lebih dinamis sebagai kerangka berpikir (manhaj al-fikr), bersikap (manhaj al-harakah), dan bertindak (manhaj al-'amal) yang mengakar kuat dalam nilai-nilai sosial-kultural Indonesia.

Aswaja yang dikembangkan oleh PMII adalah Aswaja yang reflektif dan progresif—yakni pandangan dunia yang menjunjung tinggi tawazun (keseimbangan), tasamuh (toleransi), ta'adul (keadilan), dan i'tidal (moderasi) sebagai prinsip dasar dalam menanggapi kompleksitas realitas sosial. Nilai-nilai ini bukan hanya menjadi pedoman spiritual dan etis, tetapi juga instrumen kritis dalam membaca ketimpangan struktural, penindasan kultural, dan penyimpangan kekuasaan dari nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam perspektif PMII, Aswaja bukan warisan beku, melainkan warisan hidup yang harus terus ditafsir ulang seiring perubahan zaman. Dengan Aswaja sebagai manhaj, PMII melampaui sekat-sekat tekstualisme dan formalisme dalam beragama, lalu bergerak pada wilayah praksis—yakni bagaimana nilai-nilai Islam dapat mewujud dalam tindakan nyata yang membela kaum lemah, memberdayakan masyarakat, dan menegakkan keadilan sosial.

Dalam kerangka inilah, PMII menempatkan ideologinya sebagai fondasi etis sekaligus politis. Etis karena ia menolak kekerasan dan intoleransi sebagai cara menyelesaikan konflik sosial; politis karena ia menyuarakan pembebasan

dari sistem yang menindas, serta menuntut kekuasaan agar berpihak kepada rakyat, bukan elite semata. Aswaja yang demikian bukan hanya memelihara tradisi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran transformatif.

Sebagaimana dinyatakan oleh Kuntowijoyo (2004), agama harus mengalami proses "objektifikasi"—yakni menjadi kekuatan sosial yang menampilkan wajah keberpihakan, bukan hanya ajaran pribadi yang bersifat individualistik. PMII, melalui tafsir kritis terhadap Aswaja, menjawab tantangan itu: menjadikan Islam bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi sebagai etos perlawanan dan moralitas transformasi.

Dalam dokumen resmi *Nilai Dasar Pergerakan* (NDP) yang disusun pada tahun 1991 oleh sahabat Abdullah Zaini dan kolega-koleganya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) secara eksplisit merumuskan pandangan ontologis dan aksiologis tentang manusia sebagai makhluk yang multidimensional. Manusia tidak hanya diposisikan sebagai makhluk spiritual yang terikat kepada Tuhan (makhluk teologis), tetapi juga sebagai makhluk sejarah yang bertanggung jawab atas dunia dan masyarakatnya (makhluk historis). Dalam kerangka ini, setiap kader PMII diarahkan untuk mengembangkan kesadaran teologis yang membebaskan dan praksis sosial yang membangun.

Konsepsi ini tidak berhenti pada retorika normatif keagamaan, tetapi menembus ke dalam inti eksistensi manusia sebagai subjek perubahan. Dalam semangat ini, PMII menolak bentuk-bentuk keberagamaan yang pasif, fatalistik, atau ahistoris. Sebaliknya, PMII menghidupkan nilai-nilai Islam sebagai kekuatan pembebas yang berpihak pada kaum mustadh'afin—mereka yang tertindas secara struktural maupun kultural.

Gagasan ini sejajar dengan pemikiran Ali Syariati, seorang pemikir revolusioner asal Iran, yang menegaskan

bahwa iman sejati meniscayakan keberpihakan terhadap yang tertindas, penolakan terhadap segala bentuk penindasan, serta keterlibatan aktif dalam mengubah sejarah dengan kesadaran tauhid (Syariati, 2003). Tauhid, dalam pandangan Syariati, bukan hanya keyakinan metafisik, melainkan prinsip emansipatoris yang membongkar berhala-berhala kekuasaan, ideologi tiranik, dan struktur ketimpangan.

PMII menjadikan warisan ini sebagai ruh gerakannya: beriman sambil melawan, bertauhid sambil membebaskan. Tauhid menjadi titik tolak pembentukan manusia yang sadar akan misinya sebagai hamba sekaligus pengelola dunia, sebagai pribadi yang tunduk kepada Tuhan, namun bebas dari penghambaan kepada manusia dan sistem yang menindas. Oleh karena itu, pendidikan kaderisasi di PMII tidak hanya membentuk akal kritis dan wawasan sosial, tetapi juga memperkuat spiritualitas yang aktif—spiritualitas yang menjelma dalam kepedulian, aksi, dan perjuangan.

Dengan paradigma ini, PMII berupaya menciptakan sintesis antara iman dan kesadaran sosial, antara nilai-nilai transenden dan aksi nyata. Dalam dialektika itulah, PMII terus bergerak: menggugat ketidakadilan, membela rakyat, dan memaknai perjuangan sebagai bagian dari pengabdian kepada Tuhan.

PMII juga mengadopsi semangat humanisme profetik sebagaimana dirumuskan oleh Kuntowijoyo dalam *Islam sebagai Ilmu* (2006), yakni konsep perubahan sosial yang berpijak pada tiga prinsip fundamental: transendensi, humanisasi, dan liberasi. Dalam kerangka ini, transendensi menegaskan dimensi ilahiah dalam setiap perjuangan sosial; humanisasi menempatkan manusia sebagai subjek utama perubahan; dan liberasi mengarah pada pembebasan dari segala bentuk penindasan—baik struktural, kultural, maupun spiritual.

Bagi PMII, semangat ini tidak sekadar menjadi wacana normatif, tetapi dijadikan sebagai paradigma praksis dalam membangun gerakan sosial yang sadar nilai dan berorientasi pada keadilan substantif. Transformasi sosial yang diusung PMII bukanlah sebatas reformasi simbolik yang berhenti pada permukaan institusi, melainkan perubahan yang menyentuh akar struktur ketimpangan dan mengafirmasi keberadaan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Dengan pendekatan ini, PMII tidak sekadar tampil sebagai gerakan moral yang menyuarakan etika di tengah kekuasaan yang korup, melainkan juga sebagai gerakan intelektual yang membangun basis pengetahuan kritis, dan gerakan politik kebudayaan yang menantang dominasi wacana elite dengan narasi rakyat kecil. PMII berdiri di garis depan untuk mendobrak struktur hegemonik, sambil tetap berakar pada nilai-nilai Islam dan keindonesiaan.

Dalam konteks ini, humanisme profetik menjadi landasan filosofis yang menempatkan perjuangan kader PMII sebagai panggilan sejarah untuk menyatukan iman, ilmu, dan amal dalam kerja-kerja advokatif dan transformatif. Gerakan menjadi jalan suci (*al-thariq al-muqaddas*) ketika ia berpijak pada nilai-nilai langit, berpihak pada kemanusiaan, dan membebaskan realitas yang timpang.

Sebagaimana ditegaskan oleh Kuntowijoyo: "Humanisme profetik tidak hanya mengajak manusia untuk kembali kepada Tuhan, tetapi juga memanggil mereka untuk mengubah dunia." (*Kuntowijoyo, 2006*).

Maka, PMII tidak cukup hanya menjadi pengamat realitas; ia harus menjadi pelaku sejarah. Dalam dialektika sosial-politik bangsa, PMII memposisikan dirinya sebagai motor transformasi sosial yang etis, reflektif, dan berpihak. Ia hadir sebagai jembatan antara spiritualitas yang hidup

dan perjuangan sosial yang nyata.

Dengan demikian, *Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)* hadir sebagai kekuatan dialektik yang hidup, menganyam benang-benang nilai-nilai Islam yang transenden dengan realitas sosial yang profan, menjembatani antara spiritualitas yang mendalam dan tuntutan transformasi struktural yang mendesak. PMII bukan sekadar pewaris tradisi, melainkan juga subjek aktif perubahan sejarah, yang berupaya mengaktualisasikan Islam tidak sebagai simbol kekuasaan, tetapi sebagai etika pembebasan dan praksis emansipatoris.

Dalam posisi ini, PMII tampil sebagai agent of prophetic transformation—yang tidak berhenti pada romantisme masa lalu atau kritik verbal semata, tetapi berani menyalakan api perubahan melalui gerakan yang kontekstual, kritis, dan berkeadilan. Semangat keislaman yang dibawanya bukanlah Islam yang membelenggu, melainkan Islam yang membebaskan, sebagaimana dimaknai dalam paradigma *tauhid sosial*: memihak pada yang lemah, menggugat kekuasaan yang menindas, dan membangun tatanan sosial yang lebih manusiawi.

PMII tidak berdiri di menara gading keilmuan, tetapi turun ke jalan sejarah, menyatu dengan denyut nadi rakyat, dan menjadikan iman, ilmu, serta amal sebagai fondasi perjuangan. Dalam ruang dialektika inilah, PMII menolak untuk sekadar menjadi pengamat zaman. Ia memilih menjadi pelaku zaman—mengkritik dengan nalar, membela dengan nurani, dan membangun dengan etika.

B. PMII SEBAGAI GERAKAN INTELEKTUAL DAN SOSIAL

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tidak lahir dalam ruang hampa sejarah, melainkan dalam pusaran pergulatan intelektual, sosial, dan ideologis pasca-

kemerdekaan. Ia hadir pada momen ketika Indonesia muda tengah mencari bentuknya, dan kampus menjadi medan pertarungan gagasan antara kekuatan nasionalis, Islamis, dan komunis. Dalam konteks itu, mahasiswa bukan hanya subjek pembelajar, melainkan juga aktor politik dan moral, yang mengambil peran dalam merumuskan arah bangsa.

Didirikan pada 17 April 1960 di Surabaya, PMII menjelma menjadi entitas yang unik: bukan sekadar organisasi kemahasiswaan, melainkan gerakan intelektual dan sosial yang berakar pada nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, berorientasi pada kebangsaan, dan berpijak pada komitmen terhadap keadilan sosial. PMII membangun jati dirinya dalam dialektika antara teologi pembebasan dan praksis sosial, antara nalar kritis dan spiritualitas, serta antara identitas religius dan cita-cita kerakyatan.

Dengan semangat tersebut, PMII menolak untuk menjadi instrumen kekuasaan atau sekadar pewaris dogma. Ia memilih jalan yang lebih sukar namun bermakna: menjadi gerakan transformatif yang menghadirkan Islam sebagai kekuatan etis, bukan ideologi eksklusif. PMII memperjuangkan peran mahasiswa sebagai subjek perubahan, bukan pelengkap statistik pembangunan. Ia berdiri sebagai jembatan antara kesadaran akademik di kampus dan jeritan rakyat di lorong-lorong sejarah, menjadikan ilmu sebagai cahaya, iman sebagai kompas, dan rakyat sebagai kiblat perjuangan.

Sebagai gerakan intelektual, *Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)* memaknai ilmu pengetahuan bukan sekadar sebagai sarana mobilitas sosial atau pencapaian akademik yang bersifat individualistis, tetapi sebagai alat pembebasan—baik dari kebodohan, ketertindasan, maupun keterasingan manusia dari nilai-nilai kemanusiaannya. Dalam tradisi pemikiran kritis, sebagaimana diusung oleh Paulo Freire (1997), ilmu pengetahuan memiliki dimensi

emansipatoris ketika ia mampu membangkitkan kesadaran reflektif dan menghadirkan transformasi sosial yang berpihak pada kaum tertindas (*the oppressed*).

Dalam kerangka ini, kaderisasi PMII bukanlah proses penggandaan elite teknokratik, melainkan ruang dialektis pembentukan pribadi yang berpikir kritis, reflektif, spiritual, dan solider. Kader tidak dididik sekadar untuk cakap dalam teori, tetapi juga teruji dalam praksis. Mereka dilatih untuk menjadi intelektual organik dalam pengertian Gramscian—yakni intelektual yang tidak terpisah dari denyut kehidupan rakyat, yang menjadikan pikirannya sebagai alat perjuangan, bukan sekadar alat penyesuaian dengan sistem yang ada (Gramsci, 1971).

PMII merumuskan bahwa orientasi ilmu pengetahuan harus menyatu dengan nilai iman dan komitmen kemanusiaan. Ini selaras dengan konsep *tauhid sosial* dalam pemikiran Ali Syari'ati (2003), yang menekankan bahwa keimanan yang sejati adalah keimanan yang mendorong pembebasan, keberpihakan pada mustadh'afin (kaum tertindas), dan penolakan terhadap segala bentuk kezaliman struktural.

Dengan demikian, ilmu dalam visi PMII bukanlah barang netral, melainkan kekuatan moral dan politik yang harus diarahkan untuk perubahan. Maka dari itu, proses kaderisasi di PMII sejatinya adalah proses pemanusiaan: membentuk kader yang mampu membaca zaman dengan nurani, merumuskan masalah dengan nalar kritis, dan bergerak dengan keberanian moral untuk menghadirkan keadilan.

Dalam Nilai Dasar Pergerakan (NDP), *Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)* menempatkan manusia sebagai makhluk berkesadaran historis yang memiliki tanggung jawab etis terhadap perubahan sosial. Manusia bukan sekadar entitas yang dibentuk oleh struktur, tetapi

subjek otonom yang mampu mengintervensi sejarah dan meretas arah baru bagi peradaban. Dalam pandangan ini, keberadaan manusia selalu mengandung dimensi praksis—ia ada untuk mengada secara aktif dalam sejarah.

Pandangan ini beresonansi kuat dengan pemikiran Paulo Freire dalam karya monumental nya *Pedagogy of the Oppressed* (1970), di mana ia menekankan bahwa pendidikan sejati adalah pendidikan yang membangkitkan kesadaran kritis (conscientização)—yakni kesadaran yang mendorong individu untuk melihat dirinya bukan sebagai korban pasif, melainkan sebagai pelaku perubahan yang sadar akan ketimpangan dan menolak untuk tunduk pada status quo. Pendidikan, menurut Freire, harus bersifat dialogis, membebaskan, dan menempatkan realitas sosial sebagai teks yang harus ditafsirkan secara aktif dan kritis.

Berangkat dari prinsip ini, kaderisasi dalam PMII tidak hanya diarahkan pada penguasaan wacana keilmuan, tetapi juga pada kemampuan untuk membaca realitas sosial sebagai "kitab kehidupan". Kader tidak dididik untuk berhenti pada tumpukan buku, tetapi justru untuk menjadikan ilmu sebagai jembatan menuju keberpihakan. Mereka diajak menafsirkan kemiskinan, ketimpangan, kekerasan struktural, dan penderitaan rakyat sebagai bagian dari medan praksis yang menuntut intervensi moral dan intelektual.

Dalam kerangka ini, pendidikan kader PMII adalah pendidikan pembebasan—ia mengintegrasikan nalar kritis, spiritualitas, dan keberanian untuk bertindak. Kader diajak untuk tidak hanya berpikir, tetapi juga bertindak; tidak hanya memahami, tetapi juga menggugah. Sebab, sebagaimana ditegaskan oleh Freire, "*To exist, humanly, is to name the world, to change it.*"

Selain itu, PMII mengartikulasikan dan mempraktikkan epistemologi transformatif—sebuah cara berpikir yang

tidak memisahkan antara pengetahuan, nilai, dan tindakan. Dalam kerangka ini, ilmu pengetahuan tidak dimaknai sebagai entitas netral dan bebas nilai, melainkan sebagai medan perjuangan ideologis yang harus dimobilisasi untuk membebaskan, mencerahkan, dan mentransformasikan realitas sosial.

Epistemologi transformatif yang dianut PMII bertumpu pada kesadaran bahwa ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk digunakan dalam keberpihakan yang etis dan praksis. Hal ini sejalan dengan pandangan Sandra Harding (1991) yang menolak positivisme sebagai satu-satunya sumber kebenaran ilmiah, dan justru menekankan pentingnya *"standpoint epistemology"*—yakni ilmu yang berpijak dari perspektif mereka yang termarjinalkan, sehingga lebih peka terhadap ketidakadilan dan mampu memicu perubahan sosial yang bermakna.

Dalam semangat ini, intelektualisme PMII adalah intelektualisme yang berpihak—berpihak pada kaum yang ditindas, pada suara-suara yang dibungkam, dan pada nilai-nilai keadilan serta kemanusiaan. Pengetahuan bukan disimpan dalam menara gading, tetapi ditebarkan di jalan-jalan rakyat, di lorong-lorong kampung, dan di ruang-ruang kebijakan publik.

Dengan demikian, ilmu dalam PMII bersifat profetik: ia bukan hanya alat analisis, tetapi juga kompas moral; bukan hanya untuk memahami dunia, tetapi juga untuk mengubahnya. Intelektualisme seperti ini bukanlah bentuk romantisme moral, tetapi bagian dari komitmen terhadap masa depan yang lebih adil dan manusiawi—sebuah masa depan yang tidak dibentuk oleh kekuasaan semata, tetapi oleh *akal sehat, hati nurani, dan keberanian moral*.

Sebagai gerakan sosial yang berakar pada nilai-nilai Islam, PMII tidak menjadikan agama sebagai simbol identitas atau sekadar ornamen formalitas. Islam dalam

perspektif PMII adalah energi etik dan spiritual—sebuah kekuatan pembebas yang menuntun tindakan, bukan sekadar kepercayaan yang dijaga dalam ruang ibadah. Dalam tradisi ini, ajaran Islam tentang keadilan (‘adl), persaudaraan (ukhuwwah), dan pembebasan (tahrir) menjadi pilar moral yang harus ditransformasikan ke dalam realitas sosial yang konkret.

PMII memahami bahwa keberagamaan sejati tidak berhenti pada ritual, tetapi menemukan maknanya justru dalam keberpihakan kepada yang lemah, dalam keberanian untuk menggugat ketimpangan, dan dalam konsistensi membela hak-hak dasar manusia. Maka dari itu, PMII tidak hanya hadir di ruang-ruang seminar dan forum intelektual, tetapi juga menjejakkan kaki di sawah-sawah petani yang digusur, di pabrik-pabrik tempat buruh diperbudak sistem, dan di jalan-jalan tempat rakyat bersuara melawan kekuasaan yang menindas.

Sikap ini sejalan dengan pandangan Ali Syari’ati (2003) yang menyatakan bahwa Islam adalah revolusi spiritual yang menuntut keberpihakan pada kaum mustadh’afin—mereka yang tertindas dan dilemahkan oleh sistem. Dalam konteks Indonesia, perjuangan itu berarti membongkar struktur kekuasaan yang korup, melawan eksploitasi sumber daya, dan membangun kesadaran rakyat sebagai subjek sejarah.

PMII, dalam praksis sosialnya, tidak alergi terhadap kekuasaan, tetapi juga tidak tunduk padanya. Kritik terhadap rezim bukanlah bentuk kebencian, tetapi ekspresi tanggung jawab moral. Di sinilah peran PMII sebagai gerakan sosial Islami: mengubah spiritualitas menjadi solidaritas, dan menjadikan agama sebagai kekuatan transformatif untuk menghadirkan tatanan masyarakat yang lebih adil, manusiawi, dan berkeadaban.

Gerakan sosial PMII berpijak pada prinsip Islam transformatif—sebuah pandangan yang menempatkan

agama bukan hanya sebagai sistem kepercayaan personal, melainkan sebagai kekuatan etis dan politis yang membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan. Perspektif ini terinspirasi dari pemikiran Fazlur Rahman dan Ali Syari'ati, dua pemikir besar dalam khazanah Islam modern yang sama-sama memandang Islam sebagai sumber emansipasi, bukan dogma yang membelenggu.

Bagi Fazlur Rahman (1982), Islam harus dibaca sebagai "etika progresif" yang menuntut keterlibatan aktif dalam perubahan sosial. Ia menekankan pentingnya kontekstualisasi wahyu, sehingga ajaran Islam tidak berhenti pada literalitas hukum, tetapi mampu membentuk struktur sosial yang adil dan beradab. Sementara Ali Syari'ati (2003) lebih radikal dalam menekankan bahwa Islam sejati adalah Islam pembebasan—yakni agama yang berpihak pada kaum mustadh'afin dan menentang struktur-struktur feodalisme, kapitalisme eksploitatif, dan tirani politik yang melanggengkan ketimpangan.

Dalam kerangka ini, PMII memaknai dakwah bukan sekadar ajakan ritualistik, tetapi sebagai tindakan pembebasan—sebuah proses membangun kesadaran kolektif untuk meruntuhkan sistem dehumanisasi yang merampas martabat manusia. Dakwah adalah perjuangan untuk menciptakan masyarakat yang adil secara struktural dan manusiawi secara kultural. Dakwah adalah artikulasi nilai-nilai tauhid yang aktif: melawan penindasan, meretas kejumudan, dan menyalakan api perubahan.

Dengan demikian, PMII menempatkan Islam sebagai praksis pembebasan: bukan hanya jalan spiritualitas personal, tetapi juga medan etis-politik yang menuntut keberpihakan, keberanian, dan kesadaran. Islam tidak boleh menjadi pelarian dari realitas, tetapi harus menjadi kekuatan untuk mengubah realitas. Di sinilah PMII menjalankan perannya sebagai gerakan sosial yang tidak

hanya berseru atas nama langit, tetapi juga berpijak kokoh di bumi—menyatukan iman, ilmu, dan amal dalam perjuangan kemanusiaan.

PMII juga memaknai konsep amar ma'ruf nahi munkar tidak sekadar dalam bingkai moral individual, tetapi dalam kerangka sosial-politik yang transformatif. Konsep ini dipahami sebagai panggilan etis untuk mendorong keadilan struktural dan menentang setiap bentuk penindasan sistemik yang merendahkan martabat manusia. *Amar ma'ruf* bukan hanya anjuran kepada kebaikan spiritual semata, tetapi juga ajakan kolektif untuk membangun sistem sosial yang adil, egaliter, dan berkeadaban. Sebaliknya, *nahi munkar* bukan sebatas kecaman terhadap maksiat personal, melainkan sikap kritis terhadap kemungkaran yang terlembaga—seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, kekerasan negara, dan diskriminasi sosial.

Dalam semangat itu, aksi-aksi PMII yang bersifat advokatif, kritis terhadap kebijakan negara, serta berpihak kepada rakyat kecil, merupakan ekspresi dari etika keislaman yang hidup, kontekstual, dan progresif. PMII hadir tidak sebagai organisasi yang memelihara status quo keagamaan, melainkan sebagai gerakan moral-politik yang merevitalisasi makna dakwah dalam arena publik. *Amar ma'ruf nahi munkar* menjadi praksis sosial, di mana nilai-nilai Islam diwujudkan dalam tindakan nyata untuk memperjuangkan hak-hak buruh, petani, perempuan, kaum marjinal, dan kelompok tertindas lainnya.

Sejalan dengan pemikiran Nurcholish Madjid (1992), Islam bukan hanya agama ritual, tetapi juga "ethos transformasi sosial" yang mendorong keterlibatan aktif umat dalam memperbaiki kehidupan bersama. Maka, PMII menafsirkan dakwah sebagai keberanian untuk bersuara di tengah ketidakadilan, dan keimanan sebagai komitmen untuk mengubah dunia, bukan sekadar menerima nasib.

Dengan demikian, PMII mempraktikkan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai tanggung jawab sosial, bukan hanya kewajiban agama; sebagai strategi perubahan, bukan sekadar seruan moral. Inilah wajah Islam yang membebaskan dan mencerahkan—yang menjadikan aktivisme sosial sebagai bagian dari ibadah, dan perjuangan keadilan sebagai bentuk kecintaan kepada Tuhan dan kemanusiaan.

Kekuatan utama PMII justru terletak pada kemampuannya menggabungkan dua dunia yang kerap dipisahkan: dunia ilmu dan dunia perjuangan. Di dalam PMII, berpikir tidak menjadi aktivitas elitis yang terkurung dalam ruang-ruang akademik, dan bertindak tidak menjadi lompatan pragmatis tanpa pondasi ideologis. Keduanya saling menyatu, saling menghidupkan. Sebab bagi PMII, intelektualitas sejati adalah yang berpihak; dan aktivisme sejati adalah yang tercerahkan.

Dalam gerakannya, PMII menghidupkan semangat intelektual organik sebagaimana digagas oleh Antonio Gramsci (1971), yaitu sosok intelektual yang tidak sekadar menjadi penyambung lidah kekuasaan, tetapi menjadi bagian dari rakyat dan perjuangannya. Kader PMII dididik bukan untuk sekadar memproduksi pengetahuan, tetapi untuk menghidupkan kesadaran dan menyulut keberanian untuk melawan ketidakadilan.

Dalam semangat itulah kutipan Karl Marx menjadi relevan: "*Para filsuf hanya menafsirkan dunia dalam berbagai cara, tetapi yang penting adalah mengubahnya.*" PMII bukan hanya menafsirkan ayat dan realitas, tetapi juga mengubahnya secara bermartabat—dengan nalar yang jernih, etika yang kuat, dan keberpihakan yang teguh kepada kaum tertindas.

Idealisme bagi PMII bukan mimpi kosong, tetapi daya dorong historis untuk mengubah kenyataan sosial-politik yang timpang. Sementara realitas bukan untuk disucikan

atau diterima apa adanya, tetapi untuk diuji, dikritik, dan diperbaiki dalam cahaya ilmu dan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, PMII berdiri di persimpangan dialektis antara tafsir dan praksis, antara mimbar akademik dan jalanan, antara keheningan belajar dan kegaduhan perlawanan. Di sinilah letak kekuatan PMII: menjadi pelaku sejarah, bukan hanya penonton. Menjadi juru tafsir kehidupan, sekaligus pembentuk arah peradaban.

Gerakan intelektual PMII menjaga nalar tetap menyala, sementara gerakan sosialnya memastikan nalar itu tidak kehilangan arah. Di sinilah PMII menemukan posisinya yang unik dalam lanskap organisasi kemahasiswaan: bukan sekadar ruang intelektual yang elitis dan terputus dari denyut sosial, tetapi juga bukan gerakan populis yang bising namun miskin gagasan.

PMII hadir sebagai ruang dialektik, tempat di mana ide dan aksi bertemu, tafsir dan realitas saling menyapa, serta nilai-nilai Islam berpadu dengan aspirasi rakyat. PMII bukan sekadar forum diskusi atau barisan massa aksi, tetapi laboratorium intelektual dan sosial yang terus memproduksi kesadaran kritis dan keberanian moral.

Sebagaimana dikatakan oleh Edward Said (1994), intelektual yang beretika adalah mereka yang tidak hanya berjarak dari kekuasaan, tetapi juga dekat dengan penderitaan. Dalam konteks ini, PMII menolak menjadi menara gading akademik; ia memilih berjalan bersama rakyat, sambil tetap membawa cahaya ilmu dan spiritualitas Islam.

Inilah wajah PMII: gerakan yang berpikir dan bergerak, berdoa dan bersuara, menafsirkan wahyu dan menantang ketimpangan. Ia tumbuh dari rahim kampus, tapi jantungnya berdetak di tengah denyut penderitaan rakyat. Dan karena itu pula, PMII tidak hanya menjadi saksi zaman, tetapi juga agen perubahan zaman.

C. GERAKAN SOSIAL SEBAGAI DIALEKTIKA: TEORI DAN PRAKTIK

Gerakan sosial tidak lahir dari ruang yang hampa. Ia tumbuh dari ketegangan historis antara struktur ketidakadilan yang mapan dan aspirasi kolektif akan tatanan yang lebih manusiawi. Dalam ruang inilah, gerakan sosial menjadi ekspresi dialektis antara penindasan dan perlawanan, antara status quo yang menindas dan utopia yang diperjuangkan.

Secara teoritis, Charles Tilly (2004) menyebut gerakan sosial sebagai "sustained campaigns of claim making," yaitu upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menuntut perubahan atas relasi kuasa yang timpang. Sementara menurut Jürgen Habermas (1984), gerakan sosial modern merupakan bagian dari proyek emansipatoris masyarakat, yang bertujuan membuka ruang komunikasi rasional antara warga dan sistem kekuasaan.

Gerakan sosial, dengan demikian, bukan sekadar reaksi spontan atas penderitaan, tetapi sebuah proses kesadaran kritis—sebagaimana ditegaskan Paulo Freire (1970)—yang menjadikan pengalaman ketertindasan sebagai titik tolak pembebasan. Ia adalah dialektika yang hidup, tempat di mana gagasan, nalar etis, dan praksis sosial saling berkelindan, mengalami benturan, dan akhirnya melahirkan transformasi sosial.

Dalam konteks Indonesia, gerakan sosial mahasiswa, termasuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), telah memainkan peran penting dalam menjaga ruang kritik, menjadi pengingat etis bagi kekuasaan, dan merumuskan arah perubahan sosial. PMII memaknai gerakan bukan sebagai kegaduhan politik semata, tetapi sebagai manifestasi etika profetik—yang memadukan nalar, iman, dan keberpihakan terhadap yang tertindas.

Dalam kerangka dialektika historis, sebagaimana dirumuskan oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel, realitas sosial tidaklah statis, melainkan bergerak melalui proses *Aufhebung*—yakni ketegangan antara tesis dan antitesis yang kemudian melahirkan sintesis: bentuk baru yang mengandung dan sekaligus melampaui dua kutub sebelumnya (*Hegel, Phenomenology of Spirit*, 1807). Logika ini tidak hanya berlaku dalam filsafat spekulatif, tetapi juga menjadi kerangka analisis yang relevan dalam memahami dinamika gerakan sosial.

Gerakan sosial tidak sekadar muncul dari kondisi objektif berupa ketimpangan atau ketidakadilan, tetapi juga merupakan produk dari kesadaran reflektif yang tumbuh melalui pergulatan batin dan intelektual terhadap realitas yang menindas. Ia adalah hasil dari kontradiksi sosial yang tidak terselesaikan, lalu direspons dengan perlawanan kolektif yang tidak hanya bersifat reaksioner, tetapi juga visioner—mengajukan kemungkinan dunia yang lebih adil.

Sebagaimana dijelaskan oleh Axel Honneth (1995) dalam teori pengakuan (*recognition theory*), gerakan sosial kontemporer sering kali dimotivasi oleh perasaan terasing, dilecehkan, atau tidak diakui secara kultural dan institusional. Maka, gerakan sosial adalah arena perjumpaan antara pengalaman eksistensial dan refleksi rasional, antara penderitaan struktural dan harapan transformatif.

Dalam hal ini, dialektika gerakan sosial menjadi medan lahirnya kesadaran baru—yang tidak hanya menyadari keterkungkungan struktur lama, tetapi juga menciptakan jalan menuju emansipasi. Dengan kata lain, gerakan sosial adalah praktik historis-filosofis, tempat manusia berperan sebagai subjek perubahan, bukan semata objek dari tatanan sosial-politik yang mapan.

Teori dalam gerakan sosial bukan sekadar himpunan ide abstrak yang bersifat spekulatif. Ia merupakan instrumen

praksis yang membebaskan—sebuah jembatan antara kesadaran dan aksi. Dalam perspektif Paulo Freire (1970), teori menemukan maknanya dalam proses *conscientization* (kesadaran kritis), yaitu proses di mana individu dan komunitas memahami posisi historisnya dalam struktur sosial yang menindas, dan dari situ, tumbuh keberanian untuk menolak serta mengubah realitas tersebut (*Pedagogy of the Oppressed*).

Teori, dalam pandangan ini, bukanlah milik ruang seminar yang steril dari konflik, melainkan lahir dari dan untuk realitas sosial yang konkret—yang penuh luka, ketimpangan, dan dehumanisasi. Maka, teori dalam gerakan sosial adalah teori yang hidup, yang terus-menerus ditajamkan oleh pengalaman dan dibentuk oleh kehendak untuk mengubah.

Dalam konteks gerakan mahasiswa Islam seperti PMII, teori bukan hanya menjadi kerangka analisis, tetapi juga menjadi fondasi ideologis dan spiritual dalam menggugat status quo. Melalui proses kaderisasi dan dialektika intelektual, PMII mendorong anggotanya untuk menjadi subjek yang sadar akan ketimpangan sosial-politik, lalu bertindak atas dasar keyakinan etis dan nalar kritis untuk memperjuangkan alternatif tatanan yang lebih adil dan manusiawi.

Teori dalam PMII bukanlah teori yang netral, melainkan berpihak—berpihak pada nilai-nilai Islam transformatif, berpihak pada rakyat kecil, dan berpihak pada masa depan yang lebih bermartabat. Sebagaimana dikatakan oleh Gramsci, tugas intelektual organik bukan hanya memahami dunia, tetapi menyusun kekuatan sosial untuk mengubahnya.

Lebih jauh, dalam tradisi Islam, kesadaran kritis bukan sekadar produk pemikiran modern, tetapi merupakan bagian integral dari misi kenabian. Seperti ditegaskan oleh

Ali Syari'ati dalam *Tugas Cendekiawan Muslim* (2003), seorang intelektual Muslim harus mengambil peran sebagai *ra'ûs al-mujtama'*—kesadaran tertinggi dalam masyarakat. Ia bukan hanya penghafal pengetahuan atau pengulang tradisi, melainkan sosok yang hadir untuk menyinari kegelapan struktural dengan cahaya ilmu yang membebaskan.

Syari'ati menolak model intelektual yang teralienasi dari realitas sosial, apalagi yang tunduk pada kekuasaan dan status quo. Baginya, ilmu bukan untuk kemegahan akademik, melainkan untuk membebaskan umat dari kebodohan, penindasan, dan ketidakadilan. Dalam hal ini, intelektual bukan hanya harus memahami ilmu, tetapi juga menggunakannya sebagai senjata perjuangan demi kemanusiaan dan keadilan.

Dalam kerangka ini, kesadaran kritis adalah semangat tauhid yang hidup. Tauhid, dalam perspektif Syari'ati, bukan sekadar pengakuan teologis, melainkan prinsip pembebasan dari segala bentuk taghut—penindas politik, ekonomi, dan budaya. Maka, tugas intelektual Muslim bukan hanya menyampaikan kebenaran, tetapi membangkitkan kesadaran kolektif dan mengarahkan umat untuk melawan ketertindasan, menuju tatanan sosial yang bermartabat.

Konsepsi ini sangat relevan dengan visi gerakan mahasiswa Islam seperti PMII, yang memadukan dimensi teologis dengan praksis sosial. Dalam setiap proses kaderisasi, PMII tidak hanya mengasah nalar, tetapi juga membentuk keberpihakan. Inilah wujud konkret dari spirit profetik: berpikir demi membebaskan, dan bertindak demi menegakkan keadilan.

Namun, teori tanpa praktik hanyalah retorika kosong, sementara praktik tanpa teori cenderung menjadi agitasi tanpa arah dan kehilangan daya transformatifnya. Di sinilah pentingnya dialektika sebagai prinsip yang menghubungkan nalar dan tindakan, refleksi dan perubahan. Karl Marx,

dalam *Theses on Feuerbach* (1845), mengkritik para filsuf yang hanya berhenti pada kontemplasi: *"Philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point, however, is to change it."* Kutipan ini tidak sekadar menjadi slogan revolusioner, tetapi merupakan seruan agar kesadaran tidak mandek dalam ruang konseptual, melainkan menjelma menjadi kekuatan sejarah yang mengubah realitas.

Dalam konteks gerakan sosial, termasuk gerakan mahasiswa Islam seperti PMII, dialektika bukan hanya metode berpikir, tetapi juga cara hidup. Kesadaran kritis harus diwujudkan dalam praksis—yakni tindakan nyata yang terarah dan bernilai etis. Sebab, kesadaran yang tidak diwujudkan dalam tindakan adalah kesia-siaan moral, dan tindakan yang tidak dibimbing oleh kesadaran hanya akan menjadi reaksi sesaat, bukan transformasi yang berkelanjutan.

PMII hadir sebagai ruang dialektika itu: tempat di mana gagasan Islam dipertemukan dengan realitas ketimpangan sosial, tempat dimana tradisi diperiksa secara kritis dan diaktualkan dalam bentuk keberpihakan yang nyata. Maka, dalam gerak langkahnya, PMII bukan hanya menafsirkan dunia—baik dalam bentuk ayat qauliyah maupun kauniyah—tetapi juga berikhtiar mengubahnya, dengan semangat ilmu, iman, dan aksi.

Dalam konteks PMII dan gerakan sosial progresif lainnya, *praktik* bukan sekadar pelengkap teori, melainkan medan pembuktian bagi validitas dan relevansi ide. Aksi massa, advokasi kebijakan, pendampingan masyarakat, pendidikan rakyat, hingga penggunaan ruang digital sebagai medium artikulasi wacana dan perlawanan, adalah bentuk konkret dari praksis sosial yang berpijak pada kesadaran kritis. Praktik seperti itu bukan hanya kegiatan operasional, tetapi juga proses dialektik, di mana teori diuji melalui realitas, dan realitas dipahami ulang melalui refleksi teoritis.

Sebagaimana dijelaskan oleh Antonio Gramsci dalam konsep *hegemoni kultural* (1971), kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh dominasi ekonomi atau militer, tetapi juga oleh penguasaan atas makna dan kesadaran. Oleh karena itu, praktik gerakan sosial tidak bisa dilepaskan dari produksi wacana dan kontestasi makna di ruang publik, termasuk dalam era digital saat ini. PMII, dalam hal ini, memainkan peran strategis dalam membangun *counter-hegemony* melalui pendidikan kader, diskusi kritis, publikasi alternatif, dan aksi kolektif yang membela kaum tertindas.

Dalam ruang-ruang kaderisasi dan pendidikan politik PMII, pengalaman praksis ini tidak dibiarkan menjadi rutinitas mekanis, melainkan terus-menerus direfleksikan sebagai bahan evaluasi kritis. Di sinilah dialektika menjadi hidup dan produktif: terjadi perjumpaan antara *logos* (rasio), *ethos* (nilai), dan *praxis* (tindakan), sebagaimana diajarkan oleh para pemikir transformatif seperti Paulo Freire (1970) dan Ali Syari'ati (2003). Keduanya menekankan bahwa kesadaran kritis harus dilahirkan dan ditumbuhkan melalui keterlibatan aktif dalam proses pembebasan sosial.

Dengan cara itu, PMII tidak hanya bergerak dalam dimensi moral dan spiritual, tetapi juga beroperasi sebagai aktor perubahan yang sadar posisi, sadar tujuan, dan sadar sejarah. Gerakan ini menjelma menjadi ruang dialektika yang terus membangun jembatan antara gagasan dan kenyataan, antara idealisme dan strategi, antara Islam dan transformasi sosial.

Sebagaimana diungkap oleh Antonio Gramsci dalam *Selections from the Prison Notebooks* (1971), intelektual organik bukanlah mereka yang sekadar tenggelam dalam dunia ide atau menara gading akademik, melainkan individu yang menyatu dengan denyut kehidupan rakyat dan terlibat aktif dalam perjuangan sosial. Intelektual organik hadir dari dan untuk kelas yang diperjuangkannya—ia

mengartikulasikan kesadaran kolektif, menyusun strategi perlawanan, serta menjembatani antara teori dan praktik dalam kerangka perubahan struktural.

Dalam konteks ini, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memposisikan diri sebagai *rahim ideologis* yang menyiapkan kader-kader intelektual organik yang tidak hanya menguasai wacana, tetapi juga terlibat aktif dalam dinamika sosial-politik. PMII tidak berhenti pada pencapaian akademik individual, tetapi berusaha mencetak pribadi yang memiliki kesadaran kritis, komitmen etis, dan orientasi praksis.

Gerakan kaderisasi dalam PMII, sejak jenjang *Makesta* hingga *PKL dan PKN*, bukan sekadar proses formal pendidikan organisasi, tetapi merupakan ruang dialektik di mana teori-teori sosial, Islam transformatif, dan pengalaman rakyat bertemu. Di sinilah benih intelektual organik ditanam: ketika kader tidak hanya diajak memahami struktur ketimpangan, tetapi juga dilatih untuk terlibat dalam mengubahnya—melalui advokasi, riset partisipatif, penyadaran masyarakat, dan aksi sosial-politik yang berbasis nilai.

Maka, PMII tidak boleh berhenti pada pencetak akademisi teknokratis yang cakap secara administratif namun steril dari empati dan imajinasi sosial. Yang dibutuhkan zaman ini adalah sosok-sosok kader yang mampu menjembatani antara gagasan Islam yang profetik dengan realitas rakyat yang tertindas. Seorang *intellectual-in-action*—yang berpikir sekaligus bertindak, yang membaca kitab dan juga membaca jeritan rakyat.

Sebagaimana ditegaskan oleh Gramsci, "semua orang adalah intelektual, tetapi tidak semua orang memiliki fungsi sebagai intelektual dalam masyarakat." Tugas PMII adalah memungkinkan sebanyak mungkin kader untuk menjalankan fungsi itu—sebagai pemikir yang berpihak,

dan sebagai pelaku perubahan yang berakar.

Dialektika antara teori dan praktik merupakan fondasi utama dalam proses revolusi kesadaran dan transformasi sosial. Dalam konteks filsafat kritis, dialektika bukan sekadar metode berpikir yang mempertentangkan ide, tetapi suatu proses hidup yang menyatukan refleksi intelektual dengan tindakan historis. Kesadaran tidak lahir dari ruang abstrak, tetapi melalui interaksi aktif antara subjek dan dunia sosialnya.

Dalam khazanah filsafat Islam, dialektika ini menemukan padanannya dalam konsep islah (perbaikan berkelanjutan) dan amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Islah meniscayakan proses yang terus-menerus, bukan revolusi yang instan dan membakar sesaat. Amar ma'ruf nahi munkar pun bukan sekadar seruan moral, tetapi panggilan untuk mengintervensi realitas sosial—untuk menghapus kemapanan yang menindas dan membangun struktur baru yang lebih adil.

Dalam semangat itu, gerakan sosial seperti PMII tidak bisa berhenti pada agitasi emosional atau semangat demonstratif semata. Ia harus menjadi proyek panjang, yang ditopang oleh refleksi teoritis, konsolidasi nilai, dan pembelajaran kolektif. Kaderisasi PMII bukan hanya arena pelatihan kepemimpinan, melainkan proses pengasahan kesadaran kritis, penumbuhan empati sosial, dan pematangan strategi perubahan.

Sebagaimana diungkap oleh Fazlur Rahman, inti dari pembaruan Islam adalah pembacaan kreatif terhadap wahyu dan realitas sosial secara simultan. Maka, teori-teori sosial, prinsip keislaman, dan pengalaman rakyat harus terus dikaji ulang secara dialektis. Dalam kerangka ini, PMII bergerak bukan sebagai gerakan karitatif, tetapi sebagai gerakan transformatif—yang berusaha menghadirkan keadilan

struktural melalui jalan pendidikan, advokasi, aksi sosial, dan produksi wacana.

Dengan demikian, perubahan sosial yang diusung PMII adalah perubahan yang sadar, terarah, dan bermoral. Sebuah perubahan yang tidak hanya meruntuhkan ketimpangan, tetapi juga membangun tatanan yang manusiawi. Inilah makna islah yang sejati—bukan semata memperbaiki sistem, tetapi membentuk manusia baru: manusia yang sadar, adil, dan berani bertindak.

Sebagaimana dinyatakan oleh Kuntowijoyo, gerakan Islam harus "naik kelas" dari sekadar *gerakan moral* menjadi *gerakan ilmu*—sebuah gerakan yang sistematis, rasional, dan terstruktur (Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu*, 2006). Seruan ini bukan hanya kritik terhadap kecenderungan moralistik yang abstrak dan tanpa strategi, tetapi juga ajakan untuk menjadikan ilmu sebagai basis perubahan sosial yang terukur dan berkelanjutan.

Dalam konteks gerakan mahasiswa Islam seperti PMII, hal ini menjadi sangat relevan. PMII tidak cukup hanya menjadi penyeru kebaikan secara moral, tetapi harus menjelma sebagai pusat produksi pengetahuan yang membumi dan membebaskan. Ilmu dalam PMII tidak dipahami sebagai kumpulan teori di ruang kelas, tetapi sebagai perangkat kritis yang digunakan untuk memahami realitas, merumuskan strategi perubahan, dan membela kepentingan rakyat tertindas.

Dialektika antara moralitas dan rasionalitas, antara semangat dan sistem, antara populisme dan ilmu pengetahuan, menjadi medan yang selalu dinavigasi oleh PMII. Di satu sisi, PMII harus menjaga keberpihakan kepada rakyat agar tidak kehilangan legitimasi sosial. Namun di sisi lain, ia juga harus menghindari jebakan aktivisme yang reaktif dan kehilangan kedalaman teoritis. Inilah tantangan dialektika yang sesungguhnya: membumikan

ide, dan mengidealkan bumi—menerjemahkan teori ke dalam praktik tanpa menghilangkan semangat ilmiah dan kritisnya.

Sebagai gerakan ilmu, PMII diharapkan mampu melahirkan kader-kader yang bukan hanya vokal di jalanan, tetapi juga strategis dalam merumuskan kebijakan, tajam dalam membaca struktur, dan bijak dalam membangun narasi alternatif. Dalam makna ini, PMII bergerak dari sekadar moral voice menjadi epistemic force—kekuatan yang mampu menggeser wacana dominan dan membentuk horizon baru tentang keislaman, keindonesiaan, dan keadilan sosial.

D. PMII SEBAGAI MEDIATOR ANTARA SUARA RAKYAT DAN RUANG AKADEMIK

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bukan hanya organisasi kaderisasi atau forum intelektual, melainkan juga jembatan dialektis yang menghubungkan dua dunia yang sering kali terpisah: ruang akademik, yang sarat teori, konsep, dan disiplin ilmu; serta ruang sosial rakyat, yang dipenuhi jeritan ketidakadilan, kemiskinan, dan penderitaan struktural. Dalam konteks ini, PMII tampil sebagai mediator antara epistemologi dan emansipasi—antara ilmu pengetahuan yang berkembang di kampus dan kenyataan sosial yang menindih di lapangan.

PMII tidak sekadar mengumpulkan mahasiswa untuk berdiskusi, tetapi membentuk kader yang mampu membaca realitas dengan mata ilmu dan hati nurani. Sebagaimana dikatakan oleh Paulo Freire, pendidikan sejati adalah yang mampu "membaca dunia" sebelum membaca teks (Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, 1970). Maka, kaderisasi PMII tidak berhenti pada transfer wacana, tetapi terus mendorong proses transformasi diri agar mahasiswa tidak terjebak

menjadi menara gading intelektual, melainkan mampu hadir di tengah masyarakat sebagai pelaku perubahan.

Dalam bahasa Antonio Gramsci, PMII membentuk intelektual organik—yakni mereka yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat perjuangan dan menjalin keterikatan dengan kelas subaltern (Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, 1971). Mahasiswa bukan lagi entitas apolitis, melainkan menjadi penghubung antara harapan rakyat dan kebijakan negara, antara suara-suara marjinal dengan pusat-pusat kekuasaan.

Dengan demikian, PMII bukan sekadar agen perubahan, melainkan arena dialektika sosial-politik-intelektual. Di sana, teori dan praktik bersua; idealisme dan realitas saling menguji; dan Islam, sebagai energi etik dan spiritual, diberi makna kontekstual melalui pembelaan terhadap kaum tertindas. Dalam medan perjuangan inilah, PMII menemukan relevansinya yang paling otentik: menjadi penyambung lidah rakyat di ruang akademik, dan penyambung gagasan progresif di ruang rakyat.

Sejak kelahirannya pada tahun 1960, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) telah memposisikan diri sebagai aktor penghubung antara elite pengetahuan—yang sering bersemayam dalam menara gading akademik—dan masyarakat akar rumput yang berhadapan langsung dengan realitas ketimpangan. PMII lahir dari kesadaran bahwa ilmu tidak boleh tercerabut dari kehidupan, dan bahwa tugas mahasiswa bukan hanya menjadi penonton yang cerdas, tetapi pelaku perubahan yang sadar dan berpihak.

Dalam dokumen Nilai Dasar Pergerakan (NDP) yang menjadi ruh gerakannya, PMII menegaskan pentingnya kesatuan antara keilmuan dan kemanusiaan. Ilmu dalam perspektif PMII bukan sekadar akumulasi konsep dan teori, melainkan juga medium pembebasan dan alat perjuangan. Inilah yang membedakan PMII dari sekadar organisasi

akademik: ia membumikan pengetahuan, menjadikannya sarana untuk menafsirkan penderitaan rakyat dan mengartikulasikan jalan keluar dari struktur yang menindas.

PMII bukan sekadar gerakan moral, karena moralitas tanpa aksi bisa berubah menjadi romantisme utopis. Ia juga bukan sekadar gerakan akademik, karena ilmu tanpa keterlibatan sosial berpotensi menjadi alat pelanggeng status quo. PMII adalah gerakan sosial transformatif—gerakan yang berangkat dari kesadaran keislaman, digerakkan oleh nalar kritis, dan diarahkan pada perubahan sosial yang adil dan berakar pada realitas masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kuntowijoyo (2006), gerakan Islam yang maju adalah yang mampu naik kelas menjadi "gerakan ilmu", yakni gerakan yang sistematis, rasional, dan tidak sekadar bersandar pada moralitas individual. PMII menjelma dalam semangat ini: sebagai lokomotif perubahan sosial yang menjembatani idealisme kampus dengan denyut kebutuhan rakyat. Dalam setiap aksi, forum diskusi, atau pendampingan masyarakat, PMII sedang menulis ulang makna keislaman yang membebaskan, membumi, dan transformatif.

Ruang akademik adalah arena produksi dan reproduksi pengetahuan, tempat di mana nalar dihidupkan, gagasan dipertukarkan, dan teori-teori kritis dikembangkan. Namun dalam kenyataannya, kampus seringkali terjebak dalam menara gading intelektual, yang memisahkan pengetahuan dari realitas sosial-politik yang dihadapi masyarakat luas. Ilmu menjadi steril dari keberpihakan, dan kritik terperangkap dalam jurnal atau seminar yang tidak pernah menyentuh tanah.

Dalam konteks inilah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengambil posisi strategis sebagai penghubung dialektis antara ruang akademik dan ruang sosial. Mengadopsi semangat *intelektual organik*

sebagaimana dirumuskan oleh Antonio Gramsci (1971), PMII tidak melihat dirinya sebagai bagian dari elit intelektual yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang sedang berjuang. *Intelektual organik*, dalam istilah Gramsci, adalah mereka yang tidak hanya berpikir untuk memahami dunia, tetapi untuk mengubahnya, dengan berpihak pada kelas yang tertindas dan terpinggirkan dalam struktur sosial.

PMII menjadikan ilmu sebagai alat emansipasi, bukan sekadar prestise akademik. Dengan memadukan tradisi keilmuan Islam, pemikiran kritis kontemporer, dan pengalaman sosial rakyat, PMII mengembangkan epistemologi pembebasan—cara berpikir yang tidak netral, tetapi berpihak secara sadar terhadap keadilan. Ruang-ruang diskusi kaderisasi, pelatihan kepemimpinan, hingga aksi-aksi advokasi adalah wujud dari sintesis antara teori dan praktik yang menjadi ciri khas intelektual organik.

Dalam semangat ini, kader PMII tidak hanya dididik untuk "pintar", tetapi untuk berani, kritis, dan berpihak. Mereka tidak hanya membaca buku, tetapi juga membaca realitas. Sebagaimana dikatakan Paulo Freire (1970), pendidikan yang membebaskan adalah yang mampu membangkitkan kesadaran kritis (conscientização), yakni kesadaran untuk memahami struktur penindasan dan bertindak untuk mengubahnya. PMII menerjemahkan kesadaran ini dalam gerakan yang hidup, yang menghubungkan ruang akademik dengan jalanan, kampus dengan desa, teks dengan konteks.

PMII menghidupkan ruang akademik bukan untuk menciptakan elitisme intelektual, melainkan untuk memperkuat posisi tawar rakyat melalui kerja ideologis, penyadaran struktural, dan pembentukan kesadaran historis. Dalam pandangan PMII, ilmu tidak dipisahkan dari keberpihakan; pengetahuan tidak bersifat netral, tetapi

selalu berpihak—entah kepada status quo atau kepada perubahan.

Forum-forum seperti diskusi kaderisasi, kajian kritis, hingga penulisan ilmiah kader menjadi medium penyemai kesadaran, tempat di mana gagasan dibenturkan dengan realitas, dan teori diuji dalam praksis. Di sana, nalar kritis dibentuk bukan untuk menciptakan kasta intelektual baru, tetapi untuk membuka ruang-ruang pembebasan, baik di tingkat individu maupun struktural.

Sebagaimana dikemukakan Michel Foucault, pengetahuan (knowledge) selalu berkaitan dengan kuasa (power). Maka, PMII berupaya menciptakan basis pengetahuan alternatif yang tidak tunduk pada kuasa hegemonik—baik dalam bentuk kapitalisme akademik, birokrasi kampus, maupun politik oligarki. Dalam forum-forum intelektual nya, PMII menumbuhkan keberanian berpikir dan menyuarakan kritik, sebagai bagian dari proyek penyadaran sosial (*social conscientization*).

Dalam kerangka ini, kerja intelektual kader PMII bukan sekadar aktivitas akademik, melainkan kerja ideologis yang mengakar pada cita-cita keadilan sosial. Ilmu menjadi alat emansipasi, bukan alat represi; menjadi jembatan dialog antara teks suci dan penderitaan manusia; antara Islam dan realitas rakyat.

Di sisi lain, suara rakyat adalah realitas konkret yang tidak bisa diabaikan. Ia bukan sekadar statistik dalam laporan pembangunan, tetapi jeritan nyata dari tubuh-tubuh yang terpinggirkan. Kemiskinan, ketimpangan sosial, kriminalisasi, hingga krisis ekologis adalah ekspresi dari struktur yang timpang dan relasi kuasa yang eksploitatif. Mereka yang paling menderita justru adalah mereka yang paling tidak memiliki akses terhadap sumber daya, pengetahuan, maupun kekuasaan.

Dalam istilah Pierre Bourdieu (1990), mereka adalah kaum yang tersingkir dari arena sosial karena tidak memiliki *capital*—baik ekonomi, budaya, maupun simbolik—untuk bersaing atau sekadar bertahan. Suara mereka sering kali dibungkam oleh retorika pembangunan, dibajak oleh populisme, atau diabaikan oleh institusi formal negara.

Inilah pentingnya kehadiran gerakan sosial berbasis intelektual seperti PMII, yang mampu menjadi mediator antara nalar dan nurani, antara ruang akademik yang kritis dan realitas rakyat yang penuh luka. PMII tidak sekadar menyuarakan penderitaan rakyat, tetapi berusaha mengartikulasikannya secara politis dan ideologis, agar menjadi kekuatan perubahan, bukan sekadar keluhan yang teredam.

Sebagaimana diingatkan oleh Frantz Fanon (1961), penderitaan yang tidak disuarakan akan menjadi luka kolonial yang abadi. Maka, tugas kader dan intelektual organik adalah menjadikan penderitaan itu artikulatif dan transformasional, bukan hanya bahan diskusi, tetapi dasar perjuangan.

PMII tidak mengambil posisi di menara gading. Ia menolak menjadi menara sunyi yang hanya menggumamkan teori tanpa suara penderitaan. Sebaliknya, PMII turun ke bawah, membaur dengan denyut rakyat, menjadi penyambung lidah mereka yang tak terdengar—melalui aksi sosial, advokasi kebijakan, hingga keberpihakan terhadap kelompok-kelompok yang dimarjinalkan oleh sistem.

Dalam banyak konteks sosial-politik, kader PMII tampil sebagai motor perubahan: mereka memimpin demonstrasi menolak ketimpangan, mengadvokasi kebijakan yang lebih adil, dan mendampingi masyarakat dalam konflik agraria, pelanggaran HAM, maupun krisis ekologis. Di sinilah PMII menjalankan peran praksisnya sebagai intelektual organik, sebagaimana disebut Antonio Gramsci (1971):

bukan sekadar memproduksi ide, tetapi memastikan ide itu bekerja dalam medan perjuangan rakyat.

Gerakan ini merefleksikan semangat Islam transformatif, di mana keberpihakan kepada mustadh'afin (kaum tertindas) menjadi fondasi moral sekaligus politik. Sebagaimana diungkap oleh Ali Syari'ati (2003), tugas seorang Muslim bukan hanya bertakwa secara personal, tetapi juga berjuang untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan—baik spiritual, ekonomi, maupun struktural.

PMII juga menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks struktural. Bagi PMII, menyerukan kebaikan berarti memperjuangkan keadilan sosial; melarang kemungkaran berarti menolak segala bentuk kebijakan yang merugikan rakyat. Gerakan mereka bukan sekadar simbolik, melainkan artikulatif dan intervensional. Sebuah bentuk dakwah sosial-politik yang menjadikan Islam sebagai kekuatan etik, bukan retorik.

PMII sebagai mediator berarti menjalankan kerja dialektis—yakni menghadirkan gagasan akademik ke tengah denyut kehidupan rakyat, sekaligus membawa aspirasi rakyat masuk ke ruang-ruang intelektual dan politik. PMII tidak memisahkan dunia kampus dari realitas sosial. Kampus, bagi PMII, bukan hanya ruang studi, tetapi juga laboratorium sosial: tempat di mana teori diuji dalam praktik, dan pengetahuan tidak berhenti pada seminar, tetapi menjelma dalam gerakan.

Di sisi lain, masyarakat tidak diposisikan sebagai objek studi yang pasif, melainkan sebagai subjek perubahan. PMII menolak pendekatan yang memandang rakyat sekadar sebagai "data" atau "populasi", dan sebaliknya mengakui mereka sebagai agen historis yang punya kehendak, suara, dan kesadaran. Inilah yang disebut Paulo Freire (1970) sebagai *dialogical praxis*—sebuah proses transformatif di

mana rakyat dan intelektual belajar bersama dalam gerakan menuju keadilan.

Dengan cara ini, PMII membongkar tembok antara menara gading akademik dan jalanan yang riuh oleh jeritan rakyat. PMII menjembatani dua dunia yang sering terpisah: dunia simbol dan dunia konkret; dunia teori dan dunia praktik. Ia melatih kader untuk tidak hanya berpikir tajam, tetapi juga terlibat secara aktif dalam perubahan sosial.

Sebagaimana ditekankan oleh Jurgen Habermas (1984) dalam teori tindakan komunikatifnya, perubahan sosial memerlukan ruang dialogis yang kritis. PMII berupaya menciptakan ruang itu—di kelas, di warung kopi, di lapangan aksi, dan di lembaga-lembaga kebijakan publik—dengan menjadikan dialektika sebagai metode dan keberpihakan sebagai etika.

Hal ini sejalan dengan gagasan Paulo Freire bahwa pendidikan sejati adalah *praxis*—yakni kesatuan antara refleksi kritis dan aksi transformatif (Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, 1970). *Praxis*, dalam pengertian Freire, bukan sekadar tindakan atau pemikiran yang berdiri sendiri, tetapi tindakan yang lahir dari kesadaran kritis dan ditujukan untuk mengubah realitas yang menindas.

Dalam konteks ini, PMII menjalankan praxis tersebut dengan konsisten: membumikan teori-teori sosial, keislaman, dan keadilan ke dalam tindakan nyata di tengah masyarakat, sekaligus memaknai setiap bentuk aksi sebagai momen reflektif yang terus memperkaya kesadaran kolektif. Proses kaderisasi, advokasi sosial, hingga pendidikan rakyat yang dilakukan PMII bukanlah kegiatan yang sporadis atau seremonial, melainkan bagian dari kerja ideologis yang terstruktur dan berkesinambungan.

Dengan menghidupkan *praxis*, PMII menolak dualisme antara aktivisme dan intelektualisme. Keduanya justru

dipadukan dalam satu gerakan sadar yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat emansipasi, bukan alat dominasi. Inilah yang menjadikan PMII bukan hanya tempat menempa ide, tetapi juga tempat menumbuhkan keberanian moral untuk bertindak.

Dalam dunia modern yang cenderung memisahkan antara intelektualisme dan aktivisme, antara kampus dan jalanan, PMII mengambil posisi dialektis: berpikir secara kritis dalam ruang akademik, dan bertindak secara nyata bersama rakyat. PMII menolak reduksi intelektual menjadi sekadar konsumsi wacana, dan menolak aksi sebagai pelampiasan kemarahan yang tidak berpijak. Ia hadir sebagai jembatan peradaban—yang mengalirkan kesadaran kritis dari ruang teori ke ruang aksi, menyatukan semangat perubahan dengan analisis yang tajam, dan mengartikulasikan keadilan sebagai tugas historis sekaligus spiritual.

Sebagai mediator antara ide dan realitas, PMII menjalankan misi profetik yang tidak hanya berakar pada nilai-nilai Islam, tetapi juga berpadu dengan etos intelektual pembebasan. Dalam peran gandanya, PMII memperlihatkan bahwa mahasiswa bukan hanya pelajar, tetapi juga pelaku sejarah; bukan hanya pencari gelar, tetapi pengemban amanah sosial.

Sebagaimana ditegaskan oleh Kuntowijoyo, Islam seharusnya tidak berhenti sebagai sistem nilai abstrak, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk gerakan ilmu dan gerakan sosial yang terpadu (Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu*, 2006). Dalam konteks ini, PMII menempuh jalan tersebut: menjadikan ilmu bukan sekadar akumulasi pengetahuan, tetapi energi perubahan sosial; dan menjadikan gerakan sosial bukan sekadar mobilisasi massa, tetapi ekspresi praksis intelektual yang bermoral.

PMII berusaha menyatukan nurani sosial—yang peka

terhadap penderitaan rakyat—dengan nalar intelektual—yang tajam dalam membaca realitas dan merumuskan strategi perubahan. Inilah wajah gerakan transformatif yang ditawarkan PMII: gerakan yang berpijak pada akar, berpikir dengan kepala, dan bergerak dengan hati.

KOPRI

BAB II

SPIRIT PERLAWANAN: WARISAN IDEOLOGIS DAN GERAKAN KEBANGSAAN

Sejarah bangsa Indonesia bukan hanya dihiasi oleh deretan peristiwa, tetapi juga ditenagai oleh spirit perlawanan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Spirit ini bukan semata keberanian untuk melawan penjajahan, tetapi juga kesadaran ideologis yang menempatkan kebebasan, keadilan, dan martabat sebagai fondasi kehidupan bersama. Di balik setiap pemberontakan dan gerakan kebangsaan, ada narasi besar tentang pencarian jati diri, tentang bagaimana manusia Indonesia memaknai kemerdekaan bukan sekadar sebagai status politik, melainkan sebagai cita moral dan peradaban.

Dalam bab ini, kita akan menelusuri denyut ideologis di balik gerakan kebangsaan: mulai dari warisan nilai-nilai perlawanan yang hidup dalam budaya dan agama, hingga formasi ideologi nasional yang menyatukan pluralitas dalam bingkai keindonesiaan. Inilah fondasi awal yang turut melahirkan gerakan mahasiswa Islam seperti PMII—sebuah entitas yang tidak lahir dalam kevakuman sejarah, melainkan menyerap spirit perlawanan untuk melanjutkan perjuangan dalam wujud yang lebih kontekstual dan transformatif.

A. PERLAWANAN SEBAGAI SIKAP IDEOLOGIS DAN TEOLOGIS

Perlawanan bukan semata reaksi spontan atas situasi, tetapi merupakan ekspresi dari kesadaran yang mendalam terhadap realitas ketimpangan dan ketidakadilan struktural. Dalam kerangka ini, perlawanan tidak bersifat impulsif, melainkan merupakan *tindakan ideologis*—yakni keberpihakan sadar terhadap nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan yang diperjuangkan secara konsisten dan reflektif.

Sebagaimana dijelaskan oleh Louis Althusser dalam *Ideology and Ideological State Apparatuses* (1971), ideologi bukan sekadar himpunan gagasan, melainkan praktik material yang membentuk kesadaran dan subjek dalam relasi sosial tertentu. Dengan demikian, perlawanan ideologis tumbuh dari kesadaran atas posisi dalam struktur kekuasaan, serta dari tekad untuk melakukan intervensi terhadap struktur tersebut demi mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil. Perlawanan menjadi jalan untuk membebaskan diri dari penundukan ideologis, sekaligus membongkar aparatus yang melanggengkan ketimpangan.

Namun, dalam tradisi keislaman, perlawanan bukan hanya tindakan politis atau ideologis, tetapi juga sikap teologis yang berakar dalam iman kepada nilai-nilai transenden. Islam tidak hanya hadir sebagai sistem ritual, melainkan sebagai *weltanschauung*—pandangan dunia yang menempatkan keadilan (`adl), kebenaran (*haqq*), dan pembebasan (*tahrir*) sebagai prinsip ilahiah yang melekat dalam misi kenabian. Dalam perspektif ini, perlawanan adalah bagian dari tanggung jawab spiritual untuk menegakkan keadilan sebagai amanah Tuhan.

Al-Qur'an secara tegas mengecam sikap pasif terhadap kezaliman. Dalam *QS. An-Nisa: 75*, Allah berfirman: *"Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela)*

orang-orang yang lemah—laki-laki, perempuan, dan anak-anak—yang berdoa: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya zalim ini…". Ayat ini menunjukkan bahwa membela yang tertindas adalah perintah teologis, bukan sekadar etis. Diam terhadap ketidakadilan, dalam kerangka ini, menjadi bentuk pengkhianatan terhadap amanah kemanusiaan dan keberimanan itu sendiri.

Ali Syari'ati, salah satu pemikir Islam revolusioner paling berpengaruh, menawarkan pembacaan yang radikal terhadap konsep *tauhid*. Baginya, *tauhid* bukan sekadar doktrin teologis tentang keesaan Tuhan, melainkan sebuah ideologi pembebasan. Dalam bukunya *On the Sociology of Islam* (1979), Syari'ati menegaskan bahwa *tauhid* adalah penolakan total terhadap segala bentuk *taghut*—kekuatan tiranik yang menindas manusia, baik dalam bentuk kekuasaan politik, sistem ekonomi, maupun dominasi budaya. Dengan kata lain, beriman kepada Tuhan berarti menolak tunduk kepada struktur sosial yang menindas.

Dalam perspektif ini, perlawanan terhadap ketidakadilan bukan hanya tindakan politis, tetapi manifestasi dari iman yang murni. Keimanan kepada Tuhan yang Esa berarti menafikan setiap bentuk perbudakan sosial, karena hanya Tuhan yang pantas disembah. Maka, sikap pasrah terhadap penindasan bukanlah bentuk kesabaran spiritual, tetapi pengkhianatan terhadap prinsip tauhid itu sendiri. Perlawanan, dalam kerangka ini, menjadi bagian tak terpisahkan dari keimanan—ia adalah tauhid yang bergerak dalam sejarah.

Lebih jauh, perlawanan dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari misi profetik yang diwariskan oleh para nabi sebagai pembawa risalah kebenaran dan keadilan. Para nabi tidak hanya menyampaikan wahyu secara lisan, tetapi juga menghadapkan diri pada struktur kekuasaan yang menindas, sebagai bentuk pengabdian terhadap kehendak

Ilahi. Nabi Musa, misalnya, diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi Firaun, simbol absolut dari tirani politik dan perbudakan struktural. Perintah Allah dalam *QS. Taha: 47—"Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas"*—menunjukkan bahwa pembebasan umat dari belenggu penindasan merupakan mandat transenden, bukan sekadar proyek sosial-politik biasa.

Dalam konteks ini, aksi perlawanan terhadap ketidakadilan merupakan bagian integral dari jihad maknawi, yaitu perjuangan eksistensial untuk menegakkan nilai-nilai Ilahi dalam realitas dunia yang pincang dan timpang. Ini adalah jihad yang bukan hanya melawan musuh fisik, tetapi juga melawan struktur batin dan sosial yang menormalisasi kezaliman. Seperti ditegaskan oleh Ibn Khaldun, salah satu bapak sosiologi Islam, bahwa kekuasaan yang tidak berpihak pada keadilan akan membawa kehancuran peradaban (Muqaddimah, 1377 M/1958). Maka, perlawanan bukan hanya bentuk ekspresi politik, melainkan pengejawantahan iman yang aktif dan historis.

Dalam wacana modern Islam Indonesia, perlawanan teologis mendapatkan artikulasi kontekstual yang tajam melalui pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ia menegaskan bahwa keberagamaan yang otentik tidak boleh berhenti pada dimensi ritual dan simbolik, tetapi harus mewujud dalam pembebasan manusia dari segala bentuk struktur yang menindas dan mendiskriminasi. Dalam *Ilusi Negara Islam* (2009), Gus Dur dengan tegas menyatakan bahwa agama tidak boleh dijadikan alat legitimasi penindasan, melainkan harus menjadi kekuatan transformatif yang membebaskan.

Keberpihakan kepada kaum mustadh'afin—yakni mereka yang dilemahkan secara struktural dan sosial—bagi Gus Dur, bukanlah pilihan politis semata, melainkan

manifestasi langsung dari keimanan yang aktif dan berani. Dalam semangat itu, Gus Dur melanjutkan warisan profetik, memadukan antara tauhid yang membebaskan (sebagaimana diusung Ali Syari'ati) dan komitmen sosial terhadap pluralisme, keadilan, dan kemanusiaan. Ia menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama dan menyerukan agama yang membela korban, bukan penguasa; membela hak, bukan dominasi.

Karena itu, perlawanan ideologis dan teologis bukanlah dua kutub yang berdiri sendiri, melainkan dialektis dan saling menghidupi. Perlawanan ideologis menyuplai kerangka analitis, kesadaran kelas, dan arah perjuangan struktural; sementara perlawanan teologis memberi kedalaman moral, energi etis, dan legitimasi spiritual atas tindakan melawan ketidakadilan. Dalam pertemuan keduanya, lahirlah bentuk-bentuk gerakan sosial keagamaan yang tidak hanya menuntut perubahan dalam struktur kekuasaan, tetapi juga perubahan dalam kesadaran, makna hidup, dan relasi sosial.

Gerakan mahasiswa Islam seperti PMII hadir dalam ruang ini: ruang dialektis antara iman dan ilmu, antara langit cita dan bumi realitas. Perlawanan menjadi bukan sekadar sikap politis, tetapi ekspresi keberislaman yang membumi dan keberpihakan yang ilmiah. Inilah bentuk praksis Islam yang tidak berhenti pada tafsir teks, tetapi menjelma menjadi tafsir atas realitas—melalui tindakan kolektif, advokasi keadilan, dan pendidikan kesadaran. Dengan demikian, perlawanan menjadi jalan spiritual sekaligus intelektual, tempat Islam dipraktekkan sebagai kekuatan emansipatoris di tengah ketimpangan zaman.

B. SEJARAH PERLAWANAN PMII TERHADAP KETIDAK-ADILAN: DARI SPIRIT MORAL KE GERAKAN STRUKTURAL

Sejak dideklarasikan pada 17 April 1960, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tidak hanya dimaksudkan sebagai wadah kaderisasi intelektual berbasis nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, tetapi juga sebagai manifestasi historis dari resistensi moral terhadap ketimpangan struktural dan ketidakadilan sosial yang mengakar. Di tengah pusaran perubahan zaman dan kontestasi ideologi nasional, PMII memposisikan dirinya sebagai kekuatan pembebas, yang menyatukan semangat keilmuan dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Dalam setiap fase sejarahnya, PMII hadir bukan sebagai penonton pasif, melainkan pelaku aktif dalam perjuangan sosial. Ia konsisten berdiri di barisan paling depan untuk membela kaum tertindas (mustadh'afin) dan melawan segala bentuk dominasi kekuasaan yang merampas martabat kemanusiaan. Dengan mengusung nilai-nilai *rahmatan lil 'alamin*, PMII menjadikan perlawanan terhadap ketidakadilan sebagai bagian integral dari keberislaman, dan menjadikan perjuangan sosial sebagai lahan subur bagi transformasi ilmu, iman, dan amal dalam satu tarikan nafas.

Perlawanan PMII lahir dari kesadaran historis yang mendalam bahwa mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai agen intelektual di ruang akademik, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memikul tanggung jawab moral dan historis terhadap arah perjalanan bangsanya. Dalam pandangan PMII, intelektualitas bukan sekadar penguasaan konsep dan teori, melainkan harus menjelma menjadi keberpihakan nyata terhadap keadilan dan kemanusiaan.

Kesadaran ini tertanam kuat dalam Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII yang berpijak pada visi humanisme

transendental, yakni keyakinan bahwa manusia adalah subjek perubahan sosial sekaligus wakil Tuhan di muka bumi (khalīfatullāh fīl arḍ). Dengan posisi ini, setiap kader PMII tidak hanya dipanggil untuk berpikir kritis dan bertindak etis, tetapi juga untuk memperjuangkan transformasi sosial yang berpihak pada kaum tertindas sebagai bagian dari tugas spiritualnya. Di sinilah perlawanan menjadi bentuk peribadahan: mewujudkan nilai-nilai ilahiah dalam struktur sosial yang manusiawi dan berkeadilan.

Era Orde Lama dan Ketegangan Ideologis

Pada dekade awal kelahirannya, PMII berdiri dalam lanskap politik yang kompleks dan penuh turbulensi. Tahun 1960-an ditandai dengan menguatnya pengaruh ideologi kiri, terutama komunisme, di kalangan mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan. Di tengah arus ideologis yang begitu deras, PMII mengambil posisi strategis sebagai kekuatan penyeimbang, tidak dengan pendekatan represif, tetapi melalui perlawanan kultural dan ideologis yang berbasis nilai-nilai Islam dan semangat kebangsaan.

Kader-kader PMII saat itu gencar melakukan diskusi kritis, penerbitan selebaran, serta menggalang forum-forum dakwah intelektual yang bertujuan membangun kesadaran alternatif terhadap ideologi yang dianggap mengancam nilai keimanan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Perlawanan ini bukan semata-mata gerakan reaktif, tetapi lahir dari komitmen keilmuan yang konsisten, yakni memadukan ilmu, iman, dan keberpihakan sosial. Dalam konteks ini, PMII tampil sebagai agen dakwah intelektual, memperjuangkan Islam yang rahmatan lil ʻalamin di tengah kontestasi ideologi-ideologi dunia.

Orde Baru: Antitesis terhadap Otoritarianisme

Pada masa Orde Baru, PMII menghadapi dinamika yang jauh lebih kompleks dan menantang. Rezim yang mengatasnamakan stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi justru mengekang kebebasan sipil, memusatkan kekuasaan, dan melanggengkan ketimpangan struktural. Di tengah iklim represif dan hegemoni negara, PMII tetap meneguhkan diri sebagai kekuatan moral dan intelektual yang kritis.

Meskipun berbagai organisasi mahasiswa mengalami kooptasi dan depolitisasi melalui kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan), PMII tidak sepenuhnya tunduk pada logika kekuasaan. Di banyak daerah, kader PMII tetap melakukan kajian kritis, advokasi mahasiswa, dan pembelaan terhadap hak-hak rakyat melalui gerakan bawah tanah dan forum-forum independen. Penolakan terhadap kooptasi bukan semata sikap politis, melainkan wujud dari kesadaran ideologis—bahwa kebenaran harus ditegakkan meski berhadapan dengan kekuatan represif.

Dalam konteks ini, PMII menjadi bagian dari gerakan intelektual organik sebagaimana dimaksud oleh Gramsci, yakni kelompok yang tidak hanya mereproduksi pengetahuan, tetapi juga terlibat aktif dalam perjuangan sosial. PMII bukan sekadar organisasi mahasiswa, tetapi tumbuh menjadi ruang dialektika antara keberislaman, keindonesiaan, dan keberpihakan terhadap kaum tertindas.

Pasca-Reformasi: Perlawanan dalam Ranah Kebijakan dan Sosial

Setelah Reformasi 1998, lanskap politik Indonesia berubah drastis, tetapi tidak serta-merta menghadirkan keadilan sosial yang dijanjikan. Demokrasi memang

tumbuh secara prosedural—dengan pemilu, kebebasan pers, dan multipartai—namun di balik euforia itu, ketimpangan struktural dan eksklusi sosial tetap mengakar kuat. Inilah yang disebut para pemikir kritis seperti Nancy Fraser sebagai "krisis representasi ganda"—ketika masyarakat tidak hanya mengalami ketidakadilan distribusi ekonomi, tetapi juga marginalisasi dalam sistem politik yang seharusnya inklusif (Fraser, *Justice Interruptus*, 1997).

Dalam konteks ini, PMII tidak mengambil sikap pasif atau larut dalam romantisme reformasi. Di berbagai wilayah, PMII justru menegaskan kembali mandat sosialnya: menjadi pembela kaum tertindas dan pelanjut spirit transformasi. Dari desa-desa yang terancam tambang, perkebunan sawit, hingga kawasan urban yang menghadapi penggusuran dan krisis ekologis, kader PMII tampil sebagai motor advokasi rakyat.

Aksi massa, diskusi publik, investigasi lapangan, pernyataan sikap politik, bahkan litigasi strategis di pengadilan—semua itu menjadi bentuk konkret dari perlawanan struktural. PMII tidak hanya menggelorakan kritik, tetapi juga terlibat dalam solusi: mendampingi petani menggugat hak atas tanah, menyuarakan buruh kontrak dalam forum publik, hingga mengadvokasi masyarakat adat yang kehilangan hutan dan ruang hidup.

Sebagaimana digariskan dalam *Nilai Dasar Pergerakan (NDP)*, PMII tidak berhenti pada formalisme demokrasi, tetapi terus memperjuangkan keadilan substantif—yakni demokrasi yang menyentuh kehidupan rakyat kecil. Inilah bentuk keberislaman yang membumi: menjadikan amar ma'ruf nahi munkar sebagai energi praksis yang menyatukan iman, ilmu, dan tindakan sosial.

Perlawanan PMII hari ini tidak lagi bersifat reaktif dan spontan, tetapi telah berkembang menjadi gerakan yang lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang.

Transformasi ini ditopang oleh proses kaderisasi yang sistematis, yang tidak hanya mendidik anggota menjadi cendekiawan kampus, tetapi juga menjadi intelektual organik—sebagaimana dikonsepsikan oleh Antonio Gramsci dalam *Selections from the Prison Notebooks* (1971).

Bagi Gramsci, intelektual organik adalah mereka yang tidak hanya memahami realitas sosial, tetapi juga melebur dalam perjuangan rakyat untuk membentuk hegemoni baru yang lebih adil. Dalam kerangka ini, PMII tidak mencetak "intelektual menara gading" yang asing terhadap penderitaan sosial, melainkan intelektual yang terlibat, berpihak, dan menyuarakan perubahan.

Melalui jenjang kaderisasi—Studi Islam Intensif (PKD), Pelatihan Kader Lanjut (PKL), hingga Pelatihan Kader Nasional (PKN)—PMII membangun kesadaran kritis dan militansi etis kadernya, dengan landasan nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Materi-materi seperti analisis sosial, teori kritis, studi keislaman progresif, dan advokasi kebijakan menjadi bagian dari kurikulum kaderisasi yang membentuk watak intelektual progresif.

Dengan bekal ini, kader PMII tidak hanya mampu membaca realitas sosial, tetapi juga berani masuk ke ruang-ruang pengambilan keputusan, mendampingi rakyat di akar rumput, serta menyusun strategi advokasi dan gerakan sosial. Ini menunjukkan bahwa perlawanan tidak lagi dilihat sebagai ekspresi kemarahan, melainkan sebagai bentuk kesadaran historis dan strategi ideologis untuk meruntuhkan ketidakadilan secara sistemik.

Dengan demikian, PMII tampil sebagai kekuatan kultural-politik yang bergerak dalam kerangka kesadaran kelas, keberpihakan teologis, dan tanggung jawab intelektual. Ia menjahit dunia pemikiran dan dunia tindakan dalam satu arah: pembebasan manusia dari ketertindasan.

PMII dan Perlawanan Simbolik di Era Digital

Di era media sosial dan disrupsi digital, medan perjuangan sosial tidak lagi semata berada di jalanan atau ruang seminar, tetapi juga di ruang-ruang virtual yang membentuk opini publik dan kesadaran kolektif. Dalam konteks ini, PMII turut beradaptasi dan berinovasi, memanfaatkan teknologi sebagai alat perjuangan ideologis dan kultural.

Melalui kampanye daring, literasi digital, serta opini dan edukasi berbasis media sosial, PMII memainkan peran strategis dalam membangun "benteng narasi" melawan hoaks, ujaran kebencian, radikalisme agama, hingga propaganda oligarki digital. Seperti dijelaskan oleh Manuel Castells dalam *Networks of Outrage and Hope* (2012), jaringan digital dapat menjadi sarana mobilisasi sosial dan produksi makna. PMII menempuh jalur ini dengan memproduksi wacana alternatif yang mengakar pada nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin, nasionalisme inklusif, dan keadilan sosial.

Kehadiran digital PMII bukan hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan edukatif—melawan disinformasi dengan argumentasi, melawan polarisasi dengan dialog, serta melawan apatisme dengan literasi kesadaran. Media sosial menjadi "medan dakwah baru" dan "forum perlawanan digital", di mana kader PMII berperan sebagai penggerak opini dan penyambung nilai-nilai kebenaran dalam dunia yang banjir informasi namun miskin pengetahuan.

Di tengah algoritma yang cenderung memperkuat bias, PMII mengambil posisi sebagai penjaga akal sehat publik dan juru bicara kelompok rentan. Dengan narasi berbasis data, nilai, dan refleksi keislaman progresif, PMII membuktikan bahwa perlawanan dapat dimodernisasi tanpa kehilangan ruhnya—yakni keberpihakan pada kebenaran dan keadilan.

Perlawanan PMII hari ini telah berkembang melampaui ranah ekonomi dan politik, memasuki medan yang lebih subtil namun tak kalah penting: ketidakadilan epistemik. Ketidakadilan ini merujuk pada dominasi struktur pengetahuan—apa yang dianggap sah, ilmiah, atau "rasional"—yang kerap bias terhadap kepentingan elite kekuasaan, kapital global, dan pandangan dunia Barat yang hegemonik. Miranda Fricker (2007) dalam karyanya *Epistemic Injustice* menyebut bahwa ketidakadilan epistemik terjadi ketika seseorang atau kelompok dipandang tidak kredibel secara pengetahuan atau diabaikan dalam proses produksi makna. Inilah yang sering dialami oleh rakyat kecil, komunitas adat, dan kelompok marginal lainnya.

Dalam lanskap inilah, PMII menegaskan dirinya bukan hanya sebagai pembela rakyat dalam pengertian sosial-politik, tetapi juga sebagai pelawan hegemoni dalam produksi pengetahuan. Melalui forum kajian, penerbitan alternatif, dan advokasi berbasis riset, PMII melawan dominasi epistemik yang menyingkirkan narasi lokal, pengalaman rakyat, serta nilai-nilai keislaman yang humanis dan membebaskan. Ini adalah bagian dari misi dekonstruksi dan reartikulasi pengetahuan agar lebih berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.

Lebih dari itu, PMII membawa semangat keilmuan yang membebaskan—yakni ilmu yang tidak netral terhadap penindasan, tetapi justru berpihak pada pembebasan manusia. Gagasan ini sejalan dengan pendidikan kritis Paulo Freire, yang menyebut bahwa pendidikan sejati adalah yang membangkitkan kesadaran kritis (conscientização), memungkinkan manusia untuk menyadari struktur yang menindas dan bertindak untuk mengubahnya (Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, 1970). Dalam semangat itu, PMII membangun intelektualitas kadernya bukan untuk menjadi teknokrat yang melayani status quo, tetapi sebagai

intelektual transformasional yang mampu mengintervensi wacana dominan.

Dengan demikian, perlawanan PMII hari ini adalah gerakan ganda: gerakan sosial dan gerakan epistemik—yang tidak hanya membela hak rakyat atas tanah, kerja, dan lingkungan, tetapi juga hak atas pengetahuan, narasi, dan identitas. Ini adalah bentuk baru dari jihad maknawi: memperjuangkan ilmu sebagai alat pembebas, bukan penjinak; sebagai kekuatan pencerah, bukan alat dominasi.

Sejarah PMII bukan sekadar catatan tentang organisasi, melainkan narasi perlawanan yang terus menyala—dari ruang kelas hingga jalanan, dari diskusi intelektual hingga advokasi kebijakan. Ia hadir bukan hanya sebagai saksi perubahan zaman, tetapi sebagai subjek historis yang aktif mengintervensi jalannya sejarah, dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab sosial dan spiritualnya. Dalam kerangka humanisme transendental yang menjadi dasar gerakannya, PMII memadukan iman, intelektualitas, dan aksi sosial dalam satu tarikan napas perjuangan.

Dalam terang nilai-nilai Islam yang membebaskan, nasionalisme yang inklusif, dan kemanusiaan yang universal, PMII menunjukkan bahwa perlawanan bukanlah ekspresi kebencian, melainkan manifestasi terdalam dari cinta yang berkesadaran—cinta kepada kebenaran, cinta kepada rakyat yang tertindas, dan cinta kepada Tuhan yang Maha Adil. Seperti dikatakan Frantz Fanon, "Setiap generasi harus, dalam ketidakjelasan relatifnya, menemukan misinya, mengisinya atau mengkhianatinya" (*The Wretched of the Earth*, 1961). PMII, dalam konteks itu, memilih untuk mengisi misi zamannya: membela yang lemah, merawat yang tercerabut, dan merumuskan masa depan yang lebih adil dengan akal, hati, dan iman.

C. PMII DALAM TRANSISI ORDE: ORDE BARU, REFORMASI, DAN ERA OLIGARKI

Orde Baru: PMII dalam Bayang-Bayang Otoritarianisme

Pada masa Orde Baru (1966–1998), Indonesia memasuki fase stabilitas politik semu yang dibangun melalui represi sistematis, sentralisasi kekuasaan, dan depolitisasi rakyat. Pemerintahan Soeharto menciptakan aparatus kekuasaan yang tidak hanya mengontrol fisik masyarakat, tetapi juga membentuk kesadaran publik melalui ideologi tunggal dan kooptasi lembaga-lembaga sipil, termasuk kampus. Gerakan mahasiswa pun direduksi menjadi mitra pembangunan, bukan lagi kekuatan kritis pengontrol kekuasaan. Dalam lanskap inilah, PMII menghadapi dilema historis: mempertahankan idealisme keberpihakan kepada rakyat atau tunduk pada tekanan negara yang represif.

PMII menempuh jalur yang tidak mudah. Di satu sisi, ia tetap menyuarakan aspirasi kaum tertindas, menjaga jarak dari kooptasi politik yang membungkam. Di sisi lain, ia harus menghadapi risiko pembubaran, pengawasan intelijen, hingga kekerasan negara. Namun justru dalam tekanan inilah, PMII mengukuhkan jati dirinya sebagai gerakan kaderisasi yang berwatak kritis dan independen. Ia tidak larut dalam euforia pembangunan yang menyingkirkan suara rakyat, tetapi terus menghidupkan nalar publik melalui forum diskusi, kajian ideologis, dan gerakan moral yang menantang status quo secara intelektual.

Sebagaimana dikemukakan oleh Michel Foucault (1977), kekuasaan modern tidak selalu bekerja melalui kekerasan langsung, melainkan melalui mekanisme "*disciplinary power*" yang membentuk cara berpikir dan bertindak. Dalam konteks ini, perlawanan PMII terhadap Orde Baru bukan sekadar perlawanan fisik, tetapi juga perlawanan

epistemik—yakni upaya untuk mempertahankan otonomi berpikir dan etika keberpihakan di tengah hegemoni ideologi pembangunan yang menyingkirkan rakyat dari proses pengambilan keputusan.

Namun, sebagaimana dicatat oleh Daniel Dhakidae (2003), intelektual Indonesia pada masa Orde Baru dipaksa untuk mencari bentuk-bentuk ekspresi kritis yang kreatif, agar tidak diberangus oleh rezim yang mengontrol ketat ruang publik dan wacana. Dalam situasi ini, PMII menempuh jalur taktis namun tetap berprinsip, berbeda dari beberapa organisasi mahasiswa lain yang mengalami kooptasi lebih langsung. PMII memilih untuk memperkuat kerja-kerja kaderisasi dan pembangunan basis ideologis sebagai benteng perlawanan yang tak kasat mata tetapi sangat strategis.

Forum-forum kaderisasi, pelatihan, dan diskusi internal dijadikan ruang alternatif perlawanan intelektual yang tersembunyi dari radar kekuasaan. Meskipun negara secara sistemik mengendalikan kampus melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) pada 1978—yang pada hakikatnya adalah upaya depolitisasi mahasiswa—PMII tetap menjaga ruang-ruang kontemplasi dan kesadaran kritis di balik narasi resmi pembangunan.

Pilihan ini merupakan bentuk perlawanan diam-diam namun radikal, sebagaimana disebut James C. Scott (1990) sebagai "*hidden transcripts*"—yakni bentuk-bentuk diskursus bawah tanah yang menolak dominasi kekuasaan secara simbolik maupun substansial. Dalam forum-forum kaderisasi itulah, nalar pembebasan, keberpihakan pada rakyat, dan identitas sebagai intelektual santri terus ditanamkan dan dipelihara. PMII tidak hanya bertahan dalam badai represi Orde Baru, tetapi secara perlahan menjadi ruang persemaian bagi gerakan pembebasan yang

kelak memainkan peran signifikan menjelang era Reformasi.

Dalam praktik kesejarahannya, PMII sempat berada dalam zona abu-abu politik, utamanya karena kedekatannya dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang saat itu masih menjadi bagian dari konstelasi politik formal melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedekatan ini menimbulkan ambiguitas posisi, antara menjadi gerakan moral-intelektual atau menjadi perpanjangan dari kepentingan politik institusional. Namun seiring waktu, terutama menjelang dekade 1990-an, muncul gelombang kader-kader progresif yang mendorong PMII keluar dari bayang-bayang politik praktis, dan mengembalikannya ke khittah sebagai gerakan ideologis yang berpihak pada rakyat.

Ketika arus ketidakpuasan terhadap Orde Baru kian meluas akibat otoritarianisme, korupsi, dan ketimpangan sosial, banyak kader PMII yang memilih berseberangan dengan kekuasaan, menjadi bagian dari simpul-simpul perubahan. Arah ini mempertegas bahwa kesetiaan PMII bukan kepada rezim atau partai, melainkan pada nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan yang diperjuangkan secara konsisten. Inilah titik balik penting dalam sejarah perlawanan PMII, ketika ia menegaskan dirinya bukan sekadar organisasi mahasiswa keagamaan, tetapi juga agen transformasi sosial yang aktif dan berpihak.

Reformasi 1998: PMII sebagai Bagian dari Gelombang Demokratisasi

Ketika krisis multidimensi melanda Indonesia pada akhir 1990-an—mulai dari kehancuran ekonomi, kebangkrutan moral politik, hingga runtuhnya kepercayaan publik terhadap rezim—PMII tampil sebagai kekuatan moral dan intelektual yang mendorong perubahan sistemik.

Bersama elemen mahasiswa lintas organisasi, PMII berada di garda depan demonstrasi besar-besaran yang menuntut lengsernya Presiden Soeharto dan lahirnya tatanan politik baru yang lebih demokratis.

Namun, peran PMII tidak terbatas di panggung nasional. Kader-kadernya di daerah menjadi jembatan penting antara krisis nasional dan penderitaan rakyat lokal—mengartikulasikan keresahan petani, nelayan, buruh, dan masyarakat adat ke dalam wacana reformasi. Dalam banyak kasus, PMII tidak hanya turun ke jalan, tetapi juga turun ke akar, menyusun narasi perubahan yang membumi, menyuarakan aspirasi dari desa-desa terpinggirkan, dan menghadirkan semangat reformasi yang inklusif dan transformatif.

Momentum reformasi 1998 menjadi titik historis di mana PMII menegaskan posisinya bukan hanya sebagai organisasi kaderisasi, tetapi sebagai gerakan rakyat yang berakar, berpikir kritis, dan bergerak progresif demi terwujudnya keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam konstitusi dan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin.

Reformasi 1998 menjadi momen watershed—titik balik sejarah—bagi PMII. Di satu sisi, reformasi membuka ruang demokrasi yang lebih luas, memberi angin kebebasan dan peluang ekspansi pengaruh PMII di berbagai ruang publik. Euforia kebebasan itu menjadikan PMII lebih leluasa menyuarakan gagasan dan memperluas jaringan gerakan. Namun, di sisi lain, muncul tantangan-tantangan baru yang tak kalah kompleks: bagaimana mempertahankan idealisme di tengah tarik-menarik kepentingan politik, fragmentasi kekuasaan, dan godaan pragmatisme?

Menjawab situasi ini, PMII tidak memilih jalan apatis atau eksklusif. Sebaliknya, organisasi ini menegaskan kembali peran historisnya sebagai gerakan intelektual yang berpihak kepada rakyat, seraya beradaptasi dengan realitas

baru. Kader-kadernya didorong untuk memasuki sektor-sektor strategis perubahan—media, organisasi masyarakat sipil, parlemen, birokrasi, hingga lembaga kebijakan publik. Dengan itu, PMII menghidupkan kembali semangat "intelektual organik" (Gramsci, 1971): menjadi bagian dari struktur, namun tetap kritis terhadapnya; berada dalam sistem, tetapi tidak larut dalam kompromi nilai.

Sebagaimana dicatat oleh Marcus Mietzner (2013), era pasca-Soeharto memang membuka gerbang demokrasi, tetapi juga menghadirkan paradoks baru: munculnya oligarki politik yang menyusupi institusi demokrasi melalui kekuatan uang, patronase, dan kooptasi struktural. Demokrasi prosedural berkembang, tetapi jiwa demokrasi—yakni partisipasi substantif dan keadilan sosial—sering kali dibajak oleh elite-elite baru yang hanya mengganti wajah, bukan cara kerja.

Dalam konteks ini, PMII dihadapkan pada dilema sejarah: bagaimana tetap menjadi kekuatan moral dan intelektual di tengah godaan politik elektoral yang korosif? Ketika kader-kadernya mulai memasuki ranah politik formal—baik di legislatif, eksekutif, maupun partai—PMII dituntut untuk menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan, tanpa kehilangan daya transformatifnya. Jarak kritis ini bukanlah penolakan terhadap politik, melainkan sebuah sikap etis yang memastikan bahwa kekuasaan tetap diawasi, dikritisi, dan dikembalikan kepada mandat rakyat.

PMII, dalam situasi ini, harus membangun kesadaran ganda: menjadi bagian dari sistem tanpa terkooptasi oleh sistem, berada di dalam kekuasaan namun tetap berpihak kepada rakyat. Di sinilah pentingnya memperkuat basis ideologis dan praksis nilai—agar kekuasaan tidak menjadi tujuan, tetapi instrumen perubahan.

Era Oligarki: Tantangan Baru bagi Gerakan Mahasiswa Islam

Memasuki era demokrasi prosedural, Indonesia tidak serta-merta pulih sebagai negara rakyat. Reformasi 1998 memang membuka ruang kebebasan, tetapi tidak serta-merta menumbuhkan keadilan. Demokrasi yang dijanjikan justru berkembang dalam bentuk yang paradoksal—ia hidup dalam prosedur, tetapi hampa dalam substansi. Jeffrey A. Winters (2011) menyebut Indonesia sebagai "oligarki elektoral": sebuah tatanan di mana pemilu dijalankan secara rutin, tetapi dikooptasi oleh elite ekonomi-politik yang menggunakan kekayaan dan jaringan patronase untuk mempertahankan kuasa.

Dalam skema ini, rakyat hadir sebagai pemilih, bukan penentu; sebagai angka statistik, bukan subjek politik. Kekuasaan tak lagi ditentukan oleh wacana dan ide, tetapi oleh modal dan aliansi kekuatan. Demokrasi berubah menjadi panggung yang dikendalikan oleh segelintir elite, sementara mayoritas warga tetap berada dalam posisi marginal—terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka sendiri.

Dalam lanskap demokrasi elektoral yang kian pragmatis, PMII menghadapi tantangan yang paling subtil namun menentukan: bagaimana tetap menjaga roh sebagai gerakan moral dan ideologis di tengah derasnya arus politik transaksional? Setelah reformasi membuka keran partisipasi, banyak kader PMII masuk ke gelanggang kekuasaan—baik melalui partai politik, lembaga negara, maupun birokrasi.

Sebagian dari mereka berhasil membawa semangat transformasi dan membuktikan bahwa intelektual yang lahir dari rahim gerakan bisa menjadi agen perubahan dari dalam. Namun, tidak sedikit pula yang terperangkap dalam logika kekuasaan yang mengutamakan kalkulasi elektoral daripada visi kerakyatan. Dalam situasi ini, PMII berada di

persimpangan antara idealisme dan kompromi, antara nilai dan kuasa.

Dilema ini menjadi ujian historis: apakah PMII akan larut sebagai saluran mobilitas sosial semata, atau tetap teguh sebagai kekuatan transformatif yang merawat kesadaran, memperjuangkan keadilan, dan membela kaum tertindas? Inilah pertarungan kontemporer gerakan: bukan lagi melawan rezim otoriter, tetapi melawan kooptasi makna dan banalitas kekuasaan.

Di tengah era oligarki yang menyusup ke dalam institusi demokrasi, PMII tidak tinggal diam. Organisasi ini berupaya mempertahankan idealismenya melalui reorientasi gerakan kaderisasi dan penguatan literasi politik yang berpihak kepada rakyat. Kesadaran bahwa demokrasi prosedural tanpa substansi hanya akan memperpanjang dominasi elite membuat PMII merumuskan kembali strategi gerakannya: bukan hanya mencetak kader yang pandai berbicara di forum, tetapi kader yang mampu membaca realitas sosial-politik secara kritis dan transformatif.

Pendidikan kader—yang dahulu berfokus pada nilai dasar pergerakan (NDP) dan wawasan keislaman—kini diperluas cakupannya menjadi laboratorium pembentukan intelektual organik, meminjam istilah Antonio Gramsci (1971), yakni mereka yang mampu menyambungkan teori dengan perjuangan rakyat. Materi-materi seperti teori kritis, politik kelas, konflik agraria, krisis ekologi, serta struktur ketimpangan ekonomi dijadikan bagian integral dalam proses kaderisasi.

Langkah ini menunjukkan bahwa PMII tidak sekadar bertahan dalam romantisme masa lalu, tetapi aktif melakukan adaptasi intelektual agar tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman. Dengan memperkuat kapasitas analitis dan ideologis kadernya, PMII berupaya merawat posisi sebagai gerakan pembebasan, bukan hanya jaringan

karier politik. Dalam dunia yang dibentuk oleh algoritma dan pasar, kesadaran kritis menjadi satu-satunya benteng yang tersisa.

PMII juga menghidupkan kembali semangat "gerakan rakyat" melalui beragam bentuk advokasi, pendidikan kritis, dan kampanye di ruang digital. Di tengah disrupsi teknologi dan kemunduran demokrasi substansial, ruang virtual telah menjadi medan baru pertarungan wacana dan kesadaran. Dalam konteks ini, media digital tidak hanya dipahami sebagai alat komunikasi, tetapi juga arena ideologis, tempat berlangsungnya kontestasi antara narasi keadilan dan dominasi wacana elite.

Semangat ini selaras dengan konsep *praxis* yang dikemukakan oleh Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970): sebuah sintesis antara refleksi kritis (conscientização) dan aksi transformatif. Bagi Freire, pendidikan sejati bukanlah indoktrinasi, tetapi pembebasan—dan hal itu hanya bisa terjadi jika individu sadar atas situasi penindasannya, lalu bertindak untuk mengubahnya.

Dalam semangat ini, PMII menolak menjadi sekadar penonton sejarah. Ia berusaha tampil sebagai pelaku aktif dan sadar, yang tidak hanya bergerak secara taktis, tetapi juga secara konseptual. Setiap aksi massa, setiap unggahan digital, dan setiap forum diskusi bukanlah aktivitas insidental, melainkan bagian dari *praxis* yang melibatkan kesadaran historis dan orientasi ideologis.

Melalui pendekatan ini, PMII menegaskan posisinya sebagai gerakan intelektual rakyat yang tidak hanya memperjuangkan perubahan struktural, tetapi juga transformasi makna—yakni menggeser cara pandang publik dari kepasrahan menuju kesadaran kritis, dari individualisme menuju solidaritas sosial.

Jalan Panjang Melawan dan Membangun

Transisi dari Orde Baru ke Reformasi, dan kini ke era oligarki, menunjukkan bahwa perlawanan bukanlah suatu peristiwa yang selesai dalam satu babak sejarah. Ia adalah proses dialektis—sebagaimana dikemukakan dalam tradisi filsafat kritis—yang terus bergerak dalam ketegangan antara penindasan dan pembebasan, antara dominasi dan resistensi.

Perlawanan tidak lahir dari kehampaan, melainkan dari kesadaran historis yang membaca ketimpangan secara struktural, serta dari keberanian untuk menghadirkan alternatif. Dalam konteks Indonesia, setiap fase kekuasaan menyisakan bentuk-bentuk ketidakadilan baru: jika Orde Baru menindas dengan represi, maka era Reformasi kerap menindas melalui kooptasi dan ilusi partisipasi; dan kini, dalam era oligarki, penindasan menjadi lebih subtil—terjadi lewat mekanisme pasar, media, hukum, dan politik representatif yang dikendalikan elite.

Dalam medan yang terus berubah ini, perlawanan menjadi kerja terus-menerus untuk menyusun kekuatan rakyat, membangun kesadaran kolektif, dan merebut kembali ruang-ruang demokrasi yang telah dicemari oleh kepentingan sempit. Ia menuntut keberanian moral, ketajaman analisis, dan konsistensi perjuangan—sebuah etos yang menjadi ciri khas gerakan mahasiswa progresif seperti PMII.

Dengan demikian, perlawanan bukan sekadar reaksi, tetapi tanggung jawab historis dan spiritual, sebuah panggilan untuk menegakkan nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan di tengah arus zaman yang kerap melupakan hal-hal esensial.

PMII bukan hanya saksi zaman, tetapi juga arsitek perubahan sosial. Ia tidak sekadar mencatat sejarah,

tetapi menulisnya dengan tinta perjuangan. Dari ruang kelas tempat gagasan dikristalisasi, hingga ruang-ruang rakyat tempat ketimpangan menjerit, PMII hadir sebagai jembatan antara nalar kritis dan keberpihakan sosial. Dari demonstrasi sebagai ekspresi perlawanan langsung, hingga legislasi sebagai medan artikulasi struktural, PMII menunjukkan kemampuan beradaptasi dan konsistensi ideologis di tengah perubahan lanskap politik nasional.

Sebagai gerakan mahasiswa Islam, PMII tidak membatasi perjuangannya dalam ranah spiritualitas individual atau wacana moral normatif belaka. Ia justru menegaskan bahwa agama adalah kekuatan emansipatoris yang harus berbicara tentang struktur sosial, distribusi kekuasaan, dan keadilan historis. Dalam semangat *tauhid sosial* yang digaungkan oleh pemikir seperti Ali Syari'ati, dan dalam praksis *keislaman yang membebaskan* sebagaimana diyakini Gus Dur, PMII memposisikan dirinya sebagai pelaku sejarah yang sadar bahwa iman tanpa keberpihakan adalah kesalehan yang hampa.

Dengan demikian, PMII menjadi ruang dialektika antara iman dan ilmu, antara kaderisasi dan gerakan, antara pengorganisasian rakyat dan pengaruh kebijakan publik. Ia menolak dikurung dalam sekat sektarian atau politik identitas sempit. Sebaliknya, PMII justru menegaskan bahwa menjadi mahasiswa Islam adalah menjadi manusia merdeka yang berpikir, bergerak, dan berjuang untuk masa depan bangsa yang adil, demokratis, dan beradab.

D. PERLAWANAN HARI INI: DARI DEMONSTRASI KE ADVOKASI STRUKTURAL

Perlawanan sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap struktur sosial-politik yang timpang tidak lagi cukup jika hanya diwujudkan dalam demonstrasi jalanan yang

bersifat simbolik atau insidental. Meskipun aksi massa tetap memiliki nilai strategis sebagai alat tekanan politik dan kanal artikulasi suara publik, dalam konteks kontemporer—terutama pasca-reformasi dan di tengah menguatnya demokrasi prosedural—perlawanan menuntut bentuk yang lebih kompleks, strategis, dan berkelanjutan.

Transformasi bentuk-bentuk perlawanan ini mencerminkan pergeseran dari mobilisasi spontan ke arah organisasi sosial yang berbasis data, narasi, dan advokasi kebijakan. Perlawanan tidak lagi sekadar memprotes di luar pagar kekuasaan, melainkan juga masuk dan menantang sistem dari dalam: melalui pengawalan legislasi, penyusunan riset advokatif, pembentukan koalisi masyarakat sipil, serta partisipasi aktif dalam ruang-ruang deliberatif. Gerakan tidak lagi hanya "melawan", tetapi juga "menyusun"—membentuk narasi tanding, membangun kekuatan sipil, dan menata ulang struktur pengetahuan.

Dalam skema ini, kerja-kerja advokasi dan pendidikan politik menjadi pilar utama. Perlawanan tidak cukup hanya emosional—ia harus rasional, sistemik, dan berbasis pada strategi jangka panjang. Perubahan tidak lagi dikejar lewat momentum, tetapi lewat institusionalisasi gagasan dan kaderisasi nilai.

Demonstrasi: Ekspresi, tetapi Bukan Solusi Akhir

Demonstrasi telah menjadi simbol klasik keberanian mahasiswa dan rakyat dalam menyuarakan aspirasi serta mengekspresikan ketidakpuasan terhadap struktur kekuasaan yang tidak adil. Aksi turun ke jalan merepresentasikan bentuk perlawanan spontan sekaligus kolektif, di mana ruang publik diubah menjadi arena ekspresi politik rakyat. Dalam konteks politik Indonesia, demonstrasi bukan sekadar ritual protes, tetapi telah

menjadi instrumen historis perubahan, yang menandai titik balik dalam perjalanan bangsa.

Momentum besar seperti gerakan reformasi 1998, yang mengguncang fondasi rezim Orde Baru, menunjukkan betapa massa kritis mahasiswa mampu menggugah kesadaran publik dan menggiring runtuhnya otoritarianisme. Demikian pula pada gerakan mahasiswa tahun 2019 yang menolak revisi UU KPK dan sejumlah RUU kontroversial lainnya, demonstrasi kembali memainkan peran penting sebagai bentuk koreksi moral terhadap arah demokrasi yang menyimpang.

Dalam dua peristiwa tersebut, demonstrasi menjadi bukan hanya ajang ekspresi, tetapi juga tindakan simbolik yang menyatukan kekuatan rakyat lintas identitas. Ia mengirimkan pesan kuat kepada penguasa bahwa suara dari jalanan tetap relevan sebagai penanda adanya krisis kepercayaan dan tuntutan untuk perubahan.

Namun, demonstrasi juga memiliki batas-batas inheren. Ia cenderung bersifat reaktif, emosional, dan sementara, sehingga mudah ditangkal oleh aparat represif maupun direduksi maknanya oleh narasi kekuasaan. Dalam banyak kasus, demonstrasi yang tidak terhubung dengan strategi advokasi lanjutan akan kehilangan daya dorongnya, bahkan hanya menjadi letupan wacana tanpa arah institusional.

Sebagaimana diingatkan oleh Jürgen Habermas dalam *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1989), ruang publik tidak boleh berhenti pada ekspresi protes, tetapi harus bergerak menuju ruang deliberatif, di mana aspirasi rakyat diproses menjadi kebijakan yang sah secara normatif. Dalam perspektif ini, demonstrasi yang tidak terartikulasi dalam bentuk advokasi kebijakan yang sistemik hanya akan menjadi *"simfoni retoris"*—indah dalam gema, namun rapuh dalam dampak struktural.

Advokasi Struktural: Perlawanan yang Menyasar Sistem

Advokasi struktural merupakan bentuk perlawanan yang melampaui aksi protes semata. Ia tidak hanya menggugat ketidakadilan, tetapi juga menegosiasikan perubahan dalam ranah kebijakan, hukum, dan kelembagaan negara. Di sinilah perjuangan tidak lagi berada semata di jalanan, tetapi juga memasuki ruang-ruang formal: parlemen, pengadilan, ruang konsultasi publik, dan forum legislatif. Advokasi struktural mensyaratkan pendekatan yang berbasis pada riset empiris, argumentasi yuridis, kerja koalisi lintas sektor, serta diplomasi politik.

Dengan cara ini, perlawanan menjadi terstruktur, terukur, dan berkelanjutan—tidak hanya menyalakan kesadaran, tetapi juga menciptakan kanal perubahan yang institusional dan berdampak sistemik. Dalam konteks ini, mahasiswa dan gerakan rakyat tidak cukup menjadi oposisi moral, tetapi juga aktor transformasi kebijakan.

Dalam pandangan Antonio Gramsci, perubahan sosial tidak cukup dicapai hanya melalui perebutan kekuasaan negara secara frontal (*war of maneuver*), melainkan juga melalui perjuangan posisi jangka panjang (*war of position*). Perjuangan ini dilakukan dengan membangun hegemoni budaya, mempengaruhi struktur kesadaran kolektif, dan merebut ruang-ruang ideologis yang selama ini dikuasai oleh kelas dominan (Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, 1971).

Dalam konteks inilah advokasi struktural menjadi sangat relevan. Ia bukan sekadar upaya teknokratis, tetapi bagian dari strategi hegemonik—mempengaruhi sistem dari dalam melalui perubahan narasi, regulasi, kebijakan publik, dan reposisi aktor-aktor institusional. Dengan demikian, advokasi struktural adalah bentuk kontemporer dari *war of position* yang memungkinkan gerakan sosial merebut

pengaruh secara perlahan namun mendalam, bukan hanya di jalanan, tetapi juga di jantung kekuasaan.

PMII dan Transisi Strategi Perlawanan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), sebagai bagian integral dari sejarah panjang gerakan mahasiswa di Indonesia, telah mengalami transformasi strategi dalam menanggapi dinamika sosial-politik yang terus berubah. Dari aksi-aksi jalanan yang heroik pada masa Orde Baru dan puncak Reformasi 1998, PMII kini mulai memantapkan diri sebagai aktor advokasi struktural yang bekerja melalui pendekatan berbasis data, hukum, dan jaringan koalisi sosial-politik.

Beberapa cabang PMII telah aktif mengembangkan bentuk-bentuk advokasi baru yang lebih sistemik dan berdampak langsung, antara lain:

Melakukan judicial review terhadap kebijakan daerah maupun nasional yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil;

Mengawal proses legislasi melalui partisipasi dalam forum-forum dengar pendapat publik (public hearing), sebagai bentuk kontrol sipil atas pembentukan hukum;

Menyelenggarakan pendidikan hukum masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti buruh, petani, dan masyarakat adat, agar mereka memahami hak-hak konstitusionalnya;

Menggunakan teknologi digital untuk pengawasan kebijakan publik (*e-advocacy*), seperti pelaporan pelanggaran kebijakan, kampanye isu strategis, hingga pemantauan anggaran secara partisipatif.

Transformasi ini menunjukkan bahwa perlawanan dalam tradisi PMII tidak hanya bertahan, tetapi juga

beradaptasi—dari simbolisme jalanan menuju kerja-kerja institusional yang konstruktif, tanpa kehilangan semangat keadilan sosial dan keberpihakan pada rakyat.

Advokasi semacam ini merupakan bagian dari apa yang disebut Paulo Freire sebagai *praxis*—yakni perpaduan antara refleksi kritis dan aksi transformatif (Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, 1970). Dalam kerangka ini, perlawanan bukan lagi sekadar reaksi spontan terhadap ketidakadilan, melainkan proses sadar yang terencana, berbasis teori sosial, strategi gerakan, dan visi jangka panjang tentang perubahan. *Praxis* memungkinkan PMII tidak hanya menjadi penentang struktur yang menindas, tetapi juga arsitek dari struktur yang membebaskan.

Tantangan dan Jalan Ke Depan

Transformasi dari demonstrasi ke advokasi struktural bukanlah jalan yang mulus. Advokasi menuntut kapasitas intelektual yang tajam, jaringan sosial-politik yang luas, serta pemahaman atas mekanisme hukum dan kebijakan publik. Ini berarti kaderisasi tidak bisa lagi sekadar bersifat retoris atau simbolik, tetapi harus berorientasi pada penguatan riset, analisis kebijakan, dan keterampilan teknokratis. Tantangan lain yang tak kalah penting adalah risiko kooptasi dan pragmatisme—terutama ketika sebagian aktivis mulai masuk ke dalam struktur birokrasi atau partai politik, yang sering kali justru mengaburkan garis demarkasi antara perjuangan dan kompromi.

Namun demikian, sebagaimana ditegaskan oleh Kuntowijoyo dalam magnum opus-nya *Islam sebagai Ilmu* (2006), gerakan Islam modern harus mengalami transformasi epistemologis: dari sekadar gerakan moral menjadi "gerakan ilmu" dan "gerakan sosial" yang terpadu. Menurutnya, gerakan keislaman tidak cukup hanya

mengandalkan retorika normatif atau mobilisasi emosi keagamaan, tetapi harus dibangun di atas dasar ilmu pengetahuan, analisis struktural, dan strategi perubahan jangka panjang. Dalam pandangan ini, Islam tidak hanya menjadi sumber etika, tetapi juga menjadi fondasi epistemik dan praksis sosial.

Gagasan Kuntowijoyo sejalan dengan pemikiran Antonio Gramsci tentang pentingnya membangun hegemoni kultural melalui "intelektual organik"—yakni kaum intelektual yang berpihak pada rakyat dan aktif membentuk kesadaran kolektif (Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, 1971). Dalam kerangka ini, gerakan sosial Islam tidak boleh berhenti pada resistensi simbolik, tetapi harus menjadi kekuatan yang mampu mengintervensi wacana publik, mengubah struktur sosial, serta mempengaruhi kebijakan melalui kekuatan ilmu dan advokasi.

Lebih jauh, Paulo Freire juga menekankan bahwa perjuangan sosial harus dibangun di atas prinsip *praxis*—yakni perpaduan antara refleksi kritis dan aksi transformatif (Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, 1970). Bagi Freire, pembebasan sejati hanya mungkin terjadi ketika rakyat memiliki kesadaran kritis (conscientização) dan mampu mengorganisasi diri dalam struktur perjuangan yang sistemik. Hal ini menguatkan argumentasi bahwa perlawanan yang tidak dibarengi oleh ilmu akan mudah terjebak dalam romantisme dan simbolisme, sementara ilmu tanpa keberpihakan akan menjelma menjadi instrumen dominasi status quo.

Dengan demikian, seperti yang diimpikan Kuntowijoyo, perlawanan dalam konteks gerakan Islam modern harus bersifat integratif: memadukan moralitas keislaman, kekuatan intelektual, serta kapasitas untuk merumuskan dan mengadvokasi kebijakan publik yang berkeadilan.

Inilah bentuk perlawanan yang tidak hanya reaktif terhadap ketimpangan, tetapi juga proaktif dalam merancang masa depan sosial-politik yang manusiawi dan berkeadaban.

Hari ini, perlawanan tidak kehilangan maknanya—ia justru mengalami pendalaman makna dan perluasan medan juangnya. Demonstrasi tetap memegang peran vital sebagai simbol krisis sosial dan alat mobilisasi massa yang mampu menggugah kesadaran publik. Namun, dalam konteks demokrasi prosedural yang kian kompleks, gerakan sosial tidak cukup hanya dengan gebrakan emosional sesaat. Ia harus bermetamorfosis menjadi advokasi struktural yang terukur, berkelanjutan, dan berbasis pengetahuan.

Dalam semangat ini, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan gerakan mahasiswa lainnya perlu memasuki fase baru perjuangan: memadukan idealisme dengan profesionalisme, moralitas dengan keahlian teknis, serta aksi dengan refleksi. Sebagaimana ditunjukkan oleh Habermas dalam *The Theory of Communicative Action* (1984), transformasi sosial mensyaratkan kehadiran ruang publik yang rasional dan deliberatif, bukan hanya ruang simbolik yang penuh seruan tanpa arah strategis.

Perlawanan hari ini bukan sekadar soal siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang mampu membentuk kebijakan, mempengaruhi opini publik secara rasional, dan menanamkan nilai-nilai keadilan dalam institusi sosial. Dalam istilah Gramsci, ini adalah bentuk "war of position"—kerja ideologis yang panjang untuk merebut hegemoni, bukan sekadar "war of maneuver" yang serba taktis (Gramsci, 1971).

Oleh karena itu, gerakan mahasiswa masa kini dituntut untuk naik kelas: dari gerakan yang semata-mata reaktif menjadi gerakan praxis dalam makna Freire (1970)—yakni perlawanan yang lahir dari kesadaran kritis, dijalankan dengan strategi, dan diarahkan untuk transformasi struktural.

BAB III

ETIKA PERUBAHAN: ISLAM, KEMANUSIAAN, DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Perubahan sejati tidak pernah lahir dari ambisi kekuasaan semata, melainkan dari suara hati yang terusik oleh penderitaan sesama. Dalam perspektif Islam, perubahan bukanlah sekadar peralihan bentuk atau sistem, tetapi panggilan moral untuk menghadirkan keadilan, merawat kemanusiaan, dan menunaikan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Etika Islam menuntun umatnya untuk tidak diam di hadapan kezaliman, tidak abai terhadap ketimpangan, dan tidak netral dalam arus ketidakadilan.

Bab ini mengajak kita menelusuri bagaimana Islam memaknai perubahan sebagai tanggung jawab sosial yang melekat pada dimensi iman dan amal. Di sinilah etika bertemu dengan praksis: ketika nilai-nilai ilahiah dijelmakan dalam tindakan membela yang lemah, menyuarakan yang tak terdengar, dan membangun tatanan yang lebih manusiawi. Dalam dunia yang terus berubah—sering kali dengan wajah yang kejam dan mekanistik—ajaran Islam memberi kita cahaya untuk menjaga nurani, meneguhkan solidaritas, dan menyalakan lentera perubahan yang berakar pada kasih sayang dan keadilan.

A. ISLAM SEBAGAI AGAMA TRANSFORMATIF: DARI SPIRITUALITAS MENUJU KEADILAN SOSIAL

Islam, sejak wahyu pertamanya turun kepada Nabi Muhammad SAW, membawa pesan yang jauh melampaui ibadah ritual. Ia adalah ajaran yang menyentuh seluruh aspek kehidupan: spiritualitas, struktur sosial, tata ekonomi, hingga prinsip-prinsip politik. Dalam konteks ini, Islam bukan semata sistem kepercayaan, tetapi juga *worldview* yang membentuk cara manusia memaknai dunia dan mengubah realitas yang timpang.

Dalam Al-Qur'an, dimensi transformatif Islam tercermin dalam seruan kepada keadilan sosial: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..."* (QS. An-Nahl: 90)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan (*al-'adl*) bukan sekadar nilai, tetapi perintah Ilahi yang menuntut realisasi dalam praktik sosial. Pesan ini diperkuat dengan perjuangan Nabi Muhammad yang bukan hanya membangun kesalehan personal, tetapi juga menciptakan tatanan sosial yang egaliter di tengah struktur jahiliyah yang menindas—baik secara kelas, ras, maupun gender.

Pemikiran tokoh seperti Ali Shariati sangat membantu untuk memahami dimensi emansipatoris Islam. Ia menyebut Islam sebagai "agama pembebasan" (*din-i rahai-bakhsh*), yang hadir untuk membela *mustadh'afin*—kelompok yang terpinggirkan dalam struktur sosial (Shariati, *Religion versus Religion*, 1979). Islam menurutnya bukan ajaran yang memelihara status quo, melainkan yang menantang kekuasaan yang eksploitatif, baik dalam bentuk ekonomi, kekuasaan politik, maupun dominasi kultural.

Pandangan ini selaras dengan ide Muhammad Iqbal, yang melihat Islam sebagai "energi pembaharuan peradaban." Dalam *The Reconstruction of Religious Thought*

in Islam (1930), Iqbal menegaskan bahwa Islam harus terus hidup dalam dinamika zaman sebagai kekuatan etis yang mendorong kemajuan umat manusia secara kolektif, bukan stagnasi spiritual semata.

Jika dipahami secara mendalam, Islam bukanlah ajaran yang netral terhadap ketimpangan. Ia berpihak secara jelas kepada keadilan, kesetaraan, dan pembebasan. Seperti ditegaskan oleh Fazlur Rahman, Islam menuntut *transformasi struktural* atas tatanan yang melahirkan kesenjangan dan eksploitasi (Rahman, *Islam and Modernity*, 1982). Maka, pesan Islam bukan hanya moralistik, tetapi juga politis—bukan dalam arti partisan, melainkan dalam makna *etika kekuasaan dan pengelolaan kehidupan publik*.

Gerakan mahasiswa Islam, seperti PMII, perlu membaca Islam dalam semangat ini. Islam bukan hanya teks untuk dikaji, tetapi nilai untuk diwujudkan. Maka, tugas kader PMII bukan hanya berdakwah dalam pengertian konvensional, tetapi mengartikulasikan Islam sebagai kekuatan perlawanan terhadap ketimpangan struktural—melalui pendidikan, advokasi, legislasi, dan aksi sosial. Dalam bahasa Kuntowijoyo, ini adalah langkah "mengilmukan Islam dan mengislamkan ilmu" (Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu*, 2006).

Islam sebagai agama transformatif berarti Islam yang *membebaskan*, bukan membelenggu; *mengangkat derajat manusia*, bukan memperalatnya. Dalam dunia modern yang dipenuhi ketimpangan dan dehumanisasi, Islam menawarkan visi alternatif—yang memadukan spiritualitas, kesadaran sosial, dan keberpihakan kepada keadilan. Inilah Islam yang hidup, progresif, dan relevan dengan tantangan zaman.

Sebagaimana ditegaskan oleh Fazlur Rahman dalam *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (1982), "The Qur'an's basic aim is to create a

moral and just social order." Kutipan ini tidak sekadar menyampaikan visi Al-Qur'an secara abstrak, tetapi menggambarkan kedalaman misi wahyu Islam sebagai kekuatan transformasional—yang tidak berhenti pada ritual ibadah, melainkan bergerak aktif mengintervensi realitas sosial.

Wahyu dalam Islam bukanlah teks pasif yang dibacakan dalam keheningan, melainkan panggilan untuk bertindak di tengah hiruk-pikuk ketimpangan. Ia tidak hanya memberi arah kepada individu untuk menjadi saleh, tetapi juga mendorong umat untuk membangun tatanan masyarakat yang adil, beradab, dan berkesadaran etis. Dalam pandangan Rahman, wahyu bukanlah dogma yang membekukan pikiran, tetapi sumber daya intelektual dan moral untuk membaca zaman secara kritis dan menjawab tantangannya secara kreatif.

Nilai-nilai seperti *'adl* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan *amanah* (tanggung jawab) bukan hanya hiasan retoris dalam diskursus keagamaan, tetapi pilar dari etika sosial-politik Islam. Keadilan bukan sekadar membagi secara merata, tetapi menata struktur agar manusia tidak lagi ditindas oleh sistem. Kasih sayang bukanlah kelembutan yang apatis, tetapi empati yang aktif: sebuah dorongan untuk membela yang lemah dan memperjuangkan yang tertindas. Amanah, dalam hal ini, bukan hanya tentang tanggung jawab personal, tetapi etika kolektif dalam merawat kekuasaan, lingkungan, dan sesama manusia.

Pandangan Rahman membuka kesadaran baru bahwa Islam adalah agama yang hidup dalam sejarah dan untuk sejarah—agama yang memanggil manusia bukan sekadar menjadi pengikut setia, tetapi juga agen perubahan. Maka tidak mengherankan jika dalam berbagai momentum sejarah, Islam menjadi kekuatan pembebas: melawan feodalisme, kolonialisme, hingga sistem kapitalistik yang eksploitatif.

Keadilan dalam Islam bukanlah utopia, tetapi proyek bersama yang harus diperjuangkan dengan ilmu, refleksi, dan aksi. Inilah makna mendalam dari wahyu yang hidup: ketika ayat-ayat suci tidak hanya mengisi ruang-ruang ibadah, tetapi juga menyapa ranah politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Ketika *tadabbur* (perenungan) bergandengan tangan dengan *tasyri'* (pembuatan hukum) dan *islah* (reformasi sosial).

Dengan membaca Islam dalam bingkai Fazlur Rahman, kita diajak untuk memahami bahwa Al-Qur'an adalah naskah etika pembebasan. Ia tidak hadir untuk menidurkan kesadaran, tetapi untuk membangunkannya. Islam bukan sekadar pedoman hidup individual, tetapi juga konstitusi moral untuk membentuk masyarakat yang adil dan manusiawi.

Dan dalam dunia yang hari ini ditandai oleh ketimpangan, kerusakan moral, dan krisis kepemimpinan, pesan ini menjadi sangat relevan: bahwa Islam, melalui wahyu-Nya, memanggil kita bukan hanya untuk tunduk dalam doa, tetapi juga untuk bangkit dalam perubahan.

Konsep transformasi sosial dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari misi kenabian. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad diutus untuk *"membebaskan beban-beban yang memberatkan umat manusia dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka"* (QS. Al-A'raf: 157). Ayat ini tidak hanya menggambarkan peran spiritual Nabi sebagai pembimbing akidah, tetapi juga sebagai agen pembebasan struktural, yang datang untuk menghancurkan belenggu ketertindasan, baik dalam bentuk eksploitasi ekonomi, subordinasi sosial, maupun dominasi politik.

Dalam perspektif ini, Islam menjadi lebih dari sekadar agama ritual—ia adalah *teologi pembebasan* (liberation theology) yang menjadikan perjuangan melawan kezaliman

sebagai bagian dari iman. Hal ini sejalan dengan pandangan Ali Shariati, pemikir revolusioner asal Iran, yang menyatakan bahwa *"Islam adalah agama revolusi"*. Dalam karyanya *On the Sociology of Islam* (1979), Shariati menekankan bahwa Islam bukanlah sistem yang pasif terhadap ketidakadilan. Sebaliknya, Islam justru hadir sebagai ideologi transformatif, yang mengajarkan umatnya untuk menolak segala bentuk tirani dan ketimpangan sosial.

Bagi Shariati, tauhid (monoteisme) bukan hanya penegasan keesaan Tuhan, tetapi juga penolakan terhadap segala bentuk tuhan-tuhan palsu—yakni kekuasaan otoriter, ketamakan kapitalisme, dan dominasi kultural yang menindas. Dengan demikian, Islam membebaskan manusia bukan hanya dari dosa-dosa spiritual, tetapi juga dari struktur-struktur duniawi yang menindas kemanusiaan.

Pandangan ini menggugah kesadaran bahwa ajaran kenabian selalu membawa misi perubahan sosial. Para nabi bukanlah petapa yang menjauh dari dunia, tetapi pemimpin moral yang mengubah dunia. Mereka tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga mengintervensi realitas sosial, menggugah nurani kolektif, dan menantang hegemoni yang menindas. Nabi Muhammad SAW, misalnya, memulai dakwahnya dengan menggugat ketimpangan Makkah, menantang struktur patriarkis, dan memperjuangkan hak-hak kaum tertindas—budak, perempuan, dan yatim piatu.

Dalam konteks kontemporer, pemahaman ini menuntut umat Islam untuk menghidupkan kembali semangat profetik dalam setiap upaya sosial dan politik. Gerakan Islam tidak boleh sekadar menjadi penjaga moralitas simbolik, tetapi harus hadir sebagai *penggerak keadilan struktural*. Spirit kenabian adalah panggilan untuk tidak diam ketika umat ditindas, lingkungan dihancurkan, dan kemiskinan dilembagakan.

Dengan demikian, Islam bukan hanya agama yang turun dari langit, tetapi juga agama yang mengakar di bumi—agama yang membawa pesan *rahmatan lil 'alamin* dalam bentuk nyata: pembebasan, keadilan, dan kemanusiaan. Dan tugas generasi hari ini adalah meneruskan misi itu: menjadikan Islam sebagai kekuatan etis yang membebaskan, bukan sekadar doktrin yang menenangkan.

Secara filosofis, konsep Islam transformatif tidak mungkin dipisahkan dari etika tauhid—sebuah prinsip yang bukan hanya mendefinisikan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur tatanan sosial dan moral umat manusia. Tauhid dalam Islam bukan sekadar deklarasi teologis bahwa "Tiada Tuhan selain Allah", tetapi sebuah kerangka etis-ontologis yang menolak segala bentuk pengkultusan terhadap kekuasaan, harta, atau manusia itu sendiri.

Seperti dijelaskan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam *Islam and Secularism* (1978), tauhid merupakan asas metafisika Islam yang menciptakan keterhubungan antara dunia spiritual dan realitas sosial. Al-Attas menyebut bahwa tauhid tidak boleh dipahami secara sempit sebagai dogma ritualistik, melainkan sebagai prinsip yang menuntut keteraturan, keadilan, dan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan manusia—baik individu maupun kolektif.

Dari sini dapat kita lihat bahwa tauhid melahirkan kesadaran etik yang radikal: bahwa hanya Allah yang layak menjadi pusat kekuasaan, dan bahwa segala bentuk penindasan, absolutisme politik, dan ketimpangan sosial adalah bentuk-bentuk kemusyrikan simbolik yang harus dilawan. Maka, pengesaan Tuhan berarti pula penolakan terhadap dewa-dewa kekuasaan duniawi—baik dalam bentuk oligarki ekonomi, kekuasaan otoriter, maupun sistem sosial yang tidak adil.

Etika tauhid juga memunculkan tanggung jawab sosial yang mendalam. Ia menuntut manusia untuk bertindak secara adil karena Allah adalah sumber keadilan, untuk menegakkan amanah karena kekuasaan bukan milik mutlak manusia, dan untuk menjaga keseimbangan karena alam semesta diciptakan dalam harmoni. Tauhid, dengan demikian, adalah basis kesadaran transformatif yang menjadikan Islam bukan hanya agama individu, tetapi juga kekuatan moral bagi perubahan sosial.

Sebagaimana ditegaskan oleh Fazlur Rahman, misi utama Al-Qur'an adalah menata masyarakat yang berkeadilan dan bermoral tinggi (*Islam and Modernity*, 1982). Artinya, doktrin tauhid harus diwujudkan dalam bentuk sistem sosial yang menjunjung tinggi keadilan ('adl), kasih sayang (rahmah), dan tanggung jawab kolektif (amanah).

Etika tauhid menuntut lebih dari sekadar kesalehan pribadi—ia menuntut transformasi sosial yang berbasis spiritualitas dan ilmu. Inilah mengapa Islam transformatif tidak hanya bicara soal ibadah, tetapi juga soal struktur, kebijakan, dan relasi kekuasaan. Sebuah masyarakat yang bertauhid adalah masyarakat yang menolak dominasi manusia atas manusia, dan memperjuangkan kemerdekaan, kesejahteraan, dan martabat semua warga.

Dengan demikian, Islam transformatif bukan sekadar mimpi utopis, tetapi sebuah etika praksis yang menyatu antara iman dan tindakan. Di sinilah PMII dan gerakan Islam progresif harus berpijak—memahami tauhid bukan sebagai simbol dogmatis, tetapi sebagai fondasi pembebasan, penataan sosial, dan etika peradaban.

Di sinilah letak kekuatan transformasi Islam yang sejati: bukan pada ornamen simbolik atau ritual semata, melainkan pada kemampuannya membentuk *habitus* sosial yang membebaskan manusia dari belenggu penindasan,

stagnasi intelektual, dan kemiskinan struktural. Islam, sejak awal, adalah gerakan ide yang hidup dalam praksis sejarah, bukan sekadar sistem hukum kaku yang menuntut kepatuhan tanpa pemahaman.

Sebagaimana ditegaskan oleh Mohammad Arkoun dalam *The Unthought in Contemporary Islamic Thought* (2002), Islam harus dibaca ulang sebagai wacana kritis yang membuka kemungkinan-kemungkinan baru dalam mengembangkan pemikiran dan praksis sosial. Arkoun mengajak kita keluar dari jebakan nalar tekstualistik yang membekukan wahyu menjadi dogma, menuju cara pandang yang memahami Islam sebagai proyek intelektual yang dinamis, historis, dan terbuka terhadap tafsir progresif.

Dalam konteks ini, transformasi Islam berarti menjadikan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kasih sayang sebagai pola kehidupan bersama—sebuah *habitus*, menggunakan istilah Pierre Bourdieu, yaitu sistem disposisi dan praktik sosial yang terbentuk dalam relasi antara struktur dan agen. Islam tidak cukup hanya dipraktikkan di atas sajadah atau di balik mimbar khutbah, tetapi harus menjadi kebiasaan hidup sosial: dalam cara kita memperlakukan orang miskin, memperjuangkan keadilan, mengelola kekuasaan, dan merespons perubahan zaman.

Transformasi ini menuntut rekonstruksi kesadaran umat, bukan sekadar peningkatan ibadah ritual. Kesalehan harus diterjemahkan menjadi keadaban publik, spiritualitas harus membentuk kebijakan, dan iman harus menjadi energi pembebasan. Islam, dalam kerangka ini, adalah etika kehidupan yang terus bergerak, yang menolak pembekuan makna dan stagnasi sosial.

Oleh karena itu, sebagaimana ditekankan Arkoun, tantangan terbesar umat Islam bukan hanya dalam menghadapi dunia luar, tetapi dalam memperbaharui cara berpikir, menafsir, dan bertindak. Membebaskan Islam

dari "yang tak terpikirkan" (*l'impensé*) adalah langkah awal menuju Islam yang lebih membumi dan membebaskan.

Dengan demikian, Islam sebagai agama transformatif bukanlah sekadar slogan retoris atau simbol identitas, melainkan sebuah mandat spiritual dan sosial yang melekat pada esensi keimanan itu sendiri. Keimanan, dalam kerangka ini, bukanlah sikap pasif yang membiarkan ketimpangan berlangsung, melainkan keterlibatan aktif dalam sejarah untuk menegakkan keadilan, memanusiakan manusia, dan merestorasi kehidupan yang bermartabat.

Al-Qur'an secara eksplisit menyerukan keberpihakan terhadap kelompok mustadh'afin—mereka yang dilemahkan oleh struktur kekuasaan, ekonomi, dan budaya. Dalam QS. An-Nisa' [4]:75, Allah menyeru: *"Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita maupun anak-anak..."* Ayat ini menunjukkan bahwa pembelaan terhadap hak-hak manusia yang tertindas adalah bagian integral dari spiritualitas Islam.

Dalam pandangan Ali Shariati, Islam adalah agama para pembebas, bukan penjaga status quo. Ia menulis bahwa *"Islam adalah agama revolusi dan kesadaran sosial yang menolak segala bentuk penghisapan dan dominasi"* (Shariati, *On the Sociology of Islam*, 1979). Maka, menjadi Muslim berarti menolak kezaliman dalam segala bentuknya—baik personal maupun struktural.

Spirit transformasi inilah yang, dalam konteks kontemporer, menjadi fondasi gerakan keadilan sosial, reformasi hukum, serta advokasi hak asasi manusia yang digerakkan oleh iman yang aktif. Di tengah krisis moral global dan ketimpangan sistemik, Islam menghadirkan etika profetik yang menuntut aksi, bukan sekadar kontemplasi. Seperti ditekankan oleh Fazlur Rahman, tujuan utama

wahyu adalah "to create a moral and just social order" (*Islam and Modernity*, 1982).

Oleh karena itu, Islam transformatif bukan sekadar tentang menjadi baik secara personal, tetapi juga tentang membangun sistem yang adil secara kolektif. Inilah agama yang tidak membiarkan kemiskinan dilembagakan, ketidakadilan dinormalkan, dan kekuasaan disakralkan. Inilah Islam yang menyatu dengan denyut sejarah, berdiri di barisan rakyat, dan menjadi inspirasi perubahan sosial yang berkelanjutan.

B. AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH DAN NILAI-NILAI SOSIAL: ETIKA KOMUNITAS, KESEIMBANGAN, DAN KEADILAN

Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) bukanlah sekadar klaim teologis atau warisan historis dari tradisi Islam klasik. Lebih dari itu, ia merupakan kerangka etika kolektif yang membentuk peradaban Islam yang ramah, adil, dan inklusif. Dalam sejarah Islam Nusantara, Aswaja telah menjadi fondasi sosial yang mempersatukan umat, menjembatani perbedaan, dan merawat harmoni dalam keberagaman.

Sebagai *manhaj al-fikr* (metodologi berpikir), Aswaja menawarkan empat prinsip utama:

- Tawasuth (moderasi): penolakan terhadap ekstremisme, baik dalam bentuk puritanisme berlebihan maupun liberalisme tanpa batas.
- Tawazun (keseimbangan): antara hak dan kewajiban, antara dunia dan akhirat, antara individu dan kolektif.
- Tasamuh (toleransi): pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan, baik dalam ranah mazhab, budaya, maupun keyakinan.

- I'tidal (keadilan): penegakan kebenaran secara proporsional tanpa keberpihakan yang zalim.

Empat prinsip ini bukanlah doktrin pasif, tetapi etika aktif yang mendorong pemeluknya untuk mewujudkan masyarakat yang damai, egaliter, dan berkeadaban. Dalam konteks keindonesiaan, Aswaja menjadi salah satu sumbu etis yang mampu menjawab persoalan sosial kontemporer: radikalisme, polarisasi politik, ketimpangan, hingga hilangnya empati sosial.

Sebagaimana ditegaskan oleh KH. Ahmad Siddiq, tokoh penting Nahdlatul Ulama, Aswaja harus dihidupkan sebagai *"manhaj al-hayah"*—metodologi hidup—yang tidak hanya menjawab persoalan akidah, tetapi juga membentuk kepribadian sosial dan tanggung jawab kemanusiaan. Aswaja membentuk karakter yang tidak hanya *tahu kebenaran*, tetapi juga *berani memperjuangkan keadilan*.

Di tengah era disrupsi nilai dan derasnya arus ideologi global, Aswaja menawarkan titik temu antara tradisi dan modernitas, antara iman dan akal, antara teks dan konteks. Ia menjadi panduan etis yang tidak kaku, tetapi juga tidak permisif—teguh dalam prinsip, lentur dalam pendekatan.

Dengan demikian, Aswaja adalah jalan tengah yang berkarakter kuat namun bersikap terbuka—ia bukan hanya menjaga kemurnian ajaran Islam, tetapi juga mengartikulasikannya dalam praksis sosial yang membebaskan, mempersatukan, dan mencerdaskan. Inilah wajah Islam yang membangun, bukan meruntuhkan; merangkul, bukan menyingkirkan; dan menata peradaban, bukan menegaskan dominasi.

Secara historis, Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) tumbuh sebagai respon intelektual dan spiritual terhadap gelombang ekstremisme teologis dan kekerasan politik yang muncul dalam masa-masa awal Islam. Di tengah polarisasi

antara kelompok-kelompok tekstualis-radikal seperti Khawarij dan kelompok spekulatif seperti Mu'tazilah, muncul usaha untuk menyatukan antara otoritas wahyu dan nalar, antara keteguhan akidah dan kelenturan dalam praksis sosial.

Tokoh sentral dalam konstruksi teologi Aswaja adalah Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, yang merumuskan pendekatan teologis yang tidak semata literalis atau rasionalis, tetapi integratif dan kontekstual. Mereka menegaskan pentingnya *akal* dalam memahami *wahyu*, namun tetap dalam bingkai kesetiaan pada otoritas Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan cara ini, Aswaja menjadi payung intelektual yang menjauhkan umat dari fanatisme buta dan kekacauan pemikiran.

Dalam bidang fikih, Aswaja tidak memonopoli kebenaran pada satu mazhab, tetapi mewadahi keberagaman pendapat yang bersumber dari mazhab-mazhab mu'tabarah: Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Pendekatan ini menumbuhkan toleransi intra-Islam yang tinggi, karena perbedaan bukan dilihat sebagai ancaman, melainkan rahmat dan kekayaan interpretatif. Prinsip *ikhtilaf* dalam fiqh Aswaja mengajarkan bahwa perbedaan pandangan bukanlah pemecah, tetapi pematangan pemahaman.

Sementara dalam tasawuf, Aswaja mengintegrasikan spiritualitas dalam kehidupan sosial dan politik, bukan sebagai pelarian dari dunia, tetapi sebagai pemurnian batin dalam mengabdi pada realitas. Tokoh seperti Imam al-Ghazali mengajarkan bahwa tasawuf sejati adalah pembersihan jiwa yang berdampak pada perbaikan masyarakat. Ia bukan sekadar ritual dzikir, tetapi jalan menuju ihsan dalam amal dan etika. Sementara Junaid al-Baghdadi meletakkan dasar tasawuf sunni yang menjauhkan umat dari kebatinan ekstrem, sekaligus menjaga kedalaman rohani dalam bingkai syariat.

Dengan fondasi tiga pilar—akidah yang moderat, fikih yang toleran, dan tasawuf yang membumi—Aswaja menjelma menjadi jalan tengah Islam yang relevan sepanjang zaman. Ia bukan kompromi antara dua ekstrem, melainkan *jalan kesadaran* yang memadukan antara akal, iman, dan amal sebagai fondasi kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Sebagaimana dikatakan oleh KH. Hasyim Asy'ari, "Ahlussunnah wal Jama'ah adalah jalan keseimbangan yang menjaga umat dari keterbelahan dan keterjerumusan." Inilah warisan yang diteruskan oleh organisasi-organisasi keislaman seperti Nahdlatul Ulama dan PMII, yang menjadikan Aswaja bukan hanya sebagai doktrin, tetapi sumber etika sosial, politik, dan peradaban Islam di Indonesia.

Dalam konteks sosial, Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) bukan hanya kerangka keagamaan, tetapi juga fondasi etika kewargaan dan peradaban. Ia menegaskan bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan keniscayaan ilahiah yang harus dikelola dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Prinsip-prinsip seperti *tawazun* (keseimbangan), *tasamuh* (toleransi), dan *i'tidal* (keadilan) bukan sekadar jargon, tetapi pedoman hidup dalam merawat harmoni sosial di tengah kompleksitas zaman.

Aswaja mengajarkan bahwa hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk menuntut penghormatan terhadap hak-hak setiap individu, tanpa melihat latar belakang agama, budaya, atau kelas sosial. Ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujurat: 13 yang menyatakan bahwa perbedaan manusia adalah untuk saling mengenal (li ta'arafu), bukan untuk saling menyingkirkan. Dalam pandangan Aswaja, agama harus melahirkan tata sosial

yang inklusif dan berkeadilan, bukan menjadi alat dominasi atau eksklusivisme.

Pandangan ini ditegaskan dengan sangat indah oleh KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pemikir besar Aswaja, dalam karya klasiknya *al-Nur al-Mubin* (1930), saat ia menyatakan bahwa: *"Agama dan negara ibarat dua saudara kembar; agama adalah pondasinya, dan negara adalah penjaganya."*

Ungkapan ini bukan sekadar metafora, tetapi pandangan politik-teologis yang menyatukan antara idealisme spiritual dan tanggung jawab kebangsaan. Agama tidak boleh menjadi alat provokasi kekuasaan, dan negara tidak boleh meminggirkan nilai-nilai moral dan spiritual. Inilah etika simbiosis antara iman dan institusi, antara ukhrawi dan duniawi—sebuah prinsip yang mengakar dalam tradisi Aswaja.

Sebagai kerangka etika sosial, Aswaja mendorong umat Islam untuk menjadi pelaku aktif dalam membangun tatanan yang damai dan beradab, bukan sekadar menjadi penonton dalam hiruk-pikuk zaman. Dalam konteks Indonesia, semangat ini tercermin dalam perjuangan organisasi seperti PMII dan NU, yang sejak awal berdiri tidak hanya menjaga ajaran Islam yang moderat, tetapi juga menjadi garda depan dalam merawat keindonesiaan yang plural dan demokratis.

Dengan demikian, Aswaja tidak hanya relevan dalam kerangka keimanan, tetapi juga menjadi peta moral untuk menghadapi tantangan kebangsaan dan kemanusiaan masa kini. Di tengah meningkatnya radikalisme, polarisasi politik, dan fragmentasi sosial, Aswaja hadir sebagai jalan tengah yang meneguhkan peradaban—jalan di mana agama membimbing, negara melindungi, dan masyarakat tumbuh dalam semangat toleransi dan keadilan.

Falsafah sosial Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) berdiri kokoh di atas pijakan *maslahah*—konsep kemaslahatan umum yang menjadi inti dari tujuan syariat Islam. Dalam pandangan Imam al-Ghazali, sebagaimana tertuang dalam *al-Mustashfa*, syariat hadir bukan untuk membatasi, melainkan untuk melindungi dan menyempurnakan lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), harta (*mal*), dan keturunan (*nasl*). Kelima maqashid ini tidak berhenti pada tingkat personal, melainkan berorientasi pada struktur sosial yang adil dan seimbang.

Inilah yang menjadi kekhasan Aswaja: etika sosialnya bersifat publik dan partisipatif. Ia tidak membentuk eksklusivitas elit agama atau oligarki spiritual, tetapi membuka ruang yang luas bagi dialog, keterlibatan umat, dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, ajaran Aswaja menjadi lebih dari sekadar dogma, tetapi menjelma menjadi etika sosial kolektif yang mendorong kemaslahatan bersama.

Sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Shatibi dalam *al-Muwafaqat*, *maslahah* adalah "asas yang dengannya hukum-hukum syariat dapat difahami sebagai respon terhadap kebutuhan umat manusia." Maka, prinsip-prinsip Aswaja seperti *tawasuth* (moderasi), *tasamuh* (toleransi), dan *i'tidal* (keadilan) tidak lahir dari kompromi teologis semata, tetapi dari kesadaran mendalam bahwa agama harus berperan aktif dalam mengatur kehidupan sosial yang sehat, adil, dan inklusif.

Falsafah ini sangat kontekstual dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang plural dan majemuk. Aswaja tidak membenturkan agama dengan kebhinekaan, tetapi justru menjadikan perbedaan sebagai anugerah dan peluang untuk membangun peradaban bersama. Dalam kerangka ini, syariat bukan sistem kekuasaan, tetapi sistem nilai

yang menata kehidupan dengan mengedepankan maslahat publik dan kemanusiaan universal.

Dengan demikian, Aswaja tidak hanya menjadi penjaga ortodoksi Islam, tetapi juga motor penggerak bagi masyarakat yang menjunjung tinggi keadaban, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Ia menjadi semacam *etos kolektif* yang menghubungkan spiritualitas dengan struktur sosial, sehingga umat Islam tidak hanya saleh secara ritual, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan politis.

Dalam lanskap pemikiran kontemporer, Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) tidak semata-mata dipahami sebagai doktrin teologis klasik, tetapi juga sebagai kerangka epistemologis yang hidup, mampu merespons perubahan zaman tanpa kehilangan akar tradisinya. Aswaja bukan sistem keimanan yang statis, melainkan cara berpikir (manhaj al-fikr) yang memadukan wahyu, akal, dan realitas secara harmonis.

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menegaskan hal ini dengan menyebut Aswaja sebagai "jalan tengah yang memungkinkan Islam hidup berdampingan dengan demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia" (*Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, 2006). Dengan kata lain, Aswaja memberi ruang bagi *ijtihad sosial* yang tidak hanya sah dari sisi agama, tetapi juga relevan secara kontekstual.

Sebagai model epistemologi, Aswaja berpijak pada prinsip tafwīḍ dan taʿaqqul—menyandarkan hal-hal gaib kepada otoritas ilahi, namun tetap menggunakan nalar sehat untuk mengelola dunia nyata. Pendekatan ini memungkinkan Aswaja menghindari dua ekstrem: skripturalisme yang kaku di satu sisi, dan relativisme yang tanpa batas di sisi lain. Dalam kerangka ini, nalar kritis tidak ditentang, tetapi justru dijadikan alat untuk memahami syariat secara lebih bermakna dan solutif.

Aswaja juga menolak kekerasan atas nama agama, serta mengedepankan prinsip *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* melalui jalan damai, dialogis, dan solutif. Nilai-nilai tawasuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang), dan i'tidal (adil) bukan hanya jargon moral, tetapi pijakan metodologis untuk membaca realitas sosial, politik, dan budaya secara bijaksana.

Maka, dalam dunia yang semakin kompleks—di mana agama kerap dihadapkan pada tantangan modernitas, sains, hak asasi manusia, dan globalisasi—Aswaja tampil sebagai model Islam yang inklusif namun otentik, dinamis tapi berakar, serta mampu menavigasi zaman tanpa larut dalam fanatisme ataupun liberalisme ekstrem.

Dengan demikian, Aswaja bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga fondasi intelektual untuk masa depan Islam yang ramah, rasional, dan relevan. Ia membentuk "mazhab peradaban" yang memungkinkan Islam menjadi kekuatan pembebas, bukan penindas; pemersatu, bukan pemecah; dan penopang nilai-nilai universal dalam kerangka iman yang kokoh.

Dengan demikian, Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) tidak hanya berhenti sebagai sistem keyakinan teologis, tetapi menjelma menjadi sebuah proyek peradaban. Ia tidak hanya menjawab pertanyaan metafisik tentang Tuhan dan kebenaran, tetapi juga menyusun etika sosial yang membentuk tatanan hidup bersama yang berkeadilan, damai, dan beradab. Di sinilah letak keunggulan Aswaja: ia tidak menegasikan realitas dunia, melainkan menatanya dengan ruh spiritualitas.

Dalam kerangka Aswaja, agama bukan kutub yang memisahkan, tetapi jembatan yang menyatukan. Ia memperkuat solidaritas sosial, menciptakan ruang dialog, serta mendorong umat Islam untuk mengambil peran aktif dalam menyelesaikan problem-problem kebangsaan dan

kemanusiaan. Seperti yang dicontohkan para ulama klasik dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, nilai-nilai Aswaja dihidupkan dalam praksis, bukan hanya diucapkan dalam retorika.

Aswaja adalah manhaj *wasathiyah* (jalan tengah) yang kokoh, bukan kompromi yang rapuh. Ia mengakar pada khazanah keilmuan Islam klasik, tetapi juga terbuka terhadap dinamika zaman. Oleh karena itu, ia menjadi rujukan moral yang kontekstual, tidak asing di ruang publik demokratis, dan tetap otentik dihadapan modernitas.

Nilai-Nilai Sosial dalam Aswaja

Berikut adalah nilai-nilai sosial utama dalam tradisi Aswaja yang membentuk karakter masyarakat muslim yang berperadaban:

Tawasuth (Moderasi):

Aswaja menolak semua bentuk ekstremisme—baik tekstualisme yang beku maupun liberalisme yang kehilangan arah. Moderasi di sini bukan posisi tengah pasif, tetapi pilihan sadar untuk menyeimbangkan teks dan konteks, spiritualitas dan rasionalitas, konservasi dan inovasi.

Tasamuh (Toleransi):

Dalam semangat tasamuh, perbedaan bukanlah ancaman, melainkan anugerah. Aswaja mendorong umat Islam untuk menghargai keragaman mazhab, budaya, dan keyakinan sebagai bagian dari sunnatullah. Ini menjadi fondasi bagi *ukhuwah basyariyah*—persaudaraan universal yang menempatkan kemanusiaan sebagai titik temu.

I'tidal (Keadilan):

Keadilan, dalam pandangan Aswaja, tidak hanya berlaku di pengadilan, tetapi juga meresap dalam

sikap sehari-hari—dalam berpolitik, berbisnis, dan bermasyarakat. Prinsip i'tidal menolak dominasi sepihak dan menyerukan keadilan distributif, sosial, dan ekologis yang sejalan dengan maqashid al-syari'ah.

Tawazun (Keseimbangan):

Hidup seimbang adalah prinsip etis sekaligus spiritual. Aswaja mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan komunitas, antara dunia dan akhirat. Dalam hal ini, manusia diposisikan sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas harmoni semesta.

Dengan menghidupkan nilai-nilai ini, Aswaja mampu menjadi arus utama Islam yang rahmatan lil 'alamin, sekaligus pelopor etika publik yang relevan di tengah keragaman Indonesia. Dalam semangat ini pula, Aswaja bukan hanya penjaga ortodoksi, tetapi juga motor transformasi sosial yang berlandaskan kearifan, kasih sayang, dan keadilan.

C. ETIKA SOSIAL DALAM TRADISI PMII: TIDAK HANYA MELAWAN, TAPI MEMBANGUN

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir bukan semata dari kebutuhan organisatoris, tetapi dari rahim sejarah yang sarat dengan ketegangan antara idealisme dan realitas, antara nilai keislaman dan problem kebangsaan. Ia tumbuh dalam medan sosial-politik yang menuntut keberanian intelektual sekaligus kepekaan spiritual.

Sebagai organisasi kader, PMII tidak hanya ditakdirkan untuk melawan tirani dan ketidakadilan, tetapi juga mewarisi tugas kenabian: menegakkan nilai kebenaran dan menata tatanan sosial yang berkeadilan, inklusif, dan beradab. Maka dari itu, perlawanan dalam tradisi PMII bukanlah reaksi emosional yang sporadis, melainkan tindakan etis yang

berakar pada kesadaran kritis dan tanggung jawab historis.

Di sinilah letak pentingnya etika sosial dalam gerakan PMII. Ia menjadi fondasi moral dan orientasi nilai dalam setiap langkah organisasi. Etika ini menghindarkan gerakan dari sekadar menjadi alat kepentingan politik sesaat. Ia menjelma sebagai kompas moral yang mengarahkan aktivisme mahasiswa pada transformasi struktural dan pembangunan masyarakat sipil yang partisipatif dan manusiawi.

Sebagaimana dikatakan oleh Emmanuel Levinas, etika bermula dari "kehadiran wajah orang lain"—kesadaran akan keberadaan yang lain sebagai panggilan tanggung jawab (Levinas, *Totality and Infinity*, 1961). Dalam konteks PMII, etika sosial berarti menjadikan penderitaan rakyat sebagai suara yang harus didengar, dan ketimpangan sebagai panggilan untuk bertindak.

Etika sosial PMII tidak berhenti pada kritik, tetapi juga menggagas. Tidak hanya menolak dominasi, tetapi merancang tatanan. Inilah yang membedakan antara gerakan yang hanya membongkar, dengan gerakan yang juga membangun.

Dengan warisan Aswaja dan komitmen kebangsaan, PMII hadir bukan untuk memperkeruh ruang publik, melainkan menerangi jalan perubahan. Ia menawarkan bentuk keberislaman yang kontekstual dan praksis—yang tidak melupakan langit, tapi juga berpijak pada bumi.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bukan sekadar organisasi, melainkan suatu entitas kultural dan intelektual yang memiliki *watak ganda*: menolak dan membangun. Inilah yang disebut sebagai "double movement"—tradisi gerakan ganda yang menjadi ciri khas PMII dalam merespons realitas sosial.

Gerakan ini tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan negatif-dialektis yang menolak ketimpangan, ketidakadilan, dan hegemoni kekuasaan, tetapi juga sebagai gerakan afirmatif yang secara aktif merumuskan, merintis, dan mengartikulasikan tatanan sosial baru yang lebih adil, inklusif, dan manusiawi. Dalam bahasa Karl Polanyi, double movement adalah bentuk dialektika sosial antara *market force* dan *social protection*—dan dalam konteks PMII, ia terwujud sebagai perjuangan antara kritik terhadap struktur zalim dan komitmen membangun struktur alternatif (Polanyi, *The Great Transformation*, 1944).

Pijakan ideologis PMII dalam hal ini sangat kuat: Aswaja (Ahlussunnah wal Jama'ah). Nilai-nilai *tawasuth* (moderasi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan) bukan hanya dogma normatif, tetapi nilai-nilai praksis yang dijalankan dalam konteks kehidupan sosial dan perjuangan rakyat. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman etik yang membentuk habitus kader PMII dalam berinteraksi, berorganisasi, dan berkontribusi di tengah masyarakat.

Dalam ranah sosial, prinsip Aswaja menjelma menjadi:

- Etika pergaulan sosial: menjunjung tinggi toleransi, musyawarah, dan pengakuan atas keragaman.
- Kerja advokasi: memperjuangkan hak-hak kelompok termarjinalkan secara sistematis dan terukur.
- Pendidikan publik: membebaskan masyarakat melalui pengetahuan yang memampukan (*empowerment*).

Pengorganisasian rakyat: menghidupkan kembali semangat gotong royong dan solidaritas kolektif dalam memperjuangkan kesejahteraan.

Dengan demikian, gerakan PMII tidak hanya hadir sebagai reaksi, tetapi sebagai *subjek perubahan* yang berpijak pada nilai dan strategi. Gerakan ini menolak menjadi

destruktif atau sektarian; sebaliknya, ia bergerak dengan *kecerdasan spiritual* dan *ketajaman sosial* yang menjadikan Islam bukan hanya sebagai doktrin, tetapi sebagai energi transformasi peradaban.

Etika sosial dalam tradisi PMII tidak berhenti pada titik resistensi. Ia bukan sekadar semangat melawan kekuasaan yang timpang atau sistem yang menindas. Etika sosial dalam PMII adalah etika transformasional—yakni keberanian untuk melampaui kritik menuju konstruksi. Ini sejalan dengan pemikiran Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970), yang menegaskan bahwa perjuangan sejati tidak dapat berhenti pada bentuk perlawanan verbal atau fisik semata, melainkan harus mengarah pada *praxis*: sintesis antara *refleksi kritis* dan *aksi yang membebaskan*.

Dalam kerangka ini, etika sosial menjadi medan *kesadaran transformatif* (transformative consciousness), bukan sekadar ekspresi kemarahan atau reaksi spontan. PMII menghidupkan semangat *praxis* ini dalam berbagai bentuk gerakan:

- Dari demonstrasi yang menggugah kesadaran publik,
- Menuju edukasi yang membentuk kesadaran kritis,
- Dari orasi yang menyuarakan kebenaran,
- Menuju legislasi yang mengubah struktur,
- Dari gerakan moral,

Menuju pembangunan komunitas yang konkret dan partisipatif.

Transformasi ini menunjukkan bahwa PMII bukan hanya reaktif, tetapi *proaktif dan produktif*, membangun tatanan baru yang berkeadilan melalui jalur intelektual, advokatif, dan struktural. Dalam perspektif ini, kader PMII tidak hanya diajak untuk *berani menolak*, tetapi juga untuk *mampu merancang* dunia yang lebih adil dan manusiawi.

Dengan menjadikan *refleksi sebagai fondasi aksi*, PMII menempatkan dirinya dalam tradisi intelektual dan spiritual yang progresif—menggabungkan nilai-nilai Islam, semangat Ahlussunnah wal Jama'ah, dan praksis pembebasan dalam satu tarikan napas gerakan.

Di tengah hegemoni oligarki dan krisis etika publik yang makin menguat, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menolak jatuh dalam jebakan gerakan yang semata reaktif dan sesaat. PMII tidak hadir hanya sebagai suara yang melawan, tetapi sebagai *kesadaran yang membimbing* dan *kekuatan yang membangun*. Etika sosialnya bukan sekadar retorika perjuangan, tetapi panggilan untuk *mengisi ruang-ruang substantif perubahan*:

- Mengawal kebijakan publik agar berpihak pada keadilan sosial,
- Memperjuangkan hak-hak warga marginal yang sering tersisih dari narasi pembangunan,
- Merawat kebudayaan yang toleran, inklusif, dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Dalam perspektif etis dan filosofis ini, *perlawanan tidak berarti destruksi, tetapi konstruksi nilai*. Artinya, perlawanan yang dilakukan bukanlah kehendak untuk merobohkan semata, melainkan keinginan membangun kembali fondasi sosial yang lebih adil dan bermartabat. Seperti dikatakan oleh Jurgen Habermas, "emansipasi sejati bukan hanya membebaskan dari belenggu, tetapi membangun rasionalitas baru yang lebih komunikatif dan berkeadaban" (Habermas, *The Theory of Communicative Action*, 1984).

PMII, dengan semangat Aswaja dan warisan intelektual Islam progresif, mengembangkan tradisi *etika kehadiran*: tidak cukup mengutuk dari luar sistem, tetapi hadir di dalamnya dengan membawa nurani, integritas, dan visi

kebangsaan. Dalam konteks ini, kader PMII tidak hanya dipanggil untuk bersuara, tetapi juga untuk *berdaya dan menggerakkan perubahan*—melampaui slogan, menyentuh akar realitas.

Inilah wajah etika sosial PMII hari ini: progresif tanpa kehilangan spiritualitas, kritis tanpa kehilangan kesantunan, dan konstruktif tanpa kehilangan keberpihakan. Sebuah etika yang tidak hanya berteriak "lawan", tetapi juga mampu berkata "bangunlah".

Gagasan *etika membangun* tidak muncul dalam ruang hampa. Ia berpijak pada kesadaran historis dan keilmuan bahwa perubahan sosial tidak cukup dilakukan melalui resistensi semata, tetapi memerlukan *kerangka aksi yang terencana, berakar pada nilai, dan dipandu oleh ilmu*. Pemikiran ini sejalan dengan seruan Kuntowijoyo yang menggugah umat Islam untuk naik kelas dari sekadar gerakan moral menjadi *gerakan ilmu* dan *gerakan sosial* yang terintegrasi (Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu*, 2006). Artinya, perubahan bukan hanya soal niat baik, tetapi soal *kapasitas epistemik* dan *daya transformatif* yang konkret.

Dalam konteks ini, PMII sebagai gerakan mahasiswa Islam tidak cukup hanya menjadi penafsir penderitaan atau pengkritik status quo. Ia dipanggil untuk mempertautkan tiga dimensi perjuangan dalam satu simpul: ilmu sebagai landasan berpikir, nilai sebagai kompas moral, dan aksi sebagai wujud komitmen sosial. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Ilmu tanpa nilai bisa menjadi dingin dan teknokratis; nilai tanpa ilmu cenderung idealistik tapi lemah dalam strategi; aksi tanpa keduanya hanya menjadi reaksi tanpa arah.

Sebagai gerakan kader, PMII harus memposisikan diri sebagai *subjek perubahan* yang mampu menciptakan solusi berbasis pengetahuan dan etika. Ini mencerminkan transformasi dari gerakan sporadis menjadi gerakan

strategis, dari agitasi menuju advokasi, dari demonstrasi menuju rekayasa sosial.

Seperti ditegaskan oleh Kuntowijoyo, transformasi umat membutuhkan *ilmuwan organik*—yakni mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga terlibat aktif dalam proses sosial. Inilah medan juang kader PMII: menjadikan ilmu bukan sekadar alat untuk naik kelas sosial, melainkan sarana untuk *menyusun peradaban yang adil dan manusiawi*.

Etika Sosial Inklusif: PMII dan Komitmen Lintas Batas

Lebih dari sekadar ekspresi keberpihakan moral, etika sosial dalam tubuh PMII menemukan manifestasi nyatanya dalam orientasi keumatan dan kebangsaan yang inklusif dan transformatif. Sebagai gerakan yang berakar pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah, PMII tidak menutup diri dalam eksklusivisme ideologis atau identitas sektarian. Sebaliknya, ia tumbuh sebagai ruang dialektis yang terbuka terhadap kerja sama lintas iman, lintas gender, dan lintas kelas sosial.

Dalam pandangan ini, perubahan sosial sejati hanya mungkin tercapai bila ditopang oleh solidaritas kolektif, bukan oleh fanatisme golongan. PMII menyadari bahwa masyarakat Indonesia dibangun di atas pluralitas yang kompleks, dan karena itu, perjuangan sosial tidak boleh jatuh pada romantisme identitas. Koalisi lintas batas ideologis dan kultural menjadi syarat mutlak dalam membangun demokrasi yang berkeadilan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jürgen Habermas, masyarakat modern membutuhkan "*communicative action*"—tindakan yang dilandasi pada kesalingpahaman antaraktor sosial, bukan sekadar dominasi satu kebenaran atas yang lain (Habermas, *The Theory of Communicative Action*, 1984). Spirit ini tercermin dalam praksis sosial PMII yang mengedepankan dialog, advokasi lintas komunitas,

dan pengorganisasian warga secara partisipatif.

Dalam kacamata filsafat Islam progresif, komitmen terhadap keadilan tidak dapat diklaim secara eksklusif. Seperti ditegaskan oleh Fazlur Rahman, etika Qur'an justru menuntut keterlibatan aktif dalam menciptakan struktur sosial yang adil bagi semua, "terlepas dari agama, ras, atau kelas sosialnya" (Rahman, *Islam and Modernity*, 1982).

Dengan demikian, etika sosial PMII tidak hanya mengajarkan keberanian untuk menolak ketidakadilan, tetapi juga kebijaksanaan untuk membangun jembatan di tengah perbedaan. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, pilihan etis seperti inilah yang menjadikan PMII relevan sebagai gerakan mahasiswa yang bukan hanya berpikir kritis, tetapi juga bertindak solutif dan inklusif.

Etika sosial dalam tradisi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bukanlah etika pasif yang hanya mengutuk ketidakadilan dari kejauhan. Ia adalah etika aktif dan progresif, yang tidak berhenti pada kritik atas struktur yang menindas, tetapi terus bergerak menciptakan alternatif peradaban. Dalam hal ini, PMII menempatkan diri sebagai pelaku sejarah, bukan hanya sebagai saksi penderitaan umat.

Sebagai gerakan yang lahir dari rahim Ahlussunnah wal Jama'ah, PMII membawa misi moral yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformasional. Ia memadukan keberanian moral—untuk berkata tidak kepada tirani dan ketimpangan—dengan kecakapan struktural—untuk membangun sistem sosial yang lebih adil, inklusif, dan beradab.

Etika ini berpijak pada semangat *amar ma'ruf nahi munkar* yang tidak terjebak dalam moralistik simbolik, tetapi menjelma dalam praksis sosial yang konkret: advokasi kebijakan, pendidikan publik, pemberdayaan masyarakat,

dan penguatan demokrasi partisipatif. Dalam pandangan ini, PMII tidak sekadar menjadi gerakan resistensi, tetapi gerakan peradaban—yang menyadari bahwa perubahan sejati membutuhkan kombinasi antara visi etis dan kemampuan teknokratis.

Sebagaimana dikatakan Antonio Gramsci, gerakan revolusioner yang berhasil adalah gerakan yang mampu menciptakan *hegemoni moral dan intelektual*, bukan sekadar oposisi destruktif (Gramsci, *Prison Notebooks*, 1971). Etika sosial PMII pun bergerak dalam jalur ini—mengubah kesadaran, membentuk wacana, dan membangun institusi.

Dengan demikian, etika sosial dalam PMII tidak hanya menolak tirani, tetapi juga menawarkan narasi alternatif tentang keadilan, kebersamaan, dan keberadaban. Ia tidak terjebak dalam reaksi emosional terhadap realitas, melainkan menyusun strategi perubahan jangka panjang yang berakar pada nilai, ilmu, dan komitmen kebangsaan. Inilah wajah PMII sebagai gerakan yang tidak hanya bergerak, tetapi menggerakkan zaman.

D. MENGGAGAS PERUBAHAN YANG BERAKAR PADA ETIKA DAN SPIRITUALITAS

Perubahan sosial yang otentik tidak pernah lahir semata dari kemarahan atau gejolak emosional terhadap ketimpangan. Ia justru tumbuh dari kesadaran etis dan spiritual yang mendalam—kesadaran bahwa ketidakadilan bukan hanya persoalan struktural, tetapi juga refleksi dari kerapuhan batin manusia dan masyarakat yang kehilangan nilai-nilai ilahiah. Dalam kerangka Islam, perubahan sejati adalah proses *tazkiyah* (penyucian), bukan sekadar *inqilab* (revolusi) dalam makna politis.

Tazkiyah bukan hanya praktik spiritual personal, melainkan sebuah proyek peradaban: membersihkan

individu dan komunitas dari *zulm* (kezaliman), *jahl* (kebodohan), dan *fujur* (kerusakan moral). Inilah fondasi perubahan yang dibawa oleh para nabi—termasuk Nabi Muhammad SAW—yang tidak hanya menggulingkan berhala fisik di Ka'bah, tetapi juga menghancurkan berhala-berhala struktural berupa eksploitasi, kasta sosial, dan kekuasaan tanpa moral.

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: *"Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memurnikan mereka (menyucikan jiwa mereka), mengajarkan Kitab dan Hikmah, dan sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata."* (QS. Al-Jumu'ah: 2)

Ayat ini menunjukkan bahwa proyek perubahan yang dibawa Islam bersifat holistik: mulai dari penyadaran spiritual hingga pembebasan sosial (*tahrir*). *Tahrir* di sini bukan semata-mata pembebasan dari kekuasaan zalim, tetapi kebangkitan martabat manusia (karāmah insāniyah) dan penciptaan tatanan yang adil.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Malek Bennabi, yang menekankan bahwa perubahan besar dalam sejarah Islam hanya terjadi ketika umat mengubah "mentalitas kolonial" menjadi "kesadaran peradaban" (Bennabi, *The Question of Ideas in the Muslim World*, 1970). Artinya, tidak ada revolusi sosial yang berkelanjutan tanpa revolusi kesadaran.

Dengan demikian, perubahan dalam tradisi Islam bukan sekadar tindakan politis, melainkan proses rekonstruksi batin dan struktur, yang saling menguatkan. Dari tazkiyah lahir tahrir; dari kesalehan spiritual tumbuh keberanian sosial. Inilah jalan perubahan yang Islami: sunyi dalam doa, tajam dalam nalar, dan kokoh dalam aksi.

Dalam Al-Qur'an, perubahan sosial bukan sekadar akibat dari dinamika politik atau tekanan ekonomi, melainkan buah dari perubahan batiniah manusia itu sendiri. Allah berfirman: *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri."* (QS. Ar-Ra'd: 11)

Ayat ini bukan hanya pernyataan teologis, tetapi juga manifes etika perubahan: bahwa segala bentuk reformasi yang hakiki bermula dari revolusi kesadaran. Di sinilah Islam menempatkan tanggung jawab utama bukan pada sistem semata, tetapi pada manusia sebagai pelaku sejarah. Perubahan bukan sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang diperjuangkan melalui refleksi, penataan diri, dan komitmen moral.

Dalam kerangka ini, kesadaran bukan sekadar pengetahuan, tetapi kesediaan untuk berubah—mencabut akar ketidakadilan dari dalam jiwa: keserakahan, apatisme, fanatisme, dan ketakutan. Sebab sistem yang menindas akan terus berulang jika manusia yang menggerakkannya tidak mengalami transformasi nilai.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Fazlur Rahman, yang menafsirkan Al-Qur'an sebagai dorongan etis untuk membangun masyarakat yang bermoral dan adil. Bagi Rahman, wahyu tidak bersifat fatalistik; ia justru mendorong partisipasi aktif manusia dalam membentuk sejarah.

Dengan demikian, QS. Ar-Ra'd: 11 mengajarkan bahwa perubahan bukanlah mukjizat instan, melainkan proses kolektif yang dimulai dari ruang terdalam manusia—kesadaran. Dari perubahan kesadaran lahirlah perubahan sikap, dari perubahan sikap lahirlah perubahan tindakan, dan dari tindakan yang konsisten lahirlah tatanan sosial yang baru dan beradab.

Inilah spiritualitas perubahan dalam Islam: menumbuhkan harapan bukan dari luar, tetapi dari dalam diri yang sadar, tangguh, dan tercerahkan.

Ayat ini menegaskan bahwa setiap perubahan eksternal yang autentik harus dimulai dari revolusi internal—yakni dari kesadaran etis yang jernih, spiritualitas yang reflektif, dan etika sosial yang aktif. Islam mengajarkan bahwa transformasi bukanlah sekadar pergeseran struktur kekuasaan, melainkan proses mendalam yang berakar pada jiwa manusia. Dalam konteks ini, spiritualitas bukan ruang pelarian, bukan pula praktik eskapis yang menjauh dari realitas sosial, tetapi justru merupakan energi moral yang membakar semangat untuk terlibat secara aktif dalam perubahan. Ia adalah kekuatan yang menghidupkan nurani, menggerakkan empati, dan menginspirasi aksi sosial yang transformatif. Inilah spiritualitas yang membebaskan: bukan hanya membentuk pribadi saleh, tetapi juga membangun masyarakat yang adil dan manusiawi.

Pemikiran Ali Shariati, seorang intelektual revolusioner asal Iran, menjadi suluh penting dalam membaca ulang spiritualitas Islam sebagai kekuatan pembebasan. Bagi Shariati, Islam bukan sekadar agama ritual yang terjebak dalam formalitas ibadah, melainkan sebuah ideologi emansipatoris yang hadir untuk meruntuhkan struktur penindasan dan membela kaum mustadh'afin—mereka yang dilemahkan secara sistemik. Dalam *Religion versus Religion* (1979), ia menegaskan bahwa Islam sejati adalah Islam yang melawan dominasi, menolak kooptasi kekuasaan, dan berpihak pada keadilan. Dengan kata lain, spiritualitas tidak pernah netral; ia memiliki keberpihakan moral yang jelas. Dan keberpihakan itu tidak lahir dari kebencian, tetapi dari kesucian hati, kejernihan akal, dan kepekaan sosial. Dalam pandangan ini, beriman berarti berpihak, dan berpihak

berarti berjuang—bukan hanya untuk keselamatan pribadi, tetapi untuk pembebasan kolektif umat manusia.

Demikian pula Seyyed Hossein Nasr, seorang pemikir Islam kontemporer dengan pendekatan sufistik yang mendalam, menegaskan bahwa krisis modernitas bukan hanya persoalan politik, ekonomi, atau teknologi, tetapi krisis yang paling mendasar: krisis makna dan kehampaan spiritual. Dalam karyanya *Man and Nature* (1968), Nasr menunjukkan bahwa terputusnya hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam semesta telah melahirkan peradaban yang gersang secara ruhani, sekaligus destruktif secara ekologis. Bagi Nasr, pemulihan sosial tidak cukup dilakukan melalui reformasi sistem, melainkan menuntut transformasi paradigma—dari pola pikir eksploitatif menuju kesadaran kosmik yang harmonis; dari dominasi terhadap alam menjadi keberserahan yang berkah dalam keteraturan Ilahiah. Dalam konteks ini, spiritualitas bukan pelarian dari dunia, melainkan jalan untuk menyembuhkan dunia—dengan memulihkan dimensi sakral dalam kehidupan manusia dan peradaban.

Dalam konteks PMII dan gerakan mahasiswa Islam, menggagas perubahan yang berakar pada etika dan spiritualitas berarti menolak dua jebakan ekstrem yang kerap menjerat gerakan keagamaan maupun gerakan mahasiswa. Pertama, jebakan politisasi kosong—yakni saat gerakan hanya menjadi perpanjangan tangan kekuasaan, kehilangan nurani dan independensi moralnya, dan sibuk berkalkulasi tanpa visi transformatif. Kedua, jebakan eskapisme religius—di mana spiritualitas tercerabut dari realitas sosial, menjadi ritual yang steril dari kepedulian, dan justru menjadi pelarian dari tanggung jawab kemanusiaan. PMII, jika ingin tetap relevan dan visioner, harus merawat spiritualitas yang berpijak pada bumi dan etika yang menjangkau langit: iman yang membebaskan, bukan membius; dan ilmu yang mencerahkan, bukan memperdaya.

Sejak awal kelahirannya, PMII membawa misi luhur untuk menjembatani antara spiritualitas dan aktivisme sosial. Sebagai gerakan yang berpijak pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja), PMII tidak terjebak dalam dikotomi antara iman dan realitas, antara zikir dan pikir. Dalam tradisinya, PMII mengintegrasikan tasawuf sebagai sumber spiritualitas, falsafah sebagai landasan nalar kritis, dan fiqh sosial sebagai pedoman aksi transformatif. Nilai-nilai Aswaja seperti *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), dan *i'tidal* (berkeadilan) bukan sekadar jargon normatif, tetapi menjadi lensa untuk membaca realitas dan fondasi untuk merumuskan strategi perubahan. Dengan etika tersebut, PMII berusaha menghadirkan Islam yang membumi sekaligus mencerahkan: Islam yang tidak hanya hadir di mimbar, tetapi juga di tengah problem sosial umat.

Dengan demikian, etika dan spiritualitas bukan sekadar pelengkap gerakan, melainkan fondasi yang menopangnya. Tanpa keduanya, setiap upaya perubahan akan kehilangan arah, mudah terjebak dalam pragmatisme jangka pendek, atau berakhir sebagai gerakan yang hampa makna. Etika memberi arah moral, spiritualitas memberi kedalaman eksistensial—keduanya menjadikan gerakan bukan hanya reaktif, tetapi juga reflektif dan transformatif. Sebagaimana ditegaskan oleh Kuntowijoyo, Islam modern harus tampil sebagai *"gerakan ilmu dan gerakan sosial"*—yakni gerakan yang bertumpu pada kesadaran transenden dan mewujud dalam praksis transformasional (Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu*, 2006). Inilah kerangka perubahan yang tidak hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga membentuk peradaban yang berkeadilan dan bermartabat.

Menggagas perubahan yang berakar pada etika dan spiritualitas adalah ikhtiar merawat makna di tengah arus perubahan. Ia memastikan bahwa perjuangan tidak hanya bergerak pada level struktur, tetapi juga menyentuh inti terdalam dari peradaban: jiwa kolektif umat manusia.

Perubahan sejati tidak lahir dari amarah semata, tetapi dari kesadaran yang tercerahkan dan nilai yang terinternalisasi. Inilah jalan Islam yang membebaskan—jalan yang spiritual dalam tujuannya, dan sosial dalam tindakannya. Jalan yang tidak hanya merombak realitas lahiriah, tetapi juga menyucikan batin masyarakat dari ketimpangan, kezaliman, dan kehilangan arah.

BAB IV

GERAKAN MAHASISWA DAN KRISIS SOSIAL INDONESIA

Dalam setiap babak krisis sosial Indonesia—dari rezim otoriter hingga demokrasi yang pincang—gerakan mahasiswa selalu hadir sebagai bara yang tak pernah padam. Ia bukan sekadar suara lantang di jalanan, melainkan nurani kolektif yang mengingatkan bangsa akan janji-janji yang dilupakan: keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan martabat kemanusiaan. Ketika negara tersesat dalam labirin kekuasaan, mahasiswa menjadi mata yang awas dan hati yang gelisah. Bab ini menelusuri bagaimana gerakan mahasiswa, termasuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), membaca dan merespons krisis sosial yang terus berulang: kemiskinan yang struktural, ketimpangan yang membatu, serta demoralisasi politik yang menjangkiti sendi-sendi negara. Di tengah arus neoliberalisme dan kekeringan moral, apakah gerakan mahasiswa masih relevan sebagai agen perubahan? Atau justru sedang diuji arah dan identitasnya?

A. KETIMPANGAN EKONOMI DAN MARGINALISASI RAKYAT KECIL: SEBUAH LUKA STRUKTURAL BANGSA

Ketimpangan ekonomi bukan sekadar statistik dingin atau grafik pertumbuhan yang timpang; ia adalah luka sosial yang terus menganga di tubuh bangsa, mencerminkan kegagalan sistemik dalam merawat keadilan dan kemanusiaan. Di satu sisi, segelintir elite ekonomi-politik

menikmati surplus kapital, kekuasaan yang terkonsentrasi, dan akses nyaris tak terbatas terhadap sumber daya strategis; sementara di sisi lain, jutaan rakyat kecil terjebak dalam kemiskinan struktural, pengangguran terselubung, pendidikan yang timpang, dan akses kesehatan yang nyaris nihil. Ini bukanlah kecelakaan sejarah atau akibat dari kemalasan rakyat, tetapi konsekuensi logis dari konfigurasi kebijakan yang sejak lama lebih berpihak pada akumulasi modal daripada distribusi keadilan. Ketimpangan ini adalah produk dari model pembangunan eksklusif—yang mengukur kemajuan dengan angka pertumbuhan ekonomi, tapi menutup mata terhadap kesenjangan antar kelas, antar wilayah, dan antar generasi. Dalam situasi seperti ini, ketimpangan bukan hanya soal pendapatan, tapi tentang martabat yang diinjak, mimpi yang dirampas, dan masa depan yang dipersempit oleh ketidaksetaraan struktural yang kian mengeras.

Data dari World Inequality Report (2022) mengungkap kenyataan pahit yang membayangi perjalanan bangsa Indonesia: satu persen kelompok terkaya menguasai lebih dari 45% kekayaan nasional, sedangkan 50% penduduk terbawah hanya memiliki kurang dari 10% total aset nasional. Angka-angka ini bukan sekadar statistik kering atau grafik ekonomi yang timpang, melainkan potret luka sosial yang dalam—ketimpangan yang melahirkan ketidakberdayaan struktural dan menjauhkan sebagian besar rakyat dari cita-cita keadilan sosial yang termaktub dalam konstitusi.

Ketimpangan ini tidak hadir dalam ruang hampa. Ia lahir dari sejarah panjang konfigurasi kekuasaan yang berpihak pada akumulasi modal, bukan distribusi keadilan. Kebijakan pembangunan yang bias kapital, liberalisasi ekonomi tanpa kontrol sosial, serta lemahnya sistem proteksi terhadap kelompok rentan telah menciptakan ekosistem ekonomi yang memihak segelintir elite, sembari

menyingkirkan mereka yang miskin dari akses terhadap sumber daya dasar—pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, bahkan partisipasi politik.

Dalam perspektif filosofis, ketimpangan bukan hanya soal ekonomi, tetapi menyangkut hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat. John Rawls, dalam *A Theory of Justice* (1971), menegaskan bahwa keadilan sosial hanya dapat ditegakkan jika ketimpangan disusun sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak yang paling lemah. Namun dalam kenyataannya, logika yang dominan bukanlah "keadilan sebagai fairness," melainkan logika pasar yang menjustifikasi konsentrasi kekayaan atas nama efisiensi dan pertumbuhan. Inilah yang disebut Paulo Freire sebagai *kekerasan struktural*—bentuk kekuasaan yang membungkam melalui sistem dan mekanisme yang tampak legal, tetapi melukai secara moral.

Dari sudut pandang Islam, ketimpangan ekonomi yang ekstrem adalah pengkhianatan terhadap maqashid al-syari'ah—tujuan-tujuan luhur syariat yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menekankan bahwa harta bukan sekadar milik individual, melainkan amanah sosial yang harus dikelola untuk kemaslahatan umum. Ketika kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, maka fungsi sosial harta telah dikhianati, dan negara memiliki tanggung jawab etis untuk mengoreksi ketimpangan tersebut melalui kebijakan redistributif.

Ketimpangan yang dibiarkan terus menganga bukan hanya membahayakan stabilitas ekonomi, tetapi juga merusak tatanan moral masyarakat. Ia memicu kecemburuan sosial, memelihara rasa ketidakadilan, dan pada akhirnya menciptakan jurang antara negara dan rakyat. Di tengah krisis ini, perjuangan melawan ketimpangan bukanlah semata-mata agenda ekonomi, tetapi juga panggilan etik

dan spiritual—ikhtiar untuk mengembalikan martabat manusia dan memuliakan nilai-nilai keadilan dalam ruang sosial.

Dalam perspektif ilmiah kontemporer, Thomas Piketty dalam karya monumentalnya *Capital in the Twenty-First Century* (2014) mengemukakan bahwa ketimpangan ekonomi cenderung meningkat secara sistematis ketika tingkat pengembalian modal (*return on capital*) lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dalam formula yang kini dikenal luas, $r > g$, ia menunjukkan bahwa kekayaan yang berasal dari akumulasi aset (seperti properti, saham, dan warisan) tumbuh lebih cepat daripada pendapatan dari kerja atau produktivitas. Akibatnya, kelas pemilik modal terus memperbesar dominasinya atas kekayaan nasional, sementara kelas pekerja dan kelompok miskin semakin tertinggal.

Fenomena ini menyebabkan reproduksi kelas atas secara turun-temurun dan mempersempit peluang mobilitas sosial. Ketika kekayaan tidak lagi diperoleh melalui kerja keras atau kontribusi inovatif, tetapi diwariskan dan dilindungi oleh sistem hukum serta kebijakan fiskal yang bias elite, maka sistem ekonomi berubah wajah: dari meritokratis menjadi aristokratis. Ini adalah bentuk baru dari feodalisme, dengan kapital sebagai tuannya. Piketty menyebutnya sebagai "*patrimonial capitalism*"—kapitalisme warisan—di mana status sosial ditentukan bukan oleh kemampuan, tetapi oleh garis keturunan dan warisan finansial.

Di sinilah kita menyaksikan kembalinya struktur sosial yang tidak adil secara epistemologis dan etis. Ketimpangan semacam ini tidak hanya merusak struktur ekonomi, tetapi juga menurunkan kualitas demokrasi dan memperlemah kohesi sosial. Ketika segelintir orang menguasai sumber daya secara tidak proporsional, maka suara mayoritas rakyat terpinggirkan. Kebijakan publik tidak lagi lahir dari

deliberasi kolektif untuk kebaikan bersama, tetapi dari lobi-lobi eksklusif demi kepentingan korporat dan oligarki.

Lebih dari sekadar masalah teknis, ketimpangan adalah masalah moral dan filsafat keadilan. Seperti yang ditekankan oleh Amartya Sen dalam *Development as Freedom* (1999), pembangunan yang sejati bukan hanya tentang peningkatan angka PDB, tetapi tentang perluasan kebebasan substantif manusia untuk menjalani hidup yang bermakna. Ketimpangan yang ekstrem merampas kebebasan itu, karena ia membatasi akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, bahkan martabat hidup. Dengan kata lain, ketimpangan bukan hanya menciptakan kemiskinan material, tetapi juga kemiskinan eksistensial.

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan ini semakin kompleks karena beririsan dengan marginalisasi struktural dan warisan kolonialisme ekonomi. Kawasan-kawasan kaya sumber daya justru menjadi daerah termiskin karena hasil bumi dikuasai segelintir korporasi. Urbanisasi yang cepat tanpa keadilan spasial meminggirkan kelas pekerja dari ruang hidupnya. Bahkan sistem pendidikan pun ikut terkomodifikasi, menjadi mekanisme penyaring sosial yang menguntungkan mereka yang sudah mapan secara ekonomi.

Maka dari itu, memahami dan mengkritisi ketimpangan hari ini bukan hanya tugas ekonom, tetapi juga tugas moral, politik, dan spiritual. Kita harus bertanya: sistem macam apa yang kita wariskan? Dan kepada siapa pembangunan ini diarahkan?

Marginalisasi rakyat kecil di Indonesia bukan sekadar gejala insidental, melainkan bagian dari pola struktural yang terus berulang di bawah narasi besar pembangunan. Dalam berbagai rupa dan wilayah, rakyat dipaksa keluar dari ruang hidupnya: petani digusur demi proyek infrastruktur, buruh dieksploitasi dengan sistem kerja fleksibel tanpa

jaminan sosial, masyarakat adat dikriminalisasi karena mempertahankan tanah leluhur, dan komunitas pesisir kehilangan akses terhadap laut akibat ekspansi industri ekstraktif. Ini bukan hanya pelanggaran atas hak ekonomi, tetapi juga penyingkiran terhadap identitas, budaya, dan martabat komunitas.

Situasi ini menegaskan relevansi kritik Nancy Fraser dalam *Redistribution or Recognition?* (2003), bahwa keadilan sosial di era kontemporer menuntut pendekatan dua dimensi: *redistribusi ekonomi* dan *pengakuan sosial-kultural*. Redistribusi berarti mengoreksi ketimpangan material dan akses terhadap sumber daya, sedangkan pengakuan berarti menghormati identitas, martabat, dan hak eksistensial kelompok yang selama ini dipinggirkan. Dalam pandangan Fraser, keadilan sejati lahir dari interseksi keduanya—karena memperbaiki ekonomi tanpa mengakui keberagaman kultural hanya akan menghasilkan "kosmetik kebijakan"; sedangkan pengakuan tanpa redistribusi hanya menjadi "romantisisme identitas".

Lebih dalam lagi, Fraser mengkritik bahwa sistem neoliberal cenderung menggantikan perjuangan struktural dengan simbolisme permukaan. Ini menciptakan ilusi inklusi melalui representasi, tetapi membiarkan logika pasar bebas tetap mengatur akses terhadap tanah, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Akibatnya, kelompok miskin tetap miskin, tetapi kini dengan label "terwakili". Dalam konteks Indonesia, ini terlihat dalam ironi pembangunan yang menggandeng jargon inklusi—tetapi di sisi lain, masyarakat miskin kota terusir oleh gentrifikasi, dan masyarakat adat kehilangan hak komunalnya karena proyek pertambangan dan perkebunan skala besar.

Pandangan Fraser ini memperkaya diskursus tentang keadilan, sebab ia menolak dikotomi lama antara kelas dan identitas. Keduanya harus ditangani bersama. Dalam

konteks gerakan mahasiswa dan rakyat, pendekatan ganda ini menyiratkan bahwa perjuangan sosial hari ini tidak bisa berhenti pada tuntutan ekonomi semata, tetapi juga harus memulihkan martabat komunitas yang terpinggirkan secara historis, budaya, dan politis.

Karena itu, ketidakadilan struktural harus dilawan dengan strategi yang juga struktural: mengubah cara pandang terhadap pembangunan, mendesak model redistribusi kekayaan yang adil, sekaligus mendorong pengakuan terhadap keragaman cara hidup yang selama ini direduksi oleh logika pasar dan negara sentralistik.

Dalam lanskap sosial-politik Indonesia kontemporer, praktik oligarki bukan sekadar anomali demokrasi, melainkan justru menjadi struktur kekuasaan dominan yang membentuk arah kebijakan dan orientasi pembangunan. Jeffrey A. Winters dalam karyanya *Oligarchy* (2011) menjelaskan bahwa Indonesia pasca-Reformasi tidak benar-benar keluar dari cengkeraman kekuasaan elite, melainkan bertransformasi menjadi "oligarki elektoral"—sebuah bentuk kekuasaan di mana demokrasi prosedural dijalankan, tetapi kendali atas sumber daya, regulasi, dan keputusan politik tetap berada di tangan segelintir elite ekonomi-politik yang memiliki kekayaan luar biasa (oligarchs).

Winters menyatakan bahwa oligarki bukan soal jumlah orang kaya, melainkan soal kemampuan segelintir orang superkaya untuk "mempertahankan kekayaan mereka melalui kekuasaan politik". Dalam konteks Indonesia, para oligarki ini memiliki akses eksklusif terhadap infrastruktur hukum, media, partai politik, bahkan institusi penegakan hukum—yang pada akhirnya menjadikan demokrasi sebagai ilusi partisipasi, sementara keputusan-keputusan substansial tetap diambil dalam ruang-ruang tertutup kekuasaan modal.

Situasi ini memperparah marginalisasi rakyat kecil, karena ketika kebijakan publik diproduksi oleh dan untuk oligarki, maka kepentingan rakyat selalu dikompromikan, bahkan dikorbankan. Dalam kebijakan agraria, misalnya, konflik lahan terus meningkat karena negara lebih berpihak kepada investasi korporasi dibanding hak-hak petani dan masyarakat adat. Dalam sektor energi, sumber daya dikuasai segelintir konglomerat yang mampu membeli akses regulatif. Bahkan dalam pendidikan dan kesehatan, liberalisasi layanan publik justru memperluas kesenjangan, karena rakyat miskin dipaksa menjadi konsumen di pasar kebutuhan dasar.

Lebih jauh, oligarki bukan hanya sistem politik yang timpang, tetapi juga simptom krisis etika publik, karena kekuasaan tidak lagi dijalankan sebagai amanah sosial, melainkan sebagai instrumen akumulasi pribadi. Di sinilah letak urgensi etika sosial-politik dalam gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil: bukan hanya melawan kebijakan buruk, tetapi menantang struktur kekuasaan yang melahirkan ketimpangan secara sistemik.

Dengan demikian, jika marginalisasi adalah akibat dari dominasi oligarki, maka perjuangan keadilan sosial harus dimulai dari dekonstruksi terhadap narasi kekuasaan dominan—yakni mengembalikan demokrasi pada akar kerakyatan dan menjadikan negara sebagai arena publik, bukan korporasi elite.

Lebih jauh, dalam kerangka filsafat politik dan keadilan, John Rawls melalui maha karyanya *A Theory of Justice* (1971) merumuskan bahwa keadilan bukan sekadar tentang distribusi yang setara, tetapi tentang mengatur ketimpangan agar menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung. Inilah yang disebutnya sebagai "difference principle"—sebuah prinsip moral yang menuntut agar ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan sejauh hal itu

memaksimalkan kesejahteraan bagi kelompok paling rentan. Rawls menantang logika meritokrasi dan pasar bebas yang sering kali melegitimasi ketimpangan atas nama efisiensi dan produktivitas. Baginya, keadilan sosial mensyaratkan empati institusional, bukan sekadar netralitas prosedural.

Dalam konteks Indonesia, prinsip Rawlsian ini seakan menjadi cermin yang memantulkan kegagalan struktural negara dalam memenuhi mandat keadilan. Ketika hukum berpihak kepada pemodal, ketika kebijakan fiskal menguntungkan korporasi besar, dan ketika pendidikan serta layanan kesehatan bermutu hanya tersedia bagi kalangan menengah-atas, maka yang terjadi adalah pembiaran sistemik atas penderitaan mereka yang hidup di lapisan bawah masyarakat. Padahal, menurut Rawls, legitimasi moral suatu negara terletak pada kemampuannya melindungi dan memberdayakan mereka yang paling rentan—bukan sekadar menjaga stabilitas bagi mayoritas, apalagi melayani minoritas elite.

Dengan kata lain, negara yang gagal menjamin keadilan substantif bagi kaum miskin, tertindas, dan termarjinalkan bukan hanya gagal secara administratif, tetapi juga gagal secara etis. Ketimpangan yang dibiarkan tumbuh tanpa koreksi adalah bentuk kekerasan yang dilembagakan (institutionalized injustice), dan dalam perspektif Rawlsian, itu berarti negara kehilangan legitimasi moralnya sebagai pengemban keadilan.

Dalam tradisi pemikiran Islam, ketimpangan ekonomi yang ekstrem bukan sekadar persoalan material, tetapi merupakan bentuk kezaliman struktural yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan ilahiyah. Al-Qur'an secara eksplisit memperingatkan agar kekayaan tidak terkonsentrasi hanya pada segelintir elite, sebagaimana termaktub dalam firman-Nya: *"agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu"*

(QS. Al-Hasyr: 7). Ayat ini bukan hanya ajakan etis, tetapi juga fondasi normatif bagi struktur ekonomi yang adil dan inklusif, yang menjamin hak-hak kaum lemah dalam distribusi kekayaan nasional.

Pemikir Islam terkemuka, Sayyid Qutb, dalam *Social Justice in Islam* (1953), menegaskan bahwa keadilan sosial bukan sekadar cita-cita, tetapi inti ajaran Islam. Baginya, masyarakat Islam harus dibangun di atas tiga prinsip utama: kebebasan individu, kesetaraan hak, dan solidaritas sosial. Ketika sistem ekonomi mengeksklusi mayoritas dan hanya menguntungkan minoritas, itu bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan pengkhianatan terhadap nilai-nilai tauhid. Dalam konteks ini, ketimpangan struktural adalah bentuk kufr sosial—pengingkaran terhadap hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia.

Lebih radikal, Ali Shariati melihat ketimpangan sebagai manifestasi taghut modern—yakni kekuatan opresif yang menyamar dalam bentuk institusi ekonomi dan politik yang menciptakan dominasi serta penindasan. Dalam *Religion versus Religion* (1979), Shariati mengingatkan bahwa agama tidak boleh bersikap netral terhadap struktur ketidakadilan. Islam yang otentik adalah Islam yang berpihak pada kaum tertindas (*mustadh'afin*) dan menantang segala bentuk dominasi yang menindas, baik dalam bentuk feodalisme, kapitalisme, maupun otoritarianisme. Maka dari itu, perjuangan melawan ketimpangan bukan sekadar agenda politik, melainkan tugas teologis, bagian dari ibadah dalam bentuk sosial.

Dengan demikian, dalam perspektif Islam, keadilan ekonomi bukanlah pelengkap dari spiritualitas, tetapi justru wujud nyata dari iman itu sendiri. Ketika kekayaan hanya dikuasai oleh sedikit orang, dan mayoritas hidup dalam ketergantungan serta kemiskinan, maka masyarakat tersebut telah kehilangan ruh keadilannya. Di sinilah urgensi

gerakan sosial—seperti yang diperjuangkan oleh kalangan mahasiswa Islam—untuk menyuarakan kebenaran profetik, melawan kezaliman struktural, dan membela nilai-nilai ilahiah dalam ranah sosial.

Oleh karena itu, perjuangan melawan ketimpangan bukan semata urusan statistik ekonomi atau kebijakan teknokratis, melainkan sebuah panggilan nurani dan amanah spiritual. Ia merupakan tanggung jawab etis yang lahir dari kesadaran bahwa setiap manusia diciptakan dengan martabat dan potensi sebagai *khalifah* di muka bumi—bukan untuk dieksploitasi, tetapi untuk dimuliakan. Ketika sistem sosial dan ekonomi membiarkan jutaan manusia hidup dalam keterpinggiran, maka yang tergadai bukan hanya keadilan sosial, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar.

Dalam konteks inilah, gerakan sosial—termasuk gerakan mahasiswa—tidak bisa bersikap netral. Ia memiliki mandat historis sekaligus moral untuk menjadi *suara yang menggugat* ketidakadilan dan *tangan yang membangun* masa depan yang lebih adil. Bukan sekadar menjadi penonton pasif dalam drama ketimpangan yang terus berlangsung, tetapi menjadi aktor perubahan yang menolak tunduk pada hegemoni kekuasaan dan kepentingan oligarki.

Seperti ditegaskan oleh Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970), perubahan sosial yang sejati tidak lahir dari kemarahan yang membabi buta, tetapi dari kesadaran kritis yang membebaskan—kesadaran yang mampu mengubah keterjajahan menjadi keberdayaan, dan kesunyian menjadi solidaritas. Dalam pandangan ini, aktivisme bukan sekadar tindakan politik, tetapi ekspresi iman, perwujudan tauhid sosial, dan wujud tanggung jawab terhadap masa depan umat dan bangsa.

B. KOMODIFIKASI PENDIDIKAN DAN KEMUNDURAN DEMOKRASI: DARI KRITIS KE KOMERSIAL, DARI RAKYAT KE ELIT

Pendidikan, dalam kerangka ideologi demokrasi, seharusnya menjadi instrumen pembebasan—bukan sekadar sarana mobilitas sosial, melainkan ruang pembentukan kesadaran kritis, pematangan nalar publik, dan penguatan partisipasi warga negara dalam kehidupan bersama. Seperti ditegaskan oleh Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970), pendidikan adalah proses dialogis yang membebaskan, bukan menindas; ia membentuk manusia sebagai subjek sejarah, bukan objek kekuasaan.

Namun dalam cengkraman neoliberalisme global, wajah pendidikan mengalami metamorfosis ideologis yang mendalam. Ia tidak lagi dipahami sebagai *hak universal* yang menjamin martabat, tetapi diperlakukan sebagai *komoditas* dalam pasar bebas. Proses ini dikenal sebagai komodifikasi pendidikan—yakni saat nilai-nilai luhur pendidikan direduksi menjadi relasi jual-beli, di mana ijazah menjadi barang dagangan, dan pengetahuan ditakar berdasarkan nilai tukar, bukan nilai guna sosial.

Fenomena ini berimplikasi luas: akses terhadap pendidikan tinggi menjadi hak istimewa bagi mereka yang mampu secara ekonomi, sementara kelompok marginal tersingkir secara sistemik. Dalam situasi ini, pendidikan gagal menjalankan fungsinya sebagai alat demokratisasi, dan justru memperlebar jurang ketimpangan sosial. Seperti dikritik oleh Henry A. Giroux (2011), universitas telah berubah menjadi "perusahaan" yang lebih sibuk mencari sponsor korporasi daripada memperjuangkan keadilan sosial atau mengembangkan nalar kritis mahasiswa.

Komodifikasi juga berdampak pada substansi kurikulum dan orientasi kelembagaan. Ilmu-ilmu sosial

dan humaniora terpinggirkan, digantikan oleh program studi yang "menguntungkan pasar." Hal ini memperkuat hegemoni pasar atas pendidikan dan memperlemah kapasitas kritis institusi akademik sebagai ruang oposisi terhadap kekuasaan. Pendidikan tak lagi membentuk *citizen*, tetapi *consumer*.

Istilah "komodifikasi pendidikan" berakar dari kritik teoritis terhadap kapitalisme global, khususnya dalam konteks neoliberalisme yang menjadikan segala sesuatu—termasuk ilmu dan hak belajar—sebagai objek pasar. David Harvey (2005) dalam *A Brief History of Neoliberalism* menegaskan bahwa neoliberalisme mendorong logika privatisasi, deregulasi, dan kompetisi bebas, yang pada akhirnya mereduksi sektor publik menjadi ladang investasi privat. Dalam logika ini, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai hak warga, tetapi sebagai jasa yang tunduk pada mekanisme permintaan dan penawaran.

Akibatnya, universitas mengalami transformasi ideologis: dari ruang intelektual yang otonom menjadi institusi semi-korporat yang terobsesi pada brand, akreditasi, dan ranking global. Harvey menyebut fenomena ini sebagai "neoliberal capture"—ketika institusi publik dirampas oleh kepentingan kapital. Di Indonesia, dampak dari kecenderungan ini tampak nyata pasca-Reformasi, khususnya setelah disahkannya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang ini, meskipun dibingkai dalam istilah "otonomi kampus", membuka ruang luas bagi praktik komersialisasi terselubung: penaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), pembatasan akses mahasiswa miskin, dan ketergantungan perguruan tinggi terhadap sponsor korporasi.

Situasi ini menciptakan ironi besar dalam demokrasi: pendidikan, yang seharusnya menjadi fondasi kesetaraan, justru menjadi sarana reproduksi elitisme dan eksklusi

sosial. Universitas berhenti menjadi "menara air" bagi publik, dan justru berubah menjadi "menara gading" yang hanya bisa dinaiki oleh mereka yang memiliki daya beli. Kritik Ivan Illich dalam *Deschooling Society* (1971) kembali relevan di sini—bahwa sistem pendidikan formal modern kerap melayani reproduksi ketimpangan, bukan pembebasan.

Dengan demikian, komodifikasi pendidikan bukan hanya masalah teknis-administratif, tetapi juga persoalan moral dan politik. Ia menantang hakikat pendidikan itu sendiri: apakah masih menjadi ruang pencarian kebenaran dan pembentukan watak warga negara, ataukah sekadar arena produksi gelar dan tenaga kerja untuk industri? Dalam dilema inilah, peran mahasiswa sebagai subjek kritis—bukan sekadar konsumen—menjadi krusial dalam mempertahankan jiwa emansipatoris pendidikan.

Dalam kerangka ini, Paulo Freire (1970) sejak awal telah memberikan peringatan kritis melalui konsep "banking education", yakni model pendidikan yang memperlakukan siswa sebagai wadah kosong yang harus diisi, bukan sebagai subjek yang berpikir dan berdaya. Dalam paradigma ini, relasi pedagogis menjadi hierarkis dan satu arah—guru sebagai pemilik pengetahuan, dan murid sebagai penerima pasif. Proses belajar tidak lagi bersifat dialogis dan membebaskan, melainkan menjadi transmisi informasi yang membekukan kesadaran kritis.

Komodifikasi pendidikan dalam era neoliberalisme memperparah model *banking education* ini. Mahasiswa secara sistemik didorong untuk melihat diri mereka bukan sebagai pencari kebenaran, tetapi sebagai "konsumen" yang membeli jasa akademik demi meraih sertifikat kompetensi pasar. Dosen pun tak luput dari logika ini: mereka didorong menjadi "penyedia layanan akademik" yang harus memenuhi target publikasi, indeks kinerja, dan

rating institusi, bukan sebagai pendidik yang mendampingi transformasi intelektual mahasiswa. Pendidikan akhirnya terperangkap dalam logika output, bukan proses; dalam metrik kuantitatif, bukan kualitas eksistensial.

Dalam konteks inilah, kritik Freire menemukan relevansi baru: pendidikan telah menjadi arena domestikasi, bukan emansipasi. Ia tidak lagi mengajarkan "bagaimana berpikir", melainkan "apa yang harus dihafal"; tidak lagi mendorong perubahan struktural, melainkan justru menyesuaikan individu agar patuh pada sistem yang timpang. Seperti ditulis Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed*, "Pendidikan sejati bukanlah tindakan mengisi, tetapi tindakan membebaskan melalui dialog."

Lebih jauh, jika dibiarkan, komodifikasi akan merusak roh pendidikan sebagai praksis kultural untuk membentuk kesadaran historis dan tanggung jawab sosial. Dalam jangka panjang, ini menghasilkan generasi teknokrat yang cakap secara profesional, tetapi tumpul secara etis; mahir dalam algoritma, namun miskin dalam empati dan kepekaan sosial. Di sinilah pentingnya merebut kembali makna pendidikan—sebagai ruang pembentukan manusia utuh, bukan sekadar produsen angka IPK.

Transformasi pendidikan menjadi komoditas bukan hanya berdampak pada akses ekonomi, tetapi juga mereduksi kualitas demokrasi secara struktural. Dalam tradisi negara demokratis, pendidikan berfungsi sebagai fondasi *civic literacy*—yakni kemampuan warga negara untuk memahami hak dan kewajiban politiknya, berpikir kritis terhadap wacana publik, serta terlibat aktif dalam proses deliberatif dan pengambilan keputusan bersama.

Namun ketika pendidikan dikomersialisasikan, akses terhadap civic literacy menjadi eksklusif. Mahalnya biaya pendidikan dan bias teknokratis dalam kurikulum menciptakan jurang antara warga yang berpendidikan

tinggi dan yang terpinggirkan secara struktural. Akibatnya, ruang partisipasi politik menyempit, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara epistemik. Demokrasi pun kehilangan basis sosialnya—karena partisipasi publik bukan lagi lahir dari kesadaran kolektif, melainkan dari sirkulasi elitis dan kepentingan pragmatis.

Demokrasi tanpa pendidikan kritis hanyalah demokrasi prosedural: menggelar pemilu tanpa membentuk pemilih yang melek makna, membolehkan partisipasi tanpa memberdayakan kesadaran. Seperti diingatkan Noam Chomsky (2012) dalam *How the World Works*, kekuasaan dalam masyarakat modern cenderung dikonsentrasikan melalui "manufaktur konsensus", yakni penciptaan kesepakatan palsu melalui kontrol informasi dan pembatasan akses pengetahuan. Jika pendidikan gagal menciptakan warga yang sadar dan reflektif, maka demokrasi tidak lebih dari teater legitimasi, bukan ruang perjuangan makna.

Lebih dari itu, komodifikasi pendidikan mengubah institusi akademik dari ruang publik menjadi entitas privat yang tunduk pada logika pasar, bukan logika publik. Kampus tidak lagi menjadi tempat pembentukan etika publik, tetapi menjadi mesin produksi tenaga kerja bagi pasar bebas. Dalam konteks ini, demokrasi bukan hanya terancam dari luar melalui otoritarianisme, tetapi juga dari dalam—melalui depolitisasi warga oleh sistem pendidikan itu sendiri.

Larry Diamond (2008) dalam *The Spirit of Democracy* menegaskan bahwa salah satu gejala krusial dari krisis demokrasi kontemporer adalah munculnya apathy politik atau *apatheia* warga negara—yakni ketidakpedulian terhadap urusan publik sebagai akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokratis. Fenomena ini bukan hanya gejala psikologis individual,

tetapi merupakan dampak sistemik dari proses depolitisasi yang berlangsung terus-menerus, termasuk melalui dunia pendidikan yang gagal membangkitkan kesadaran kritis dan kepekaan sosial.

Ketika pendidikan berubah menjadi arena kompetisi ekonomi dan teknokrasi karier, ruang pembentukan jiwa warga negara (civic soul) perlahan menghilang. Orientasi pendidikan yang semata-mata berpusat pada pencapaian personal dan kemapanan profesional, menciptakan generasi yang cemerlang secara akademik, tetapi tumpul secara sosial. Dalam konteks ini, generasi muda tidak sekadar apatis, tetapi juga tercerabut dari cita-cita kolektif—lebih sibuk membangun career path pribadi daripada memperjuangkan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama.

Krisis demokrasi hari ini bukan semata akibat represi kekuasaan atau pembatasan kebebasan sipil, tetapi juga karena hilangnya ruh partisipatif dari generasi terpelajar. Demokrasi kehilangan energi vitalnya ketika kaum muda yang seharusnya menjadi penjaga nurani publik justru beralih menjadi penonton pasif atau bahkan bagian dari status quo. Di sinilah terlihat betapa pentingnya pendidikan politik yang membebaskan—bukan indoktrinatif atau pragmatis, tetapi transformatif.

Sebagaimana diingatkan Sheldon Wolin (2008) dalam *Democracy Incorporated*, demokrasi modern kian terdorong menjadi "managed democracy"—sebuah sistem yang tampak demokratis secara prosedural, tetapi hampa secara substantif karena publik kehilangan kapasitas kritisnya. Dalam lanskap seperti ini, peran pendidikan tidak bisa netral: ia harus berpihak pada pembebasan kesadaran, penguatan partisipasi, dan pemulihan ruang-ruang publik sebagai tempat pertumbuhan demokrasi sejati.

Lebih jauh, Henry Giroux (2014) dalam *Neoliberalism's War on Higher Education* dengan tajam mengungkap bahwa

komodifikasi pendidikan bukanlah sekadar konsekuensi pasar bebas, melainkan bagian dari proyek ideologis yang lebih luas: *pengosongan demokrasi*. Menurutnya, kampus—yang semestinya menjadi benteng peradaban kritis—telah mengalami depolitisasi ilmu pengetahuan (*depoliticization of knowledge*), yaitu proses di mana pengetahuan direduksi menjadi alat teknis tanpa dimensi etis dan sosial. Ilmu tidak lagi ditimbang berdasarkan kontribusinya terhadap keadilan atau pembebasan, tetapi diukur dari "daya jual" dan "nilai investasi."

Giroux melihat bahwa dalam lanskap neoliberal, universitas tidak lagi menghasilkan warga negara yang berpikir kritis dan bertanggung jawab secara sosial, melainkan memproduksi teknokrat yang kompeten secara teknis tetapi steril secara moral. Ini adalah ironi yang menyakitkan: institusi yang dibangun atas nama pencerahan berubah menjadi pabrik kapital manusia; kampus yang dulu melahirkan perubahan, kini dikunci dalam birokratisasi dan logika korporasi.

Dalam konteks ini, komodifikasi pendidikan menjadi ancaman eksistensial bagi demokrasi, karena ia mencabut akar intelektual dan nurani moral dari warga negaranya. Ketika kampus tidak lagi menjadi ruang perdebatan publik, maka suara-suara kritis teredam, dan yang tersisa hanyalah gema konsensus palsu demi efisiensi dan reputasi institusional. Demokrasi tanpa daya kritis adalah demokrasi yang rapuh—hidup secara prosedural, tetapi sekarat secara substansial.

Oleh karena itu, melawan komodifikasi pendidikan bukan hanya soal menolak kenaikan UKT atau kebijakan privatisasi, tetapi merupakan upaya untuk menyelamatkan peran luhur pendidikan dalam membentuk manusia sebagai subjek moral dan politis. Seperti ditegaskan Paulo Freire, pendidikan sejati haruslah membebaskan, membangkitkan

kesadaran, dan memulihkan kembali manusia kepada hakikatnya sebagai makhluk yang berpikir, merasakan, dan bertindak demi kemaslahatan bersama.

Dalam konteks Indonesia, gejala *komodifikasi pendidikan* ini menampakkan wajahnya secara telanjang. Pendidikan tinggi kian terjerumus ke dalam jeratan pasar, di mana idealisme tergantikan oleh logika transaksi. Maraknya praktik *pungutan liar institusional*, lemahnya budaya akademik, serta politisasi kampus menciptakan ekosistem yang tidak kondusif bagi tumbuhnya nalar kritis dan integritas ilmiah. Universitas, alih-alih menjadi ruang otonomi keilmuan, justru berubah menjadi perpanjangan tangan kepentingan ekonomi-politik dan birokrasi kekuasaan.

Lebih jauh, menjamurnya lembaga pendidikan swasta yang profit-oriented telah menambah kompleksitas persoalan. Banyak di antaranya menjual gelar tanpa proses akademik yang bermakna, menjadikan pendidikan sebagai komoditas mewah yang diperdagangkan di pasar bebas. Gelar akademik tak lagi dipandang sebagai buah dari pergulatan intelektual, tetapi sebagai tiket instan menuju mobilitas sosial—meski ilusi tersebut semakin rapuh di tengah realitas lapangan kerja yang makin sempit dan kompetitif.

Akibatnya, mahasiswa tidak lagi diposisikan sebagai subjek transformatif atau agen perubahan, melainkan sebagai *nasabah* yang harus membayar mahal demi selembar ijazah. Dalam struktur semacam ini, relasi antara mahasiswa dan institusi pendidikan menyerupai relasi pasar: penuh kalkulasi, minim emansipasi. Pendidikan kehilangan ruhnya sebagai proses pemanusiaan, dan berubah menjadi arena komersialisasi yang banal.

Ironisnya, janji bahwa ijazah akan menjadi jalan menuju masa depan cerah pun semakin hampa.

Ketimpangan ekonomi, pengangguran struktural, dan pasar kerja yang disesaki tenaga kerja murah menjadikan investasi pendidikan tak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan. Maka yang tersisa hanyalah frustrasi kolektif: generasi terdidik yang tercerabut dari harapan dan cita-cita kebangsaan.

Dalam konteks ini, komodifikasi pendidikan bukan sekadar gejala sosial, tetapi krisis peradaban—karena menyentuh jantung etos keilmuan, keadilan sosial, dan masa depan demokrasi itu sendiri.

Islam sebagai agama pembebas—secara spiritual, sosial, dan intelektual—senantiasa menempatkan pendidikan dalam posisi sentral sebagai ibadah dan amanah sosial. Dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, mencari ilmu bukanlah hak istimewa segelintir elit, tetapi *fardhu 'ain* atas setiap individu Muslim, laki-laki maupun perempuan, tanpa batas kelas sosial maupun hambatan ekonomi (HR. Ibnu Majah). Pendidikan, dalam pandangan Islam, bukan semata alat mobilitas sosial, melainkan jalan pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada kemanusiaan.

Dalam sejarah Islam klasik, kita menyaksikan lahirnya institusi-institusi keilmuan yang menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan kesetaraan. Madrasah, bait al-hikmah, perpustakaan umum, dan halaqah-halaqah ilmu tumbuh dalam semangat keumatan—bukan sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai ekspresi tanggung jawab kolektif terhadap ilmu dan kebajikan. Para ulama klasik seperti Al-Ghazali, Ibn Sina, dan Ibn Khaldun tidak pernah memisahkan ilmu dari adab, dan tidak menjadikan ilmu sebagai komoditas, melainkan sebagai warisan kenabian (*mawārith al-anbiyā*').

Dalam kerangka nilai tersebut, komodifikasi pendidikan dalam sistem kapitalisme modern merupakan bentuk dekadensi intelektual sekaligus distorsi nilai agama. Ketika ruang-ruang pendidikan dibatasi oleh biaya, status,

dan birokrasi teknokratis, maka ia kehilangan watak profetiknya: membebaskan manusia dari kebodohan, ketertindasan, dan ketidakadilan.

Maka pendidikan harus dikembalikan kepada cita-cita utamanya: sebagai pencarian makna, pembentukan karakter, dan penguatan komitmen kebangsaan. Pendidikan bukan hanya soal transfer informasi, tetapi pembentukan *insan kamil*—manusia yang berpikir jernih, merasa dengan nurani, dan bertindak demi maslahat umat dan bangsa. Di sinilah Islam dan demokrasi menemukan titik temu: sama-sama menjunjung ilmu sebagai fondasi keadaban publik.

C. PMII SEBAGAI RESPONS TERHADAP KRISIS MULTIDIMENSI: DARI GERAKAN MORAL KE GERAKAN PERADABAN

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tidak lahir di ruang hampa sejarah, melainkan dalam pusaran zaman yang penuh gejolak: ketika republik muda tengah mencari bentuk dan arah, dan ketika nilai-nilai Islam, nasionalisme, serta keadilan sosial saling bergumul dalam medan sejarah yang cair. Kemerdekaan telah diraih, tetapi janji-janji kemerdekaan belum sepenuhnya ditegakkan. Ketegangan ideologis antara nasionalisme sekuler dan fundamentalisme keagamaan, ditambah ketimpangan sosial akibat kolonialisme yang belum tertanggulangi, menciptakan krisis multidimensi—mulai dari krisis identitas bangsa, ketidakadilan struktural, hingga keterasingan nilai-nilai spiritual Islam dari ruang publik.

Dalam konteks itulah PMII muncul, bukan semata sebagai organisasi kemahasiswaan, tetapi sebagai subjek historis yang membawa misi peradaban. Ia hadir sebagai ruang artikulasi Islam yang humanis—yang mengedepankan nilai-nilai Aswaja sebagai jalan tengah antara skripturalisme

sempit dan liberalisme kosong. Sebagai anak kandung Nahdlatul Ulama, PMII mewarisi tradisi keilmuan yang merangkul akal dan wahyu, serta semangat kebangsaan yang inklusif dan pluralistik.

PMII sejak awal memposisikan diri sebagai gerakan yang menjawab realitas—bukan sekadar menjadi reaksi atas zaman, tetapi pembentuk arah zaman itu sendiri. Ia menjadi medan penggemblengan intelektual, laboratorium sosial, dan panggung perjuangan etis mahasiswa Islam dalam merespons problem struktural bangsa: mulai dari kemiskinan, ketimpangan pendidikan, hingga disorientasi nilai dalam kehidupan bernegara. Dalam tradisi ini, Islam tidak dipisahkan dari persoalan kebangsaan, dan perjuangan sosial tidak diceraikan dari spiritualitas.

Sejak dideklarasikan pada 17 April 1960, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) telah menempatkan dirinya sebagai kekuatan kultural dan intelektual yang berakar kuat pada tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja). Aswaja bukan sekadar identitas teologis, tetapi menjadi paradigma berpikir dan bertindak yang membimbing PMII dalam menjawab tantangan zaman. Dalam bingkai ini, Islam tidak dilihat sebagai dogma beku atau instrumen formalistik negara, melainkan sebagai sistem nilai yang transformatif dan kontekstual—mampu berdialog dengan dinamika sosial, tanpa kehilangan ruh spiritualitasnya.

Dalam menghadapi krisis multidimensi yang meliputi krisis identitas, disintegrasi sosial, dan ketimpangan struktural, PMII menghadirkan prinsip-prinsip Aswaja sebagai kompas moral dan etika aksi sosial. Nilai tawasuth (moderat) mendorong sikap adil dan tidak ekstrem dalam beragama dan berpolitik. I'tidal (keadilan) menegaskan pentingnya keberpihakan pada yang tertindas dan koreksi terhadap kekuasaan yang zalim. Tasamuh (toleransi) menjadi dasar dalam membangun kebhinekaan yang damai

dan berkeadaban. Sementara amar ma'ruf nahi munkar menjadi etika keterlibatan sosial yang aktif dan progresif, yang membentuk karakter aktivisme PMII—bukan hanya sebagai penjaga nilai, tetapi juga sebagai pelopor perubahan.

Paradigma Aswaja yang dianut PMII tidak bersifat reaksioner, melainkan proaktif: ia membimbing kader-kadernya untuk tidak hanya memahami realitas, tetapi juga mentransformasikannya. Dalam semangat inilah, PMII berusaha menjembatani antara Islam sebagai iman dan nilai hidup, Indonesia sebagai identitas kebangsaan, dan modernitas sebagai tantangan serta peluang peradaban. Dengan warisan ini, PMII bukan hanya melahirkan aktivis kampus, tetapi juga kader umat dan bangsa—yang berpikir kritis, berperilaku etis, dan bergerak kolektif demi keadilan sosial.

Krisis Sosial dan Ketimpangan

PMII lahir di tengah lanskap sosial Indonesia yang ditandai oleh ketimpangan ekonomi yang akut dan meluas. Kesenjangan antara elite dan rakyat kecil bukan sekadar soal distribusi pendapatan, tetapi merupakan ekspresi dari kegagalan sistemik dalam menjamin hak-hak dasar manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Amartya Sen (1999) dalam Development as Freedom, kemiskinan harus dipahami bukan hanya sebagai kekurangan materi, tetapi sebagai bentuk kekurangan kebebasan—yakni hilangnya kemampuan untuk hidup secara bermartabat, sehat, dan partisipatif dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, ketimpangan adalah kekerasan struktural yang menggerus otonomi dan martabat manusia.

PMII membaca realitas ini sebagai bentuk penindasan sistemik yang tak dapat dibiarkan. Dengan mengusung semangat Islam transformatif dan nilai-nilai Aswaja,

PMII memposisikan diri bukan sekadar sebagai saksi atas derita kaum marginal, tetapi sebagai bagian dari gerakan pembebasan. Gerakan ini tidak berhenti pada protes moral, tetapi menjelma dalam berbagai bentuk praksis: advokasi kebijakan publik yang berkeadilan, pengorganisasian akar rumput, serta pendidikan kritis yang memihak kaum tertindas—kaum mustadh'afin—sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan tatanan sosial yang lebih etis dan beradab.

Dalam tradisi ini, PMII tidak sekadar mengkritik sistem, tetapi berupaya membentuk kesadaran alternatif yang membebaskan. Pendidikan bukan hanya sebagai transfer pengetahuan, tetapi sebagai alat emansipasi, sebagaimana dikemukakan oleh Paulo Freire (1970) dalam *Pedagogy of the Oppressed*—bahwa pendidikan sejati adalah yang membangkitkan kesadaran kritis dan mengarahkan peserta didik untuk melawan ketidakadilan. PMII, dalam konteks ini, berperan sebagai lokomotif gerakan moral dan intelektual yang memadukan antara iman, ilmu, dan amal dalam membela rakyat kecil.

Krisis Demokrasi dan Eksklusi Politik

Dalam era pasca-Reformasi, harapan akan demokrasi yang egaliter dan partisipatif belum sepenuhnya terwujud. Demokrasi Indonesia banyak dikritik karena terjebak dalam wujud prosedural—menekankan pemilu sebagai ritual politik rutin, namun mengabaikan keadilan sosial, kesetaraan akses, dan partisipasi warga secara substansial. Demokrasi menjadi sekadar kontestasi elektoral tanpa disertai demokratisasi pengetahuan, ekonomi, dan budaya. Ketimpangan tetap mencengkeram, suara rakyat kerap dibungkam oleh kapital politik, dan ruang publik tergerus oleh logika pasar serta dominasi oligarki.

Dalam lanskap inilah, PMII hadir bukan hanya sebagai entitas organisatoris, tetapi sebagai kekuatan moral-intelektual yang berupaya memperluas horizon demokrasi. PMII memandang demokrasi bukan sekadar tentang memilih, tetapi tentang *mewujudkan* keadilan sosial. Maka perjuangan PMII tidak semata menolak otoritarianisme dan represi politik, tetapi juga menantang struktur sosial-ekonomi yang timpang, serta membela hak-hak mereka yang termarjinalkan: buruh, petani, masyarakat adat, dan kelompok miskin kota.

Sejalan dengan pemikiran Jürgen Habermas (1984) dalam The Theory of Communicative Action, PMII berupaya menciptakan ruang publik (public sphere) yang rasional, dialogis, dan inklusif—sebuah medan wacana di mana warga dapat berdiskusi secara kritis tanpa dominasi kekuasaan atau kapital. Di tengah derasnya polarisasi politik, populisme dangkal, dan ujaran kebencian yang membanjiri ruang digital, PMII menegaskan pentingnya etika komunikasi dan pembentukan kesadaran deliberatif sebagai pondasi bagi demokrasi yang sehat.

Lebih dari itu, demokrasi substantif yang diperjuangkan PMII menyentuh aspek yang paling mendasar: keberpihakan pada rakyat. Bagi PMII, demokrasi bukan tujuan akhir, tetapi jalan menuju keadilan sosial. Maka advokasi terhadap kebebasan akademik, pendidikan kritis, perlindungan hak asasi manusia, dan reformasi struktural menjadi bagian integral dari kerja-kerja gerakan.

Krisis Makna dan Spiritualitas

Tak kalah penting, PMII juga membaca krisis modernitas sebagai krisis spiritual dan etika. Modernitas yang menjanjikan kemajuan ilmu dan teknologi ternyata tidak selalu beriringan dengan kemajuan moral dan

kebijaksanaan hidup. Di tengah zaman yang dipenuhi materialisme, konsumerisme, dan disorientasi nilai, manusia justru mengalami alienasi: keterasingan dari makna, dari sesama, bahkan dari dirinya sendiri. Realitas ini memperlihatkan bahwa krisis hari ini bukan hanya krisis sistem, tetapi juga krisis jiwa—ketandusan batin di tengah gemerlap peradaban.

Dalam konteks ini, PMII menawarkan kembali pentingnya tasawuf sosial: sebuah spiritualitas yang tidak eskapis, tetapi berpihak—berakar pada kesucian hati namun berpijak pada realitas sosial. Tasawuf sosial menolak dualisme antara dunia dan akhirat, antara batin dan gerakan. Ia bukan jalan diam, tetapi jalan empati; bukan sekadar kesalehan individual, tetapi kesalehan sosial yang membela yang tertindas dan menolak ketidakadilan.

Pemikiran ini sejalan dengan Ali Shariati (1979) dalam Religion vs. Religion, yang menolak agama yang membius dan meninabobokan, dan justru menyerukan Islam sebagai energi pembebasan—agama yang membangkitkan kesadaran dan menggerakkan perjuangan. Sementara itu, Seyyed Hossein Nasr (1968) dalam *The Encounter of Man and Nature* mengingatkan bahwa modernitas yang kehilangan dimensi spiritual akan menjelma menjadi kekuatan destruktif, baik terhadap manusia maupun alam. Maka Islam, menurut Nasr, harus menjadi jembatan antara ilmu, etika, dan kesucian hidup—membangun peradaban yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beradab.

Melalui visi ini, PMII tidak hanya menjadi gerakan politik atau akademik, tetapi juga gerakan spiritual—yang menyatukan dzikir dan pikir, ibadah dan advokasi, kontemplasi dan aksi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tasawuf dalam praksis sosial, PMII berupaya membangun kader yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga bening hatinya, tangguh etikanya, dan peka terhadap jeritan umat.

PMII sebagai Gerakan Emansipatoris dan Peradaban

Dengan kerangka berpikir tersebut, PMII tidak sekadar menjadi organisasi kader, tetapi menjelma sebagai gerakan emansipatoris—sebuah sintesis antara pemikiran kritis, spiritualitas transformatif, dan praksis sosial. PMII memposisikan dirinya bukan hanya sebagai wadah pengkaderan formal, tetapi sebagai ruang dialektika ide dan perjuangan yang membebaskan, yang menumbuhkan kesadaran historis sekaligus komitmen etik atas realitas sosial.

Gerakan ini menghubungkan nilai-nilai Islam dengan realitas kebangsaan Indonesia secara kreatif dan kontekstual—bukan dengan cara menyeragamkan, melainkan dengan merangkul keragaman sebagai kekayaan. Islam tidak diposisikan sebagai ideologi kekuasaan yang eksklusif, melainkan sebagai etika peradaban yang membimbing kehidupan berbangsa secara adil dan manusiawi.

Sejalan dengan pemikiran Kuntowijoyo (2006) dalam Islam sebagai Ilmu, PMII mengidealkan diri sebagai "gerakan ilmu" dan "gerakan sosial" sekaligus. Artinya, Islam harus diartikulasikan bukan semata melalui simbol-simbol keagamaan, tetapi melalui ilmu pengetahuan yang membebaskan dan aksi sosial yang menyejahterakan. Formalisme simbolik tanpa kesadaran struktural hanya akan memperkuat status quo, bukan melakukan transformasi.

Dalam semangat ini, PMII membangun etos kaderisasi yang tidak hanya menghasilkan aktivis, tetapi juga intelektual organik—yakni mereka yang berpihak pada rakyat, berpikir kritis dalam terang nilai-nilai Aswaja, dan terlibat aktif dalam perubahan sosial. Inilah bentuk integrasi antara iman, ilmu, dan amal dalam konteks keindonesiaan yang majemuk dan penuh tantangan.

Dengan demikian, PMII bukan sekadar entitas organisasi, tetapi merupakan respons ideologis, historis, dan praksis atas krisis multidimensi yang melanda Indonesia. Ia hadir sebagai bentuk kesadaran kolektif mahasiswa Islam terhadap keretakan struktur sosial, krisis legitimasi politik, dan keterasingan nilai-nilai spiritual dalam pembangunan bangsa.

Lebih dari sekadar perlawanan terhadap tatanan yang timpang, PMII menawarkan jalan peradaban—sebuah ikhtiar membangun masyarakat yang beradab, demokratis, dan berkeadilan dengan bertumpu pada kekuatan etika, ilmu, dan iman. Jalan ini bukan jalan instan, melainkan proses panjang membentuk nalar kritis, kesalehan sosial, dan partisipasi aktif dalam ruang publik.

Dalam kerangka ini, PMII berusaha menjembatani spiritualitas dan praksis, intelektualitas dan kerakyatan, tradisi dan kemajuan. Ia bukan gerakan reaksioner, tetapi gerakan reflektif yang sadar sejarah, kontekstual dalam metode, dan transformatif dalam tujuan. Maka dari itu, keberadaan PMII bukan hanya relevan, tetapi niscaya, dalam menghadapi tantangan zaman dan menyemai harapan masa depan bangsa.

D. PERAN MAHASISWA DALAM MEMBANGUN KESADARAN KRITIS PUBLIK: DARI INTELEKTUAL ORGANIK MENUJU AGEN TRANSFORMASI

Mahasiswa, dalam sejarah sosial-politik Indonesia maupun dunia, tidak pernah sekadar menjadi penonton pasif dari panggung perubahan. Mereka justru tampil sebagai aktor historis—penggerak, penggugat, bahkan pelopor dalam pelbagai fase transformasi masyarakat. Dari gerakan anti-kolonial, reformasi struktural, hingga tuntutan keadilan ekologis dan digital, mahasiswa selalu hadir sebagai

kekuatan moral dan intelektual yang menantang status quo.

Di tengah krisis multidimensi—mulai dari ketimpangan ekonomi, stagnasi demokrasi, hingga disorientasi nilai—mahasiswa memegang peran strategis sebagai agen pembentuk kesadaran kritis publik. Kesadaran ini, dalam istilah Paulo Freire (1970), bukan hanya "kesadaran naif" yang menerima kenyataan apa adanya, tetapi "kesadaran historis-kritis" yang mampu mengenali ketidakadilan struktural dan merumuskan jalan pembebasan.

Peran mahasiswa bukan sekadar menyuarakan aspirasi, tetapi membangun nalar emansipatoris dalam masyarakat—yakni kesadaran kolektif bahwa ketertindasan bukanlah takdir, melainkan hasil dari struktur sosial yang bisa dan harus diubah. Dalam konteks inilah, mahasiswa menjadi medium dialektis antara rakyat dan negara, antara idealisme dan realitas, antara harapan dan perjuangan.

Sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah gerakan mahasiswa Indonesia—dari 1966, 1998, hingga berbagai gelombang protes kontemporer—peran mereka tidak hanya mengoreksi kekuasaan, tetapi juga membangun horizon baru bagi masa depan bangsa. Maka, ketika kesadaran kritis tumbuh di tengah mahasiswa, ia tidak hanya mengubah pandangan individu, tetapi mampu mengguncang fondasi struktur yang timpang.

Mahasiswa sebagai Intelektual Organik

Konsep "intelektual organik" Antonio Gramsci menemukan aktualisasinya dalam gerakan mahasiswa Islam, khususnya dalam tubuh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). PMII tidak hanya membentuk kader yang cakap secara intelektual, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa ilmu pengetahuan harus berpijak pada realitas sosial dan digunakan untuk membela kaum yang

tertindas (*mustadh'afin*). Inilah yang menjadikan kader PMII sebagai calon *intelektual organik*—mereka yang tidak hanya memahami teori, tetapi menanamkan diri dalam denyut nadi masyarakat.

Dalam paradigma ini, kaderisasi PMII bukan sekadar proses penguasaan wacana, tetapi medan pembentukan karakter intelektual yang sadar akan struktur ketimpangan sosial, politik, dan budaya. Diskusi, sekolah kader, advokasi, hingga pengabdian masyarakat bukanlah kegiatan insidental, melainkan upaya sistematis untuk membangun kesadaran organik—kesadaran yang lahir dari interaksi dengan problematika rakyat, bukan dari abstraksi akademik belaka.

Sejalan dengan Gramsci, PMII memandang bahwa dominasi tidak hanya berlangsung secara koersif, tetapi melalui hegemoni: penerimaan masyarakat terhadap tatanan yang tidak adil karena mereka diyakinkan secara kultural dan ideologis. Di sinilah pentingnya intelektual organik—kader PMII hadir sebagai aktor yang membongkar mitos-mitos hegemonik dan mengajukan narasi tandingan: narasi Islam yang membebaskan, narasi kebangsaan yang egaliter, dan narasi keadilan sosial yang membumi.

Kehadiran PMII di tengah kampus dan masyarakat menjadi ruang artikulasi Islam progresif yang menolak formalisme dan konservatisme simbolik. Islam dalam PMII bukanlah ajaran yang menara gading, melainkan nilai yang hidup dalam praksis pembelaan terhadap marjinalisasi. Dengan basis Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja), PMII menanamkan nilai *tawasuth* (moderat), *i'tidal* (adil), *tasamuh* (toleran), dan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai prinsip etik dan praksis sosial.

Dalam lanskap demokrasi yang kian dikendalikan oligarki, serta pendidikan tinggi yang kian dikomodifikasi, mahasiswa kerap dijinakkan menjadi teknokrat yang patuh.

PMII justru menolak normalisasi ini. Di tengah apatisme dan pragmatisme yang menggerogoti dunia kampus, PMII menawarkan jalan lain: jalan intelektual organik yang merakyat, berpikir kritis, dan bertindak transformatif.

Maka menjadi kader PMII bukan sekadar menjadi aktivis organisasi, melainkan menyusun komitmen hidup untuk berpihak kepada yang lemah, menyuarakan kebenaran, dan mengubah kenyataan. Mereka tidak menjadikan ilmu sebagai alat prestise, tetapi sebagai amanat sejarah untuk memperjuangkan keadilan dan peradaban. Mereka bukan hanya "mahasiswa," tetapi *penggerak sejarah*.

- **Membangun Kesadaran Kritis: Antara Refleksi dan Aksi**

Kesadaran kritis (*conscientização*) sebagaimana dirumuskan oleh Paulo Freire menemukan resonansinya dalam praksis gerakan mahasiswa Islam, khususnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Dalam pandangan Freire, pendidikan yang membebaskan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi membangkitkan kesadaran historis untuk memahami realitas sebagai hasil dari konstruksi kekuasaan dan ketimpangan struktural. Konsep ini sejalan dengan semangat Islam sebagai agama pembebas—yang menolak kejumudan, melawan penindasan, dan menyerukan amar ma'ruf nahi munkar sebagai prinsip perubahan sosial.

PMII, sebagai gerakan kaderisasi intelektual yang berakar pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja), mengaktualisasikan kesadaran kritis ini dalam format kaderisasi yang tidak hanya bersifat teoritik, tetapi praksis. Kaderisasi dalam PMII bukan sekadar rutinitas organisasi atau formalitas struktural, melainkan upaya sistematis membentuk *insan cita*—yakni kader yang berpikir kritis, berakhlak sosial, dan berpihak kepada kaum mustadh'afin.

Dalam proses ini, dialektika antara ilmu, iman, dan amal menjadi medan tempaan bagi tumbuhnya kesadaran yang berakar pada realitas serta nilai-nilai transendental.

Sebagaimana Freire mengkritik pendidikan bank-style—yang menjadikan peserta didik sebagai wadah pasif—PMII pun menolak kaderisasi yang dogmatis dan indoktrinatif. Diskusi intelektual, kajian reflektif, hingga praksis sosial di masyarakat menjadi sarana bagi kader untuk mengalami realitas secara langsung dan mengartikulasikan tanggung jawab etisnya. Di sinilah pendidikan menjadi tindakan emansipatoris: bukan sekadar mengenal teks, tetapi membaca konteks; bukan hanya memahami konsep, tetapi menggugat ketimpangan dan ketidakadilan yang nyata.

Kesadaran kritis dalam PMII juga diperkaya oleh nilai-nilai Islam seperti *tawasuth* (moderasi), *i'tidal* (keadilan), *tasamuh* (toleransi), dan *syura* (musyawarah). Nilai-nilai ini bukan hanya prinsip etika, tetapi juga perangkat analisis dan tindakan. Seorang kader PMII yang tercerahkan tidak akan puas dengan pencapaian akademik semata, tetapi terdorong untuk menjadi *intelektual organik*—dalam istilah Antonio Gramsci—yakni kader yang berpihak kepada rakyat, menjadi suara dari mereka yang dibungkam, dan menempatkan ilmu sebagai alat pembebasan.

Dalam realitas sosial Indonesia yang ditandai oleh kemiskinan struktural, oligarki politik, dan komodifikasi pendidikan, keberadaan PMII menjadi penting sebagai ruang artikulasi Islam progresif dan nasionalisme kritis. Kaderisasi PMII tidak hanya membentuk personalitas intelektual, tetapi juga menciptakan gerakan sosial yang hidup: melalui advokasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, gerakan literasi, hingga pembelaan terhadap kelompok yang terpinggirkan.

Dengan demikian, kesadaran kritis ala Freire bukanlah wacana asing bagi PMII, melainkan ruh yang terus dihidupkan dalam praksis kaderisasi dan gerakan sosialnya. Menjadi kader PMII berarti terlibat dalam proyek pembebasan: membebaskan diri dari kebodohan, membebaskan masyarakat dari ketidakadilan, dan membebaskan bangsa dari keterpurukan nilai. Ilmu bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menyulut transformasi. Inilah jalan yang menyatukan *conscientização* Freire dengan semangat *insan kamil* dalam Islam—yakni manusia yang berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab terhadap perubahan.

- **Kampus sebagai Ruang Publik Alternatif**

Dalam perspektif Habermas (1984), ruang publik adalah medan deliberatif tempat warga negara dapat berdialog secara rasional dan setara untuk membentuk opini publik yang berpengaruh terhadap kebijakan. Namun dalam realitas politik kontemporer, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, ruang publik kerap terdistorsi oleh dominasi oligarki, kepentingan pasar, dan hegemoni narasi elite. Maka dari itu, diperlukan *ruang publik alternatif*—tempat warga, khususnya generasi muda, dapat membangun kesadaran kritis dan etika kolektif yang membebaskan.

Dalam kerangka ini, organisasi mahasiswa seperti PMII hadir bukan sekadar sebagai wadah kaderisasi, tetapi sebagai miniatur ruang publik yang hidup dan dinamis. PMII memfasilitasi diskursus kritis melalui forum kaderisasi, kajian pemikiran, aksi sosial, hingga advokasi kebijakan yang berbasis pada nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja). Nilai-nilai seperti *tawasuth* (moderat), *musyawarah* (deliberasi), dan *amar ma'ruf nahi munkar* (etika sosial) merepresentasikan praktik deliberatif dalam

tradisi Islam yang sejalan dengan prinsip *communicative rationality* ala Habermas.

Dengan menghidupkan tradisi musyawarah yang rasional, partisipatif, dan etis, PMII menjembatani antara ruang keislaman dan ruang kebangsaan, antara warisan nilai dan tantangan zaman. Musyawarah dalam Islam tidak hanya sarana pengambilan keputusan, tetapi juga forum pendidikan politik, penyemaian etika, dan pembentukan konsensus berbasis nilai. Di sinilah *ruang publik Islami* mendapat aktualisasinya—yakni ketika diskursus tidak semata akademik, melainkan juga bermoral dan membumi.

Lebih jauh, PMII tidak hanya mengartikulasikan wacana keislaman yang humanis dan kontekstual, tetapi juga memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Ketika demokrasi formal tersandera pada prosedur elektoral, PMII mempraktikkan *demokrasi substantif* melalui keberpihakan pada rakyat kecil, advokasi hak-hak sipil, serta penciptaan ruang-ruang kesadaran kritis di luar parlemen dan media arus utama.

Dengan demikian, PMII dapat dipandang sebagai perwujudan praksis Islam moderat dalam membangun ruang publik etis, yang menyatukan dimensi ilmu, iman, dan amal. Ia tidak sekadar menolak otoritarianisme atau neoliberalisme secara reaktif, tetapi menawarkan alternatif praksis melalui gerakan intelektual, spiritual, dan sosial yang berakar pada nilai keadilan, kebersamaan, dan kemanusiaan. Seperti ditegaskan oleh Kuntowijoyo, Islam sebagai gerakan sosial dan ilmu harus mampu mengartikulasikan gagasan dalam tindakan, dan tindakan dalam etika.

- **Mahasiswa sebagai Agen Transformasi Sosial**

Peran mahasiswa tidak boleh berhenti pada titik kritik. Sebagai agen perubahan, mereka harus mengambil satu

langkah lebih maju: menawarkan solusi, mengorganisir kekuatan rakyat, dan membangun kesadaran yang berdaya ubah. Inilah yang menjadikan gerakan mahasiswa memiliki makna strategis dalam sejarah politik Indonesia.

Dalam perjalanan sejarah, dari perlawanan terhadap dominasi kolonial, penggulingan rezim Orde Lama dan Orde Baru, hingga Reformasi 1998, mahasiswa tampil bukan hanya sebagai suara moral, tetapi sebagai inisiator perubahan struktural. Mahasiswa bukan sekadar "oposan abadi", tetapi penggerak yang mampu menyusun alternatif sistem, baik melalui wacana maupun tindakan langsung.

Gerakan mahasiswa Islam, seperti PMII, membawa ciri khas tersendiri dalam dinamika ini. PMII tidak hanya bergerak atas dasar rasionalitas politik dan ekonomi, tetapi juga didorong oleh etos keislaman yang membebaskan. Dalam tradisi Aswaja yang dianutnya, PMII memperjuangkan nilai-nilai *rahmatan lil 'alamin* melalui praksis sosial: mendampingi komunitas miskin, advokasi keadilan lingkungan, pengarusutamaan hak asasi manusia, hingga penyadaran politik berbasis nilai.

Kader-kader PMII di banyak daerah telah aktif dalam:

- Mengadvokasi isu eksploitasi tambang dan kerusakan lingkungan,
- Menyuarakan keadilan agraria dan kedaulatan pangan,
- Mendorong pendidikan politik warga di akar rumput, serta
- Menjadi penghubung antara ilmu kampus dan persoalan rakyat.
- Dalam konteks ini, PMII tidak hanya menjadi organisasi pelatihan retorika dan diskusi wacana, tetapi wadah kaderisasi sosial—tempat di mana mahasiswa belajar hidup bersama rakyat, menyelami realitas mereka,

dan menyalurkan nilai-nilai Islam dalam kerja-kerja konkret yang berdampak langsung.

Sebagaimana dikatakan Paulo Freire, "Jika tidak ada tindakan, maka refleksi hanyalah omong kosong. Jika tidak ada refleksi, maka tindakan hanyalah aktivisme buta." PMII mencoba menjembatani keduanya: refleksi kritis berbasis Islam dan tindakan sosial berbasis keberpihakan.

Di tengah meningkatnya depolitisasi kampus, komodifikasi pendidikan, dan pragmatisme gerakan, kehadiran mahasiswa sebagai pemantik literasi politik, agen mobilisasi moral, dan pengorganisir masyarakat sipil tetap relevan dan bahkan semakin mendesak.

Dengan demikian, PMII hadir bukan hanya untuk melawan penindasan, tetapi juga untuk menyusun peradaban alternatif—yang adil, manusiawi, dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Mahasiswa tidak sekadar mencatat sejarah, mereka membentuknya.

- **Menjaga Independensi dan Integritas Gerakan**

Di tengah arus komersialisasi pendidikan, mahasiswa semakin diperlakukan sebagai "konsumen" yang membeli gelar, bukan sebagai subjek transformatif yang dibentuk untuk memimpin perubahan. Di sisi lain, kooptasi politik terhadap gerakan mahasiswa—melalui berbagai mekanisme insentif, pengaruh partai, atau jebakan posisi strategis—telah mengaburkan garis antara perjuangan idealis dan kalkulasi pragmatis.

Tantangan terbesar hari ini adalah menjaga kemurnian perjuangan. Mahasiswa dituntut untuk tetap independen secara etis dan politis—berpihak kepada kebenaran, bukan kekuasaan; berjuang untuk rakyat, bukan untuk akomodasi elit.

Gerakan mahasiswa Islam, seperti PMII, harus terus melakukan otokritik dan memperkuat etos kaderisasi yang berbasis nilai. Kaderisasi bukan semata proses strukturalisasi organisasi, tetapi pembentukan watak pejuang—yang berani berpikir berbeda, bersikap merdeka, dan berjuang tanpa pamrih kekuasaan. Dalam konteks ini, nilai *ikhlas*, *tanggung jawab sosial*, dan *spiritualitas perjuangan* menjadi fondasi utama.

Sebagaimana diungkapkan oleh Soe Hok Gie, seorang ikon idealisme mahasiswa Indonesia,

"Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan."

Kutipan ini mengingatkan bahwa keberpihakan mahasiswa pada rakyat kecil seringkali menempatkan mereka dalam posisi tidak populer. Namun keberanian untuk tetap berpihak, bahkan ketika itu tidak menguntungkan secara politik atau material, adalah esensi sejati dari intelektual organik dan kader pejuang.

Dalam konteks PMII, keberanian ini berarti berdiri tegak di tengah hegemoni kekuasaan dan pasar, menawarkan alternatif berbasis Islam yang humanistik dan membebaskan. Ini bukan sekadar aktivisme simbolik, tetapi gerakan panjang membangun kesadaran, memperkuat basis sosial, dan merawat nalar kritis.

Ketika ruang demokrasi dibatasi, kampus diprivatisasi, dan masyarakat dilanda apatisme, mahasiswa harus menjadi pelita. Dan kader PMII—yang digembleng dengan nilai-nilai Aswaja, intelektualitas kritis, dan kepedulian sosial—harus tetap menjadi garda depan perjuangan, meskipun harus berdiri sendirian.

- **Kesadaran Kritis sebagai Tanggung Jawab Moral**

Membangun kesadaran kritis publik bukan semata tugas intelektual, tetapi amanah moral mahasiswa terhadap bangsa. Dalam tradisi Islam, kesadaran ini sejalan dengan semangat *amar ma'ruf nahi munkar*—sebuah panggilan profetik untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan di tengah ketimpangan dan kemungkaran sistemik. Ini bukan sekadar ritual verbal, tetapi sebuah sikap hidup yang menuntut keberanian berpihak dan konsistensi dalam perjuangan.

Mahasiswa, khususnya kader-kader gerakan Islam seperti PMII, bukan hanya pewaris masa depan bangsa, tetapi penjaga nurani publik hari ini. Mereka memiliki tanggung jawab untuk tidak membiarkan kesadaran kolektif bangsa mati ditelan apatisme, pragmatisme, dan komodifikasi pengetahuan. Mereka harus menjadi penjaga api harapan—yang terus menyala meski dikepung kegelapan.

Dari ruang-ruang kelas hingga ke lorong-lorong masyarakat, dari mimbar kampus hingga medan advokasi rakyat, mahasiswa harus hadir sebagai penggugah kesadaran, penggerak perubahan, dan penopang cita-cita keadilan. Dalam peran itulah, idealisme dan spiritualitas Islam bertemu dalam satu tarikan nafas: membebaskan manusia, memanusiakan kehidupan, dan merawat peradaban.

BAB V

PARADIGMA DUA KAKI: MENYATUKAN BASIS INTELEKTUAL DAN BASIS SOSIAL

Dalam sejarah pergerakan, kekuatan sejati lahir dari kemampuan menyatukan dua medan perjuangan: medan pemikiran dan medan kehidupan rakyat. Tanpa basis intelektual, gerakan kehilangan arah; tanpa basis sosial, ia kehilangan pijakan. Di tengah krisis multidimensi—dari degradasi moral hingga ketimpangan struktural—mahasiswa tidak cukup hanya menjadi pemikir di ruang kelas atau aktivis di jalanan. Mereka dituntut hadir sebagai sosok utuh: berpikir tajam, tetapi juga berpihak jelas; menguasai teori, tetapi juga merasakan denyut nadi rakyat.

Paradigma dua kaki bukan sekadar strategi gerakan, melainkan jalan hidup kader yang berusaha meretas jarak antara kampus dan kampung, antara idealisme dan realitas. Di sinilah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memposisikan diri sebagai laboratorium kaderisasi yang menyatukan kekuatan nalar kritis dengan militansi sosial. Bukan hanya mencetak sarjana, tetapi melahirkan pejuang; bukan hanya penghafal teori, tetapi penggerak perubahan. Bab ini akan mengulas bagaimana dua kaki itu ditanamkan, dijalankan, dan diarahkan untuk menjejak sejarah.

A. INTELEKTUALISME ORGANIK: DARI KAMPUS KE LAPANGAN

Di tengah arus deras neoliberalisme pendidikan—yang mereduksi kampus menjadi pabrik ijazah dan menjadikan

proses akademik sekadar ritual administratif—timbul kebutuhan mendesak untuk merehabilitasi intelektualisme sebagai praksis pembebasan. Kampus, yang seharusnya menjadi ruang pembentukan akal merdeka dan etika sosial, kian terperangkap dalam logika pasar dan komodifikasi ilmu. Dalam situasi ini, intelektual tidak bisa lagi sekadar menjadi penghuni menara gading yang memperbincangkan teori-teori besar sambil abai terhadap jerit masyarakat di luar tembok kampus.

Di sinilah relevansi dan urgensi konsep "intelektual organik" yang digagas oleh Antonio Gramsci dalam *Prison Notebooks* (1971) menemukan ruang aktualisasinya. Bagi Gramsci, intelektual sejati bukanlah mereka yang mengasingkan diri dari realitas sosial, tetapi mereka yang lahir dari rahim perjuangan rakyat, menyatu dengan kehidupan kelas tertindas, dan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai senjata untuk melawan hegemoni ideologis yang menindas. Intelektual organik bukan hanya memahami struktur penindasan, tetapi juga terlibat dalam membongkarnya secara praksis, melalui keterlibatan langsung dalam pendidikan rakyat, organisasi komunitas, serta advokasi sosial-politik.

Dalam kerangka ini, ilmu bukanlah hiasan elitis atau konsumsi pribadi, melainkan alat transformatif yang berpihak kepada keadilan. Tanggung jawab intelektual adalah tanggung jawab moral dan politis—menjadi bagian dari proses emansipasi, bukan pelengkap status quo. Maka, kebangkitan intelektualisme organik adalah langkah strategis untuk memulihkan peran kampus dan mahasiswa sebagai pusat perubahan, bukan sekadar pelengkap statistik pembangunan nasional.

Intelektual organik adalah agen transformatif yang menjembatani antara dunia ide dan realitas sosial. Ia tidak berhenti pada kritik teoretis yang terkurung dalam

seminar dan jurnal, tetapi menyelami praksis historis: hadir dalam konflik sosial, menyuarakan ketidakadilan, dan mengorganisir kesadaran rakyat menuju perubahan struktural.

Sebagaimana ditegaskan Antonio Gramsci dalam *Prison Notebooks* (1971), tugas utama intelektual bukan sekadar menganalisis, tetapi membongkar dominasi ideologis yang membius kesadaran masyarakat, dan menggantinya dengan narasi tandingan yang membebaskan. Dominasi bukan hanya soal kekuatan fisik atau ekonomi, tetapi yang lebih halus dan berbahaya: dominasi makna, bahasa, dan wacana yang menjadikan ketimpangan terasa wajar.

Dalam konteks Indonesia, panggilan ini menjadi sangat relevan. Intelektual kampus tidak bisa terus berdiam di zona nyaman akademik—berpuas diri dengan gelar dan publikasi ilmiah—sementara masyarakat menghadapi krisis ekologis, ketimpangan ekonomi, dan kemunduran demokrasi. Mereka harus turun gunung, menyatu dengan denyut nadi rakyat, mendengarkan suara yang diredam, memahami luka yang tak terlihat, dan memperjuangkan keadilan yang lama tertunda. Ilmu yang tidak berpihak pada penderitaan rakyat hanyalah kemewahan yang asing dari realitas.

Dalam paradigma intelektual organik, kampus bukanlah menara gading yang memisahkan nalar dari realitas, melainkan titik tolak bagi gerakan perubahan sosial. Ia adalah ruang awal untuk membentuk daya kritis, bukan ruang akhir dari pencapaian akademik. Sebagaimana dikemukakan oleh Noam Chomsky (1997), universitas idealnya menjadi benteng kebebasan berpikir, tempat di mana ide-ide subversif terhadap ketidakadilan tumbuh subur, dan pusat resistensi terhadap struktur kekuasaan yang menindas.

Namun, ketika universitas mengalami subordinasi terhadap logika pasar dan kekuasaan politik—menjadi pabrik ijazah dan laboratorium kepentingan elite—maka tugas-tugas intelektual justru berpindah keluar dari tembok kampus: ke lapangan, ke komunitas, ke ruang-ruang rakyat. Di situlah intelektualitas sejati diuji—bukan dalam ujian tertulis atau seminar ilmiah, tetapi dalam kemampuan menghadirkan ilmu sebagai cahaya yang menerangi jalan kaum tertindas.

Gerakan mahasiswa, dalam konteks ini, tidak bisa puas menjadi "agen perubahan" dalam retorika, tetapi harus menjadi intelektual yang berjalan dengan dua kaki: satu di ruang akademik yang mempertajam analisis, satu lagi di tengah masyarakat yang menuntut keadilan. Sebab seperti kata Gramsci, pengetahuan yang tercerabut dari perjuangan hanyalah kemewahan; dan seperti kata Chomsky, intelektual yang tunduk pada kekuasaan hanyalah alat legitimasi penindasan.

Paulo Freire memperkuat visi intelektual organik ini melalui konsep conscientização, atau kesadaran kritis, dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970). Bagi Freire, pendidikan sejati bukanlah proses deposisional—di mana guru 'mengisi' murid seperti celengan kosong—tetapi sebuah dialog pembebasan yang setara. Dalam dialog itulah terjadi transformasi ganda: rakyat memperoleh alat baca dunia (reading the world), dan intelektual memperoleh kedalaman pemahaman yang membumi. Kesadaran kritis, karenanya, tidak lahir dari tumpukan teori semata, tetapi dari perjumpaan intens antara refleksi konseptual dan realitas penderitaan yang nyata.

Dalam konteks ini, mahasiswa bukan sekadar pelajar, melainkan fasilitator transformasi sosial. Mereka menjadi penghubung dialektis antara teks dan konteks, antara gagasan dan tindakan, antara kampus dan kehidupan

rakyat. Tugas mereka bukan hanya memahami, tetapi juga membebaskan. Seperti dikatakan Freire, *"Nobody liberates anybody else, and nobody liberates themselves alone. People liberate themselves in fellowship."* Maka, mahasiswa yang membangun kesadaran kritis tidak bekerja dalam isolasi akademik, melainkan hadir bersama rakyat dalam perjuangan kolektif untuk martabat, keadilan, dan pembebasan.

Bagi gerakan mahasiswa Islam seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kesadaran kritis ini bukan hanya sikap intelektual, tetapi juga manifestasi nilai-nilai Islam tentang amar ma'ruf nahi munkar. Dialog kritis dengan masyarakat bukan sekadar strategi sosial, tetapi wujud nyata dari dakwah bil hal—menyampaikan nilai kebenaran melalui keterlibatan, pemberdayaan, dan solidaritas. Dalam proses kaderisasinya, PMII menanamkan semangat ini: bahwa ilmu harus mengakar dalam realitas umat, dan gerakan harus dipandu oleh nilai-nilai keislaman yang membebaskan.

Dengan demikian, kesadaran kritis ala Freire dan intelektualisme organik ala Gramsci menemukan titik temu dalam praksis mahasiswa Islam: menjadikan ilmu sebagai alat pemberdayaan, menjadikan dakwah sebagai jalan keadilan, dan menjadikan kampus sebagai titik tolak untuk membangun masyarakat yang tercerahkan dan merdeka.

Lebih lanjut, Kuntowijoyo (2006) dalam Islam sebagai Ilmu menekankan bahwa intelektual Muslim tidak cukup hanya menjadi "juru dakwah simbolik" yang sekadar mengulang-ulang jargon moralitas tanpa menyentuh akar struktural ketimpangan. Ia harus menjelma menjadi "intelektual profetik"—sebuah sosok yang memadukan nalar ilmiah, spiritualitas yang mendalam, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Dalam kerangka ini, intelektualisme

tidak berhenti pada analisis teks, tetapi juga menyentuh dan mengubah konteks.

Kuntowijoyo memformulasikan apa yang ia sebut sebagai "ilmu sosial profetik", yakni pendekatan keilmuan yang bertolak dari nilai-nilai wahyu (transendensi), berpihak pada keadilan ('amal), dan didasarkan pada realitas sosial (humanisasi). Dengan demikian, intelektualisme Islam bukan sekadar reproduksi pengetahuan, tetapi praksis transformasi sosial. Ia menjembatani wahyu dan dunia, menyambungkan akal dengan realitas umat, dan menjadikan ilmu sebagai kendaraan menuju perbaikan kolektif. Intelektual profetik tidak hanya berpikir benar, tetapi juga berpihak.

Dalam konteks gerakan mahasiswa Islam seperti PMII, gagasan ini menemukan aktualisasinya. PMII tidak berhenti pada upaya pencerdasan spiritual atau pembinaan ideologis di ruang-ruang kaderisasi, tetapi juga turun ke akar rumput—membangun pemberdayaan komunitas, advokasi kebijakan, hingga gerakan sosial berbasis nilai Islam yang inklusif dan transformatif. Inilah wajah intelektualisme organik dalam spirit profetik: ilmu yang merakyat, iman yang mencerahkan, dan gerakan yang membebaskan.

Dengan menyatukan visi Gramsci tentang *intelektual organik*, gagasan Freire tentang *kesadaran kritis*, dan konsep Kuntowijoyo tentang *intelektual profetik*, kita memperoleh paradigma baru: paradigma dua kaki—di mana mahasiswa tidak hanya berpijak pada langit gagasan, tetapi juga menjejak bumi perjuangan.

Dalam konteks gerakan mahasiswa Islam seperti PMII, konsep intelektualisme organik menjelma secara konkret dalam prinsip "paradigma dua kaki"—sebuah orientasi gerakan yang menyeimbangkan antara kekuatan nalar akademik dan komitmen praksis sosial. Di satu sisi, PMII membangun basis keilmuan yang kokoh, menjadikan ruang

kaderisasi sebagai laboratorium intelektual yang kritis, reflektif, dan terbuka terhadap dinamika pemikiran. Di sisi lain, PMII memperkuat basis sosial dengan cara turun ke masyarakat, menyatu dengan realitas, dan mengambil peran dalam pemberdayaan akar rumput.

Kaderisasi dalam PMII tidak dipahami sekadar sebagai proses reproduksi wacana, melainkan sebagai penempaan karakter yang berpihak, tangguh, dan bergerak. Kader tidak hanya dilatih untuk berpikir kritis, tetapi juga dipanggil untuk menyatu dalam denyut kehidupan rakyat, hadir sebagai pembelajar sekaligus pembebas. Dengan demikian, PMII tidak hanya mencetak mahasiswa yang unggul secara akademik, tetapi juga militan dalam perjuangan sosial dan berani berdiri di barisan paling depan untuk keadilan.

Ilmu, dalam paradigma ini, bukan sekadar instrumen mobilitas sosial atau alat akumulasi prestise pribadi. Sebagaimana dikatakan dalam dokumen ideologis PMII (*PMII dalam Konteks Keindonesiaan dan Keislaman*, 2020), ilmu adalah senjata perlawanan, cahaya perubahan, dan jalan menuju pembebasan. Maka dari itu, menjadi kader PMII adalah komitmen ganda: menjadi cerdas dalam pikiran, dan tajam dalam tindakan. Inilah wajah intelektualisme Islam progresif yang tidak hanya berpikir untuk memahami dunia, tetapi juga bergerak untuk mengubahnya.

Menjadi intelektual organik bukan sekadar peran akademik, melainkan sebuah komitmen moral, historis, dan eksistensial. Ia menuntut keberanian untuk berpihak kepada yang tertindas, kesediaan untuk terlibat dalam realitas yang tak nyaman, dan kerendahan hati untuk terus belajar dari pengalaman hidup rakyat. Dalam era dimana ruang publik dirasuki polusi informasi, kooptasi ideologis, dan euforia simbolik, kehadiran intelektual organik adalah sebuah bentuk perlawanan yang bernurani—sebuah lentera yang menyala di tengah gelapnya zaman.

Ia tidak puas hanya menjelaskan dunia dengan teori-teori besar; ia bergerak untuk mengubahnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Antonio Gramsci, tugas intelektual sejati adalah "menyelami kontradiksi zaman, membongkar hegemoni dominan, dan menyusun narasi tandingan dari rahim pengalaman rakyat." Intelektual organik adalah penghubung antara nalar dan nurani, antara kampus dan kampung, antara wacana dan gerakan. Ia hadir bukan sebagai hakim yang menghakimi dari menara gading, melainkan sebagai sahabat sejarah yang turut memikul beban zaman dan menyalakan harapan dari bawah.

Dalam dunia yang serba terfragmentasi dan banal, kehadiran intelektual organik bukan hanya dibutuhkan, tetapi mendesak. Ia menjadi penjaga etika publik dan penggerak kesadaran kritis kolektif—bukan karena posisinya yang tinggi, tetapi karena keberpihakannya yang rendah hati. Sebab, perubahan sejati tidak pernah lahir dari jarak, melainkan dari kedekatan yang penuh cinta dan keberanian.

B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI JALAN DAKWAH SOSIAL

Dalam Islam, dakwah bukan semata seruan lisan atau ritual formalitas spiritual. Ia adalah panggilan transformatif yang menembus batas mimbar, menuju ruang-ruang konkret kehidupan sosial. Dakwah yang sejati tidak berhenti pada nasihat, tetapi menjelma menjadi tindakan pembebasan yang menyentuh akar persoalan umat—kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, dan ketertindasan struktural. Dalam kerangka ini, pemberdayaan masyarakat bukan hanya strategi pembangunan sosial, melainkan inti dari dakwah sosial Islam itu sendiri.

Sebagaimana termaktub dalam misi profetik (lihat QS. Al-A'raf: 157), Nabi Muhammad diutus untuk membebaskan manusia dari beban dan belenggu mereka. Misi ini meniscayakan keberpihakan kepada yang lemah (mustadh'afin), serta keterlibatan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Maka, amar ma'ruf nahi munkar tidak sekadar aksi moral individual, tetapi proyek kolektif pembebasan sosial, yang menggabungkan etika spiritual dan kerja kemanusiaan.

Konsep ini sejalan dengan pandangan Fazlur Rahman (1982), yang menekankan bahwa Islam sebagai sistem etika harus menghasilkan transformasi sosial nyata. Islam, dalam makna substantifnya, tidak cukup hanya dipelajari atau dikhotbahkan—ia harus dihidupkan melalui keberpihakan terhadap problematika nyata umat. Dakwah dalam bentuk pemberdayaan berarti menghadirkan keadilan dalam distribusi pengetahuan, akses ekonomi, pendidikan, serta ruang partisipasi politik dan sosial.

Gerakan mahasiswa Islam, seperti PMII, memiliki peran strategis dalam mewujudkan dakwah sosial ini. Dengan mengusung nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, PMII menjadikan pemberdayaan sebagai ladang dakwah yang menyentuh akar: menyapa masyarakat dengan ilmu, membela mereka dengan keberanian, dan membimbing mereka dengan keteladanan. Inilah bentuk dakwah yang tidak hanya memanggil, tetapi menggugah dan menggerakkan.

Dakwah bukan sekadar ritual verbal di atas mimbar, melainkan panggilan aksi yang menembus batas khutbah. Ia adalah ekspresi iman yang diwujudkan dalam kerja sosial yang menyentuh akar penderitaan umat—kemiskinan yang membelenggu, ketimpangan yang meluas, ketidakadilan struktural yang mengakar, serta keterasingan sosial yang mengikis martabat manusia. Dalam perspektif

ini, pemberdayaan masyarakat tidak sekadar strategi pembangunan, tetapi merupakan wujud nyata dari dakwah kontekstual—yakni dakwah yang membumi pada realitas lokal dan menjawab problem aktual yang dihadapi rakyat.

Dakwah kontekstual tidak hanya mengajak kepada kebaikan, tetapi juga membebaskan dari segala bentuk penindasan, baik material maupun spiritual. Ia menyatukan dimensi tauhid dengan praksis sosial; memadukan seruan ilahiyah dengan keberpihakan terhadap mustadh'afin. Sebagaimana ditegaskan oleh Sayyid Qutb dalam *Ma'alim fi al-Tariq* (2006), tujuan utama dari dakwah bukanlah sekadar memperbanyak pengikut, melainkan menegakkan keadilan ilahiyah ('adl Ilahi) di muka bumi—yakni tatanan sosial yang mencerminkan kemuliaan nilai-nilai Islam: kesetaraan, kebebasan, dan kebenaran.

Qutb menolak dakwah yang hanya berorientasi pada statistik dan simbolisme keagamaan. Bagi beliau, dakwah adalah proyek transformatif, yang harus menantang sistem jahiliyah modern—yakni sistem yang mengeksploitasi, melanggengkan kekuasaan zalim, dan mengalienasi manusia dari fitrah mereka. Dalam semangat ini, mahasiswa muslim dan gerakan Islam progresif seperti PMII memikul tanggung jawab besar: menjadikan dakwah bukan sebagai slogan, tetapi sebagai praksis sosial-politik yang menyalakan harapan dan meneguhkan keberpihakan kepada yang tertindas.

Dalam lanskap pemikiran modern, dakwah sosial menemukan resonansi yang kuat dengan pendekatan liberatif dan partisipatoris dalam pemberdayaan masyarakat. Dakwah tidak lagi dipahami sebagai aktivitas monologis dari "yang tahu" kepada "yang tidak tahu", tetapi sebagai proses dialogis yang menumbuhkan kesadaran, partisipasi, dan transformasi sosial.

Pendekatan ini sangat selaras dengan gagasan Paulo

Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970), di mana ia mengembangkan konsep conscientização—yakni kesadaran kritis sebagai jalan pembebasan. Bagi Freire, pembebasan hanya dapat terjadi ketika manusia mampu membaca realitas sosial secara struktural dan memahami posisi mereka dalam jejaring ketimpangan. Pendidikan—dan dalam konteks kita, dakwah—harus mampu membuka ruang dialog, bukan dogma; mengajak berpikir, bukan sekadar menerima; membangkitkan keberdayaan, bukan ketundukan.

Menariknya, dalam tradisi spiritual Islam, gagasan tentang kesadaran kritis ini tidak asing. Islam mengenal konsep bashirah—mata batin yang tajam, jernih, dan mampu melihat hakikat kebenaran secara mendalam. Basirah bukan hanya pengetahuan rasional, tetapi kesadaran spiritual yang mendorong tindakan berlandaskan hikmah, keadilan, dan keberpihakan. Allah berfirman: *"Katakanlah: Inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas basirah..."* (QS. Yusuf [12]: 108).

Basirah dalam Islam, sebagaimana conscientização dalam Freirean theory, menuntut keterlibatan aktif dalam mengubah kondisi umat yang tertindas. Maka, dakwah sosial yang membebaskan bukan hanya menyampaikan ajaran secara verbal, melainkan menghidupkan kembali kesadaran umat tentang hak, martabat, dan potensi transformasi. Dakwah bukan alat konservasi, melainkan kekuatan emansipatoris.

Dalam konteks ini, gerakan mahasiswa Islam seperti PMII dapat memainkan peran strategis sebagai pelaku dakwah yang berbasiskan pada kesadaran kritis dan spiritualitas profetik. Kaderisasi bukan hanya ruang reproduksi narasi keislaman, tetapi juga laboratorium pembentukan basirah kolektif—yang menyalakan

keberanian untuk membongkar struktur penindasan, sekaligus merancang tatanan sosial yang lebih adil.

Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk dakwah sosial tidak cukup berhenti pada pendekatan karitatif yang bersifat sesaat dan top-down. Dakwah yang sejati bukanlah sekadar memberi, tetapi membangkitkan. Ia bukan hanya tentang mengulurkan tangan, tetapi tentang mengembalikan martabat manusia sebagai subjek perubahan—makhluk yang bermartabat, mandiri, dan memiliki daya untuk mengubah realitas hidupnya sendiri.

Prinsip ini tertanam kuat dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau membangun Madinah sebagai prototipe masyarakat Islam, dakwah yang dijalankan tidak terbatas pada penguatan tauhid secara verbal, tetapi mencakup dimensi yang lebih luas dan holistik. Nabi mendirikan pasar untuk menyaingi dominasi ekonomi Yahudi, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar sebagai rekonsiliasi sosial, serta menata kehidupan politik, hukum, dan pertahanan. Dakwah menjadi sarana rekonstruksi masyarakat dari akar—spiritual, kultural, hingga struktural (Nasution, 2005).

Inilah yang membedakan dakwah sosial profetik dari bentuk dakwah yang elitis dan verbalistik. Sebagaimana dijelaskan oleh Fazlur Rahman (1982), Islam pada dasarnya adalah proyek etis-transformasional yang menuntut keterlibatan dalam mengatasi persoalan ketimpangan dan penindasan. Dakwah bukan hanya tugas individual untuk mengajak kepada kebaikan, tetapi agenda kolektif untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak diposisikan sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai *mitra aktif* dalam proses perubahan. Sejalan dengan pemikiran Freire, ini adalah bentuk *dakwah partisipatoris* yang mengakui potensi lokal dan pengetahuan rakyat sebagai kekuatan

transformatif. Pemberdayaan berarti *membuka ruang bagi masyarakat untuk mengenali, mengkritisi, dan mengatasi ketertindasannya sendiri.*

Bagi gerakan mahasiswa Islam seperti PMII, ini adalah panggilan moral dan ideologis. Kaderisasi tidak hanya harus menghasilkan individu yang religius dan cerdas, tetapi juga visioner dan berpihak kepada masyarakat tertindas. Dakwah dalam konteks PMII berarti menyatu dengan denyut rakyat, membangun ketahanan ekonomi masyarakat, memperkuat komunitas, dan memantik kesadaran kolektif menuju perubahan struktural.

Dalam konteks Indonesia hari ini—di mana ketimpangan ekonomi, eksklusi sosial, dan krisis lingkungan semakin akut—pemberdayaan masyarakat sebagai dakwah sosial menemukan relevansinya yang paling nyata. Dakwah tidak lagi cukup hadir sebagai wacana moral di ruang publik atau mimbar keagamaan semata, tetapi harus bertransformasi menjadi gerakan praksis yang mengakar pada realitas kehidupan rakyat. Ini mencakup berbagai aspek: pengorganisasian komunitas akar rumput, pembangunan pendidikan alternatif yang membebaskan, perjuangan keadilan agraria, penguatan ekonomi lokal, hingga advokasi kebijakan publik yang berpihak pada kaum tertindas.

Pemberdayaan dalam bingkai dakwah adalah bentuk dari *ijtihad sosial*, yaitu keberanian untuk memaknai ajaran Islam secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam tradisi maqashid al-syari'ah, tujuan utama syariat adalah *mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah)*. Maka, dakwah sosial sejati harus menyentuh akar-akar problem sosial struktural—bukan sekadar menyalahkan perilaku masyarakat, tetapi membongkar sistem yang menciptakan ketimpangan dan penderitaan kolektif.

Gerakan mahasiswa Islam, seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), telah membaca konteks ini secara progresif. PMII tidak hanya memposisikan dirinya sebagai penjaga moralitas akademik, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang menjadikan hablum minannas (relasi kemanusiaan) sebagai poros nilai kaderisasinya. Nilai ini bukan sekadar etika individual, tetapi konsepsi politik etis yang mendorong kader untuk berpihak pada masyarakat tertindas dan memperjuangkan keadilan sosial sebagai bagian dari panggilan iman.

Dalam berbagai lini, kita menyaksikan kader PMII terlibat dalam:

- Pengembangan pendidikan rakyat melalui sekolah-sekolah alternatif atau kajian-kajian kritis berbasis komunitas.
- Pemberdayaan ekonomi desa dan UMKM dengan pendekatan koperasi syariah atau pelatihan kewirausahaan.
- Advokasi agraria yang melibatkan pendampingan petani dan nelayan.
- Aksi solidaritas terhadap korban kekerasan struktural—baik berupa penggusuran, perampasan tanah, hingga ketidakadilan hukum.

Semua ini adalah bentuk dari dakwah sosial yang membebaskan *(tahririyah),* bukan hanya mengajak masyarakat untuk "taat secara personal," tetapi untuk bangkit secara kolektif. Seperti ditegaskan oleh Ali Syariati, dakwah tidak hanya berbicara tentang Tuhan di langit, tetapi juga tentang menumbangkan berhala sosial di bumi—ketimpangan, tirani, dan eksploitasi.

Dalam lanskap ini, PMII hadir bukan hanya sebagai organisasi kader, tetapi sebagai madrasah perlawanan,

tempat di mana nilai-nilai Islam, ilmu pengetahuan, dan realitas sosial disatukan dalam semangat transformasi. Inilah jalan dakwah yang menyatukan langit dan bumi: antara tauhid dan keadilan, antara spiritualitas dan solidaritas, antara zikir dan pikir.

Dengan demikian, dakwah dalam pengertian yang mendalam bukanlah sekadar ekspresi kesalehan personal, melainkan sebuah tanggung jawab sosial yang melekat pada misi kenabian. Ia bukan hanya soal menyampaikan kebaikan secara verbal, tetapi sebuah keberpihakan struktural terhadap yang lemah, tertindas, dan terpinggirkan. Dakwah menjadi etika profetik yang mengintegrasikan iman dengan keadilan sosial, sebagaimana dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah yang plural, egaliter, dan bermartabat.

Dalam konteks dunia yang terus dibayang-bayangi oleh krisis multidimensi—dari kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, hingga dekadensi moral—peran da'i sejati tidak lagi cukup hanya dengan retorika yang menyentuh hati, tetapi harus berpijak pada aksi yang menyentuh realitas. Seorang da'i kontemporer adalah ia yang mampu menjembatani nilai-nilai spiritual dengan perjuangan sosial; yang bukan hanya mengajak pada surga eskatologis, tetapi juga memperjuangkan keadilan di bumi ini sebagai refleksi tauhid yang membumi.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: *"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." (HR. Ahmad).* Hadis ini menegaskan bahwa nilai manusia tidak diukur dari banyaknya pengetahuan atau kekuatan wacana, melainkan dari dampaknya terhadap kehidupan sesama. Maka, seorang da'i yang sejati adalah aktivis kemanusiaan, penggerak perubahan, dan penyambung suara rakyat yang dibungkam oleh sistem. Ia hadir bukan hanya sebagai pengingat moral,

tetapi sebagai agen transformatif yang membela nilai-nilai keadilan, keberpihakan, dan pembebasan.

Dalam kerangka ini, gerakan mahasiswa Islam seperti PMII memikul tugas mulia sebagai da'i-da'i sosial, yang tidak hanya memahami teks suci, tetapi juga membaca realitas sosial dengan mata iman dan akal kritis. Dakwah mereka adalah dakwah praksis—mengorganisasi, memberdayakan, dan memerdekakan. Sebab, Islam tidak hanya turun untuk mengatur hubungan ritual manusia dengan Tuhannya, tetapi juga untuk membebaskan manusia dari belenggu kezaliman manusia atas manusia lain.

Inilah esensi dari dakwah sosial yang hidup dan berdenyut bersama penderitaan umat: menggabungkan lisan yang mengajak, hati yang peduli, dan tangan yang bekerja. Sebuah dakwah yang tidak hanya berbunyi, tetapi juga membekas.

Dalam dunia yang dipenuhi ketimpangan struktural dan penderitaan sistemik, di mana kemiskinan bukan sekadar akibat malas bekerja tetapi buah dari ketidakadilan historis dan eksploitasi yang terorganisir, pemberdayaan masyarakat menjadi bentuk dakwah yang paling kontekstual dan bermakna. Di tengah realitas di mana banyak suara dibungkam dan tubuh-tubuh dikorbankan demi akumulasi kapital, dakwah tidak bisa berhenti di langit doa, tetapi harus menjejak bumi perjuangan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan*" (QS. An-Nahl: 90). Ayat ini menegaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar bukan sekadar seruan moralistik, tetapi panggilan untuk menata struktur sosial agar lebih adil dan manusiawi. Dakwah sejati adalah dakwah yang tidak hanya menasihati,

tetapi mengorganisasi. Tidak hanya mengingatkan, tetapi menghidupkan harapan.

Dalam kerangka ini, pemberdayaan masyarakat bukan aktivitas sekunder dari dakwah, melainkan intisari dari risalah Islam yang rahmatan lil 'alamin. Nabi Muhammad SAW sendiri, dalam membangun masyarakat Madinah, mencontohkan bahwa dakwah adalah kerja kolektif yang menyentuh berbagai dimensi kehidupan: ekonomi, budaya, politik, dan spiritual. Beliau mendamaikan yang berseteru, membebaskan budak, memajukan pendidikan, serta memperjuangkan hak kaum marginal. Dakwah beliau adalah praksis sosial yang inklusif dan transformatif.

Maka, dalam realitas kekinian, jalan dakwah sosial adalah jalan yang mengharuskan kita mengangkat yang lemah, menyuarakan yang bisu, dan membela yang tertindas. Ia bukan jalan yang mewah atau nyaman. Ia adalah jalan yang melelahkan—penuh peluh, caci, bahkan mungkin pengorbanan. Tetapi di situlah letak kemuliaannya. Karena siapa pun yang menempuh jalan ini sedang menghidupkan kembali jejak kenabian: menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam memuliakan sesama manusia.

Sebagaimana disampaikan oleh Ali Syariati (1979), "Islam bukan agama penonton, tetapi agama para pejuang." Maka dakwah bukan sekadar menyaksikan penderitaan dari kejauhan, tetapi turut serta dalam memperjuangkan dunia yang lebih adil, manusiawi, dan penuh kasih.

C. MEMBANGUN LITERASI KRITIS DALAM KALANGAN AKAR RUMPUT

Di tengah arus informasi yang kian deras—dan sering kali manipulatif serta sarat kepentingan kekuasaan—literasi kritis bukan lagi pilihan, melainkan keharusan historis, khususnya bagi masyarakat akar rumput. Mereka adalah

kelompok yang selama ini paling rentan terhadap eksploitasi informasi, marginalisasi struktural, dan pembodohan sistemik. Dalam banyak kasus, informasi yang datang bukan untuk mencerdaskan, melainkan untuk mengalihkan, membius, dan menundukkan kesadaran kolektif.

Konsep literasi kritis dalam hal ini tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan teknis membaca dan menulis, tetapi kemampuan untuk membaca realitas secara mendalam, sebagaimana dikembangkan oleh Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970). Membaca dunia, menurut Freire, lebih penting daripada sekadar membaca kata. Literasi kritis adalah proses pembangkitan kesadaran (conscientização)—kesadaran akan posisi diri dalam sistem yang menindas, dan kemampuan untuk menantangnya secara kolektif dan terorganisir.

Dalam tradisi Islam, pendekatan ini sejalan dengan makna basirah—mata batin yang jernih, yang mampu melihat kebenaran di balik kepalsuan, dan menolak tunduk pada narasi hegemonik. Al-Qur'an berkali-kali menyerukan agar manusia "menggunakan akal", "merenung", "mengamati tanda-tanda", dan "tidak mengikuti sesuatu tanpa ilmu". Literasi kritis dalam Islam bukan sekadar pengetahuan, tetapi hikmah yang membebaskan: *"Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?"* (QS. Az-Zumar: 9). Ayat ini tidak hanya bicara tentang ilmu, tetapi tentang kualitas kesadaran dan keberpihakan.

Dalam konteks hari ini, membangun literasi kritis di kalangan akar rumput berarti mengembalikan rakyat sebagai subjek pengetahuan, bukan objek propaganda. Ini meliputi pembongkaran mitos pembangunan yang menyingkirkan rakyat kecil, dekonstruksi atas wacana media yang bias elit, serta penciptaan ruang-ruang alternatif dimana rakyat

dapat belajar, berdiskusi, dan menyusun strategi perubahan sosial secara otonom.

Gerakan mahasiswa Islam seperti PMII memiliki posisi strategis dalam agenda ini. Dengan membawa semangat Islam rahmatan lil 'alamin dan tradisi keilmuan yang hidup, PMII dapat menjadi jembatan antara ilmu dan perjuangan rakyat. Kaderisasi tidak hanya harus menghasilkan aktivis yang fasih dalam teori, tetapi juga yang mampu menjadi fasilitator literasi kritis di tengah masyarakat: dari pesantren ke pasar, dari kelas ke kampung, dari kampus ke komunitas.

Membangun literasi kritis di kalangan akar rumput adalah bagian dari jihad intelektual dan sosial. Ini adalah bentuk dakwah kontemporer: dakwah yang membebaskan dari kebodohan, dari ketakutan, dan dari dominasi simbolik yang merampas daya hidup rakyat. Seperti pesan Ali bin Abi Thalib RA: *"Orang yang tidak mengenal kebenaran adalah budak dari siapa pun yang mengajarinya dusta."*

Dalam pandangan Paulo Freire (1970), literasi sejati bukan sekadar kemampuan membaca kata (*reading the word*) tetapi juga membaca dunia (*reading the world*). Pendidikan, menurut Freire, tidak pernah netral—ia selalu berpihak, entah pada penindasan atau pada pembebasan. Maka, literasi bukanlah sekadar kemampuan teknis untuk mengenali huruf dan kalimat, tetapi kemampuan eksistensial untuk memahami struktur realitas dan menginterogasi ketidakadilan yang dikandungnya.

Konsep *conscientização*—kesadaran kritis—adalah inti dari pedagogi pembebasan. Kesadaran ini tumbuh melalui proses refleksi dan dialog antara rakyat dan intelektual, antara pengalaman konkret dan pengetahuan teoretis. Hanya dengan kesadaran seperti inilah rakyat tidak lagi menjadi objek dari narasi dominan, tetapi menjadi subjek sejarah yang mampu membentuk masa depannya sendiri. Literasi kritis dengan demikian merupakan alat emansipasi:

ia membebaskan dari kebisuan, dari rasa tak berdaya, dan dari mitos-mitos yang meninabobokan.

Dalam konteks Indonesia, di mana pendidikan sering kali masih berwatak *banking education*—yakni pendidikan yang "menabungkan" informasi ke dalam pikiran siswa tanpa melibatkan kesadaran reflektif—gagasan Freire menjadi sangat relevan. Terutama bagi masyarakat akar rumput yang selama ini mengalami keterasingan struktural. Mereka bukan tidak cerdas, tetapi dimiskinkan secara kultural dan dipinggirkan secara sistemik. Literasi kritis hadir untuk memulihkan martabat itu, dengan menjadikan pengetahuan sebagai alat perlawanan dan keberdayaan.

Gerakan mahasiswa Islam seperti PMII memiliki posisi strategis dalam menghidupkan kembali literasi kritis di tengah masyarakat. Dengan memadukan spirit Islam, keilmuan, dan keberpihakan sosial, PMII dapat menjadi lokomotif perubahan yang bergerak dari akar. Kaderisasi PMII idealnya tidak hanya menghasilkan individu yang terdidik secara akademik, tetapi juga tercerahkan secara sosial-politik. Dalam kerangka "paradigma dua kaki"—yang menyeimbangkan basis intelektual dan basis sosial—literasi kritis bukan hanya proyek edukatif, tetapi juga dakwah emansipatoris: dakwah yang membangkitkan kesadaran dan mendorong aksi kolektif.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11: *"Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."* Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu bukan hanya untuk kemuliaan pribadi, tetapi untuk kemuliaan umat.

Masyarakat akar rumput—petani, nelayan, buruh, dan warga miskin di pelosok desa atau kota—sering kali direduksi menjadi sekadar penerima kebijakan, objek statistik, atau sasaran program pembangunan yang dirancang dari atas. Mereka jarang diakui sebagai pemilik

pengetahuan, apalagi sebagai pengambil keputusan dalam proses yang menyangkut hidup mereka sendiri. Dalam paradigma pembangunan yang elitis dan teknokratis, suara rakyat kecil kerap diredam oleh jargon-jargon kebijakan yang tidak membumi.

Literasi kritis hadir untuk mengganggu status quo ini. Ia bukan hanya sekadar kemampuan baca tulis, tetapi proses sadar untuk membaca relasi kuasa, mendekonstruksi narasi dominan, dan merebut kembali hak untuk menentukan arah kehidupan secara mandiri. Seperti ditegaskan oleh Paulo Freire (1970), pembebasan hanya mungkin terjadi jika rakyat sendiri terlibat aktif dalam memahami dan mentransformasikan realitas yang menindas mereka. Pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang menjadikan rakyat sebagai subjek historis—bukan korban sejarah.

Di sinilah relevansi pemikiran Antonio Gramsci menjadi penting. Dalam *Prison Notebooks* (1971), Gramsci menegaskan bahwa setiap orang adalah intelektual, tetapi tidak semua orang memiliki fungsi sebagai intelektual dalam masyarakat. Ia menggagas konsep *intelektual organik*—yakni individu yang lahir dari rahim rakyat, berpikir bersama rakyat, dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Intelektual organik tidak berbicara dari menara gading, melainkan dari gubuk, ladang, pasar, dan ruang komunitas; ia menyatukan refleksi dengan aksi, ilmu dengan praksis.

Dengan pendekatan ini, literasi kritis menjadi sarana rekonstruksi martabat. Masyarakat akar rumput mulai dilihat bukan sebagai massa pasif, tetapi sebagai pemilik pengalaman, nilai, dan kearifan yang otentik. Ketika seorang petani mampu membaca hubungan antara gagal panen dan kebijakan impor pangan, ketika buruh memahami kaitan antara upah murah dan struktur ekonomi global, di situlah literasi kritis bekerja sebagai alat emansipasi.

Gerakan mahasiswa Islam seperti PMII memiliki tanggung jawab historis dan moral untuk menjadi jembatan antara dunia akademik dan realitas rakyat. Mereka dapat membumikan teori ke dalam praktik pemberdayaan, menjadikan diskusi intelektual sebagai alat perubahan, dan membuka ruang-ruang dialog partisipatif bersama masyarakat. Dalam semangat "paradigma dua kaki", PMII harus mendorong terciptanya komunitas belajar rakyat, di mana literasi tidak dimonopoli oleh kampus, tetapi dibagikan, dipertukarkan, dan dipertajam dalam perjumpaan dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks keindonesiaan kontemporer, literasi kritis menjadi instrumen strategis untuk membongkar mitos pembangunan yang bersifat top-down, menguliti bias dalam pemberitaan media yang dikuasai oligarki, serta membangun daya kritis terhadap kebijakan publik yang sering kali abai terhadap aspirasi rakyat. Di tengah demokrasi prosedural yang kerap dikendalikan elite, literasi kritis berfungsi sebagai alat pembebasan, memperkuat kesadaran politik rakyat untuk menolak menjadi sekadar angka dalam kotak suara atau objek dari proyek-proyek populis yang timpang.

Membangun literasi kritis berarti membangun keberdayaan politik, ekonomi, dan kultural masyarakat akar rumput. Ini bukan tugas yang cukup diselesaikan di ruang-ruang seminar kampus atau dalam narasi akademik yang eksklusif, tetapi justru menuntut keterlibatan langsung di lapangan—melalui diskusi warga di pos ronda, kelas komunitas di balai desa, teater rakyat yang menyuarakan problem sosial, hingga media alternatif yang lahir dari dan untuk lokalitas. Di ruang-ruang inilah berlangsung proses kolektif untuk merumuskan ulang cara berpikir, cara berbicara, dan cara bertindak dalam menghadapi realitas yang kompleks.

Lebih dari sekadar kemampuan analitis, literasi kritis adalah praktik keberanian untuk bersuara, menyusun narasi tandingan, dan menantang dominasi simbolik yang membungkam suara rakyat. Ia adalah bentuk pembelajaran dialogis dan transformatif—yang tidak memisahkan teori dan aksi, tidak menjadikan rakyat sebagai "objek didik", tetapi sebagai mitra sejajar dalam perjuangan membebaskan diri dari ketertindasan struktural dan kultural.

Gerakan mahasiswa Islam seperti PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) memegang peran strategis dalam kerja literasi kritis di akar rumput. Sebagai organisasi kader yang mendasarkan geraknya pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, PMII tidak sekadar memproduksi wacana di ruang akademik, tetapi juga mengartikulasikan Islam sebagai kekuatan pembebas dalam ranah praksis sosial. Dalam kerangka "paradigma dua kaki"—yang menjadi fondasi ideologis kaderisasi PMII—satu kaki menjejak dalam bangunan keilmuan yang kokoh, sementara kaki lainnya berpijak dalam denyut kehidupan sosial rakyat. Paradigma ini menegaskan bahwa ilmu tidak boleh terputus dari realitas, dan gerakan sosial harus ditopang oleh nalar kritis yang terdidik.

Dengan demikian, kerja literasi kritis dalam PMII bukan sekadar aktivitas tambahan atau program insidental, melainkan bagian integral dari misi ideologis, politis, dan teologis organisasi. Secara ideologis, kerja literasi menegaskan keberpihakan pada rakyat dan penolakan terhadap struktur hegemonik yang menindas. Secara politis, ia mendorong transformasi relasi kuasa melalui pengorganisasian kesadaran kolektif. Dan secara teologis, kerja literasi adalah bentuk aktualisasi dari ajaran Islam tentang keadilan (*'adl*), amar ma'ruf nahi munkar, serta tanggung jawab profetik untuk menyuarakan kebenaran di tengah kebungkaman.

PMII, dalam konteks ini, tidak hanya mencetak intelektual kampus, tetapi membangun intelektual komunitas—kader-kader yang mampu menjadi fasilitator pembelajaran rakyat, penggerak diskusi kritis di desa-desa, penulis media alternatif, hingga pemantik gerakan sosial berbasis nilai. Literasi kritis bukan hanya alat analisis, tetapi juga senjata kultural dalam perjuangan panjang melawan kebodohan yang sistemik dan pembodohan yang disengaja.

Islam telah meletakkan fondasi kuat bagi kerja-kerja literasi kritis sejak awal turunnya wahyu. Ayat pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah tegas: *"Iqra'!"*—bacalah. Ini bukan sekadar ajakan untuk mengenal huruf, tetapi penegasan bahwa tindakan membaca adalah titik mula kesadaran, peradaban, dan pembebasan. Dalam perspektif Islam, membaca bukan aktivitas pasif atau sekadar konsumsi informasi, melainkan proses aktif yang disertai tadabbur (perenungan maknawi) dan tasyri' (pembacaan sosial dan kontekstual).

Dengan kata lain, *Iqra'* bukan hanya tentang membaca teks, tetapi juga membaca realitas—membaca penderitaan umat, membaca struktur ketidakadilan, dan membaca peluang-peluang perubahan. Dalam konteks masyarakat tertindas, tindakan membaca semacam ini menjadi tindakan revolusioner, karena membuka jalan kesadaran dan perlawanan terhadap hegemoni yang membelenggu. Membaca menjadi ibadah intelektual, sebuah jihad epistemik yang menempatkan ilmu sebagai sarana untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Membangun literasi kritis di kalangan akar rumput bukan semata aktivitas edukatif, melainkan merupakan bagian integral dari dakwah intelektual dan praksis kemanusiaan. Ia adalah bentuk nyata dari keberpihakan moral terhadap mereka yang selama ini terpinggirkan oleh sistem—mereka yang suaranya dibungkam, haknya

dipinggirkan, dan eksistensinya diabaikan. Literasi kritis adalah upaya mengembalikan martabat mereka sebagai subjek sejarah, bukan sekadar objek pembangunan.

Dalam konteks ini, mahasiswa tidak cukup hadir sebagai penjaga teori dan penghafal konsep-konsep elitis. Mereka dituntut untuk meninggalkan menara gading, turun ke bumi, menyentuh tanah kehidupan rakyat, dan menyatu dengan denyut nadi masyarakat. Menjadi fasilitator dialog, bukan pengkhotbah; membangun ruang belajar yang dialogis dan transformatif, bukan sekadar ruang ceramah satu arah. Di titik inilah, peran mahasiswa berubah dari sekadar pencari ijazah menjadi agen emansipasi—penyulut kesadaran dan penggerak perubahan.

Seperti dikatakan oleh bell hooks (1994), *"Education as the practice of freedom is a way of teaching that anyone can learn." Pendidikan, dalam pengertian ini, bukan sekadar proses transmisi pengetahuan, tetapi praktik pembebasan yang membangkitkan kesadaran dan memberdayakan subjek. Dalam semangat itulah, literasi kritis menjelma sebagai jalan strategis untuk mengembalikan martabat dan agensi rakyat—yakni kemampuan mereka untuk berbicara, bertindak, dan menentukan arah sejarah mereka sendiri.**

Literasi kritis bukan hanya alat untuk memahami dunia sebagaimana adanya, tetapi juga untuk membayangkan dunia sebagaimana seharusnya. Ia adalah senjata perlawanan terhadap hegemoni, sekaligus alat konstruksi bagi tatanan sosial yang lebih adil. Dalam konteks masyarakat tertindas, membaca realitas adalah tindakan politis, dan membangun kesadaran adalah bentuk tertinggi dari pendidikan. Maka, kerja literasi bukan sekadar proyek intelektual, tetapi proyek etis dan revolusioner—jalan sunyi namun agung menuju transformasi sosial.

D. PMII SEBAGAI PELOPOR GERAKAN YANG BERBASIS ILMU DAN AKSI

Sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia membuktikan bahwa perubahan sosial yang berarti tidak pernah lahir dari hiruk-pikuk tanpa arah, melainkan dari dialektika yang matang antara kekuatan nalar dan keberanian bertindak. Setiap momentum historis—dari reformasi politik hingga gerakan keadilan sosial—senantiasa ditopang oleh kesadaran kritis yang dibentuk melalui proses intelektual yang jujur dan keberpihakan yang tegas terhadap rakyat.

Dalam kerangka ini, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) hadir bukan sekadar sebagai organisasi kader, tetapi sebagai agen transformasi yang menjembatani dunia ide dan realitas sosial. PMII tidak hanya mencetak mahasiswa yang piawai dalam diskursus, tetapi juga membentuk pribadi yang siap turun ke medan sosial, mendampingi masyarakat, dan mengartikulasikan nilai-nilai keislaman secara kontekstual.

Inilah kekhasan gerakan PMII: perpaduan antara refleksi dan praksis, antara zikir dan fikir, antara keilmuan dan keberpihakan. Sebuah corak pergerakan yang tidak terjebak dalam romantisme wacana, tetapi juga tidak terperosok dalam aktivisme kosong. Sebagaimana kata Paulo Freire, "*Reflection without action is verbalism; action without reflection is activism.*" Maka, kekuatan PMII terletak pada keseimbangan antara keduanya—refleksi yang menghidupkan praksis, dan praksis yang memperkaya refleksi.

PMII bukan semata organisasi kaderisasi, melainkan sebuah laboratorium pemikiran dan medan juang yang membentuk anggotanya sebagai intelektual organik dalam makna yang dikemukakan Antonio Gramsci (1971). Intelektual organik adalah mereka yang tidak menjadikan

ilmu sebagai menara gading, tetapi sebagai alat pembebasan; tidak hanya berpikir demi kepentingan akademis, tetapi juga berpihak pada rakyat, hadir dalam denyut kehidupan masyarakat, dan berperan aktif dalam proses transformasi sosial.

Dalam kerangka itu, PMII menolak formalisme intelektual yang kering dari keberpihakan. Kaderisasi bukan sekadar proses pengisian kepala dengan teori-teori besar, tetapi pembentukan karakter dan kesadaran kolektif untuk bergerak bersama rakyat. Kader PMII didorong untuk menjadi subjek perubahan, bukan hanya perekam diskursus kampus. Ia dituntut untuk menjembatani dunia ide dan dunia realitas—mengubah pengetahuan menjadi keberdayaan, dan keberdayaan menjadi gerakan.

Ilmu, dalam tradisi PMII, tidak disakralkan secara pasif, tetapi dihidupkan secara praksis—menjadi senjata ideologis sekaligus etis untuk membongkar ketidakadilan dan memperjuangkan keadilan. Maka dari itu, menjadi kader PMII berarti siap terjun ke lapangan, menyatu dengan denyut masyarakat, serta setia pada amanat keislaman dan keindonesiaan yang membebaskan.

Paradigma kaderisasi PMII yang dikenal dengan "paradigma dua kaki"—yakni berpijak pada basis intelektual dan basis sosial—merupakan formulasi konseptual yang visioner sekaligus praksis. Ia bukan sekadar jargon organisatoris, melainkan kerangka pembentukan kader yang holistik: yang berpikir jernih sekaligus bertindak nyata. Satu kaki berpijak dalam ruang akademik, tempat akal diasah, wawasan diperluas, dan nilai-nilai keislaman serta keindonesiaan diperdalam secara reflektif. Di sini, kader PMII dipersiapkan menjadi pemikir kritis, pembelajar seumur hidup, serta agen penyemai nilai-nilai etis dan keilmuan.

Sementara itu, kaki yang lain berpijak di tengah

masyarakat—bersentuhan langsung dengan denyut kehidupan rakyat, bergulat dengan problem-problem sosial, serta terlibat aktif dalam pemberdayaan komunitas dan advokasi kebijakan. Inilah realisasi nyata dari ilmu yang membumi; ilmu yang tidak sekadar disampaikan dalam seminar, tetapi dihidupkan dalam aksi kolektif. Pendekatan ini senada dengan gagasan Paulo Freire (1970) dalam *Pedagogy of the Oppressed*, yang menekankan bahwa pendidikan yang membebaskan tidak berhenti pada pemahaman teoritis, melainkan menumbuhkan *conscientização*—kesadaran kritis—yang mendorong lahirnya tindakan transformatif.

Dengan demikian, kaderisasi PMII tidak bertujuan membentuk mahasiswa yang terasing dari realitas sosial, tetapi melahirkan intelektual-intelektual yang berpihak dan bergerak. Ilmu menjadi alat pembacaan dunia, dan gerakan menjadi medium perubahan dunia. Paradigma dua kaki adalah upaya menjahit jurang antara refleksi dan praksis, antara dunia kampus dan dunia rakyat.

Gerakan PMII adalah manifestasi dari integrasi iman, ilmu, dan amal—sebuah sintesis nilai yang menjadi inti dari ajaran Islam yang holistik. Dalam pandangan Islam, ilmu bukanlah entitas netral yang berdiri sendiri, melainkan selalu terkait erat dengan moralitas dan tindakan. Imam Al-Ghazali dengan tegas menyatakan bahwa *ilmu yang tidak diamalkan adalah kehampaan*—ibarat pohon yang tidak berbuah, atau cahaya yang tak menerangi.

Atas dasar itu, dalam tubuh PMII, aktivitas keilmuan seperti diskusi, kajian, dan penelitian tidak boleh berhenti pada ruang-ruang intelektual belaka. Ia harus bertransformasi menjadi komitmen praksis: membela yang lemah, menyuarakan yang tak terdengar, serta mengorganisasi rakyat untuk keluar dari lingkaran ketidakadilan. Ilmu menjadi pijakan untuk bergerak, bukan

sekadar untuk mengafirmasi status sosial atau mendulang prestise akademik.

Dengan demikian, PMII menempatkan kadernya sebagai insan paripurna: yang bertafakur di ruang kajian, tetapi juga bertindak di lorong-lorong kehidupan rakyat. Keberpihakan sosial menjadi keniscayaan, bukan pilihan tambahan. Dalam semangat Islam yang membebaskan dan nilai-nilai kebangsaan yang progresif, PMII hadir tidak hanya sebagai penafsir realitas, tetapi sebagai pelaku sejarah—mendorong demokratisasi sosial-politik dan membela keadilan dalam bingkai nilai-nilai keimanan.

Lebih dari sekadar organisasi kader, PMII telah menjelma menjadi inkubator kepemimpinan transformatif. Ia bukan hanya mencetak aktivis kampus, tetapi melahirkan generasi pemimpin yang membawa idealisme dan komitmen perubahan ke berbagai lini kehidupan. Banyak tokoh nasional yang pernah digembleng dalam kawah candradimuka PMII—dan ketika mereka menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan, parlemen, maupun lembaga-lembaga publik, semangat kritis dan konstruktif itu tetap mereka bawa sebagai warisan gerakan.

Namun, yang tak kalah penting bahkan mungkin lebih bermakna adalah keberadaan kader-kader yang memilih untuk tetap bersama rakyat. Mereka tidak tergiur oleh panggung kekuasaan, tetapi setia menempuh jalan panjang perubahan dari bawah—membangun komunitas, memberdayakan desa, mencerdaskan masyarakat miskin, dan menjadi bagian dari denyut nadi rakyat kecil. Di tangan merekalah, semangat PMII hidup dalam bentuk yang paling nyata: *menyatu dengan rakyat, bergerak bersama rakyat, dan berjuang untuk rakyat*.

Dalam lanskap krisis multidimensi hari ini—mulai dari dominasi neoliberalisme, kerusakan ekologis, intoleransi yang menguat, hingga ketimpangan sosial yang kian

menganga—gerakan yang berbasis ilmu dan aksi menjadi kebutuhan mendesak. Sebuah gerakan yang hanya mampu berpikir tanpa bertindak akan tumpul di hadapan realitas, sementara gerakan yang bertindak tanpa dasar pemikiran yang matang akan kehilangan arah dan mudah terseret arus.

PMII hadir untuk menjaga keseimbangan itu. Melalui paradigma dua kaki yang menjadi ciri khas kaderisasinya, PMII menumbuhkan kader-kader yang tidak hanya berpikir secara kritis dan mendalam, tetapi juga berani mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan konkret di tengah masyarakat. Inilah sintesis antara refleksi dan praksis, antara idealisme dan kerja nyata—sebuah jalan perjuangan yang tak hanya membangun wacana, tetapi juga mengubah keadaan.

Sebagaimana dikatakan oleh Ali Syariati, *"Setiap masyarakat yang ingin berubah harus memiliki dua jenis manusia: sang pemikir dan sang pelaksana. Tapi jika dua fungsi itu terpisah, maka perubahan akan terhambat."* Dalam semangat itulah, PMII hadir untuk melebur dua fungsi itu dalam satu tubuh kader—berpikir tajam sebagai cendekiawan, dan bertindak sigap sebagai aktivis. Bagi PMII, intelektualisme tidak cukup berhenti di ruang seminar; ia harus berpijak pada kenyataan, bergulat dengan persoalan rakyat, dan melahirkan aksi yang berdampak. Inilah watak kader PMII: penggerak yang reflektif dan pemikir yang transformatif.

Dengan demikian, PMII bukan sekadar organisasi mahasiswa Islam, melainkan sebuah gerakan kultural, politik, dan intelektual yang menyinergikan *zikir*, *pikir*, dan *amal* dalam satu tarikan napas perjuangan. Di dalam tubuhnya terkandung semangat *pembebasan* dari ketertindasan, *pencerahan* dari kebodohan, dan *pemberdayaan* dari ketergantungan. Di tengah gelombang apatisme dan kooptasi politik terhadap gerakan mahasiswa,

PMII tetap teguh menjadi pelopor gerakan yang menjadikan ilmu sebagai landasan, nilai sebagai kompas, dan aksi sebagai jalan perubahan.

PMII

BAB VI

STRATEGI GERAKAN: REFLEKSI, AKSI, DAN TRANSFORMASI

Setiap gerakan besar lahir bukan hanya dari keberanian bertindak, tetapi dari kejernihan berpikir dan ketepatan strategi. Dalam dinamika sosial-politik yang kompleks dan terus berubah, keberhasilan gerakan tidak cukup ditentukan oleh semangat, tetapi juga oleh kemampuan membaca konteks, merumuskan arah, dan melakukan intervensi yang bermakna. PMII memahami bahwa gerakan yang efektif harus berpijak pada tiga poros utama: refleksi yang tajam, aksi yang konkret, dan transformasi yang berkelanjutan. Refleksi membentuk kesadaran kritis; aksi menerjemahkannya ke dalam gerakan nyata; sementara transformasi memastikan perubahan itu berdampak dan bertahan. Bab ini mengajak pembaca menelusuri strategi-strategi yang dikembangkan PMII dalam menjawab tantangan zaman, serta bagaimana refleksi intelektual dan aksi sosial digerakkan secara simultan untuk membangun perubahan yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.

A. PENDEKATAN ADVOKASI, BUDAYA, DAN PENDIDIKAN ALTERNATIF

Dalam tradisi gerakan sosial yang berpihak pada kaum tertindas, strategi bukanlah sekadar taktik jangka pendek atau manuver reaktif terhadap kekuasaan. Ia adalah arsitektur perubahan sosial yang holistik dan visioner—

sebuah rancangan yang menautkan dimensi struktural, kultural, dan spiritual dalam satu tarikan napas perjuangan. Dalam kerangka ini, pendekatan advokasi, budaya, dan pendidikan alternatif tidak berdiri sendiri, melainkan hadir sebagai tiga pilar yang saling menopang dalam upaya membangun kesadaran kritis, membangkitkan daya juang, dan menggugat kemapanan yang timpang secara sistemik.

Advokasi memberikan keberanian untuk berbicara di hadapan kekuasaan dan memperjuangkan keadilan dalam ranah kebijakan; budaya menggugat dominasi makna dan membuka ruang bagi imajinasi pembebasan; sedangkan pendidikan alternatif menyalakan obor kesadaran dan menghidupkan praksis yang transformatif. Ketiganya membentuk suatu ekosistem gerakan yang utuh, bukan hanya menyentuh aspek legal-formal, tetapi juga menelisik ke dalam struktur makna dan kesadaran kolektif masyarakat. Dalam sintesis inilah lahir gerakan yang bukan hanya melawan, tetapi merancang masa depan yang adil, merdeka, dan bermartabat.

1) Pendekatan Advokasi: Membuka Akses dan Mendorong Keadilan Struktural

Advokasi merupakan strategi transformatif yang bertujuan untuk mengintervensi kebijakan dan struktur kekuasaan, agar berpihak kepada kelompok rentan, termarjinalkan, dan tertindas. Dalam konteks gerakan sosial progresif, advokasi tidak dapat direduksi sekadar menjadi aktivitas lobi atau negosiasi elitis di ruang tertutup. Ia adalah tindakan politik yang berakar pada etika keadilan dan keberpihakan moral, bertujuan untuk merombak ketimpangan struktural yang telah mengakar dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik.

Sebagaimana dikemukakan oleh John Gaventa (1980)

dalam teorinya tentang "power and participation", advokasi yang efektif harus mampu menembus berbagai bentuk kekuasaan—baik yang terlihat (visible power), tersembunyi (hidden power), maupun yang tidak disadari (invisible power). Oleh karena itu, advokasi dalam gerakan rakyat mencakup tekanan moral terhadap penguasa, mobilisasi opini publik sebagai kekuatan kolektif, serta penggunaan instrumen hukum dan konstitusi sebagai alat perjuangan hak-hak sipil dan sosial. Dalam makna inilah, advokasi menjadi sarana emansipasi, bukan hanya ekspresi keluhan, melainkan alat perubahan yang digerakkan oleh kesadaran kritis dan solidaritas sosial.

Sebagaimana dijelaskan oleh Lisa VeneKlasen dan Valerie Miller dalam karya penting mereka *A New Weave of Power, People and Politics* (2002), advokasi yang efektif tidak hanya berhenti pada ranah permukaan kebijakan, tetapi harus mampu menembus tiga lapisan kekuasaan: kekuasaan yang terlihat (*visible power*), kekuasaan yang tersembunyi (*hidden power*), dan kekuasaan yang tertanam secara kultural dalam kesadaran sosial (*invisible power*). Ketiga dimensi ini menggambarkan kompleksitas medan perjuangan yang tidak hanya berkutat pada siapa yang membuat keputusan, tetapi juga siapa yang menentukan agenda, serta nilai-nilai apa yang dianggap wajar dan tak terbantahkan dalam masyarakat.

Dalam kerangka ini, gerakan advokasi menjadi lebih dari sekadar tuntutan administratif atau revisi regulasi—ia merupakan upaya untuk menggeser pusat-pusat makna dan membongkar hegemoni yang membungkam. Perubahan yang dituju bukan hanya bersifat prosedural, melainkan transformatif, dengan menantang relasi kuasa yang timpang, membuka ruang partisipasi yang setara, dan membangun kesadaran baru tentang hak, keadilan, dan agensi rakyat. Dengan demikian, advokasi sejati adalah tindakan politik

yang berakar pada etika pembebasan, menggabungkan tekanan moral, gerakan massa, dan kerja kultural yang mendalam untuk menciptakan perubahan struktural yang berkeadilan.

Dalam konteks Indonesia yang ditandai oleh ketimpangan struktural dan keragaman sosial yang kompleks, pendekatan advokasi telah menjadi instrumen penting dalam perjuangan masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa untuk menegakkan keadilan substantif. Advokasi digunakan untuk memperjuangkan hak-hak dasar—mulai dari hak atas tanah, pendidikan, lingkungan hidup, hingga kebebasan beragama dan berkeyakinan—yang sering kali diabaikan atau dirampas oleh kekuasaan yang timpang dan oligarkis. Dalam lanskap ini, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tampil sebagai aktor strategis yang menggabungkan nilai-nilai Islam progresif dengan praksis sosial-politik, menjadikan advokasi bukan hanya sebagai alat politik, tetapi juga sebagai manifestasi etika keimanan.

Berakar pada prinsip hablum minannas—hubungan yang adil dan manusiawi antar sesama—PMII memaknai advokasi sebagai tanggung jawab moral dan spiritual untuk berpihak pada yang lemah, termasuk buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok minoritas. Di tengah arus komersialisasi hukum dan depolitisasi gerakan mahasiswa, PMII mempertahankan garis advokasi yang berorientasi pada pembebasan struktural, bukan sekadar mediasi pragmatis. Ini sejalan dengan semangat Islam sebagai agama pembebasan—yang memihak pada mustadh'afin (kaum tertindas)—dan memperjuangkan keadilan dalam seluruh dimensi kehidupan: sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis.

2) Pendekatan Budaya: Merebut Makna, Mengubah Kesadaran

Budaya bukan sekadar ekspresi artistik atau warisan estetika, melainkan medan pertarungan makna yang sarat dengan kekuasaan simbolik. Dalam perspektif Antonio Gramsci (1971), budaya adalah arena hegemoni, tempat di mana ideologi dominan tidak hanya diberlakukan secara koersif, tetapi juga diinternalisasi secara sukarela melalui bahasa, simbol, narasi sejarah, dan institusi sosial. Hegemoni ini bekerja halus namun efektif, menjadikan ketimpangan sebagai sesuatu yang tampak "alamiah" dan tak terhindarkan. Dalam konteks ini, kebudayaan menjadi sarana pembentukan kesadaran—baik yang membebaskan maupun yang menindas.

Oleh karena itu, merebut kembali ruang budaya bukan sekadar tindakan estetis, tetapi strategi politis yang krusial dalam membongkar mitos-mitos dominasi dan membuka jalan bagi narasi alternatif. Melalui seni rakyat, teater komunitas, ritual lokal, dan sastra subaltern, gerakan sosial dapat menyuarakan kebenaran dari bawah, mengembalikan makna kepada yang terpinggirkan, dan menciptakan ruang kontestasi terhadap narasi arus utama. Budaya, dalam hal ini, menjadi alat perlawanan simbolik sekaligus medium emansipasi kolektif, yang mampu menjembatani akal, emosi, dan imajinasi dalam proses transformasi sosial.

Pendekatan budaya dalam gerakan sosial tidak sekadar menampilkan seni sebagai hiasan perjuangan, tetapi menjadikannya sebagai instrumen kesadaran dan pembebasan. Seni rakyat—dalam bentuk lagu, puisi, teater, mural, dan cerita lokal—diangkat kembali bukan sekadar untuk menghibur, tetapi untuk mengartikulasikan penderitaan, harapan, dan perlawanan dari akar rumput. Ia menjadi media di mana yang bisu bisa bersuara, dan yang tak terlihat menjadi hadir secara simbolik dalam ruang publik.

Sebagaimana ditekankan oleh Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970), ekspresi budaya adalah bagian dari proses dialogis dalam membangun kesadaran kritis. Dalam semangat yang sama, Augusto Boal mengembangkan *Theatre of the Oppressed* (1979) sebagai metode teater partisipatif, di mana rakyat bukan sekadar penonton, tetapi menjadi subjek yang mencipta dan merefleksi dunia sosial mereka. Melalui peran dan improvisasi, masyarakat diajak memerankan konflik nyata dan menemukan kemungkinan transformatif secara kolektif.

Gerakan sosial yang menghidupkan pendekatan budaya berarti membuka ruang kultural yang membebaskan, melampaui batasan wacana elitis dan akademik. Ini adalah ruang di mana pengalaman hidup rakyat menjadi basis pengetahuan, dan kreativitas menjadi kekuatan politik. Di sanalah narasi tandingan terhadap dominasi ideologis dibangun—narasi yang berpihak pada kehidupan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

PMII dan gerakan mahasiswa progresif lainnya telah lama menjadikan budaya sebagai medium perlawanan dan kesadaran, bukan sekadar ornamen dalam aksi-aksi sosial. Diskusi sastra, pembacaan puisi, musik perjuangan, mural jalanan, hingga teater rakyat menjadi bentuk-bentuk ekspresi kultural yang hidup dan reflektif. Melalui seni, kritik sosial tidak lagi hanya berwujud argumentasi akademik, tetapi menjelma menjadi pengalaman estetis yang menggugah hati dan pikiran publik secara langsung.

Budaya dalam konteks ini bukan sekadar ekspresi, melainkan instrumen dakwah sosial—sebuah cara menyampaikan nilai dan kritik dengan kelembutan makna dan kekuatan simbol. Dalam Islam sendiri, dakwah tidak hanya dilakukan melalui mimbar dan ceramah, tetapi juga melalui kebudayaan, sebagaimana diteladankan oleh

para wali dan ulama nusantara dalam sejarah Islamisasi Indonesia. Mereka menggunakan kesenian lokal—wayang, gamelan, suluk, hingga sastra lisan—untuk menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan masyarakat.

PMII melanjutkan warisan ini dalam bentuk modern. Dengan mural yang menyuarakan keadilan, musik yang menyatukan semangat perlawanan, dan teater jalanan yang merepresentasikan ketimpangan sosial, budaya dijadikan sarana komunikasi yang menembus batas-batas kelas, ideologi, dan literasi. Dalam konteks ini, pendekatan budaya adalah bentuk perjuangan simbolik yang menjembatani intelektualitas dengan emosi kolektif rakyat, memperkuat ikatan batin antara gerakan mahasiswa dan basis masyarakat.

3) Pendidikan Alternatif: Menumbuhkan Kesadaran dan Subjek Kritis

Pendidikan alternatif adalah bentuk perlawanan epistemik terhadap sistem pendidikan dominan yang kerap terjebak dalam logika pasar dan birokrasi negara. Ia tidak diarahkan untuk mencetak buruh intelektual yang patuh, melainkan untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan struktural—baik ekonomi, politik, maupun kultural. Pendidikan alternatif menolak dikotomi antara pengajar dan yang diajar, serta menolak model pendidikan "bank style" di mana pengetahuan ditransfer secara satu arah dan murid diposisikan sebagai wadah pasif.

Sebagaimana ditegaskan oleh Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970), pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang "problem-posing" dan dialogis, yaitu pendidikan yang mengajak peserta didik untuk bertanya, merenung, dan menafsirkan realitas sosialnya secara kritis. Proses ini melahirkan *conscientização*—kesadaran kritis yang memungkinkan

individu tidak hanya memahami posisinya dalam struktur ketidakadilan, tetapi juga mengorganisasikan perubahan menuju tatanan yang lebih adil.

Dalam kerangka ini, pendidikan alternatif lebih dari sekadar metode, ia adalah praksis: gabungan antara refleksi dan aksi. Ia tidak eksklusif di ruang kelas, tetapi hadir dalam diskusi warga, kelas komunitas, forum akar rumput, hingga ruang-ruang seni dan ekspresi kultural. Pendidikan semacam ini memberikan ruang bagi narasi-narasi pinggiran untuk tampil, bagi pengalaman hidup rakyat untuk diakui sebagai sumber pengetahuan, dan bagi setiap orang untuk menjadi subjek aktif dalam perubahan sosial.

Dengan demikian, pendidikan alternatif adalah bagian integral dari strategi transformasi sosial yang membumi dan membebaskan. Ia menjadi senjata intelektual kaum tertindas untuk melawan hegemoni ideologi dominan, dan sarana membangun solidaritas lintas kelas dan generasi. Pendidikan, dalam bentuk ini, bukan sekadar pencapaian akademik, tetapi komitmen etis-politik untuk membela kehidupan.

Berbeda dengan pendidikan formal yang cenderung hierarkis, seragam, dan dogmatis, pendidikan alternatif justru membuka ruang bagi peserta didik untuk menjadi subjek aktif dalam proses belajar. Ia tidak memperlakukan peserta didik sebagai objek yang harus diisi, tetapi sebagai manusia merdeka yang membawa pengetahuan, pengalaman, dan kesadaran hidupnya sendiri ke dalam proses pendidikan. Dalam pendekatan ini, belajar bukanlah proses akumulasi informasi, melainkan proses transformasi diri dan lingkungan.

Model pendidikan alternatif banyak berkembang di komunitas akar rumput sebagai bentuk resistensi terhadap sistem pendidikan dominan yang eksklusif dan elitis. Melalui sekolah rakyat, kelas komunitas, diskusi

terbuka, dan forum warga, masyarakat memproduksi ruang belajar yang demokratis dan relevan dengan realitas sosial mereka. Proses ini bersifat partisipatoris dan kontekstual—menghargai pengalaman hidup sebagai sumber pengetahuan dan mengutamakan dialog sebagai metode utama.

Di sinilah letak kekuatannya: pendidikan alternatif tidak sekadar menawarkan metode baru, tetapi menawarkan cara pandang baru terhadap makna belajar itu sendiri. Ia berpijak pada keyakinan bahwa setiap manusia mampu berpikir kritis dan berkontribusi dalam perubahan sosial, sejauh ia diberi ruang untuk menyuarakan diri dan terlibat secara kolektif.

PMII, melalui ruang-ruang kaderisasi dan pendampingan masyarakat, telah mengembangkan bentuk-bentuk pendidikan alternatif yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga praksis—menggabungkan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan dalam satu tarikan nafas perjuangan. Pendidikan dalam PMII tidak berhenti pada penguasaan wacana teologis atau ideologis, tetapi terus bergerak ke arah penyadaran struktural dan transformasi sosial.

Dalam kelas-kelas kaderisasi, diskusi-diskusi warga, dan sekolah-sekolah komunitas yang diinisiasi kader di berbagai daerah, PMII menyentuh isu-isu krusial zaman seperti ketimpangan agraria, krisis ekologi, digitalisasi dan kapitalisme data, serta pelanggaran hak asasi manusia. Di ruang-ruang inilah, pendidikan menjadi alat pembebasan sebagaimana dimaksud Paulo Freire (1970)—yakni proses dialogis yang membangkitkan kesadaran kritis (conscientização), bukan proses indoktrinasi yang meninabobokan.

Apa yang dibangun PMII merupakan bentuk konkret pendidikan alternatif berbasis gerakan: sebuah praksis yang menolak pendidikan elitis dan eksklusif, lalu menggantinya

dengan pendidikan yang bersumber dari realitas rakyat, dijalankan bersama rakyat, dan diarahkan untuk perubahan yang berpihak pada rakyat. Di sinilah letak peran strategis PMII sebagai gerakan kaderisasi intelektual yang membumi, bukan hanya menghasilkan wacana, tetapi juga membentuk praksis yang berdampak.

4) Integrasi Tiga Pendekatan: Membangun Gerakan yang Utuh

Ketiga pendekatan ini—advokasi, budaya, dan pendidikan alternatif—bukanlah strategi yang berjalan terpisah, melainkan simpul-simpul integral dari satu gerakan yang utuh. Dalam lanskap perjuangan sosial, advokasi memperjuangkan hak dan keadilan di ranah struktural; pendekatan budaya merebut kembali ruang makna dari dominasi ideologis; sementara pendidikan alternatif membangun kesadaran kritis sebagai fondasi perubahan jangka panjang. Ketiganya membentuk suatu *praxis* yang transformatif—di mana teori tidak mengambang dalam abstraksi, dan aksi tidak terjebak dalam agitasi semata, tetapi menyatu dalam dialektika pembebasan yang hidup dan kontekstual.

Sebagaimana ditegaskan oleh bell hooks (1994) dalam Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom, pendidikan sejati adalah tindakan pembebasan, bukan penjinakan. Ia adalah ruang subversif di mana subjek yang tertindas menemukan suaranya, memulihkan agensinya, dan menyusun ulang narasi hidupnya dalam relasi yang egaliter. Dalam semangat yang sama, gerakan sosial tidak boleh direduksi menjadi hanya instrumen politik atau kanal ekspresi, tetapi harus menjadi arena di mana rakyat *belajar, berjuang, dan tumbuh bersama sebagai komunitas yang merdeka.*

Gerakan seperti ini bukan hanya menargetkan perubahan kebijakan, tetapi perubahan kesadaran kolektif—yakni penataan ulang relasi kuasa, peneguhan nilai kemanusiaan, dan penciptaan dunia yang lebih adil. Dengan menggabungkan strategi advokasi yang kritis, pendekatan budaya yang reflektif, dan pendidikan alternatif yang dialogis, PMII dan gerakan sejenisnya berpotensi menciptakan transformasi sosial yang tidak hanya sistemik, tetapi juga bermakna dan membebaskan dari dalam.

B. AKSI SIMBOLIK DAN KERJA BASIS: DARI AKSI MASSA KE AKSI SOSIAL

Gerakan mahasiswa selama ini kerap diasosiasikan dengan aksi massa yang eksplosif—demonstrasi di jalanan, orasi di depan gedung parlemen, hingga penguasaan ruang publik sebagai bentuk ekspresi perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap menindas. Aksi semacam ini memiliki kekuatan simbolik yang besar: ia menandai bahwa kesadaran masih hidup, bahwa suara nurani belum padam, dan bahwa mahasiswa tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam logika *public sphere* ala Habermas (1989), demonstrasi menjadi artikulasi politik yang membuka ruang deliberasi di tengah struktur kekuasaan yang tertutup.

Namun, perjuangan sosial yang sejati tidak bisa berhenti pada simbol, sekeras apapun gaungnya. Aksi simbolik mesti ditopang oleh *kerja basis* yang konkret, sabar, dan transformatif. Ini adalah ranah yang sering kali luput dalam gemuruh protes: membangun kesadaran rakyat dari bawah, mengorganisir komunitas, mengadvokasi hak-hak dasar, serta menciptakan ruang-ruang pemberdayaan yang berkelanjutan. Sebagaimana dikatakan oleh Amartya Sen (1999), pembangunan bukan sekadar soal pertumbuhan ekonomi, tetapi perluasan kapabilitas manusia—dan inilah yang dicapai melalui kerja basis yang tekun.

Dalam konteks ini, gerakan mahasiswa ditantang untuk melampaui logika momentum dan menuju kerja gerakan jangka panjang. Demonstrasi di jalan penting, tetapi mengajar di kampung juga penting. Orasi di depan parlemen menggugah, tetapi mendengarkan keluh kesah petani atau buruh jauh lebih memanusiakan. Keduanya harus berjalan beriringan: simbol dan substansi, teriak dan dengar, gegap gempita dan kesunyian kerja akar rumput. Sebab transformasi sosial yang sejati bukan hanya tentang menggulingkan, tetapi juga tentang membangun kembali secara sabar dan kolektif.

Aksi Simbolik: Bahasa Tubuh Gerakan

Aksi simbolik merupakan bentuk komunikasi politik yang melampaui batasan narasi verbal; ia menggugah imajinasi publik melalui gestur, artefak, ruang, dan tubuh yang hadir secara politis dalam tatanan sosial. Dalam konteks gerakan sosial, aksi simbolik berfungsi sebagai *interupsi kesadaran*—mengganggu rutinitas dominan, memecah kenyamanan status quo, dan membuka ruang tafsir baru terhadap realitas yang sering kali dinaturalisasi oleh kekuasaan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Pierre Bourdieu dalam *Language and Symbolic Power* (1991), simbol bukan sekadar lambang netral, tetapi merupakan struktur makna yang mencerminkan dan mereproduksi relasi kekuasaan. Karena itu, simbol dapat pula menjadi alat untuk melawan dominasi, ketika ditransformasikan dari instrumen hegemonik menjadi medium resistensi. Dalam kerangka ini, aksi simbolik dapat dimaknai sebagai *tindakan semiotik* yang secara sadar menggeser makna simbolik dari wacana penguasa kepada suara yang terpinggirkan.

Bentuk-bentuk seperti teatrikal jalanan, pemutaran

film dokumenter, orasi puisi, mural, dan teatrikalisasi penderitaan rakyat di ruang-ruang publik bukan sekadar seni atau ekspresi, melainkan teks politik yang hidup—ia mengundang audiens untuk merasakan, memahami, bahkan turut ambil bagian dalam pergulatan yang disuarakan. Aksi simbolik bekerja dalam domain afektif dan kognitif sekaligus: ia menyentuh emosi, tetapi juga memicu pertanyaan kritis.

Dalam masyarakat yang dibanjiri oleh citra dan informasi, aksi simbolik berperan penting sebagai strategi *de-normalisasi*, yakni membongkar kepalsuan tatanan yang telah dianggap wajar. Ia tidak menawarkan solusi instan, tetapi mengaktifkan dimensi *kesadaran kritis* (*conscientização*) sebagaimana dikemukakan oleh Paulo Freire (1970)—kesadaran bahwa realitas sosial dapat dan harus diubah. Dengan kata lain, aksi simbolik adalah prolog dari transformasi; bukan akhir dari perjuangan, melainkan pemantik bagi tindakan yang lebih terorganisir dan substansial.

Namun, aksi simbolik saja tidak pernah cukup. Ia bisa menggugah kesadaran, tetapi tidak serta-merta mengubah struktur. Dalam banyak kasus, aksi simbolik justru mengalami reduksi performatif—menjadi sekadar ritual tahunan yang kehilangan daya dobrak, terjebak dalam repetisi simbolis tanpa tindak lanjut yang substantif. Ketika aksi hanya menjadi tontonan atau peristiwa yang berputar di lingkar aktivisme seremonial, maka potensinya untuk mentransformasikan realitas pun tergerus oleh waktu dan kelelahan kolektif.

Oleh karena itu, aksi simbolik mesti dipahami bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai gerbang—*threshold* menuju kerja basis yang lebih membumi, konsisten, dan menyentuh akar persoalan masyarakat. Di sinilah pentingnya integrasi antara representasi simbolik dan

intervensi struktural. Gerakan yang hanya sibuk di ruang simbol akan kehabisan napas, sementara gerakan yang tenggelam di akar tanpa membangun imajinasi publik bisa kehilangan momentum.

Sebagaimana dikemukakan oleh Nancy Fraser (1995), perjuangan keadilan sosial mesti mencakup dua dimensi: *redistribusi ekonomi* dan *rekognisi kultural*. Aksi simbolik melayani dimensi rekognisi—membuka ruang narasi alternatif dan identitas yang tertindas. Tetapi tanpa redistribusi dan transformasi di tingkat material, maka keadilan hanya akan menjadi retorika kosong. Maka, kerja basis—melalui pendampingan komunitas, pengorganisasian rakyat, dan pembangunan kapasitas lokal—menjadi lanjutan organik dari aksi simbolik yang telah menggugah.

Dengan demikian, keberlanjutan gerakan sosial tidak bisa hanya mengandalkan suara yang nyaring, tetapi juga pada kesediaan untuk bekerja dalam senyap, mendengarkan, membangun kepercayaan, dan menumbuhkan kekuatan dari bawah. Inilah bentuk *praxis* sejati: penggabungan antara refleksi kritis dan aksi transformatif dalam medan nyata.

Kerja Basis: Jalan Sunyi, Jalan Panjang

Kerja basis merupakan wujud paling nyata dari keberpihakan gerakan sosial terhadap realitas konkret kehidupan rakyat. Ia bukan sekadar aktivitas pendukung, melainkan denyut nadi perjuangan yang terus-menerus menyentuh denyut kehidupan kaum marjinal—mengorganisir petani untuk mempertahankan tanahnya, mendampingi buruh dalam memperjuangkan upah yang adil, membangun koperasi sebagai bentuk kedaulatan ekonomi, mendirikan sekolah alternatif yang merdeka dari logika pasar, hingga mengadvokasi hak-hak warga di ruang-ruang yang terpinggirkan oleh kekuasaan.

Di titik inilah gerakan menemukan "napas panjangnya". Aksi massa memang penting untuk menciptakan gelombang kesadaran, tetapi kerja basis adalah yang menjaga bara tetap menyala setelah sorotan kamera padam dan euforia publik mereda. Kerja ini tidak selalu spektakuler, tapi justru di situlah kekuatannya: ia hadir dalam kesunyian, dalam relasi yang intim dengan rakyat, dalam komitmen jangka panjang yang menolak pragmatisme politik.

Bagi gerakan mahasiswa Islam seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kerja basis bukanlah aktivitas tambahan atau sekadar pelengkap dari agenda intelektual. Ia adalah inti dari praksis sosial Islam. Dalam khazanah pemikiran Islam, perjuangan tidak berhenti pada retorika moral atau artikulasi kebenaran di ruang publik. Ia harus mewujud dalam tindakan nyata. Sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa:75, Allah mengecam mereka yang tidak berjuang membela orang-orang yang tertindas (*mustadh'afin*): *"Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah?"*

Konsep ini selaras dengan prinsip *qaulan sadidan* (perkataan yang benar dan tegas) sebagaimana disebut dalam QS. Al-Ahzab:70, namun dalam kerangka gerakan, kebenaran itu bukan sekadar diucapkan, melainkan diperjuangkan dalam realitas sosial. Artinya, antara kata dan kerja tidak boleh ada jurang yang memisahkan.

Sebagaimana diungkap oleh Frantz Fanon (1963) dalam *The Wretched of the Earth*, transformasi sejati hanya mungkin terjadi bila kaum terpelajar—termasuk mahasiswa—memutus keterasingannya dari rakyat, dan turun langsung untuk bersama mereka membangun kesadaran dan kekuatan kolektif. Inilah makna mendalam dari kerja basis: menyatukan ilmu, iman, dan keberpihakan dalam praksis yang membebaskan.

Kerja basis merupakan pengejawantahan nyata dari

etos *amar ma'ruf nahi munkar*—bukan sekadar sebagai ujaran moral dari atas mimbar, tetapi sebagai praktik emansipatoris yang menjelma dalam tindakan kolektif bersama rakyat. Dalam Islam, seruan pada kebaikan dan pencegahan terhadap kemungkaran tidak berhenti pada lisan atau niat baik semata, tetapi harus menubuh dalam keberpihakan terhadap keadilan sosial. Ia menjadi bentuk ibadah sosial yang membebaskan, bukan hanya dari ketertindasan fisik, tetapi juga dari kebungkaman struktural dan kebodohan sistemik.

Dalam konteks gerakan sosial dan pendidikan kritis, Paulo Freire (1970) menegaskan bahwa pembebasan hanya mungkin terjadi ketika rakyat belajar dari pengalaman mereka sendiri, dan kaum terdidik tidak bersikap elitis, tetapi belajar bersama rakyat, bukan berbicara atas nama mereka. Kerja basis, dalam pandangan ini, bukanlah proyek karitatif, tetapi proses *conscientização*—pembangkitan kesadaran kritis melalui dialog horizontal, bukan instruksi vertikal.

Dengan demikian, kerja basis adalah ruang dialektis di mana ilmu pengetahuan, nilai-nilai spiritual, dan pengalaman sosial saling mengasah dan memperkaya. Ia membongkar jarak antara kaum terdidik dan masyarakat, antara teori dan praktik, antara wacana dan realitas. Dalam kerja basis, mahasiswa bukan hanya agen perubahan, melainkan bagian dari rakyat itu sendiri—belajar, berjuang, dan tumbuh dalam semangat kolektif.

Lebih jauh, kerja basis adalah upaya mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta (*rahmatan lil 'alamin*) melalui tindakan konkret: membela yang lemah, memuliakan martabat manusia, dan merawat bumi sebagai amanah. Dalam kerangka ini, PMII tidak hanya mentradisikan kerja intelektual di ruang diskusi, tetapi juga menghadirkannya dalam ladang, di kampung-kampung, di pabrik, dan di

pinggiran kota—di tempat di mana ketidakadilan nyata terjadi dan perubahan sejati dibutuhkan.

Dari Aksi Massa ke Aksi Sosial: Transformasi Strategi Gerakan

Transformasi dari aksi massa menuju aksi sosial bukanlah sebuah penolakan terhadap ruang publik, melainkan suatu perluasan makna perjuangan yang lebih dalam dan berkelanjutan. Aksi massa tetap memegang peran penting sebagai alat untuk membangun kesadaran kolektif, mengartikulasikan aspirasi rakyat, dan memberi tekanan pada kekuasaan. Ia adalah bentuk "interupsi simbolik" terhadap tatanan yang menindas, penanda bahwa rakyat belum tunduk pada dominasi struktural.

Namun, tanpa keterhubungan organik dengan basis sosial, aksi massa berisiko menjadi sekadar ritual politik atau seremoni protes yang kehilangan substansi. Sebagaimana dikemukakan oleh James C. Scott (1985) dalam *Weapons of the Weak*, kekuatan sejati dari perlawanan sosial terletak pada praktik sehari-hari, dalam tindakan-tindakan kecil namun terus-menerus yang dilakukan oleh masyarakat di akar rumput. Dalam konteks ini, aksi sosial—yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan pengalaman hidup rakyat—menjadi elemen yang mengakar dan memberi legitimasi moral sekaligus kekuatan praksis pada gerakan.

Oleh karena itu, transformasi ini bukanlah dikotomi antara jalan dan kampung, antara parlemen jalanan dan kerja komunitas. Justru yang dibutuhkan adalah sinkronisasi antara mobilisasi massa dan pengorganisiran basis—agar gerakan tidak hanya terdengar lantang, tetapi juga mampu menyentuh, mengubah, dan membebaskan.

Sebaliknya, kerja sosial di tingkat basis—meskipun kerap luput dari sorotan kamera dan tidak tampak heroik di mata publik—justru merupakan inti dari perjuangan jangka panjang yang transformatif. Melalui kerja-kerja senyap namun substansial ini, gerakan sosial berupaya mengubah relasi kuasa dari bawah, bukan semata-mata mengguncang struktur dari atas. Di sinilah proses membangun keberdayaan rakyat berlangsung: rakyat tidak lagi diposisikan sebagai objek belas kasihan atau massa pendukung, melainkan sebagai subjek historis yang sadar, terorganisir, dan berdaya.

Kerja basis memungkinkan lahirnya fondasi sosial bagi transformasi struktural—yakni ketika perubahan tidak hanya terjadi di level kebijakan, tetapi juga menyentuh cara hidup, cara berpikir, dan pola relasi antar manusia. Dalam pandangan bell hooks (1994) dalam Teaching to Transgress, revolusi sejati tidak hanya meledak di jalanan, melainkan tumbuh dalam relasi-relasi yang dibangun dengan cinta, kepercayaan, dan keberanian di ruang-ruang komunitas. Inilah revolusi yang tidak spektakuler tetapi tahan lama—karena ia bertumpu pada pengalaman, keterlibatan, dan kesadaran kolektif yang mendalam.

Dalam konteks PMII, transformasi dari aksi simbolik menuju aksi sosial tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga paradigmatik. Hal ini tercermin dalam upaya memperluas ruang juang—dari ruang-ruang akademik di kampus menuju ruang-ruang hidup rakyat di kampung; dari diskusi-diskusi teoritis di kelas menjadi pendampingan konkret di tengah komunitas. Perjuangan tidak lagi dibatasi oleh tembok universitas, tetapi menjelma dalam keberpihakan nyata di tengah problematika sosial yang kompleks.

Kader PMII tidak cukup hanya menjadi demonstran musiman yang hadir saat momentum politik memuncak, tetapi harus tumbuh sebagai organisator sosial—mereka

yang dengan sabar dan konsisten merawat harapan rakyat, membangun jejaring solidaritas, dan memperjuangkan keadilan sosial secara praksis. Seperti ditegaskan oleh Paulo Freire (1970), proses perubahan sejati hanya mungkin terjadi ketika kaum terdidik "turun dari menara gading" dan belajar bersama rakyat, bukan untuk mereka, tetapi bersama mereka.

Dengan demikian, transformasi ini adalah bentuk aktualisasi dari visi PMII sebagai gerakan yang tidak hanya berpikir dan berteriak, tetapi juga bekerja dan mengakar, menjadikan zikir, pikir, dan amal sebagai landasan praksis sosial yang membebaskan.

Dialektika Simbol dan Substansi

Aksi simbolik dan kerja basis bukanlah dua kutub yang saling menegasikan, melainkan dua poros yang saling menghidupi dalam arsitektur gerakan sosial yang menyeluruh. Di satu sisi, aksi simbolik berfungsi sebagai pemantik kesadaran kolektif—ia menggugah imajinasi politik, menciptakan momentum, dan menyuarakan kebenaran secara terbuka. Di sisi lain, kerja basis adalah akar yang menopang keberlanjutan perjuangan—ia membangun keberdayaan, menumbuhkan kedaulatan, dan memperkuat solidaritas dari bawah.

Dalam tradisi gerakan sosial transformatif, kedua pendekatan ini harus dirajut dalam satu tarikan napas strategis. Sebab aksi massa tanpa basis mudah menjadi seremonial, dan kerja basis tanpa keberanian bersuara bisa tereduksi menjadi kerja teknis tanpa daya dobrak politis. Gerakan mahasiswa Islam seperti PMII dihadapkan pada tantangan historis untuk memadukan keduanya—menjadi juru bicara kebenaran di ruang-ruang publik, sekaligus teman seperjuangan rakyat di lorong-lorong kehidupan.

Seperti semangat amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam, perjuangan bukan hanya soal menyuarakan kebaikan, tetapi juga mewujudkannya secara praksis dan kolektif. Di sinilah PMII membuktikan dirinya bukan sekadar organisasi mahasiswa, tetapi gerakan pembebasan yang menggabungkan suara, makna, dan kerja nyata dalam satu tubuh perjuangan.

C. MEMBANGUN JEJARING SOLIDARITAS: LINTAS KOMUNITAS DAN GENERASI

Di tengah dunia yang kian terpecah oleh sekat identitas, kelas, dan generasi, membangun jejaring solidaritas lintas komunitas dan lintas generasi bukan lagi sekadar strategi taktis—melainkan sebuah keharusan moral, politis, sekaligus historis. Dalam lanskap sosial yang diwarnai oleh individualisme, fragmentasi kepentingan, dan ketimpangan struktural, solidaritas lintas batas menjadi energi pemersatu yang menyambung kembali jaringan kehidupan sosial yang tercerai-berai.

Gerakan mahasiswa, termasuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), tidak dapat berfungsi optimal jika berdiri sebagai menara gading yang terputus dari denyut nadi komunitas akar rumput, atau bersikap eksklusif terhadap generasi pendahulu maupun penerusnya. Sebaliknya, kekuatan sejati sebuah gerakan ditentukan oleh kemampuannya membangun relasi dan kolaborasi lintas kelas sosial, lintas sektor perjuangan, dan lintas generasi—membuka ruang dialog antara yang tua dan muda, antara kampus dan kampung, antara teori dan realitas.

Sebagaimana ditegaskan oleh Nancy Fraser (2000), solidaritas transformatif bukan hanya tentang empati, tetapi tentang *rekonstruksi hubungan sosial secara adil*. Dalam konteks ini, gerakan mahasiswa ditantang untuk

membentuk koalisi berbasis nilai dan kepentingan bersama, menjalin simpul perjuangan antara buruh, petani, seniman, tokoh adat, aktivis lingkungan, dan warga marjinal lainnya—sebagai bagian dari ekosistem perlawanan yang hidup dan tumbuh bersama.

Jejaring solidaritas adalah jantung dari gerakan yang visioner: ia menyatukan generasi dalam ingatan sejarah perjuangan, dan menghubungkan komunitas dalam kesadaran akan nasib bersama. Bagi PMII, membangun jejaring semacam ini bukan hanya agenda organisasi, tetapi perwujudan nilai *hablum minannas*—sebuah tanggung jawab spiritual dan sosial untuk merawat kebersamaan di tengah dunia yang kian terpolarisasi.

Solidaritas: Dari Empati ke Aksi Kolektif

Solidaritas bukan sekadar simpati yang dingin atau dukungan moral yang pasif. Ia adalah ekspresi nyata dari etika keberpihakan dan kehendak kolektif yang tumbuh dari pengalaman bersama—baik dalam luka ketertindasan maupun dalam harapan akan dunia yang lebih adil. Solidaritas sejati menuntut partisipasi aktif, bukan sekadar perasaan iba; ia menuntut keterlibatan dalam perjuangan, bukan hanya pengakuan dari kejauhan.

Dalam kerangka sosiologis, Émile Durkheim (1893) menegaskan bahwa solidaritas sosial adalah "lem perekat" utama yang memungkinkan masyarakat bertahan dan berkembang. Namun, bentuk solidaritas tidaklah seragam. Dalam masyarakat tradisional yang homogen, solidaritas cenderung bersifat mekanik—terbangun atas dasar kesamaan nilai dan latar belakang. Tetapi dalam masyarakat modern yang kompleks dan plural, solidaritas harus bersifat organik: bertumpu pada keragaman fungsi, saling ketergantungan, dan pengakuan terhadap perbedaan.

Artinya, dalam dunia yang dipenuhi dengan fragmentasi identitas, kelas, dan kepentingan, solidaritas bukanlah kesatuan yang dibangun di atas keseragaman, melainkan keterhubungan yang dijalin melalui dialog, pengakuan, dan kerja sama lintas batas. Solidaritas yang organik justru menguat karena perbedaan: ketika yang urban belajar dari yang rural, ketika mahasiswa bersatu dengan buruh, ketika generasi muda merangkul pengalaman generasi tua—di situlah terbangun jaringan perjuangan yang kaya secara makna dan kokoh secara struktur.

Bagi gerakan seperti PMII, membangun solidaritas berarti keluar dari eksklusivitas identitas menuju ruang perjumpaan yang egaliter. Di sanalah nilai-nilai Islam progresif menemukan artikulasinya—dalam tindakan kolektif yang melampaui sekat sektoral, dalam keberpihakan kepada yang lemah, dan dalam cita-cita bersama untuk mewujudkan *al-mashlahah al-'ammah* (kemaslahatan umum). Solidaritas, dalam pengertian ini, bukan hanya strategi gerakan, tetapi iman yang menjelma menjadi praksis sosial.

Solidaritas sejati tidak lahir dari rasa iba yang bersifat sementara, tetapi dari keterlibatan eksistensial dalam penderitaan dan perjuangan orang lain. Ia tumbuh ketika kita tidak lagi melihat penderitaan sebagai milik "mereka yang lain", melainkan sebagai bagian dari kondisi manusia yang saling terkait. Dalam konteks ini, Judith Butler (2009) memperkenalkan konsep "grievability"—sebuah ukuran apakah suatu kehidupan diakui bernilai, dan karena itu, apakah kehilangan atas kehidupan itu dianggap layak ditangisi dan diperjuangkan.

Grievability bukan hanya soal kematian yang disesali, tetapi tentang pengakuan atas kemanusiaan yang sering kali dinegasikan oleh sistem sosial dan politik. Ketika suatu kelompok dianggap tidak layak untuk bersuara, atau

bahkan untuk berduka, maka solidaritas menjadi tindakan politik: pengakuan atas martabat yang sengaja dihapus, dan keputusan untuk tidak tinggal diam di hadapan ketidakadilan.

Dalam kerangka ini, solidaritas bukan sekadar empati, tetapi tindakan etis yang radikal—karena ia menantang hierarki nilai yang menentukan siapa yang dianggap penting, dan siapa yang bisa diabaikan. Bagi gerakan mahasiswa Islam seperti PMII, membangun solidaritas berarti mengakui bahwa penderitaan kaum miskin, buruh, petani, atau kelompok minoritas bukan beban mereka semata, melainkan luka kolektif yang menuntut penyembuhan bersama.

Lintas Komunitas: Menyulam Harapan dari Perbedaan

Gerakan mahasiswa yang progresif tidak cukup hanya berpihak kepada yang tertindas; ia juga harus menolak eksklusivisme politik dan identitas yang kerap menjadi jerat baru dalam perjuangan. Solidaritas sejati menuntut keberanian untuk melampaui sekat-sekat primordial—agama, etnisitas, afiliasi ideologis atau politik—yang sering kali dijadikan batas imajiner antara "kita" dan "mereka". Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti membangun ruang-ruang dialog dan kolaborasi yang melintasi batas-batas sosial: antara mahasiswa dan petani, santri dan seniman, komunitas adat dan masyarakat urban, antara Islam tradisional dan komunitas lintas iman.

Sebagaimana Amartya Sen (2006) tekankan dalam *Identity and Violence*, identitas manusia tidak bersifat tunggal dan esensialis, melainkan plural dan kontekstual. Setiap individu membawa beragam identitas yang saling bersilang—agama, gender, kelas, profesi, budaya—dan demokrasi sejati hanya mungkin tumbuh jika ruang

sosial mengakui dan merayakan keragaman itu, bukan memusuhinya.

Dalam terang pemikiran ini, gerakan mahasiswa tidak boleh terjebak dalam eksklusivisme ideologis atau sektarianisme moral. Justru dalam keterbukaan dan kerja lintas batas itulah solidaritas menemukan maknanya yang paling otentik: bukan sebagai simpati dari jauh, tetapi sebagai perjuangan bersama yang dibangun atas dasar pengakuan dan penghormatan terhadap martabat yang beragam. Bagi PMII dan gerakan Islam progresif lainnya, inilah makna dari *ukhuwah insaniyyah*—persaudaraan kemanusiaan yang melampaui sekat simbolik, menuju transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan.

PMII, sebagai gerakan mahasiswa Islam yang berakar pada nilai-nilai keislaman yang inklusif dan keindonesiaan yang plural, memiliki modal kultural yang sangat berharga untuk menjembatani sekat-sekat sosial di tengah masyarakat yang beragam. Di tengah fragmentasi identitas yang menguat, kehadiran PMII dapat menjadi jembatan dialog—bukan hanya antara komunitas berbeda keyakinan, tetapi juga antar generasi, kelas sosial, dan orientasi budaya.

Dalam konteks ini, prinsip Islam rahmatan lil 'alamin bukan sekadar doktrin teologis, melainkan etika sosial-politik yang menuntut keterlibatan aktif dalam menciptakan tatanan yang adil, damai, dan berkeadaban. Ia mengajarkan bahwa rahmat Tuhan harus diwujudkan dalam kerja-kerja kolektif yang melintasi batas, menumbuhkan empati, dan memperjuangkan kemaslahatan bersama.

Sebagai organisasi kader, PMII dipanggil untuk mengartikulasikan nilai-nilai tersebut dalam bentuk solidaritas lintas komunitas—tidak hanya sebagai strategi gerakan, tetapi sebagai pengejawantahan dari iman yang membumi dan akhlak sosial yang membebaskan. Dalam ruang ini, perjuangan bukan hanya tentang membela

kelompok sendiri, tetapi tentang menghadirkan wajah Islam yang ramah, adil, dan transformatif bagi seluruh umat manusia.

Lintas Generasi: Menyambung Ingatan, Merawat Perjuangan

Tidak ada gerakan yang benar-benar kuat tanpa kontinuitas sejarah. Setiap perjuangan yang ingin bertahan dalam jangka panjang harus berakar pada ingatan kolektif yang hidup, bukan sekadar pada semangat sesaat. Dalam kerangka ini, solidaritas lintas generasi bukan hanya bentuk penghormatan terhadap masa lalu, tetapi juga strategi regenerasi makna—yakni upaya menyambung warisan perjuangan dengan dinamika zaman.

Generasi senior bukan untuk dikultuskan, karena sejarah bukan monumen beku. Sebaliknya, generasi muda bukan pula sekadar pelengkap, karena masa depan lahir dari tangan-tangan mereka. Maka, hubungan lintas generasi dalam gerakan harus dibangun di atas prinsip dialog dan keterbukaan: belajar dari kebijaksanaan lama tanpa terjebak dalam romantisme, dan mendengar suara muda tanpa tergelincir pada euforia.

Dalam etika Islam, ini sejalan dengan konsep *al-'ilm* (pengetahuan) yang bersifat *talaqqi*—diturunkan dengan hikmah, namun juga dikembangkan secara *ijtihad*. Dengan demikian, solidaritas lintas generasi bukan hanya memperpanjang usia gerakan, tetapi juga memperdalam jiwanya: menjaga nyala sejarah sambil menyalakan lentera masa depan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Antonio Gramsci (1971), setiap generasi lahir dalam lanskap sejarah yang tidak mereka pilih sendiri—mereka mewarisi kondisi sosial, struktur kekuasaan, dan narasi dominan yang telah dibentuk sebelumnya. Namun, warisan itu bukan untuk diterima

secara pasif. Sebaliknya, mereka memikul tanggung jawab historis untuk menafsirkan dan, jika perlu, mengubahnya secara kreatif dan radikal.

Dalam konteks inilah, dialog lintas generasi dalam tubuh organisasi seperti PMII menjadi bukan sekadar forum silaturahmi, tetapi ruang dialektika historis—di mana pengalaman para pendahulu dipertemukan dengan kegelisahan kontemporer generasi baru. Masa lalu tidak dibekukan menjadi doktrin, dan masa depan tidak dibiarkan tanpa arah. Keduanya saling menjalin untuk menciptakan kontinuitas perjuangan yang dinamis, reflektif, dan relevan.

Dialog antar generasi menjadi jembatan epistemik dan strategis: menyambung nilai, memperkaya perspektif, dan merawat kesinambungan gerakan. Inilah salah satu prasyarat penting bagi gerakan mahasiswa yang ingin tetap hidup—bukan hanya bergerak, tetapi juga bertumbuh bersama zaman.

Forum alumni, sekolah kader lintas angkatan, hingga kolaborasi lintas usia dalam aksi sosial bukan sekadar seremoni formal, melainkan strategi praksis dalam menyatukan energi historis dan energi progresif. Di titik inilah, gerakan mahasiswa seperti PMII memperlihatkan kematangannya sebagai organisasi kader yang hidup dan tumbuh dalam dialektika antar generasi.

Seorang kader muda dapat menyerap nilai keteguhan, konsistensi ideologis, dan kedewasaan berorganisasi dari para senior yang telah melewati berbagai fase perjuangan. Di saat yang sama, senior pun belajar dari konteks baru—tentang teknologi, bahasa simbolik generasi, serta cara-cara baru dalam mengorganisir masyarakat—yang lahir dari semangat eksperimentatif dan keberanian menjelajah dari kader muda.

Dengan demikian, kolaborasi lintas generasi tidak hanya melestarikan ingatan kolektif, tetapi juga memperbaharui strategi gerakan. Ia menjelma menjadi ruang pertemuan antara warisan dan inovasi, antara pengalaman dan visi, antara kebijaksanaan dan energi baru. Inilah cara organisasi tetap relevan dan progresif—dengan berakar pada sejarah, tetapi tidak terjebak dalam romantisme masa lalu.

Jaringan Solidaritas sebagai Infrastruktur Gerakan

Solidaritas lintas komunitas dan generasi bukan hanya etika perjuangan, tetapi juga membentuk infrastruktur sosial-politik yang menopang keberlanjutan gerakan dalam jangka panjang. Di dalamnya terjalin jaringan informal yang memungkinkan pertukaran pengetahuan antargenerasi, penguatan kapasitas antar komunitas, serta mobilisasi sumber daya secara lebih demokratis dan responsif.

Dalam perspektif Manuel Castells (1996), gerakan sosial di era jaringan atau *network society* tidak lagi berpusat pada struktur hierarkis dan komando tunggal, tetapi bertumpu pada kekuatan jaringan horizontal yang fleksibel, terdesentralisasi, dan kolaboratif. Ini membuka ruang bagi setiap individu dan komunitas untuk menjadi simpul-simpul aktif dalam gerakan, tanpa harus menunggu perintah dari pusat. Dalam konfigurasi ini, solidaritas menjadi semacam "sirkulasi darah" yang menghubungkan simpul-simpul itu, memastikan gerakan tetap hidup, adaptif, dan terhubung dengan kebutuhan nyata masyarakat.

PMII, jika ingin tetap relevan dalam lanskap sosial yang makin cair dan kompleks, perlu merawat serta memperluas infrastruktur solidaritas ini. Bukan hanya dengan memperkuat komunikasi internal dan eksternal, tetapi juga dengan membangun kepercayaan, memperluas

jejaring kolaboratif lintas isu, serta menumbuhkan budaya saling belajar di antara komunitas dan generasi.

PMII, dalam konteks ini, tidak cukup hanya menjadi aktor dalam satu segmen gerakan, tetapi harus tampil sebagai nodal point—titik temu strategis—yang menghubungkan berbagai jaringan perjuangan sosial. Ia dapat memainkan peran sebagai jembatan yang menyambungkan energi basis dengan kekuatan struktural, mengintegrasikan aktivisme akar rumput di desa dengan wacana akademik dan advokasi kebijakan di kota, serta menghubungkan kerja sosial yang konkret dengan ruang-ruang pengambilan keputusan yang menentukan nasib rakyat.

Dengan memanfaatkan keunggulan kaderisasi yang menyentuh spektrum luas—dari pesantren hingga perguruan tinggi, dari ruang kelas hingga ruang komunitas—PMII memiliki posisi unik untuk menjembatani berbagai dunia sosial yang kerap terfragmentasi. Dalam pendekatan ini, nilai-nilai keislaman yang inklusif dan prinsip keadilan sosial tidak hanya menjadi slogan, tetapi diartikulasikan dalam bentuk kerja kolaboratif yang menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Inilah tantangan gerakan mahasiswa Islam progresif di abad ke-21: tidak hanya hadir sebagai suara kritis, tetapi juga sebagai perancang jembatan sosial yang menyatukan, memperkuat, dan mengarahkan energi perubahan secara kolektif dan berkelanjutan.

Menjadi Jaringan, Bukan Menara

Menjadi organisasi progresif berarti menolak jatuh dalam elitisme intelektual atau aktivisme seremonial. PMII dan gerakan mahasiswa tidak boleh terjebak menjadi menara gading yang sibuk dengan diskursus internal, tetapi harus menjelma menjadi simpul-simpul perjuangan

yang terkoneksi dengan denyut kehidupan rakyat. Dalam dunia yang kian kompleks—ditandai oleh krisis demokrasi, kerusakan ekologis, dan ketimpangan global yang akut—perlawanan sporadis tidak lagi memadai. Hanya jejaring solidaritas yang kuat, lintas sektor dan generasi, serta berakar pada nilai-nilai etik yang mampu menjadi benteng terakhir bagi kemanusiaan dan keadilan sosial.

PMII memiliki tanggung jawab historis dan moral untuk membangun jejaring ini—dengan semangat kolektif, kesadaran kritis, dan komitmen transformatif. Dalam jejaring inilah, nilai hablum minannas, Islam rahmatan lil 'alamin, dan keindonesiaan yang plural bekerja secara nyata, bukan hanya sebagai narasi ideologis, tetapi sebagai daya hidup yang menggerakkan perubahan.

Sebagaimana dikatakan oleh Martin Luther King Jr., *"We are caught in an inescapable network of mutuality, tied in a single garment of destiny. Whatever affects one directly, affects all indirectly."* Dalam semangat inilah, solidaritas lintas komunitas dan generasi bukan hanya strategi gerakan, tetapi panggilan spiritual untuk merawat kemanusiaan yang saling terhubung. Bagi PMII dan gerakan mahasiswa Islam, tugas ini bukan pilihan, melainkan keniscayaan historis jika ingin tetap relevan di tengah perubahan zaman dan tetap transformatif dalam memperjuangkan keadilan sosial.

D. TRANSFORMASI SOSIAL BUKAN REVOLUSI INSTAN, TAPI KERJA KONSISTEN

Dalam konteks PMII sebagai gerakan mahasiswa Islam, hal ini menegaskan pentingnya membingkai perjuangan dalam paradigma jangka panjang. Transformasi sosial yang dibayangkan tidak bisa disandarkan pada momen-momen simbolik semata, tetapi harus dijalankan sebagai kerja ideologis yang sabar dan berkesinambungan. *Perubahan*

harus dikawal melalui proses kaderisasi yang berjenjang, pengorganisasian sosial yang sistematis, dan penguatan basis nilai—iman, intelektualitas, dan keberpihakan pada mustadh'afin.

Sebagaimana dicontohkan oleh banyak gerakan rakyat di berbagai belahan dunia, seperti perjuangan sosio politik yang digagas Nelson Mandela, atau gerakan buruh di Amerika Latin yang dikawal selama dekade oleh basis komunitas, kekuatan transformasional terletak pada kemampuan mengelola waktu, membangun fondasi sosial, dan menjadikan ideologi bukan sekadar wacana, tetapi kerangka hidup (*Lebenswelt*).

Dengan demikian, PMII sebagai agen perubahan tidak cukup hadir dalam demonstrasi atau diskusi ideologis di kampus, tetapi harus menjadi kekuatan sosial yang membumi—yang konsisten membangun jejaring, mendampingi komunitas, dan menjadi motor transformasi struktural dari bawah. Gerakan yang bertahan bukan yang paling keras bersuara, tetapi yang paling tekun bekerja dalam diam, menyemai harapan dari akar, dan merawatnya hingga tumbuh menjadi kenyataan sosial.

Transformasi sejati bukan revolusi instan. Ia adalah hasil dari perjuangan panjang yang terukur, reflektif, dan bertumpu pada keyakinan bahwa perubahan sejati hanya mungkin jika dimulai dari perubahan kesadaran, kebiasaan, dan struktur yang membelenggu kehidupan rakyat. Inilah medan jihad intelektual dan sosial PMII hari ini.

Melampaui Mimpi Revolusioner yang Instan

Konsep *conscientização*—penyadaran kritis—menjadi kunci dalam membedakan antara gerakan yang hanya reaktif dan gerakan yang transformatif. Dalam *Pedagogy of the Oppressed*, Freire menolak pendidikan yang

"mendepositkan" pengetahuan secara searah dari pengajar kepada yang diajar. Ia menyerukan pendidikan dialogis, di mana rakyat diajak membaca dunia, bukan sekadar menerima informasi. Inilah fondasi dari perubahan yang tahan lama: kesadaran rakyat atas posisi mereka dalam struktur sosial yang menindas, dan keyakinan bahwa mereka memiliki agensi untuk mengubahnya.

Dalam konteks gerakan mahasiswa seperti PMII, ini berarti:

- Kaderisasi bukan sekadar pelatihan teknis atau ideologis, tetapi proses mendalam yang membangun kesadaran akan relasi kuasa, ketimpangan, dan kemungkinan emansipasi.
- Aksi bukan hanya teriakan di jalanan, tetapi ekspresi dari pemahaman struktural terhadap kondisi masyarakat dan visi jelas akan perubahan.
- Kerja sosial bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi ruang pembelajaran kolektif yang mempertemukan teori dengan realitas rakyat.

Dengan demikian, transformasi sosial yang diusung PMII harus bertumpu pada *praxis*—yakni perpaduan antara refleksi kritis dan aksi nyata. Tanpa penyadaran, aksi menjadi hampa. Tanpa aksi, refleksi menjadi mandul. Dan tanpa kontinuitas, keduanya hanya menjadi romantisme perubahan yang tak pernah menjelma menjadi realitas.

Seperti yang juga diajarkan Freire, rakyat bukanlah objek dari belas kasihan atau pengajaran, tetapi subjek perubahan itu sendiri. Maka tugas kader PMII bukan memimpin dari atas, tetapi menyatu dan tumbuh bersama rakyat dalam proses panjang pembebasan.

"Liberation is a praxis: the action and reflection of men and women upon their world in order to transform it." — Paulo Freire, 1970.

Inilah ruh perjuangan sejati: sabar, mendalam, dan terus bertumbuh bersama rakyat, dalam kesadaran dan tindakan.

Dengan demikian, transformasi sosial tidak dapat direduksi semata-mata sebagai pergantian rezim politik atau mobilisasi massa sesaat. Ia adalah proses panjang dan mendalam yang menuntut rekonstruksi cara berpikir (mindset), dekonstruksi terhadap kebiasaan-kebiasaan lama yang melanggengkan ketimpangan, serta restrukturisasi relasi sosial secara radikal dan berkeadilan. Perubahan sejati lahir bukan dari gegap gempita di ruang publik semata, melainkan dari kerja sunyi yang menumbuhkan kesadaran, membongkar nalar dominasi, dan membangun tatanan sosial baru yang lebih manusiawi dan membebaskan. Inilah inti dari transformasi: revolusi bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam—dalam cara manusia memaknai dunia dan dirinya sendiri di tengah arus sejarah yang terus bergerak.

Kerja Kultural dan Struktural: Dua Sayap Perubahan

Perubahan sosial sejati tidak berjalan di satu jalur tunggal, melainkan menempuh dua medan perjuangan yang saling melengkapi: kerja kultural dan kerja struktural. Kerja kultural bergerak pada ranah kesadaran, menyasar cara berpikir yang telah lama terpenjara dalam fatalisme dan apatisme. Ia membongkar mitos-mitos yang membekukan imajinasi rakyat, menumbuhkan etos emansipatoris, serta menanamkan kesadaran kritis dan semangat partisipatif dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini hadir melalui pendidikan alternatif, forum komunitas, seni yang berpihak, dan praktik literasi yang membebaskan.

Sementara itu, kerja struktural menyentuh dimensi material dari ketidakadilan: ia berwujud dalam advokasi kebijakan yang progresif, pengorganisasian masyarakat akar rumput, serta pembangunan kelembagaan yang menjamin distribusi kekuasaan dan sumber daya secara adil. Kedua medan ini bukan sekadar strategi, melainkan landasan ontologis dari gerakan sosial yang ingin benar-benar mentransformasikan masyarakat, tidak hanya dalam tataran simbolik, tetapi juga dalam struktur dan makna hidup sehari-hari.

Transformasi sosial sejati tidak dapat bertumpu hanya pada rekayasa struktur atau ledakan kesadaran sesaat. Perubahan yang semata-mata menekankan aspek struktural—seperti kebijakan atau institusi—tanpa disertai pembangunan kesadaran akan melahirkan sistem yang kering, birokrasi tanpa arah, hukum tanpa keadilan. Sebaliknya, kesadaran yang tidak terorganisir dalam kanal struktural hanya akan menjadi romantisme gerakan—idealistis namun rapuh, menghangat sesaat lalu meredup tanpa jejak.

Dalam perspektif Islam, perubahan bukan hanya soal mengganti yang zalim dengan yang adil, tetapi juga tentang *tazkiyatun nafs*—penjernihan batin dan pembebasan akal. Al-Qur'an tidak hanya memerintahkan *amar ma'ruf nahi munkar*, tetapi juga mengajarkan *hikmah* dan *mau'izhah hasanah* sebagai pendekatan. Di sinilah kerja kultural menjadi penting: membangun kesadaran kritis, membongkar cara berpikir fatalistik, dan menumbuhkan etos partisipatif dalam masyarakat. Sementara kerja struktural menjadi wadah yang menopang gerak perubahan itu agar memiliki dampak yang konkret dan berkelanjutan.

Sebagaimana ditekankan dalam spirit *ahlussunnah wal jama'ah* yang menjadi basis ideologis PMII, transformasi mesti bersifat *tawassuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), dan *ta'adul* (adil)—antara ruh dan struktur, antara kesadaran

dan kelembagaan, antara idealisme dan praksis. Maka, bagi kader PMII, tugas perubahan bukan hanya menjadi pelopor dalam ruang wacana atau penggerak aksi massa, tetapi juga perajut jembatan antara kerja budaya dan kerja politik, antara pembebasan batin dan penataan sistem sosial.

Kesabaran Sejarah dan Militansi Harapan

Dalam kerja transformasi sosial, kesabaran bukan sekadar sikap pasif, tetapi merupakan kebajikan strategis yang menopang daya tahan gerakan dalam menghadapi kenyataan yang tak selalu berpihak. Sebagaimana diungkapkan oleh Antonio Gramsci (1971), perjuangan sejati hidup dalam paradoks: *"Pesimisme intelek, optimisme kehendak."* Maksudnya, intelektualitas yang jujur harus berani melihat betapa gelap dan timpangnya dunia, namun kehendak untuk berubah tidak boleh padam karenanya. Dalam jurang antara realitas dan harapan itulah kesabaran menjadi kekuatan revolusioner.

Bagi kader PMII, kesabaran bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan komitmen jangka panjang untuk terus menabur benih perubahan, meski hasilnya tak selalu tampak segera. Inilah yang disebut sebagai *militansi harapan*—yakni keyakinan bahwa dunia bisa ditata ulang atas dasar keadilan, meski jalannya berliku, menanjak, dan sering sepi.

Dalam khazanah Islam, kesabaran (ṣabr) adalah salah satu sifat utama para nabi dan pejuang kebenaran. Ia bukan sekadar bertahan dalam penderitaan, tetapi juga istiqamah dalam perjuangan, konsistensi dalam amal, dan keteguhan dalam menjaga cita-cita. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]:153, *"Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."* Maka, kesabaran dalam perjuangan bukan kelemahan, tapi bentuk keberanian yang paling hakiki—

keberanian untuk tetap melangkah, sekalipun dunia seolah tak berubah.

Kesabaran dalam perubahan bukanlah bentuk kepasrahan atau keengganan bertindak, melainkan ketekunan yang radikal, konsistensi dalam aksi, dan kesetiaan pada nilai-nilai pembebasan. Ia adalah daya tahan moral yang menopang gerakan di tengah gelombang tantangan, godaan pragmatisme, dan kelelahan kolektif. Dalam konteks inilah, bell hooks (1994) menegaskan bahwa "transformation does not happen overnight, but through sustained practice rooted in love and justice." Perubahan sejati tidak tumbuh dari letupan instan atau euforia sesaat, tetapi dari praktik yang terus-menerus, tertanam dalam cinta terhadap sesama dan keberpihakan pada keadilan.

Bagi kader gerakan seperti PMII, kesabaran adalah bentuk komitmen historis—membangun perubahan tidak sekadar untuk merespons krisis hari ini, tetapi untuk merawat masa depan yang lebih adil. Kesabaran menjadi etos perjuangan yang menghindarkan gerakan dari dua ekstrem: pesimisme yang melumpuhkan, dan romantisme yang menyesatkan. Ia menuntut kerja sunyi: mengorganisir masyarakat, mendidik dengan keteladanan, memperkuat kelembagaan, dan tetap menyemai harapan di tengah kerapuhan zaman.

Transformasi sebagai Proses Kaderisasi Sosial

Dalam konteks PMII, transformasi sosial bukan sekadar cita-cita gerakan, melainkan inti dari proses kaderisasi sosial yang menyatu dengan misi pembebasan. Kaderisasi bukan hanya membentuk individu yang cakap dalam teori, tetapi membina pribadi yang terlibat langsung dalam pergulatan realitas, yang tangguh dalam menghadapi

kenyataan, dan sabar dalam menempuh jalan perubahan yang panjang.

Kader PMII tidak dididik untuk menjadi komentator keadaan, melainkan pelaku sejarah—agen transformasi yang sadar bahwa perubahan sejati tak bisa diraih dalam hitungan hari atau bahkan satu generasi. Mereka dipersiapkan untuk menapaki jalan panjang perjuangan, menanam benih harapan di tanah yang keras, dan merawatnya dengan kesabaran politik dan kecintaan sosial.

Kerja kaderisasi dalam gerakan ini adalah kerja peradaban: menyiapkan manusia yang merdeka dalam berpikir, jernih dalam hati, dan berani dalam bertindak; manusia yang bukan hanya membebaskan dirinya dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakadilan, tetapi juga mampu membebaskan orang lain melalui praksis solidaritas dan pencerahan.

Setiap diskusi yang jujur, setiap aksi komunitas yang tulus, setiap advokasi kebijakan yang berpihak—semuanya bukanlah tindakan-tindakan yang terpisah, melainkan bagian dari mosaik agung perubahan sosial. Dalam kerja-kerja kecil yang sering luput dari sorotan, tersimpan jejak panjang peradaban yang sedang dibangun.

Transformasi sejati bukan dibentuk oleh satu momentum besar, tetapi oleh ribuan keping kontribusi yang sabar dan konsisten. Seperti membangun sebuah katedral dalam sejarah Eropa abad pertengahan—sebuah proyek lintas generasi—setiap generasi meletakkan satu batu bata: mereka mungkin tak pernah melihat bangunannya berdiri sempurna, tetapi mereka percaya bahwa apa yang mereka letakkan adalah bagian dari sesuatu yang suci dan bermakna.

Begitu pula gerakan sosial seperti PMII. Ia bukanlah proyek jangka pendek, melainkan ikhtiar panjang lintas

waktu, di mana setiap kader adalah perajin sejarah. Tugas kita bukan menyelesaikan seluruh bangunan, tetapi memastikan bahwa setiap batu yang kita letakkan berdiri kokoh, dalam arah yang benar, dan dengan keyakinan bahwa suatu hari kelak, struktur keadilan dan kemanusiaan itu akan tegak sepenuhnya.

Penutup: Jalan Panjang Tidak Harus Sunyi

Transformasi sosial yang sejati memang merupakan perjalanan panjang—sering kali melelahkan, penuh hambatan, dan tak jarang terasa sunyi. Namun, panjangnya jalan perubahan tidak boleh dimaknai sebagai keterasingan atau keheningan. Ia justru menuntut irama kolektif, jejaring solidaritas lintas batas, dan refleksi kritis yang terus diperbarui. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, di mana euforia sesaat kerap menggantikan komitmen jangka panjang, kerja yang konsisten, terarah, dan berbasis nilai adalah bentuk radikalisme yang paling tahan uji.

PMII, sebagai gerakan yang lahir dari semangat intelektual dan progresif, harus menunjukkan bahwa perubahan sejati bukan sekadar suara lantang di jalanan, melainkan langkah-langkah kecil yang terus dirawat, diperkuat, dan disinergikan—hingga pada waktunya, ia membentuk arus besar sejarah. Di tengah zaman yang dibanjiri oleh kegaduhan dan kegamangan, justru ketekunan dalam kerja-kerja sunyi dan berkelanjutan adalah manifestasi paling radikal dari harapan.

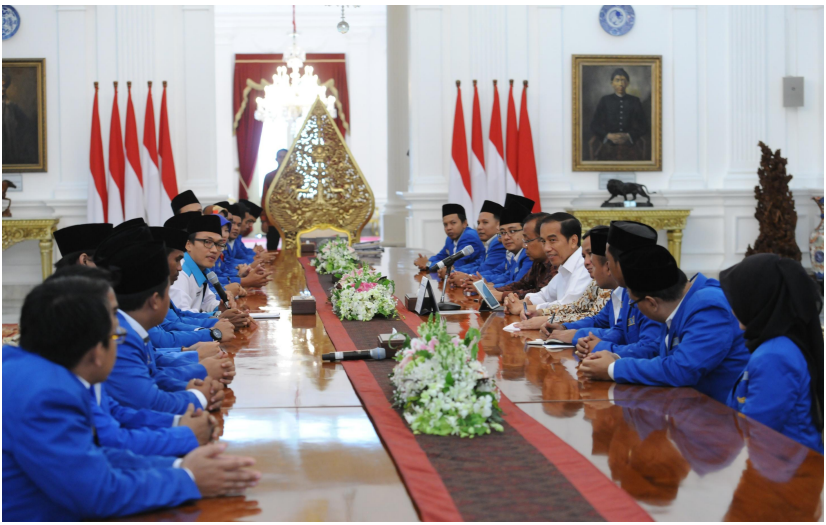

iNews
TVOne

BAB VII

TANTANGAN GERAKAN: KOPTAKSI POLITIK, KEJENUHAN KADER, DAN KRISIS NILAI

Setiap gerakan besar, cepat atau lambat, akan diuji bukan hanya oleh kekuatan lawan, tetapi oleh kerapuhan dari dalam. Musuh paling berbahaya bukan selalu yang menyerang dari luar, melainkan yang menyusup dalam bentuk kompromi nilai, apatisme kader, dan kooptasi kekuasaan. Dalam pusaran politik transaksional, godaan pragmatisme dan kehilangan arah ideologis kerap menyergap organisasi—mengikis idealisme dengan dalih realisme, dan membungkam suara kritis atas nama kedekatan struktural.

Di tengah realitas itu, PMII dihadapkan pada pertanyaan eksistensial: Apakah ia tetap menjadi gerakan pembebasan yang merawat nurani kolektif, atau berubah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan yang kehilangan keberpihakan? Apakah kader masih digerakkan oleh semangat perubahan, atau telah lelah dalam kejenuhan simbolik dan rutinitas kosong? Dan apakah nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi gerakan masih hidup dalam praksis harian, atau telah menjadi slogan yang kehilangan ruh?

Bab ini mengajak pembaca untuk menyelami titik-titik krisis yang harus dihadapi dengan jujur dan berani. Sebab hanya dengan membaca luka sendiri, sebuah gerakan bisa menemukan jalan penyembuhan. Tantangan bukan untuk

ditakuti, tapi untuk dimaknai sebagai pintu pembaruan, tempat di mana kesetiaan pada cita-cita diuji, dan arah perjuangan disusun kembali dengan lebih jernih, lebih teguh, dan lebih transformatif.

A. GODAAN PRAGMATISME DALAM TUBUH GERAKAN

Pragmatisme dalam konteks gerakan bukan semata-mata soal fleksibilitas strategi, tetapi sering kali menjadi kedok bagi oportunisme—menerima logika kekuasaan tanpa kritik, dan menyesuaikan arah gerakan demi akses terhadap sumber daya politik. Dalam jangka pendek, ini mungkin tampak "realistis", namun dalam jangka panjang justru menghancurkan integritas dan kepercayaan publik. Hannah Arendt (1963), dalam *On Revolution*, mengingatkan bahwa ketika revolusi kehilangan akar moralnya dan terseret dalam pertarungan kekuasaan yang banal, ia berubah dari tindakan pembebasan menjadi sekadar pergantian elit penguasa.

Dalam konteks gerakan mahasiswa, terutama seperti PMII, pragmatisme bisa menjelma dalam bentuk kooptasi politik, afiliasi partisan yang tak kritis, hingga penempatan kader dalam struktur kekuasaan tanpa agenda ideologis yang jelas. Hal ini memunculkan apa yang disebut oleh Antonio Gramsci (1971) sebagai *crisis of representation*—ketika kaum intelektual organik justru gagal mewakili kepentingan rakyat karena tercerabut dari basis nilai dan komunitas perjuangan.

Lebih dari itu, pragmatisme yang dilegalkan atas nama "kematangan politik" justru melemahkan daya kritis kader. Alih-alih menjadi pelopor perubahan, gerakan terjebak dalam rutinitas yang membosankan, kehilangan keberanian untuk bersuara lantang, dan lambat laun menjadi bagian dari status quo yang dahulu dikritiknya. Dalam perspektif

bell hooks (1994), kehilangan integritas ideologis adalah bentuk "kematian spiritual" dari sebuah gerakan yang pernah menyala oleh cinta dan kemarahan yang adil.

Oleh karena itu, tantangan terbesar gerakan seperti PMII bukan hanya melawan penindasan eksternal, tetapi melawan korupsi nilai dari dalam dirinya sendiri. Menjaga idealisme bukan berarti menolak strategi, tetapi memastikan bahwa strategi tetap berakar pada prinsip. Kompromi boleh dilakukan, tetapi tidak dengan menyerahkan jiwa gerakan.

Pragmatisme memang bukan semata-mata musuh gerakan. Dalam batas tertentu, ia adalah keniscayaan taktis—alat untuk membaca konstelasi sosial-politik, menyesuaikan langkah sesuai realitas yang berubah, serta membuka ruang dialog dengan berbagai kekuatan yang ada. Dalam kerangka ini, pragmatisme dapat menjadi jembatan antara idealisme dan efektivitas, antara visi besar dan langkah konkret.

Namun, persoalan muncul ketika pragmatisme bukan lagi alat, melainkan tujuan. Ketika kalkulasi strategi dan kepentingan jangka pendek menggantikan komitmen jangka panjang terhadap nilai-nilai keadilan, emansipasi, dan pembebasan, maka gerakan kehilangan karakter revolusionernya. Ia tidak lagi menjadi kekuatan pembebas, melainkan justru bagian dari arsitektur kekuasaan yang semula hendak dikoreksi.

Dalam hal ini, kritik Antonio Gramsci (1971) tentang *hegemoni kultural* menjadi relevan. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya beroperasi melalui represi, tetapi juga melalui persuasi—yakni dengan menjadikan nilai-nilai dominan tampak sebagai "nalar umum". Ketika aktor gerakan menerima nilai-nilai kekuasaan—misalnya, mengutamakan loyalitas politik di atas keberpihakan pada rakyat, atau menilai keberhasilan dari seberapa dekat mereka dengan pusat kekuasaan—maka sesungguhnya

mereka telah menjadi bagian dari mekanisme hegemonik itu sendiri. Inilah momen ketika oposisi kehilangan daya kritis dan subversifnya, ketika radikalisme berganti dengan konformitas.

Lebih lanjut, dalam konteks gerakan mahasiswa seperti PMII, pragmatisme yang tidak terjaga bisa merusak proses kaderisasi secara sistemik. Kader tidak lagi dibentuk untuk menjadi subjek pembebasan, tetapi dipersiapkan untuk menjadi alat dalam sirkuit kekuasaan. Orientasi kaderisasi bergeser: dari membangun daya kritis menjadi mencetak loyalis; dari pendidikan emansipatoris menjadi pelatihan politis yang dangkal. Dalam situasi semacam ini, gerakan tak ubahnya birokrasi ideologis yang hidup dari simbol, bukan dari substansi perjuangan.

Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukanlah penolakan total terhadap pragmatisme, tetapi kemampuan untuk menundukkannya pada prinsip. Strategi harus ditimbang dengan kompas nilai, bukan sekadar peluang. Seperti dikatakan oleh Václav Havel (1985), kekuatan sejati dalam politik adalah "power of the powerless"—yakni kekuatan yang lahir dari keberanian untuk hidup dalam kebenaran, bukan dari kemampuan bermain dalam arena kekuasaan semu.

Dalam konteks gerakan mahasiswa, termasuk PMII, godaan pragmatisme tidak datang dalam bentuk yang frontal, melainkan menyusup secara halus dan sistematis ke dalam pola pikir dan perilaku kader. Pragmatisme muncul sebagai pilihan yang tampak rasional di tengah tekanan realitas: kerja sama oportunistik dengan elite politik atas nama "akses strategis", pergeseran orientasi kader dari aktivis ideologis menjadi politisi karbitan yang haus posisi, hingga ketertarikan pada fasilitas dan jabatan tanpa kedalaman komitmen terhadap nilai-nilai perjuangan.

Fenomena ini bukan sekadar kegagalan personal,

melainkan gejala struktural yang menunjukkan adanya perubahan medan sosial tempat para aktivis dibentuk. Pierre Bourdieu (1991), melalui konsep *habitus* dan *field*, menjelaskan bahwa setiap individu mengembangkan disposisi—cara berpikir, merasa, dan bertindak—yang dipengaruhi oleh struktur sosial tempat ia berada. Dalam hal ini, *habitus* aktivis yang sebelumnya dibentuk oleh logika perjuangan (emansipasi, keadilan, nilai) mulai digantikan oleh *habitus kekuasaan*, yaitu disposisi yang menyesuaikan diri dengan kalkulasi politik, kompetisi jabatan, dan loyalitas terhadap patron.

Ketika gerakan mulai menyesuaikan cara mainnya dengan logika kekuasaan demi bertahan, maka terjadi proses yang oleh Antonio Gramsci (1971) disebut sebagai *hegemonisasi*: dominasi ideologi kekuasaan tidak lagi dipaksakan secara represif, tetapi diterima secara sukarela oleh lawan ideologisnya. Dalam kondisi ini, oposisi kehilangan daya radikalnya, karena telah menyerap nilai-nilai yang seharusnya ia lawan.

Pragmatisme, dalam bentuknya yang moderat, memang bisa menjadi strategi kontekstual yang berguna untuk memperluas pengaruh. Namun ketika ia menjadi orientasi utama, maka gerakan berubah menjadi instrumen kekuasaan, bukan lagi kekuatan kritis yang mengoreksi dan membebaskan. Ini adalah titik balik yang berbahaya, karena menandakan bahwa gerakan telah kehilangan kompas ideologisnya.

PMII, sebagai gerakan mahasiswa yang lahir dari semangat pembebasan dan keberpihakan, harus secara aktif melawan arus ini. Ia harus menegaskan kembali bahwa posisi bukan tujuan, kekuasaan bukan warisan, dan perjuangan bukan jalan pintas. Tanpa upaya sadar untuk menjaga integritas ideologis, gerakan akan terjerembab

dalam banalitas politik praktis yang justru menggerogoti legitimasi sosialnya sendiri.

Pragmatisme juga sering kali menjadi gerbang lunak yang menggerus militansi kader. Gerakan yang pada dasarnya dirancang sebagai ruang pembentukan karakter, penyemaian nilai, dan penyadaran ideologis, perlahan bergeser menjadi sarana mobilitas sosial dan batu loncatan untuk ambisi pribadi. Orientasi kader tidak lagi tertuju pada perubahan struktural yang membebaskan, tetapi pada pencapaian individual yang bersifat sementara dan dangkal.

Dalam atmosfer semacam ini, nilai-nilai fundamental dalam khazanah etika Islam—seperti *al-haqq* (kebenaran), *al-ʿadl* (keadilan), dan *al-amanah* (integritas)—tidak lagi menjadi ruh gerakan, melainkan slogan kosong yang tidak mengakar dalam praksis. Yang mengemuka adalah logika transaksional: relasi dibangun bukan atas dasar visi bersama, melainkan kepentingan sementara; posisi dikejar bukan untuk memperjuangkan nilai, tetapi untuk mengamankan privilese.

Ali Syariati (1979), seorang pemikir revolusioner dari Iran, telah lama mengingatkan tentang bahaya ini. Dalam karyanya *Tugas Cendekiawan Muslim*, ia menekankan bahwa gerakan Islam akan lumpuh dan kehilangan daya transformasinya apabila gagal membedakan antara "*quwwah ruhiyah*" (kekuatan spiritual) dan "*laʿibah siyasiyah*" (permainan politik). Ketika kekuatan spiritual yang seharusnya menjadi penggerak utama gerakan digantikan oleh intrik kekuasaan, maka yang tersisa hanyalah organisasi kosong yang bergerak tanpa arah.

Pragmatisme yang tidak terkendali menjadikan kader kehilangan *militansi ruhiyah*, yaitu keteguhan dalam nilai meski menghadapi tekanan realitas. Militansi yang dulunya terwujud dalam pengorbanan, konsistensi, dan keberanian bersuara kini digantikan oleh kalkulasi untung-rugi yang

kering dari idealisme. Inilah krisis eksistensial yang harus diwaspadai oleh gerakan mahasiswa, khususnya PMII.

Dalam konteks ini, tantangan bukan hanya melawan kekuasaan eksternal, tetapi juga melawan banalitas internal—yakni kecenderungan kader untuk menghalalkan segala cara demi hasil jangka pendek. Perjuangan sejati memerlukan penyucian niat, penajaman visi, dan pendalaman komitmen ideologis agar gerakan tidak sekadar menjadi kendaraan politik, melainkan tetap menjadi ruang pembebasan yang otentik.

Godaan pragmatisme juga berakar dari perubahan lanskap sosial-politik yang semakin liberal, individualistik, dan kompetitif. Dalam masyarakat kontemporer yang digerakkan oleh logika pasar dan obsesif terhadap performativitas, keberhasilan suatu gerakan tidak lagi dinilai dari keteguhan moral atau keberpihakan ideologis, tetapi dari seberapa efektif ia tampil di ruang publik, menjangkau media, memperoleh sumber daya, dan mendekat ke pusat kekuasaan. Reputasi menjadi lebih penting daripada substansi, dan pengaruh dianggap lebih berharga daripada integritas.

Dalam konteks semacam ini, Jean Baudrillard (1994) dalam *Simulacra and Simulation* memperingatkan bahwa kita tengah hidup dalam era *simulacra*, di mana simbol tidak lagi merujuk pada realitas yang sebenarnya, melainkan menciptakan realitas semu yang mendistorsi makna. Simbol perjuangan—seperti demonstrasi, spanduk, atau bahkan tokoh kharismatik—bisa kehilangan maknanya jika tidak dibarengi dengan kedalaman etis dan kesungguhan praksis. Di sinilah gerakan kerap terjebak: mempertahankan simbolik perlawanan, namun kehilangan akar eksistensialnya.

Dalam era ini, banyak gerakan mahasiswa termasuk PMII menghadapi dilema representasi: antara menjaga

konsistensi perjuangan yang sunyi namun bermakna, atau mengejar validasi publik yang cepat namun rapuh. Ketika wajah gerakan lebih sibuk "menampilkan perlawanan" daripada *menjalankan perlawanan*, maka yang terjadi adalah kehilangan otentisitas. Sebuah organisasi bisa terlihat "aktif" dalam ruang digital dan publik, tetapi nihil dalam keberpihakan nyata terhadap masyarakat termarjinalkan.

Pragmatisme, dalam suasana ini, hadir sebagai respons terhadap tekanan sistemik—tekanan untuk tetap relevan, eksis, dan diperhitungkan. Namun tanpa pengendalian nilai, respons tersebut dengan mudah melenceng menjadi akomodasi terhadap kekuasaan dan pasar. Gerakan bukan lagi antitesis dari sistem yang menindas, melainkan komplementer yang justru melanggengkannya.

Maka, tantangan utama bukan sekadar menjaga moralitas kader secara individual, tetapi membangun sistem nilai kolektif yang mampu menahan derasnya arus pragmatisme struktural. Dibutuhkan keberanian untuk tampil *tidak populer*, bila itu berarti tetap berpihak pada nilai dan kebenaran. Dibutuhkan *etos istikamah*—yakni komitmen jangka panjang untuk tetap setia pada jalan perjuangan, meski tidak selalu mendapat sorotan kamera atau panggung kekuasaan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi seperti PMII untuk membangun *mekanisme ketahanan nilai*—sebuah sistem internal yang tidak hanya menjaga keberlangsungan struktur organisasi, tetapi juga memelihara integritas ideologis dan spiritual gerakan. Dalam arus zaman yang mudah menggoda dengan kemewahan posisi dan ilusi pengaruh, nilai adalah jangkar yang mencegah gerakan terombang-ambing oleh pragmatisme.

Mekanisme ini dapat dibangun melalui proses kaderisasi ideologis yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran kritis dan spiritualitas

perjuangan. Regenerasi harus berlangsung secara sehat dan berkesinambungan, dengan memprioritaskan kualitas integritas dan kapasitas berpikir, bukan sekadar loyalitas struktural atau kecepatan menanjak karier organisasi. Di samping itu, evaluasi terhadap arah gerakan—baik secara ideologis maupun taktis—perlu dilakukan secara periodik, jujur, dan reflektif, agar gerakan tidak kehilangan pijakan dalam euforia momentum.

Dalam konteks ini, kembali kepada nilai-nilai Islam bukanlah langkah konservatif, melainkan revitalisasi spiritual yang justru memperkuat komitmen etis gerakan. Rasulullah saw. telah menekankan bahwa seluruh amal manusia ditentukan oleh niatnya: *"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya"* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini bukan sekadar prinsip teologis, tetapi juga pondasi moral politik: bahwa semua bentuk aktivisme, advokasi, maupun manuver taktis harus senantiasa dikawal oleh niat yang ikhlas dan lurus—untuk kemaslahatan umat, bukan ambisi pribadi; untuk keadilan sosial, bukan akumulasi kekuasaan.

Tanpa niat yang terarah dan nilai yang kokoh, gerakan akan mudah tergelincir menjadi instrumen elite, kehilangan watak profetiknya, dan justru menjadi bagian dari sistem yang dulunya dikritik. Maka, menjaga niat dalam gerakan bukan hal sepele, melainkan kerja strategis dan spiritual yang menentukan apakah gerakan akan menjadi obor perubahan atau sekadar bayangan kekuasaan.

Sebagai penutup, penting untuk diakui bahwa godaan pragmatisme dalam tubuh gerakan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya bisa dihindari. Ia adalah bagian dari dinamika historis dan politik yang melekat dalam setiap organisasi perlawanan. Namun, yang menentukan arah gerakan bukanlah keberadaan godaan itu sendiri, melainkan bagaimana organisasi menghadapinya—secara sadar, kritis, dan konsisten terhadap nilai.

Kekuatan sejati dari sebuah gerakan tidak terletak pada kecepatan meraih akses ke pusat kekuasaan, melainkan pada kemampuannya menjaga akar: nilai-nilai yang mempertautkan perjuangan dengan keadilan, integritas, dan keberpihakan kepada mereka yang terpinggirkan. Ketika nilai-nilai ini dijaga dan diperjuangkan secara sungguh-sungguh, maka gerakan akan tetap memiliki daya hidup meski berhadapan dengan arus pragmatisme yang kuat.

Dalam konteks ini, PMII mesti terus bersikap *murāqabah*—yakni waspada dan mawas diri—terhadap potensi penyimpangan arah perjuangan. Tantangan terbesar bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam: ketika gerakan perlahan kehilangan jiwanya, menjelma menjadi struktur yang kaku, dan terjebak dalam kompromi yang membungkam suara kritis. Maka, PMII harus menolak menjadi perpanjangan tangan kekuasaan yang hanya mengamini narasi dominan, dan justru meneguhkan diri sebagai *ruh kritis* yang setia pada prinsip kebenaran, meski tidak selalu populer atau menguntungkan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Sayyid Qutb, "Perjuangan bukanlah tentang kemenangan yang cepat, tetapi tentang tetap teguh dalam jalan yang benar, meski terasa berat dan sepi." Inilah tugas historis sekaligus moral dari setiap kader dan pemimpin gerakan: menjaga nyala ide, bukan sekadar memainkan posisi.

B. KADERISASI YANG STAGNAN DAN KEHILANGAN ARAH IDEOLOGIS

Setiap gerakan perubahan sejati mensyaratkan keberadaan kader sebagai aktor historis yang tidak hanya memahami konteks zamannya, tetapi juga memiliki komitmen untuk mentransformasikannya. Dalam tubuh

organisasi mahasiswa seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kader bukanlah sekadar pelengkap struktur atau pelaksana agenda, melainkan subjek ideologis—manusia pembelajar yang membawa nilai, visi, dan misi organisasi ke tengah realitas sosial yang kompleks. Kader adalah ruh dari gerakan, sekaligus jantung dari keberlanjutan transformasi.

Namun, tantangan hari ini sangat nyata: kaderisasi yang stagnan dan kehilangan arah ideologis. Proses yang semula dimaksudkan sebagai ruang dialektika ide, pembentukan kesadaran kritis, dan pematangan militansi, kini kerap merosot menjadi sekadar mekanisme administratif yang prosedural. Alih-alih menjadi pengalaman intelektual dan spiritual yang membebaskan, kaderisasi justru berubah menjadi rutinitas yang kehilangan daya gugah, kehilangan roh perjuangan.

Fenomena ini sejalan dengan kritik Paulo Freire (1970) terhadap *"banking concept of education"*—di mana proses pendidikan diperlakukan sebagai aktivitas memindahkan pengetahuan dari subjek pasif ke subjek pasif lainnya, tanpa membuka ruang bagi refleksi kritis. Dalam konteks kaderisasi PMII, hal ini tampak dalam kecenderungan formalisasi: pelatihan hanya menjadi agenda seremonial; pembacaan buku digantikan oleh slide presentasi; dan dialog ideologis tergeser oleh konsolidasi teknokratis. Akibatnya, kader tumbuh tanpa pondasi nilai yang kokoh, serta tanpa arah perjuangan yang visioner.

Di sinilah letak kegelisahan kita. Ketika kaderisasi kehilangan dimensi ideologisnya, maka gerakan kehilangan arah jangka panjangnya. Ideologi, dalam pengertian yang tidak sempit, adalah kerangka nilai dan kesadaran kolektif yang menuntun arah tindakan. Tanpa itu, PMII berisiko menjadi organisasi yang sekadar aktif secara kegiatan, namun pasif secara keberpihakan. Aktivisme tanpa ideologi

akan mudah tergoda oleh arus pragmatisme, dan mudah dibajak oleh kekuatan-kekuatan eksternal yang menjauh dari cita-cita keadilan dan pembebasan.

Sebagaimana ditekankan oleh Cornel West (1993), pendidikan sejati—dan dalam hal ini kaderisasi—harus mampu membangkitkan *"prophetic fire"*, api kenabian yang menyalakan semangat keadilan dan empati radikal. Maka, membenahi sistem kaderisasi bukan sekadar memperbaiki kurikulum pelatihan, tetapi menghidupkan kembali semangat ideologis sebagai pusat gravitasi gerakan.

Stagnasi kaderisasi dalam tubuh organisasi mahasiswa seperti PMII bukan semata problem teknis-metodologis, melainkan refleksi dari krisis nilai yang lebih dalam. Ia mencerminkan melemahnya semangat pembebasan, kaburnya arah perjuangan, dan mengendurnya kesadaran akan pentingnya kader sebagai agen perubahan. Dalam banyak kasus, kaderisasi telah terjebak dalam formalisme: ia hadir sebagai agenda tahunan yang wajib dijalankan, tetapi kehilangan makna substantif sebagai ruang pematangan ideologis dan pemekaran kesadaran sosial.

Alih-alih menjadi ruang pembentukan pemikiran kritis, progresif, dan emansipatoris, kaderisasi justru kerap memperkuat mentalitas pasif, hierarkis, bahkan dogmatis. Proses pengkaderan lebih menekankan pada kepatuhan terhadap narasi tunggal, bukan pencarian makna secara reflektif. Akibatnya, muncul kader yang lebih terlatih dalam menghafal diktum organisasi ketimbang menggugat ketimpangan sosial; lebih fasih dalam mengelola forum daripada membaca denyut zaman.

Kondisi ini menggambarkan dengan tepat kritik Paulo Freire (1970) tentang *"banking concept of education"*, yakni model pendidikan yang menempatkan peserta didik (dalam hal ini: kader) sebagai wadah kosong yang harus diisi oleh pengetahuan dari atas. Dalam paradigma ini, relasi antara

fasilitator dan peserta tidak dibangun atas dasar dialog kritis, melainkan dominasi dan subordinasi. Pendidikan semacam ini, kata Freire, bukan hanya gagal membebaskan, tetapi justru mereproduksi ketundukan.

Kaderisasi yang seharusnya menjadi wahana pembebasan (liberation), justru terjebak dalam mekanisme reproduksi struktur lama yang hierarkis dan elitis. Sebuah proses yang mestinya menggugat realitas dan menciptakan dunia baru, kini malah berkontribusi pada pelanggengan status quo. Di titik inilah kaderisasi kehilangan daya emansipatorisnya.

Dalam konteks PMII, urgensi pembaruan kaderisasi tidak bisa ditunda. Ia harus dikembalikan pada jati dirinya: sebagai ruang transformatif yang memadukan pembacaan realitas, pemahaman nilai, dan komitmen aksi. Kader tidak cukup hanya memahami sejarah organisasi, tetapi harus mampu menarasikan sejarah baru yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Maka, tugas kita hari ini bukan hanya memperbaiki metode, tetapi merevitalisasi ruh ideologis dari kaderisasi itu sendiri—agar ia kembali menjadi jalan membentuk manusia merdeka, yang berpikir tajam, bertindak adil, dan berani melawan.

Krisis ideologis dalam kaderisasi merupakan gejala mendalam dari keterputusan antara nilai dan praksis. Ia terjadi ketika nilai-nilai dasar yang semestinya menjadi ruh pembebas justru kehilangan daya transformasinya dalam proses pembelajaran. Ideologi—yang sejatinya adalah cara pandang yang membentuk kesadaran kritis terhadap struktur penindasan, ketimpangan sosial, dan cita-cita keadilan—berubah menjadi sekadar retorika yang diulang tanpa makna. Ia tidak lagi hidup dalam pikiran dan tindakan kader, melainkan beku sebagai slogan yang dipajang dalam spanduk, tanpa diinternalisasi sebagai kompas perjuangan.

Dalam banyak konteks, ideologi bahkan telah direduksi menjadi instrumen kekuasaan internal—alat untuk mempertahankan otoritas elite organisasi atau mengamankan kepentingan eksternal yang tidak selalu sejalan dengan cita-cita perubahan. Seperti yang dikritik Slavoj Žižek (1994), ideologi dalam situasi seperti ini justru berfungsi sebagai "ilusi yang tidak kita sadari sebagai ilusi", karena ia menutupi kenyataan bahwa gerakan telah menjauh dari raison d'être-nya: membebaskan manusia dari dominasi.

Jean-Paul Sartre dalam *Existentialism Is a Humanism* (1946) pernah menegaskan bahwa ideologi bukanlah dogma mati, melainkan panggilan untuk bertindak dalam dunia yang konkret. Ketika ideologi kehilangan dimensi praksisnya, ia berhenti menjadi kekuatan revolusioner dan menjelma menjadi mitos yang dikeramatkan. Dalam konteks PMII, kondisi ini tampak ketika doktrin ideologis hanya dijadikan identitas simbolik—dihafal saat Pelatihan Kader, tetapi tidak lagi relevan dalam merespons realitas digital, krisis iklim, kemiskinan struktural, atau marginalisasi sosial.

Situasi ini menimbulkan dua risiko besar: pertama, kaderisasi kehilangan daya reflektifnya dan hanya melahirkan kader teknokrat, bukan intelektual-organik. Kedua, gerakan menjadi rentan terhadap kooptasi oleh kekuatan eksternal, karena tidak lagi memiliki akar ideologis yang kuat untuk menolak kompromi pragmatis. Sebagaimana diingatkan Antonio Gramsci (1971), setiap krisis ideologi adalah saat ketika yang lama belum sepenuhnya mati dan yang baru belum sepenuhnya lahir—sehingga melahirkan ruang kosong yang bisa diisi oleh kekuatan dominan.

Oleh karena itu, revitalisasi ideologi dalam kaderisasi adalah keniscayaan. Bukan sebagai dogma yang mengikat, tetapi sebagai alat baca realitas yang terus diperbarui, sebagai

sumber inspirasi yang membebaskan, dan sebagai fondasi etik-politik dalam mengambil posisi di tengah kemelut zaman. Sebab tanpa arah ideologis yang jelas, gerakan akan kehilangan nyawa historisnya dan terseret menjadi bagian dari status quo yang justru dahulu ia lawan.

Menurut Antonio Gramsci (1971), setiap kelas atau kelompok sosial yang bercita-cita mengubah tatanan sosial-politik yang hegemonik, wajib melahirkan dan membina apa yang ia sebut sebagai *intelektual organik*. Berbeda dengan *intelektual tradisional*—yang kerap terlepas dari basis material dan terjebak dalam menara gading akademik—*intelektual organik* adalah mereka yang lahir dari denyut kehidupan rakyat, berpikir bukan demi prestise, tetapi demi pembebasan, dan bertindak bukan untuk status, melainkan untuk perjuangan.

Dalam kerangka ini, kaderisasi dalam tubuh organisasi seperti PMII seharusnya bukan hanya proses teknis yang menghasilkan administrator, fasilitator, atau pejabat struktural. Ia harus menjadi ruang dialektis yang membentuk kesadaran historis dan keberpihakan ideologis. Kader tidak boleh hanya menjadi "pengurus" yang menjalankan program, tetapi harus menjelma menjadi *subjek pemikir*—yang mampu membaca zaman, merumuskan strategi perubahan, dan berdiri di garda depan perlawanan terhadap ketimpangan sosial.

Ketiadaan *intelektual organik* menyebabkan kaderisasi mengalami reduksi peran. Proses yang semestinya membebaskan justru menjadi alat represi simbolik: membentuk kader yang patuh, bukan yang kritis; yang tunduk pada struktur, bukan yang menggugat ketidakadilan. Inilah yang dikhawatirkan Gramsci: ketika gerakan gagal melahirkan intelektual organik, maka ia akan kehilangan daya hegemoniknya dan terjebak menjadi reproduktor status quo.

Di tengah realitas sosial yang semakin kompleks—dengan ancaman populisme, krisis iklim, dan ketimpangan digital—PMII harus menjawab tantangan zaman dengan melahirkan kader-kader yang bukan hanya paham teori, tetapi juga mampu menerjemahkan teori ke dalam praksis. Mereka yang tak hanya hafal nalar kritis, tetapi juga hadir di tengah rakyat, memperjuangkan nasib kaum kecil, dan menjaga integritas nilai-nilai Islam yang membebaskan.

Membangun *intelektual organik* berarti membangun jembatan antara nalar dan nurani, antara ilmu dan amal, antara wacana dan gerakan. Tanpa itu, kaderisasi akan tetap stagnan, gerakan akan kehilangan arah, dan perubahan hanya akan menjadi mimpi yang terus tertunda.

Fenomena krisis kaderisasi dan ideologisasi dalam organisasi mahasiswa seperti PMII tidak dapat dilepaskan dari melemahnya *mata rantai intelektual* antar generasi. Tradisi intelektual yang seharusnya ditransmisikan secara organik dari satu generasi ke generasi berikutnya mengalami kerapuhan struktural. Generasi pendahulu yang pernah membawa semangat pembaruan ideologis gagal membangun ekosistem regeneratif yang sehat. Sebaliknya, generasi baru dibiarkan bergerak dalam ruang hampa—kehilangan orientasi historis dan ideologis yang seharusnya menjadi fondasi perjuangan.

Dalam situasi ini, kaderisasi cenderung mengalami dekadensi. Aktivitas membaca karya-karya kritis digantikan oleh konsumsi konten instan. Budaya menulis melemah, tergantikan oleh repetisi jargon. Ruang-ruang diskusi ideologis yang dulu menjadi ruang tempaan intelektual kini tergeser oleh seminar pragmatis dan kegiatan yang bersifat kosmetik. Dalam istilah Baudrillard (1994), ini adalah gejala *simulacra*: ketika simbol gerakan tetap dipertahankan, tetapi makna dan praksisnya menghilang.

Edward Said (1994) dalam *Representations of the*

Intellectual menegaskan bahwa intelektual sejati adalah mereka yang "selalu berada dalam posisi oposisi terhadap kekuasaan yang korup, melawan arus dominan, dan berbicara atas nama mereka yang dibungkam." Dalam konteks gerakan mahasiswa, ini berarti kader tidak cukup hanya aktif secara struktural, tetapi harus mampu menjadi suara kritis yang menantang stagnasi internal dan ketidakadilan eksternal.

Ketiadaan figur-figur *intelektual organik* dalam organisasi juga menandai krisis keberlanjutan gerakan. Tidak ada tokoh-tokoh yang mampu menjadi *penuntun ideologis* bagi generasi baru—yang tak hanya menguasai teks, tetapi juga terjun langsung dalam praksis sosial. Akibatnya, gerakan kehilangan arah, dan kader hanya bergerak dalam lingkaran teknis yang tidak menghasilkan transformasi substantif.

Untuk keluar dari krisis ini, PMII harus membangun kembali jembatan antar generasi. Diperlukan ruang kaderisasi ideologis yang serius, kontinuitas kurikulum intelektual yang visioner, dan pembinaan yang tak sekadar mengejar output struktural, tetapi lebih kepada *proses pembentukan karakter intelektual dan moral*. Sebab, seperti yang diyakini oleh Paulo Freire (1970), pendidikan (termasuk pendidikan kader) hanya akan bermakna jika bersifat dialogis, membebaskan, dan membangun kesadaran kritis terhadap dunia.

Dalam tradisi Islam, proses kaderisasi bukan hanya persoalan teknis organisasi atau sekadar mekanisme perekrutan anggota baru. Ia adalah *proses pembentukan manusia seutuhnya*—yang melibatkan dimensi spiritual, intelektual, dan sosial secara integral. Konsep tazkiyatun nafs (penyucian jiwa) dalam Al-Qur'an—*"Qad aflaha man zakkāhā, wa qad khāba man dassāhā"* (QS. Asy-Syams: 9-10)—menunjukkan bahwa kerja kaderisasi adalah kerja

pembebasan dari hawa nafsu dan kesadaran palsu. Kader bukan sekadar "siap berjuang", tetapi siap memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain.

Selanjutnya, konsep *ta'dib*, sebagaimana dijelaskan oleh Syed Naquib Al-Attas (1993), adalah pendidikan yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan ('ilm), tetapi juga membentuk adab. Ta'dib bertujuan membangun manusia yang memiliki tata krama terhadap Tuhan, ilmu, masyarakat, dan lingkungan. Dalam kerangka ini, kaderisasi sejati adalah proses panjang pembiasaan etis—di mana kader tidak hanya belajar berpikir kritis, tetapi juga belajar beradab terhadap pengetahuan dan perbedaan.

Di sisi lain, *tahdzir* adalah persiapan menghadapi realitas. Ia adalah latihan kesadaran sosial dan kesiapan bertindak menghadapi tantangan zaman. Dalam sejarah kenabian, Rasulullah ﷺ mempersiapkan para sahabat bukan hanya dengan ilmu dan spiritualitas, tetapi juga dengan *fiqh al-waqi'*—pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, politik, dan budaya zamannya. Maka tidak heran, para sahabat seperti Abu Dzar al-Ghifari dikenal karena keberaniannya melawan kemapanan, sementara Ali bin Abi Thalib dikenal karena kedalaman ilmu dan konsistensinya menjaga keadilan.

Kaderisasi yang ideal dalam perspektif Islam berdiri di atas tiga pilar yang dijalankan Rasulullah ﷺ: *ilmu* (pencerahan intelektual), *amal* (komitmen praksis), dan *akhlak* (integritas pribadi). Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Ilmu tanpa amal adalah kesia-siaan. Amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Dan keduanya tanpa akhlak hanyalah kehampaan moral.

Dalam konteks PMII, konsep ini menuntut proses kaderisasi yang menyeluruh dan transformatif. Artinya, tidak cukup hanya menyelenggarakan pelatihan teknis atau manajerial. Kaderisasi harus menanamkan *ruh perjuangan*

dan kesadaran diri sebagai *khalifah fil ardh*—manusia yang memiliki tanggung jawab sosial untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Kembali pada prinsip Islam, kader yang ideal adalah mereka yang *berpikir jernih seperti ulama, bergerak gigih seperti mujahid, dan bersikap rendah hati seperti sufi.*

Oleh karena itu, PMII perlu melakukan reorientasi besar terhadap sistem kaderisasinya. Reorientasi ini tidak sekadar pembaruan metode, tetapi pembangkitan kembali *ruh gerakan*—sebuah paradigma yang menjadikan kaderisasi sebagai proses pembentukan *subjek historis* yang sadar, berani, dan berpihak. Kaderisasi tidak boleh berhenti pada penguasaan teknis organisasi atau hafalan AD/ART, melainkan harus menjadi *ruang emansipasi*, di mana kader dilatih membaca realitas dan mengintervensinya dengan keberpihakan.

Dalam hal ini, kesadaran sejarah menjadi sangat penting. Tanpa pemahaman tentang akar ketimpangan, kolonialisme budaya, dan warisan otoritarianisme, gerakan akan kehilangan arah perjuangan. Ideologi bukan semata slogan, melainkan lensa untuk memahami kenyataan dan alat untuk mentransformasikannya. Seperti dikatakan Karl Mannheim (1936), ideologi sejati adalah "*consciousness of action*"—kesadaran yang mengarah pada tindakan transformasional.

Lebih jauh, kaderisasi PMII harus memasukkan isu-isu kontemporer ke dalam kerangka pembelajaran: krisis iklim yang merusak masa depan generasi muda, ekspansi kapitalisme digital yang memonopoli ruang hidup dan data, kemiskinan struktural yang mencabut hak-hak dasar warga, serta regresi demokrasi yang merusak partisipasi politik. Semua itu bukan sekadar isu kebijakan, tetapi medan juang baru bagi kader intelektual-progresif.

Dengan demikian, kaderisasi tidak lagi menjadi

ruang pelatihan administratif atau seremoni tahunan yang membosankan, tetapi menjadi *laboratorium pembebasan*—sebuah tempat di mana kader diuji nalar kritisnya, diasah sensitivitas sosialnya, dan dibangun militansi etikanya. Di sanalah lahir pemimpin yang tak hanya fasih berbicara, tetapi juga berani berdiri di tengah rakyat, berpihak pada kebenaran, dan tahan uji oleh godaan zaman.

Tanpa pembaruan yang mendalam dan berkelanjutan, kaderisasi yang stagnan hanya akan mencetak kader fungsional—mereka yang cekatan dalam menjalankan tugas teknis, tetapi kehilangan arah juang dan visi perubahan. Mereka bisa menjadi administrator yang rapi, namun bukan agen transformasi. Padahal, esensi dari gerakan mahasiswa bukanlah efisiensi struktural, melainkan keberanian ideologis. Sebaliknya, kaderisasi yang dilandasi semangat reflektif dan ideologis akan melahirkan kader transformatif—yakni individu yang tidak hanya memahami zamannya, tetapi juga mampu meresponsnya dengan nilai, gagasan, dan aksi nyata. Kader seperti inilah yang disebut oleh Gramsci sebagai "intelektual organik": mereka yang berpihak, berpikir, dan bertindak demi perubahan sosial yang berkeadilan.

C. PERLUASAN MEDAN JUANG: MEDIA SOSIAL, DESA, DAN EKOSISTEM DIGITAL

Di era kontemporer, medan juang tidak lagi terbatas pada ruang-ruang fisik seperti kampus, jalanan, atau forum diskusi tatap muka. Perubahan teknologi informasi telah menciptakan spektrum baru perjuangan: dunia digital. Media sosial, komunitas daring, platform literasi digital, hingga ruang-ruang virtual kini menjadi arena pertarungan ide, konsolidasi gerakan, sekaligus tempat perebutan makna dan wacana.

Gerakan mahasiswa seperti PMII mesti membaca perubahan ini bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peluang strategis. Perluasan medan juang ke wilayah media sosial dan desa digital bukan hanya adaptasi teknologis, melainkan keharusan historis untuk tetap relevan dan responsif terhadap realitas baru.

Media Sosial: Pertempuran Wacana dan Kesadaran

Media sosial telah menjadi ruang hegemoni baru. Dalam istilah Manuel Castells (2009), masyarakat kini hidup dalam *network society*, di mana kekuasaan terdistribusi melalui arus informasi dan jaringan komunikasi. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata atau modal, tetapi oleh siapa yang mampu memproduksi dan menyebarkan narasi.

Sayangnya, ruang ini juga menjadi ladang subur bagi hoaks, propaganda politik, disinformasi, dan polarisasi sosial. Maka kader-kader PMII harus hadir sebagai *content creator ideologis*—bukan sekadar penikmat informasi, tetapi produsen makna yang kritis. Media sosial mesti dimanfaatkan sebagai ruang dakwah sosial, advokasi nilai, serta perluasan jejaring solidaritas.

Dalam istilah Henry Jenkins (2006), ini adalah bagian dari *participatory culture*, di mana individu tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga kontributor aktif dalam produksi budaya. Maka penting untuk melatih kader dalam literasi digital, desain narasi visual, hingga teknik kampanye berbasis isu yang etis dan berbobot.

Desa: Medan Juang yang Sering Terlupakan

Di tengah hiruk-pikuk digitalisasi, desa kerap dianggap pinggiran. Padahal desa adalah ruang strategis transformasi sosial—tempat krisis dan potensi bertemu. Ketimpangan

pembangunan, eksploitasi sumber daya, dan krisis ekologis paling nyata dirasakan di desa. Namun di saat yang sama, desa juga menyimpan kekuatan budaya, solidaritas komunitas, dan kebijaksanaan lokal.

Dalam semangat itu, kader PMII perlu "turun gunung"—membawa semangat perubahan ke pelosok desa, bukan hanya kota. Pendekatan seperti *community organizing*, *participatory rural appraisal*, dan *sociopreneurship* menjadi penting untuk memperluas daya jangkau gerakan. PMII bisa menjadi jembatan antara desa dan kota, antara teknologi dan tradisi, antara wacana perubahan dan kerja nyata di akar rumput.

Seperti yang dikemukakan oleh Ivan Illich (1973), pembangunan yang bermakna harus bersandar pada kemandirian komunitas, bukan ketergantungan pada struktur luar. PMII perlu membangun kader yang mampu hidup dan bekerja di desa dengan visi pembebasan, bukan sebagai penyuluh dari atas, tetapi sebagai sahabat yang belajar bersama rakyat.

Ekosistem Digital: Dari Akses ke Aksi

Era digital bukan hanya tentang penggunaan gadget atau akses internet, tetapi tentang kemampuan membangun *ekosistem digital* yang sehat, adil, dan emansipatif. Ini mencakup pengembangan platform alternatif, penggunaan teknologi untuk advokasi, serta pembentukan komunitas berbasis nilai di ruang daring.

PMII harus mampu memfasilitasi lahirnya *platform kaderisasi digital*—dari kelas pemikiran online, e-book ideologi, hingga ruang kolaboratif virtual. Inisiatif ini tidak untuk menggantikan kaderisasi konvensional, tetapi untuk melengkapinya dan memperluas jangkauannya. Generasi digital membutuhkan pendekatan yang kontekstual—yang

memahami algoritma, ritme informasi, dan budaya visual.

Namun penting juga diingat, teknologi bukan netral. Sebagaimana diingatkan oleh Langdon Winner (1986), teknologi membawa nilai dan bisa memperkuat relasi kuasa yang timpang jika tidak dikontrol secara etis dan demokratis. Maka gerakan digital PMII harus berbasis pada nilai-nilai inklusif, humanis, dan berkeadilan, bukan semata mengikuti tren pasar.

Jadi, Perluasan medan juang ke media sosial, desa, dan ekosistem digital bukan soal strategi teknis belaka, melainkan agenda ideologis dan praksis. Di sinilah PMII ditantang untuk keluar dari zona nyaman kampus dan birokrasi organisasi, menuju ranah-ranah baru yang dinamis dan kompleks. Sebab perjuangan hari ini tidak lagi dibatasi ruang dan waktu—ia menuntut kehadiran di mana pun ketimpangan terjadi dan perubahan dibutuhkan.

D. MEMBANGUN KEMBALI INTEGRITAS DAN SEMANGAT PERJUANGAN

Setiap gerakan, sekuat dan seteguh apa pun, akan selalu menghadapi titik jenuh, distorsi nilai, dan ancaman erosi integritas. Ini bukan karena lemahnya gagasan awal, tetapi karena dinamika sejarah dan tekanan struktural yang terus bergulir. Dalam konteks ini, membangun kembali integritas dan semangat perjuangan bukanlah nostalgia romantik, tetapi langkah strategis untuk menjaga relevansi dan daya transformasi gerakan.

Integritas adalah jiwa dari gerakan. Ia tidak sekadar berarti kejujuran pribadi, tetapi keberanian kolektif untuk tetap setia pada nilai dan cita-cita perjuangan, meski dihadapkan pada godaan pragmatisme, kooptasi kekuasaan, dan tekanan material. Tanpa integritas, gerakan kehilangan

ruhnya—menjadi sekadar institusi tanpa arah, atau lebih parah, alat legitimasi status quo.

Integritas: Konsistensi Nilai dalam Arus Godaan

Integritas dalam gerakan mahasiswa harus dimaknai sebagai *kesetiaan ideologis yang teruji dalam praksis*. Dalam filsafat eksistensialisme, seperti yang dikemukakan oleh Jean-Paul Sartre (1946), manusia otentik adalah mereka yang tidak sekadar hidup sesuai harapan sosial, tetapi yang bertanggung jawab atas kebebasannya dalam memilih nilai dan hidup berdasarkan nilai itu, meski dunia menertawakannya.

Dalam konteks PMII, ini berarti kader harus mampu menolak kooptasi politik yang mereduksi nilai menjadi kalkulasi kekuasaan, menahan diri dari gaya hidup oportunis, dan terus membangun kapasitas berpikir serta keberanian bersikap. Integritas bukan warisan, tetapi hasil dari latihan panjang melalui pembacaan kritis realitas, kontemplasi ideologis, dan pengalaman praksis yang jujur.

Semangat Perjuangan: Energi Historis yang Terbarukan

Semangat perjuangan adalah *energi historis* yang hidup dalam tubuh gerakan. Ia tidak mati oleh zaman, tapi bisa mengendur jika tidak dirawat. Semangat ini bukan sekadar emosi sesaat, tetapi *pathos yang sadar*, gairah yang dipandu oleh pemahaman historis dan visi masa depan.

Frantz Fanon (1963) dalam *The Wretched of the Earth* menekankan pentingnya militansi yang bukan hanya fisik, tetapi intelektual dan moral. Perjuangan yang sejati harus lahir dari kesadaran mendalam tentang struktur penindasan dan komitmen untuk mengubahnya dari dalam. Di sinilah pentingnya membangun *militansi harapan*—sebuah tekad

kolektif yang tidak mudah menyerah, namun tetap terbuka pada kritik, refleksi, dan pembaruan.

Gerakan mahasiswa harus membangun kultur yang *celebrative* terhadap kerja-kerja kecil dan berkelanjutan, bukan hanya terhadap momen-momen spektakuler. Dalam dunia yang cepat dan penuh tekanan pencitraan, perlu kesadaran bahwa kerja ideologis sering bersifat diam-diam, akumulatif, dan tidak langsung terlihat hasilnya.

Jalan Pembaruan: Refleksi, Pendidikan, dan Konsolidasi

Membangun kembali integritas dan semangat perjuangan memerlukan strategi yang sistematis. *Pertama,* perlu refleksi kolektif: ruang-ruang muhasabah dan kritik internal yang jujur terhadap praktik gerakan. Tanpa ruang ini, gerakan bisa kehilangan arah karena sibuk dengan rutinitas tanpa evaluasi nilai.

Kedua, pendidikan kader harus kembali menjadi jantung organisasi. Pendidikan bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi *proses pembentukan watak dan visi*. Sebagaimana ditegaskan Paulo Freire (1970), pendidikan yang membebaskan adalah yang membangun kesadaran kritis dan mengembalikan martabat subjek untuk memahami dan mengubah dunia.

Ketiga, konsolidasi struktural dan kultural perlu dilakukan. Kader harus diajak kembali untuk terlibat dalam komunitas, membangun solidaritas, dan menghidupkan kembali kerja-kerja kolektif yang penuh makna. Dalam kerja bersama, semangat tumbuh; dalam saling berbagi beban, integritas dipelihara.

Penutup: Jalan Panjang yang Layak Ditempuh

Integritas dan semangat perjuangan bukan sekadar

retorika. Ia adalah napas gerakan yang harus dijaga, dirawat, dan diperbaharui. Di tengah dunia yang cepat berubah dan penuh godaan instan, PMII dan gerakan mahasiswa lainnya ditantang untuk menjadi *komunitas nilai*—tempat di mana idealisme bukan bahan lelucon, tetapi sumber kekuatan.

Sebagaimana kata-kata Nelson Mandela, *"After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb."* Memulihkan integritas dan semangat bukan akhir, melainkan permulaan baru dari perjuangan yang lebih matang dan terorganisir. PMII harus terus melangkah, bukan karena jalan sudah pasti, tetapi karena nilai yang diperjuangkan layak untuk diperjuangkan terus-menerus.

BAB VIII

MENUJU GERAKAN EMANSIPATORIS: MANIFESTO SOSIAL PMII UNTUK INDONESIA

Di tengah pusaran zaman yang penuh paradoks—antara kemajuan teknologi dan ketimpangan sosial, antara kebebasan politik dan krisis moral—gerakan mahasiswa dituntut untuk tidak hanya reaktif, tetapi proaktif dalam merumuskan masa depan. PMII, dengan warisan intelektual dan spiritualnya, tidak cukup hanya menjadi saksi sejarah, tetapi harus tampil sebagai penulis sejarah. Gerakan emansipatoris bukan sekadar retorika pembebasan, melainkan upaya sistematis untuk meruntuhkan belenggu ketidakadilan, memberdayakan yang lemah, dan membangun peradaban baru yang berakar pada nilai-nilai Islam, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Bab ini adalah ajakan untuk membayangkan ulang arah gerakan: dari sekadar organisasi ke arah gerakan sosial; dari ruang kaderisasi ke medan perjuangan rakyat; dari wacana ke praksis. Inilah manifesto sosial PMII: cita-cita besar yang lahir dari pembacaan realitas dan keberanian untuk mengubahnya.

A. ARAH BARU PERJUANGAN PMII DALAM ABAD KE-21

Perjalanan sejarah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bukan sekadar rentetan peristiwa

organisasi, melainkan sebuah narasi pencarian makna di tengah pergulatan zaman. Didirikan pada 17 April 1960, PMII lahir dari rahim keresahan dan harapan: keresahan akan stagnasi dialektika intelektual di tubuh umat Islam kala itu, serta harapan untuk membentuk gerakan mahasiswa yang mampu menjembatani keislaman dan keindonesiaan dalam satu tarikan napas perjuangan. Sejak awal, PMII telah meletakkan dirinya sebagai jembatan antara warisan tradisi pesantren—yang sarat nilai, kearifan, dan spiritualitas—dengan dinamika kampus modern yang rasional, kritis, dan progresif.

Dalam kerangka Antonio Gramsci (1971), PMII dapat dibaca sebagai bentuk dari *intelektual organik* umat dan bangsa—yakni mereka yang tidak sekadar berpikir untuk diri sendiri, tetapi berpihak dan hidup bersama rakyat. PMII tidak lahir dari kekosongan sejarah, melainkan dari pergulatan intelektual dan sosial yang membentuk identitas keindonesiaan pasca-kemerdekaan. Di masa awal Orde Lama, ketika polarisasi ideologis begitu tajam dan Islam politik berada dalam tekanan, PMII menjadi pilihan jalan tengah: memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks kebangsaan, tanpa terjebak dalam formalisme ideologis.

Sepanjang sejarahnya, PMII telah menjelma menjadi ruang produksi gagasan, kader, dan gerakan yang tak hanya reaktif terhadap situasi, tetapi juga aktif membentuk arah zaman. Dari era perlawanan terhadap otoritarianisme Orde Baru, keterlibatan dalam reformasi 1998, hingga tantangan era demokrasi digital dan neoliberalisme saat ini, PMII senantiasa diuji untuk tetap relevan dan transformatif. Tantangan abad ke-21 menuntut PMII untuk tidak hanya menjadi pelestari nilai, tetapi juga inovator sosial yang mampu merumuskan strategi perjuangan baru.

Sebagai entitas gerakan, PMII tidak pernah sekadar menjadi institusi formal, melainkan medan dialektika

yang mempertemukan iman dan ilmu, spiritualitas dan rasionalitas, tradisi dan modernitas. Inilah kekuatan unik yang menjadikannya tetap eksis dan dinamis. PMII harus terus merawat posisinya sebagai kekuatan *emansipatoris*—yang tidak hanya hadir untuk mengkritik kekuasaan, tetapi juga membebaskan rakyat dari ketertindasan struktural dan membangun ruang hidup yang adil dan bermartabat.

Dengan demikian, memahami sejarah PMII adalah memahami perjalanan dialektis antara identitas dan perubahan, antara teks dan konteks, antara cita-cita Islam rahmatan lil 'alamin dan realitas Indonesia yang terus bergerak. Sejarah itu belum selesai. Dan tugas generasi PMII hari ini adalah melanjutkan narasi perubahan itu—dengan nilai, keberanian, dan strategi baru yang berpijak pada realitas dan berpulang kepada cita-cita keadilan.

Namun, memasuki abad ke-21, dunia mengalami transformasi yang radikal dan kompleks. Globalisasi ekonomi mempercepat arus kapital, informasi, dan migrasi budaya lintas batas, tetapi juga menciptakan ketimpangan struktural yang semakin lebar. Revolusi digital merevolusi cara manusia berpikir, berinteraksi, dan berpolitik—namun di saat yang sama, ia juga menciptakan *echo chamber*, polarisasi, dan kecanduan algoritma. Krisis ekologis mengancam keberlanjutan bumi, sementara kebangkitan populisme kanan dan otoritarianisme baru mempersempit ruang demokrasi. Gelombang disinformasi dan *post-truth politics* telah mengguncang fondasi rasionalitas publik.

Dalam lanskap inilah, PMII sebagai gerakan mahasiswa Islam tidak bisa lagi bersandar pada pendekatan dan formasi perjuangan lama. Tantangan hari ini bukan hanya bagaimana menyuarakan kebenaran, tetapi bagaimana bertahan di tengah *banjir kebisingan informasi* dan dekadensi nilai. Seperti ditegaskan oleh Ulrich Beck (1992) dalam *Risk Society*, kita hidup dalam masyarakat

yang tidak hanya menghadapi risiko-risiko eksternal, tetapi juga memproduksi risiko melalui sistemnya sendiri—kapitalisme, teknologi, dan globalisasi.

PMII dituntut untuk membentuk arah baru perjuangan—yakni merumuskan ulang medan, metode, dan muatan perjuangan tanpa kehilangan akar nilai-nilai dasarnya: tauhid, keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan. Ini bukan sekadar adaptasi teknokratis, tetapi transformasi paradigma. Perjuangan yang dulunya berpusat pada negara dan wacana struktural, kini harus mampu menjangkau ruang-ruang baru: platform digital, ekologi sosial, serta politik identitas dan pengetahuan.

Dalam hal ini, gagasan Zygmunt Bauman (2000) tentang *liquid modernity* sangat relevan: dunia hari ini tidak lagi ditandai oleh kepastian dan struktur yang stabil, tetapi oleh fluiditas, mobilitas, dan disorientasi. PMII harus menjadi kekuatan yang mampu *berenang* di dalam modernitas cair ini—tidak tenggelam oleh derasnya perubahan, tetapi justru menavigasi arus untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial.

Arah baru perjuangan PMII berarti membumikan kembali Islam sebagai etika pembebasan, bukan sekadar identitas simbolik. Islam sebagai spirit *rahmatan lil 'alamin* harus diterjemahkan dalam solidaritas lintas kelas, advokasi terhadap korban ketimpangan digital, keberpihakan pada isu perubahan iklim, dan pemihakan terhadap masyarakat adat dan marjinal. PMII tidak boleh hanya menjadi *penonton sejarah*, tetapi aktor aktif dalam membentuk horizon baru perubahan sosial.

Untuk itu, dibutuhkan kader yang tidak hanya fasih dalam teks, tetapi juga tangguh dalam konteks. Kader yang tidak hanya bisa membaca kitab, tetapi juga membaca realitas sosial dan berpikir kritis atasnya. Perjuangan abad ke-21 membutuhkan *intelektual kolektif* (Pierre Bourdieu,

1991)—yakni gerakan yang berpikir bersama, bertindak bersama, dan membangun keberanian moral secara kolektif. PMII harus hadir sebagai laboratorium peradaban alternatif—yang menggabungkan ilmu, iman, dan aksi dalam satu tarikan nafas perjuangan.

Dari Perlawanan ke Emansipasi: Pergeseran Paradigma Gerakan

Arah baru perjuangan PMII harus dimulai dari pergeseran paradigma: dari sekadar gerakan perlawanan (resistance) menuju gerakan emansipasi (emancipation). Selama ini, banyak gerakan mahasiswa, termasuk PMII, secara historis mengambil posisi sebagai kekuatan tandingan terhadap kekuasaan—melawan otoritarianisme, menuntut keadilan, atau mengadvokasi hak rakyat. Namun, dalam konteks abad ke-21 yang sarat kompleksitas dan ambiguitas kuasa, perlawanan semata tidak cukup. Diperlukan langkah lanjut: membebaskan, membangun, dan memulihkan kehidupan sosial dari berbagai bentuk keterasingan dan ketidakadilan struktural.

Konsep emansipasi sosial, dalam perspektif kritis, tidak sekadar berarti pembebasan fisik atau politik, tetapi juga mencakup dimensi kognitif, kultural, dan spiritual. Emansipasi adalah upaya membongkar struktur dominasi—baik yang bersifat ekonomi (kapitalisme neoliberal), budaya (komersialisasi pengetahuan), maupun ideologis (hegemonik narasi tunggal kekuasaan). Dalam kerangka ini, Jürgen Habermas (1984) menegaskan bahwa emansipasi mensyaratkan *komunikasi rasional dan kesadaran kritis* sebagai fondasi untuk membentuk ruang publik yang inklusif dan demokratis. Hanya dengan mengedepankan komunikasi yang bebas dari dominasi, masyarakat dapat menyepakati nilai-nilai bersama secara deliberatif.

PMII, sebagai gerakan kaderisasi dan transformasi sosial, perlu mengambil posisi sebagai penggerak emansipasi kolektif. Ini menuntut transformasi dari gaya komunikasi vertikal-hierarkis menjadi dialog horizontal yang setara. Forum-forum kaderisasi bukan hanya tempat pengisian doktrin, tetapi harus menjadi ruang emansipatif—tempat di mana kader belajar berpikir, berdebat, dan membangun refleksi kritis secara partisipatif. Sebagaimana ditegaskan Paulo Freire (1970), pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek dari perubahan sosial.

Lebih jauh, gerakan emansipatoris PMII juga harus hadir dalam pembacaan realitas baru. Emansipasi hari ini berarti membebaskan masyarakat dari *keterjajahan digital*, dari eksploitasi algoritmik oleh korporasi global; membebaskan kaum muda dari alienasi sosial akibat pendidikan yang tidak memberdayakan; serta membebaskan kelas bawah dari penindasan struktural yang terinstitusi dalam kebijakan ekonomi, hukum, dan tata ruang.

Sebagai gerakan yang bersumber dari nilai-nilai Islam, arah emansipatoris ini menemukan legitimasi dalam semangat al-taḍrīr (pembebasan) yang menjadi salah satu poros ajaran Islam. Islam tidak datang untuk sekadar merestorasi status quo, tetapi untuk *mengangkat beban-beban penindasan (al-aghlāl)* dari pundak manusia (QS. Al-A'raf: 157). Dalam konteks ini, emansipasi adalah praksis tauhid sosial—menempatkan manusia sebagai makhluk merdeka yang bermartabat di hadapan Allah dan setara di hadapan sesama.

Dengan demikian, arah baru perjuangan PMII haruslah menyatu dalam tiga gerak utama: kritis terhadap struktur, reflektif terhadap nilai, dan konstruktif dalam praksis. Dari sini, PMII dapat mentransformasikan dirinya menjadi kekuatan emansipatoris yang bukan hanya

melawan ketidakadilan, tetapi juga *menggugah kesadaran*, *membangun institusi alternatif*, dan *meretas masa depan sosial yang lebih adil dan manusiawi*.

Dalam kerangka ini, PMII tidak cukup hanya menjadi oposisi terhadap ketimpangan sosial, tetapi harus mengambil peran yang lebih substantif sebagai katalisator perubahan sosial yang inklusif dan transformatif. Oposisi tanpa tawaran jalan keluar hanya akan melanggengkan siklus kritik tanpa solusi. PMII mesti melampaui logika reaktif menuju gerakan yang proaktif—bukan sekadar menyoroti kekeliruan sistem, tetapi juga merintis jalan-jalan baru yang menghadirkan keadilan dan kemanusiaan. Sebagaimana diungkap oleh Boaventura de Sousa Santos (2014), gerakan sosial yang progresif tidak hanya lahir dari *indignasi moral*, tetapi juga dari *imajinasi institusional*—yakni keberanian untuk merancang sistem alternatif di tengah hegemoni yang mapan.

Dalam konteks ini, PMII perlu membangun model praksis sosial yang menjadi bukti nyata dari ideologi dan nilai yang diperjuangkannya. Gerakan tidak cukup bersuara di ruang-ruang publik, tetapi harus menciptakan prototipe sosial—komunitas belajar, ekonomi alternatif berbasis kerakyatan, ruang-ruang advokasi hukum berbasis nilai Islam, dan jejaring solidaritas lintas isu. Praktik-praktik ini tidak hanya akan memperluas relevansi PMII di tengah masyarakat, tetapi juga menghidupkan kembali semangat transformasi sosial yang membumi dan partisipatif.

Dengan demikian, perjuangan PMII di abad ke-21 bukan hanya tentang mempertahankan eksistensi organisasi, melainkan tentang menjadi arsitek sosial yang mampu mengubah kenyataan. Dari sinilah PMII benar-benar hadir bukan sebagai "penonton sejarah", tetapi sebagai subjek perubahan, yang tidak hanya menggugat

dunia sebagaimana adanya, tetapi juga membayangkan dan membangun dunia sebagaimana seharusnya.

Islam Progresif dan Humanisme Transformatif

Di tengah kebangkitan politik identitas dan menguatnya fundamentalisme agama, PMII perlu menegaskan posisinya sebagai lokomotif Islam progresif—yakni Islam yang tidak terjebak pada formalisme simbolik, tetapi hadir sebagai kekuatan moral yang membela kaum tertindas dan memperjuangkan keadilan sosial. Dalam lanskap sosial-politik yang semakin terfragmentasi oleh narasi eksklusivitas agama dan polarisasi politik, PMII harus menjadi oase intelektual dan spiritual yang merangkul keragaman, serta memperjuangkan kemaslahatan seluruh rakyat.

Islam progresif yang diperjuangkan bukanlah bentuk baru dari ideologi politik, melainkan sebuah praksis teologis yang berakar pada spirit pembebasan sebagaimana dikembangkan oleh pemikir seperti Fazlur Rahman dan Ali Syariati. Rahman (1982) menekankan bahwa Al-Qur'an harus dibaca secara kontekstual dan etis untuk menjawab persoalan keadilan, pendidikan, dan kemanusiaan dalam masyarakat modern. Syariati (1979), dalam semangat yang hampir revolusioner, mengajak umat Islam untuk membebaskan diri dari struktur dominasi yang menindas, baik dalam bentuk kolonialisme eksternal maupun ketertundukan internal terhadap elitisme agama yang mematikan kesadaran kritis.

Dalam kerangka ini, trisula gerakan PMII adalah Islam, rakyat, dan keadilan. Islam menjadi sumber nilai dan etika; rakyat menjadi subjek sejarah yang harus diberdayakan, bukan dimobilisasi semata; dan keadilan menjadi arah dari seluruh perjuangan sosial-politik. Keadilan dalam perspektif

ini bukan sekadar distribusi materi, tetapi juga keadilan simbolik, epistemik, dan ekologis—yakni bagaimana rakyat memiliki suara, pengakuan, dan keberlanjutan hidup yang layak. Hal ini sejalan dengan gagasan Amartya Sen (2009), bahwa keadilan sejati hanya mungkin tercapai bila masyarakat memiliki kemampuan substantif untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna.

PMII, dalam posisi ini, tidak boleh menjadi gerakan elitis yang menjauh dari denyut rakyat. Ia harus turun ke akar rumput, membaca penderitaan, dan menjadi mitra emansipasi. Karena itulah, trisula ini bukan hanya jargon, tetapi panduan etis dan praksis: berpijak pada Islam yang membebaskan, berpihak pada rakyat yang tertindas, dan berjuang demi terwujudnya keadilan dalam segala dimensinya. Inilah misi historis dan ideologis yang harus terus diperbarui dan diwujudkan oleh PMII sebagai gerakan mahasiswa Islam yang visioner dan transformatif.

Arah baru perjuangan PMII tidak sekadar menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, tetapi mesti meletakkan dasar filosofis yang lebih kokoh: humanisme transformatif. Ini adalah pandangan bahwa manusia bukan objek yang dibentuk oleh struktur, tetapi subjek yang sadar, merdeka, dan aktif dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih adil. Dalam kerangka ini, manusia bukan hanya diperjuangkan, tetapi diberdayakan untuk menjadi agen perubahan. Humanisme transformatif berpijak pada pemikiran Paulo Freire (1970), yang menegaskan bahwa pembebasan hanya mungkin terjadi ketika manusia menyadari situasi penindasan dan bertindak untuk mengubahnya melalui praksis reflektif.

Dalam konteks Indonesia, PMII harus memperkuat garis perjuangannya pada nasionalisme inklusif—yakni kebangsaan yang tidak sempit, tetapi mengakui dan merawat keberagaman budaya, agama, dan identitas. PMII

tidak cukup hanya menjadi pelindung tradisi, tetapi juga harus menjadi penafsir kritis atas kebangsaan, sebagaimana diperjuangkan oleh para pendiri bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai titik temu antara iman dan kemanusiaan. Sikap ini senapas dengan semangat Islam Nusantara—suatu corak keberislaman yang tumbuh dari realitas historis bangsa: ramah, moderat, dan menghargai kearifan lokal. Islam Nusantara, sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad Baso (2015), bukanlah varian baru dari Islam, melainkan bentuk praksis yang berakar dalam sejarah sosial umat Islam di Indonesia, di mana Islam hidup berdampingan secara harmonis dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensi keimanan.

Dalam semangat tersebut, PMII harus menjadi pelopor nilai-nilai kemanusiaan universal: keadilan, persaudaraan, kesetaraan, dan perdamaian. Di tengah arus global yang kerap mengedepankan kompetisi, polarisasi, dan eksklusi identitas, PMII perlu menegaskan posisi sebagai penjaga nalar publik yang sehat dan jembatan dialog antar kelompok. Inilah bentuk baru jihad intelektual dan sosial yang tidak lagi berkutat pada dogma-dogma sempit, tetapi pada ikhtiar memanusiakan manusia (ta'mir al-ardh) sebagai inti dari keberislaman.

Dengan demikian, arah baru perjuangan PMII adalah pembaruan radikal yang tetap setia pada akar. Ia merawat tradisi, tetapi tidak konservatif; ia terbuka terhadap zaman, tetapi tidak terombang-ambing. Humanisme transformatif, Islam Nusantara, dan nilai-nilai kebangsaan pluralis menjadi fondasi etik sekaligus visi praksis untuk mengantar PMII menjadi gerakan emansipatoris yang relevan dan visioner di abad ke-21.

Ekologi, Digitalisasi, dan Ekonomi Baru: Medan Juang Baru

Perjuangan abad ke-21 tidak lagi dapat bertumpu semata pada isu-isu lama yang bersifat politik formal atau struktural. Dunia telah berubah dengan cepat dan kompleks, memunculkan medan-medan baru yang menuntut respons cerdas dan etis dari gerakan mahasiswa, termasuk PMII. Jika PMII hendak tetap relevan dan visioner, ia harus mampu membaca zaman dengan mata batin ideologis sekaligus nalar kritis—menjadikan setiap tantangan global sebagai bagian dari tanggung jawab historis dan spiritualnya.

Krisis Iklim dan Ekologi: Menjadi Gerakan Hijau Berbasis Spiritualitas Islam

Krisis iklim bukan sekadar isu lingkungan, tetapi ancaman eksistensial bagi umat manusia. Bencana ekologis, pemanasan global, hilangnya keanekaragaman hayati, dan eksploitasi alam secara masif adalah tanda-tanda darurat peradaban. Dalam hal ini, PMII harus tampil sebagai pelopor gerakan hijau berbasis nilai Islam, bukan sebagai wacana aksesori, tetapi sebagai bentuk praksis keimanan yang mendalam. Islam memandang manusia sebagai khalîfah fil-ardh (wakil Tuhan di bumi), yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan (QS. Al-Baqarah: 30; QS. Ar-Rum: 41). Prinsip tawazun (keseimbangan) dan himayah al-bi'ah (perlindungan lingkungan) harus menjadi bagian dari kurikulum kaderisasi dan aksi sosial PMII.

Sebagaimana ditekankan oleh Seyyed Hossein Nasr dalam *Man and Nature* (1968), krisis ekologi modern sejatinya merupakan krisis spiritualitas: manusia telah memutus relasi sakral dengan alam. Oleh sebab itu, gerakan lingkungan yang dibangun PMII tidak boleh sekadar pragmatis-teknokratik, tetapi harus menyentuh akar

spiritual dan etis: bahwa menjaga bumi adalah bagian dari ibadah dan amanah Tuhan.

Revolusi Digital dan Kecerdasan Buatan: Membangun Kesadaran Digital Kritis

Era revolusi digital dan kecerdasan buatan telah mengubah wajah kehidupan manusia secara radikal. Algoritma dan big data kini mengatur opini publik, memanipulasi preferensi individu, dan bahkan membentuk politik identitas yang ekstrem. Dunia digital bukan sekadar ruang hiburan, tetapi telah menjadi arena kontestasi wacana, nilai, dan kekuasaan. Dalam konteks ini, PMII dituntut untuk memperjuangkan literasi digital yang kritis, tidak hanya agar kader melek teknologi, tetapi agar mampu menganalisis dan mengintervensi proses-proses produksi pengetahuan dan makna di ruang siber.

Pemikir seperti Shoshana Zuboff dalam *The Age of Surveillance Capitalism* (2019) menjelaskan bagaimana kapitalisme digital mengeksploitasi data manusia sebagai komoditas. PMII harus sadar bahwa dominasi teknologi oleh korporasi global telah menciptakan ketimpangan kuasa informasi dan ancaman terhadap privasi, kebebasan berpikir, serta hak digital warga. Oleh karena itu, advokasi atas hak digital rakyat—termasuk privasi, keamanan data, dan hak atas informasi yang adil—harus masuk dalam agenda sosial PMII.

Ekonomi Digital dan Kesenjangan Sosial: Membangun Ekonomi Solidaritas dan Kedaulatan Teknologi

Kehadiran ekonomi digital telah menciptakan ilusi aksesibilitas dan kemajuan, tetapi pada saat yang sama memperdalam jurang ketimpangan ekonomi. Platform-platform digital dan model bisnis berbasis kapital data telah

memperkaya segelintir elit global sambil memperlebar eksklusi terhadap masyarakat akar rumput. PMII tidak boleh abai terhadap bentuk-bentuk baru ketidakadilan ini. Sebaliknya, PMII harus memperjuangkan model ekonomi solidaritas—seperti koperasi digital, ekonomi berbasis komunitas, dan inovasi teknologi yang bersifat kolektif.

PMII perlu mengusung gagasan "kedaulatan teknologi" sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian nasional. Ini berarti mendorong riset teknologi yang inklusif, memperkuat kapasitas digital lokal, dan melawan dominasi platform global yang merugikan rakyat. Sebagaimana dikemukakan oleh Amartya Sen (1999) dalam *Development as Freedom*, pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang membebaskan manusia dari segala bentuk ketergantungan dan ketidakberdayaan, termasuk dalam hal teknologi.

Medan perjuangan abad ke-21 menuntut PMII tidak hanya adaptif, tetapi juga progresif dan emansipatoris. Dari krisis iklim hingga disrupsi digital, dari kapitalisme platform hingga erosi nilai-nilai solidaritas, PMII harus menjawab semuanya dengan nilai, ilmu, dan aksi. Inilah jihad intelektual dan sosial generasi baru PMII—membangun peradaban yang adil, berkelanjutan, dan manusiawi.

Pernyataan Anda sudah sangat kuat dan bernas. Berikut ini saya bantu kembangkan menjadi narasi ilmiah-filosofis yang lebih utuh, dengan mempertajam konteks pemikiran Zygmunt Bauman dan mengaitkannya langsung dengan tantangan transformasi organisasi seperti PMII di abad ke-21:

Menurut Zygmunt Bauman dalam *Liquid Modernity* (2000), kita hidup dalam masyarakat cair—sebuah era dimana struktur sosial, nilai, dan identitas tidak lagi

memiliki bentuk yang kokoh dan stabil. Semua hal berubah dengan cepat: teknologi, hubungan sosial, ekonomi, bahkan makna hidup itu sendiri. Dalam dunia yang cair ini, segala sesuatu cenderung bersifat sementara, instan, dan tidak terikat oleh fondasi yang pasti. Ketidakpastian menjadi norma, dan mobilitas menjadi tuntutan.

Dalam konteks ini, organisasi sosial dan gerakan mahasiswa seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tidak bisa lagi mengandalkan struktur dan pola kerja yang kaku atau statis. Jika ingin tetap relevan dan mampu mengarungi derasnya arus perubahan, PMII harus menjelma menjadi entitas yang fleksibel dalam pendekatan, reflektif dalam berpikir, dan adaptif dalam strategi—tanpa kehilangan kompas nilai yang menjadi identitas gerakannya sejak awal: Islam, keindonesiaan, dan kemanusiaan.

Fleksibel bukan berarti kompromistis, melainkan mampu membaca zaman dan merumuskan respons kontekstual yang berbasis prinsip. Reflektif berarti terus-menerus menguji ulang asumsi, strategi, dan arah perjuangan melalui kritik-diri dan pembelajaran kolektif. Adaptif berarti mampu bergerak dalam berbagai ruang—baik digital maupun fisik, lokal maupun global—tanpa kehilangan orientasi ideologis dan keberpihakan sosialnya.

Sebagaimana ditegaskan Bauman, dalam masyarakat cair, tantangan terbesar bukan hanya bertahan, tetapi menjaga integritas identitas di tengah pusaran transformasi. Di sinilah PMII perlu mengokohkan dirinya sebagai gerakan yang lentur secara taktik, tetapi teguh secara nilai. Ia tidak hanya bereaksi terhadap perubahan, tetapi juga membentuk arah perubahan itu sendiri.

Reformasi Internal: Kembali ke Nilai, Bangun Kekuatan Baru

Arah baru perjuangan tidak akan pernah berhasil tanpa disertai keberanian untuk melihat ke dalam diri sendiri—melakukan kritik, evaluasi, dan reformasi internal secara menyeluruh. Dalam kerangka ini, PMII harus mereposisi dirinya bukan hanya sebagai agen perubahan eksternal, tetapi juga sebagai ruang dialektika internal yang terus membentuk ulang kesadaran, nilai, dan strategi gerakannya.

Reorientasi Kaderisasi: Dari Transfer Pengetahuan ke Pembentukan Kesadaran

Reformasi pertama menyentuh jantung organisasi: kaderisasi. Di tengah zaman yang sarat kompleksitas dan disrupsi, kaderisasi tidak cukup jika hanya berfungsi sebagai proses administratif atau legalistik. Ia harus bertransformasi menjadi ruang pembentukan kesadaran kritis—tempat lahirnya intelektual organik sebagaimana dikemukakan Antonio Gramsci (1971), yakni kader yang bukan hanya memahami teks, tetapi juga mampu membaca realitas dan merumuskan arah perubahan.

Kaderisasi harus membentuk pemimpin emansipatoris, bukan hanya manajer organisasi. Sebagaimana ditulis oleh Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970), pendidikan sejati adalah proses pembebasan, bukan indoktrinasi. PMII perlu mendorong kaderisasi yang dialogis, transformatif, dan berbasis pada konteks riil masyarakat—bukan hanya hafalan dokumen, tetapi penajaman nurani dan nalar kritis.

Reformulasi Ideologi: Akar Tradisi, Sayap Kontekstual

Ideologi organisasi harus mengalami reformulasi agar mampu menavigasi zaman yang berubah cepat. PMII

perlu menegaskan kembali Islam Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) sebagai fondasi teologis dan etis, namun tidak dalam bentuk literal-formalistik. Yang dibutuhkan adalah Aswaja yang hidup dan kontekstual, yang mampu menjawab problem-problem kontemporer: kemiskinan struktural, disinformasi, krisis ekologi, serta tantangan demokrasi.

Dalam hal ini, PMII dapat merujuk pada pendekatan maqāṣid al-syarīʿah sebagai landasan etis yang memprioritaskan maslahat dan keadilan sosial (al-Juwaini, al-Ghazali). Dengan begitu, ideologi tidak menjadi slogan kosong, tetapi instrumen analitis dan praksis untuk menghadirkan keadilan dalam kehidupan nyata.

Perluasan Basis Gerakan: Kampus, Komunitas, dan Ruang Digital

Reformasi terakhir adalah ekspansi medan juang. Jika sebelumnya PMII terlalu terkonsentrasi pada kampus sebagai basis utama, kini saatnya memperluas jangkauan ke desa, komunitas urban, dan ruang digital. Tantangan keumatan dan kebangsaan hari ini tidak hanya hidup di ruang akademik, tetapi juga di sawah-sawah yang terancam industrialisasi, di lorong-lorong kota yang memendam krisis sosial, dan di media sosial yang dijejali polarisasi dan hoaks.

PMII perlu hadir di desa sebagai pendamping pemberdayaan, di komunitas marginal sebagai mitra advokasi, dan di platform digital sebagai produsen wacana alternatif. Gerakan yang hidup hanya di ruang formal tidak akan mampu menjangkau kompleksitas zaman. Dengan memperluas basis, PMII dapat membangun ekosistem sosial baru yang memperkuat agenda transformasi struktural dari bawah.

Dengan demikian, reformasi internal PMII bukan sekadar pembaruan prosedural, tetapi transformasi nilai, strategi, dan orientasi gerakan. Ini adalah jalan menuju revitalisasi organisasi sebagai kekuatan sosial yang berpijak pada Islam, berpihak pada rakyat, dan bergerak demi keadilan.

Dalam pandangan Antonio Gramsci (1971), perubahan sosial tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan politik, tetapi juga oleh hegemoni budaya—dominasi cara berpikir dan kerangka makna yang diterima secara sukarela oleh masyarakat. Untuk membangun hegemoni ini, diperlukan intelektual organik: individu yang tidak hanya cerdas dalam tataran akademik, tetapi mampu mengartikulasikan ide-ide perubahan dalam bahasa rakyat dan berada dalam denyut kehidupan masyarakat itu sendiri.

Bagi Gramsci, intelektual organik adalah aktor strategis dalam perjuangan kelas. Mereka tidak berdiri di menara gading, melainkan hidup bersama kaum tertindas, menjadi penerjemah antara ideologi dan praksis sosial. Dalam konteks ini, PMII dihadapkan pada tantangan besar: bukan sekadar memperluas keanggotaan secara kuantitatif, tetapi melahirkan kader-kader yang memiliki integritas intelektual dan keberpihakan moral—yang mampu membaca dunia secara kritis dan menggugah kesadaran masyarakat untuk bergerak bersama menuju keadilan.

Kader seperti ini tidak lahir dari sistem kaderisasi yang kering dan prosedural, tetapi dari ruang-ruang pembelajaran yang menumbuhkan keberanian berpikir, ketajaman analitis, dan kepekaan sosial. Mereka harus dibekali dengan kemampuan untuk menafsirkan realitas sosial secara historis dan struktural, serta merumuskan jalan pembebasan berbasis nilai-nilai Islam dan prinsip keindonesiaan.

PMII harus mulai bertanya secara jujur: Apakah

kader kita hari ini telah menjadi jembatan antara nilai dan realitas? Apakah mereka telah mampu mempengaruhi narasi publik dan menandingi dominasi wacana status quo? Ataukah mereka justru terjebak dalam rutinitas organisasi yang menjauh dari denyut kehidupan rakyat?

Dalam konteks Indonesia kontemporer—di tengah maraknya populisme, disinformasi digital, dan krisis kepercayaan publik—peran intelektual organik menjadi semakin penting. Kader PMII harus mampu menjadi suara moral dan intelektual yang membawa pencerahan, membangun jembatan antara kampus dan kampung, antara kitab dan kenyataan.

Sebagaimana dicita-citakan oleh Gramsci, kemenangan ideologis tidak ditentukan oleh kekuatan retorika, tetapi oleh kemampuan untuk membentuk kesadaran kolektif dan praksis sosial yang konkret. Inilah medan baru perjuangan PMII: menjadi pusat produksi gagasan progresif dan gerakan sosial yang membebaskan.

Penutup: Menjadi Gerakan Harapan

Arah baru perjuangan PMII di abad ke-21 bukan sekadar pembaruan struktural atau taktis, melainkan sebuah kerja sejarah—upaya panjang dan konsisten untuk merumuskan kembali posisi gerakan di tengah pusaran zaman yang berubah cepat dan kompleks. Ini bukan proyek sesaat yang berorientasi pada hasil instan, tetapi proses transformatif yang menuntut konsekuensi etis, keberanian moral, dan keteguhan ideologis.

Dalam dunia yang semakin terdiferensiasi secara sosial, politik, dan teknologi, keberanian untuk berubah bukan berarti meninggalkan akar, tetapi justru menegaskan kembali komitmen ideologis dalam bentuk baru yang lebih relevan dan kontekstual. PMII ditantang untuk tidak

menjadi gerakan yang stagnan dalam romantisme sejarah, melainkan gerakan yang aktif dalam membentuk sejarah baru—melalui kaderisasi reflektif, militansi nilai, dan praksis sosial yang emansipatoris.

Keberanian untuk bersikap dalam konteks ini berarti menolak menjadi netral dalam situasi ketidakadilan. Sebagaimana diingatkan oleh Paulo Freire (1970), netralitas dalam situasi ketimpangan justru berarti berpihak pada penindas. PMII harus menegaskan posisi historisnya sebagai pembela rakyat, pelanjut tradisi kritis, dan pemantik kesadaran sosial.

Namun, jalan ini tidak mudah. Ia akan terus digoda oleh pragmatisme kekuasaan, reduksi gerakan menjadi sekadar alat mobilisasi, dan distorsi nilai demi akomodasi politik sesaat. Inilah saatnya keberanian ketiga dibutuhkan: keberanian untuk menolak pragmatisme. Sebab, sebagaimana ditekankan oleh Frantz Fanon dalam *The Wretched of the Earth* (1961), *"Each generation must discover its mission, fulfill it or betray it."* Ungkapan ini bukan hanya seruan moral, tetapi pengingat eksistensial: bahwa generasi hari ini memiliki tugas sejarah yang tidak bisa dilimpahkan, dan tidak boleh diabaikan.

Bagi PMII, menemukan misi itu berarti menjadi pelopor Islam progresif, penjaga nurani kebangsaan, dan agen perubahan sosial. Memenuhinya berarti melampaui formalitas organisasi, menuju gerakan yang hidup, berakar, dan berdampak. Mengkhianatinya berarti menyerah pada arus zaman tanpa arah perjuangan yang jelas.

Oleh karena itu, arah baru perjuangan ini harus dirawat dengan visi jangka panjang, dengan konsistensi nilai, dan dengan keberanian untuk tetap berpihak pada mereka yang dilemahkan (al-mustadh'afin). Inilah jihad intelektual dan sosial PMII yang sejati: jihad membebaskan, mencerdaskan, dan memanusiakan.

PMII hari ini berdiri di persimpangan sejarah, menghadapi tuntutan zaman yang tidak hanya menyoal regenerasi, tetapi juga transformasi. Tantangan globalisasi, krisis identitas, dekadensi moral, dan ketimpangan sosial menuntut gerakan mahasiswa untuk melampaui batas-batas konvensional. Dalam konteks inilah, PMII harus tampil bukan hanya sebagai organisasi mahasiswa, melainkan sebagai ruang peradaban—tempat di mana moralitas, spiritualitas, dan intelektualitas bertemu untuk membentuk arah baru bagi bangsa dan umat manusia.

Gerakan mahasiswa bukan sekadar peristiwa temporer anak muda yang resah, tetapi proyeksi nilai untuk masa depan. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa transformasi sosial selalu melibatkan energi mahasiswa. Namun hari ini, tantangannya lebih kompleks: bukan hanya menggulingkan rezim politik, tetapi juga meruntuhkan ketidakadilan struktural, memperkuat integritas publik, dan menumbuhkan solidaritas sosial lintas batas.

PMII bukan sekadar struktur organisasi; ia adalah medan pendidikan moral, sosial, dan spiritual. Sebagaimana ditekankan oleh Nurcholish Madjid, pendidikan sejati adalah pembebasan manusia dari kebodohan dan ketertindasan, untuk kemudian membimbingnya menjadi manusia paripurna (insan kamil). Maka, tugas PMII tidak berhenti pada mencetak kader yang cakap secara administratif, tetapi membentuk manusia yang utuh—yang sadar akan sejarah, peka terhadap penderitaan, dan teguh dalam memperjuangkan keadilan.

Dengan semangat Islam Ahlussunnah wal Jama'ah yang moderat, PMII harus menanamkan visi bahwa gerakan ini bukan milik satu generasi, tetapi warisan lintas zaman. Dari forum diskusi hingga ruang digital, dari kampus hingga desa, dari advokasi rakyat hingga pembangunan wacana

kritis, PMII harus hadir sebagai penjaga nilai, penyambung nalar, dan penyangga harapan.

Karena itu, menjadi kader PMII bukan sekadar soal identitas, tetapi soal tanggung jawab sejarah: membentuk bukan hanya masa depan individu, tetapi masa depan peradaban.

B. ISLAM, RAKYAT, DAN KEADILAN SEBAGAI TRISULA GERAKAN

Dalam sejarah panjang perjuangan sosial di Indonesia, relasi antara Islam, rakyat, dan keadilan bukanlah hubungan yang acak atau kebetulan. Ia adalah konstruksi historis dan ideologis yang mengakar dalam pengalaman kolektif bangsa—di mana Islam hadir bukan hanya sebagai ajaran teologis, melainkan sebagai kekuatan pembebas yang berpihak pada kaum tertindas (mustadh'afin), membela hak-hak rakyat, dan mendorong tegaknya keadilan sosial. Ketiganya membentuk trisula gerakan—tiga mata tombak perjuangan yang saling menguatkan dan tak terpisahkan dalam bingkai gerakan emansipatoris.

Islam, dalam perspektif ini, bukan sekadar agama ritual, tetapi sebagai etika pembebasan. Seperti dikemukakan oleh Ali Syariati (1979), Islam harus dipahami sebagai "agama revolusioner" yang mengajak manusia untuk menentang penindasan, menumbuhkan kesetaraan, dan menegakkan keadilan sosial. Spirit Islam dalam gerakan PMII tidak berhenti pada keformalan syariat, tetapi menjelma menjadi praksis sosial yang menantang hegemoni kekuasaan dan membela marjinalisasi.

Rakyat adalah subjek sejati dari setiap gerakan perubahan. Tanpa keterlibatan rakyat, gerakan kehilangan akar dan legitimasi sosial. PMII tidak boleh terjebak menjadi gerakan elitis yang hanya berputar di ruang akademik,

tetapi harus turun dan menyatu dengan denyut kehidupan rakyat. Dalam pengertian Gramscian, keberpihakan pada rakyat adalah syarat membangun hegemoni kultural yang progresif (Gramsci, 1971).

Keadilan adalah tujuan etis dan politik dari keseluruhan gerakan. Tidak ada Islam tanpa keadilan, dan tidak ada pembebasan rakyat tanpa penghancuran struktur-struktur ketimpangan. Keadilan dalam Islam bukan sekadar keadilan prosedural, tetapi keadilan substantif: melawan eksploitasi, meluruskan distribusi sumber daya, dan memastikan bahwa hak-hak dasar manusia terpenuhi. Inilah yang menjadi semangat ayat-ayat sosial dalam Al-Qur'an—seperti dalam QS. An-Nahl:90 yang menegaskan perintah untuk menegakkan keadilan dan melarang kezhaliman.

Ketika Islam, rakyat, dan keadilan dirajut dalam satu tarikan napas perjuangan, maka PMII memiliki landasan kokoh untuk menjadi gerakan transformatif—yakni gerakan yang tidak hanya melawan, tetapi membebaskan; tidak hanya reaktif, tetapi kreatif; tidak hanya retoris, tetapi praksis.

Di tengah arus pragmatisme politik dan disorientasi nilai yang melanda banyak organisasi, trisula ini harus menjadi kompas ideologis dan moral. Ia menjadi pengingat bahwa PMII bukan sekadar organisasi mahasiswa, tetapi bagian dari arus besar pembebasan manusia—berbasis iman, berpihak pada rakyat, dan berorientasi pada keadilan.

Islam sebagai Landasan Etis dan Epistemologis

Islam, dalam visi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), bukan sekadar simbol keagamaan atau atribut identitas kultural yang statis, tetapi menjadi *sumber etika dan epistemologi perjuangan*—sebuah paradigma berpikir dan bertindak yang mewarnai seluruh

orientasi gerakan. Dalam konteks ini, Islam dimaknai sebagai *weltanschauung* (pandangan hidup), yang menata cara melihat realitas, merumuskan masalah sosial, dan menetapkan jalan penyelesaiannya. Maka, perjuangan bukan hanya soal strategi politik, tetapi juga *pergulatan makna* yang bersandar pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Alih-alih mengekalkan Islam dalam bentuk yang tekstual-dogmatik dan seringkali ahistoris, PMII mendorong pembacaan Islam yang kontekstual dan dinamis—yakni Islam yang hidup dalam sejarah dan terus berdialog dengan realitas zaman. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *maqāʾid al-syarīʿah*, sebagaimana dirumuskan oleh al-Syāḍibī (2001), yang menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia: jiwa (*nafs*), akal (*ʿaql*), harta (*māl*), agama (*dīn*), dan keturunan (*nasl*). Dengan kerangka ini, PMII menolak segala bentuk tafsir keagamaan yang membenarkan kekerasan, ketimpangan, dan penindasan atas nama agama.

Islam yang diperjuangkan PMII adalah Islam praksis—sebagaimana dikembangkan oleh pemikir seperti Fazlur Rahman (1982), yang menyatakan bahwa esensi Islam adalah etika pembebasan: membangun keadilan, menolak dominasi, dan menumbuhkan kesetaraan. Oleh karena itu, PMII tidak terjebak dalam legalisme formal atau simbolisme ritualistik, tetapi menjadikan Islam sebagai energi moral yang membentuk sikap kritis terhadap kapitalisme eksploitatif, otoritarianisme politik, dan dehumanisasi teknologi.

Di sini, Islam bukan hanya norma, tetapi juga kerangka epistemik yang membimbing pencarian pengetahuan dan pengambilan keputusan. Dalam tradisi epistemologi Islam klasik, seperti yang dirumuskan oleh al-Farabi dan al-Ghazali, pengetahuan bukan hanya soal logika rasional, tetapi juga menyangkut dimensi etis dan spiritual. Dengan

perspektif ini, PMII memandang perjuangan sosial bukan hanya tentang perubahan struktur, tetapi juga transformasi kesadaran—yakni upaya membentuk manusia yang berpikir merdeka, berakhlak adil, dan bertindak untuk kemaslahatan semesta.

Dengan menjadikan Islam sebagai sumber etika dan epistemologi, PMII tidak hanya mempertahankan akar ideologisnya, tetapi juga membangun basis intelektual untuk merespons tantangan abad ke-21. Dalam dunia yang dilanda disorientasi nilai, PMII menawarkan jalan tengah: antara keimanan dan rasionalitas, antara tradisi dan modernitas, antara spiritualitas dan keadilan sosial.

Lebih jauh, PMII menegaskan komitmennya pada Islam yang berpihak kepada mustadh'afīn—mereka yang tertindas secara struktural, baik karena kemiskinan, diskriminasi, maupun ketidakadilan sistemik. Ini bukan sekadar pilihan strategi, melainkan panggilan teologis yang melekat dalam ajaran Islam itu sendiri. Sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisā':75, Allah berfirman: *"Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berkata: 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu!'" (QS. An-Nisā':75)*

Ayat ini menegaskan bahwa jihad bukan sekadar perjuangan spiritual atau militeristik, tetapi juga perjuangan sosial untuk membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan. Islam, dengan demikian, memandatkan gerakan untuk membela korban ketimpangan, menjadi suara bagi yang dibungkam, dan kekuatan bagi yang dilemahkan.

Dalam perspektif ini, PMII menghidupkan kembali semangat Islam pembebasan, sebagaimana dikembangkan

oleh pemikir seperti Ali Syariati (1979), yang melihat Islam bukan sebagai institusi status quo, tetapi sebagai ideologi revolusioner yang menuntut perubahan struktural. Islam, kata Syariati, adalah "agama para pemberontak," yang mengajarkan perlawanan terhadap taghut—segala bentuk kekuasaan yang menindas dan tidak adil.

Maka, keberpihakan pada mustadh'afin bukanlah sikap politis sesaat, melainkan laku spiritual yang melibatkan dimensi etika dan historis. Dalam hal ini, PMII memaknai keimanan sebagai keberanian untuk berdiri di pihak yang tertindas, bukan diam dalam kenyamanan kaum privilese. Seperti dikatakan oleh Malik Bennabi, seorang pemikir Muslim Aljazair, "Peradaban tidak dibangun oleh mereka yang tunduk pada realitas, tetapi oleh mereka yang menolaknya demi keadilan."

Lebih dari itu, keberpihakan ini menuntut organisasi untuk terus memperbarui metode perjuangannya. Dalam dunia modern yang kompleks—di mana ketimpangan tak lagi hanya soal tanah dan upah, tetapi juga soal akses informasi, teknologi, dan representasi budaya—PMII harus mampu merumuskan strategi emansipasi baru. Gerakan tidak boleh puas menjadi komentator, tetapi harus menjadi agen transformasi yang menyentuh realitas konkret kaum marjinal: buruh migran, masyarakat adat, nelayan, perempuan korban patriarki, hingga kelompok minoritas yang terpinggirkan.

Dengan menjadikan pembelaan terhadap mustadh'afin sebagai prinsip utama, PMII menyatukan pondasi spiritual, ideologis, dan praksis dalam satu garis perjuangan. Inilah manifestasi dari Islam yang berpihak: bukan hanya membangun masjid, tetapi membebaskan manusia dari "struktur penindasan"—baik yang tampak maupun yang tersembunyi.

Dalam kerangka perjuangan sosial PMII, Islam tidak boleh direduksi menjadi sekadar ritual atau formalitas keagamaan. Ia adalah kekuatan emansipatoris—kekuatan yang membebaskan manusia dari penindasan, baik dalam bentuk ekonomi, budaya, politik, maupun spiritual. Islam menjadi daya gerak transformatif yang mendasari tindakan kolektif untuk mewujudkan keadilan.

Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Ali Syariati (1979), seorang pemikir revolusioner Iran, yang mengembangkan konsep *Islamic ideology of liberation*. Menurut Syariati, Islam sejati bukanlah Islam yang kompromistis dengan kekuasaan, melainkan Islam yang aktif membela hak-hak rakyat dan menentang struktur dominasi yang menindas manusia. Bagi Syariati, Islam adalah agama para nabi yang senantiasa berpihak kepada *mustadh'afin*, dan karena itu, menjadi ideologi perjuangan melawan *taghut*—segala bentuk kezaliman yang terlembagakan.

Dalam konteks ini, Islam bukan hanya sistem keyakinan, tetapi juga etika gerakan dan basis epistemologis perubahan sosial. Ia menuntut partisipasi aktif dalam merombak struktur ketimpangan dan mendorong terciptanya tatanan sosial yang adil dan beradab. Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* tidak lagi terbatas pada pengawasan moral individual, tetapi menjadi praksis sosial-politik yang menentang eksploitasi, korupsi, kekerasan, dan ketidaksetaraan.

Sejalan dengan ini, Mohammad Iqbal (1930) dalam *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* menegaskan bahwa Islam adalah kekuatan dinamis yang mendorong kebangkitan manusia. Keimanan, bagi Iqbal, bukanlah pelarian dari dunia, melainkan dorongan spiritual untuk menghadapi dan mengubah dunia. Ini mempertegas bahwa Islam bukan doktrin pasif, melainkan kekuatan aktif

yang mereformasi relasi sosial dan menumbuhkan etos perubahan.

PMII, sebagai gerakan mahasiswa Islam, perlu menghidupkan kembali semangat ini: menjadikan Islam sebagai dasar perjuangan emansipasi yang tidak berhenti pada simbol, tetapi bergerak pada tindakan. Ini meniscayakan keberanian untuk menafsirkan ulang doktrin agama dalam cahaya keadilan sosial—sebagaimana dikembangkan dalam maqashid syariah dan etika profetik.

Dengan menjadikan Islam sebagai kekuatan emansipatoris, PMII tidak hanya mereproduksi wacana keagamaan yang tekstualis dan normatif, tetapi juga membangun Islam yang membebaskan (*liberating Islam*)—yang menjadi cahaya bagi rakyat, kekuatan bagi gerakan, dan penuntun bagi perubahan zaman.

Rakyat sebagai Subjek Sejarah, Bukan Objek Politik

Gerakan mahasiswa yang otentik tidak menjadikan rakyat sebagai objek belas kasih atau komoditas retoris. Sebaliknya, rakyat adalah *subjek sejarah*—aktor utama dalam proses perubahan sosial yang harus diberdayakan, didengar, dan dilibatkan secara aktif. PMII, sebagai bagian dari tradisi gerakan transformatif, harus membongkar cara pandang elitis yang menempatkan rakyat sebagai massa pasif. Rakyat bukan sekadar penerima manfaat program, melainkan sumber pengetahuan, kekuatan kolektif, dan subjek pembebasan.

Dalam kerangka teoritik Antonio Gramsci (1971), perubahan sosial yang berkelanjutan hanya mungkin dicapai melalui pembentukan *hegemoni kultural*—di mana gerakan sosial membangun aliansi organik dengan kelas-kelas rakyat dan menciptakan *common sense* baru yang berpihak pada keadilan. Gramsci menekankan pentingnya

peran *intelektual organik*, yaitu intelektual yang tidak berdiri di menara gading, tetapi hidup bersama rakyat, menjadi pengorganisasi persetujuan (*organizer of consent*), dan jembatan antara teori dan praksis.

PMII memiliki tanggung jawab historis untuk melahirkan kader-kader intelektual organik ini—yang tidak hanya cakap secara teoritis, tetapi juga terlibat dalam denyut kehidupan sosial masyarakat: di desa-desa, di kantong-kantong urban, di komunitas marginal, dan di ruang digital. Gerakan tidak cukup hadir di ruang seminar dan diskusi internal, tetapi harus terjun menjadi bagian dari narasi perjuangan rakyat: dalam isu agraria, ekologi, ketimpangan pendidikan, dan akses kesehatan.

Konsep *subjek sejarah* ini juga ditegaskan oleh Paulo Freire (1970) dalam *Pedagogy of the Oppressed*. Freire mengkritik pendidikan gaya bank—di mana rakyat dianggap sebagai tabungan kosong yang harus diisi pengetahuan dari atas. Sebaliknya, ia menawarkan *pedagogi dialogis* yang membebaskan: rakyat belajar bukan untuk menjadi seperti elite, tetapi untuk menyadari posisinya, memahami struktur penindasan, dan bertindak kolektif mengubah realitas. PMII harus mengadopsi semangat ini: menjadikan kaderisasi dan advokasi sosial sebagai ruang dialog horizontal yang membangkitkan kesadaran kritis dan memperkuat agensi rakyat.

Dengan menjadikan rakyat sebagai subjek sejarah, PMII tidak hanya memperluas basis gerakan, tetapi juga memperdalam keberpihakan ideologisnya. Ini bukan strategi populis jangka pendek, melainkan komitmen jangka panjang untuk membangun gerakan sosial yang demokratis, partisipatif, dan berakar pada kehidupan nyata masyarakat.

Dalam kondisi kontemporer yang ditandai oleh dominasi neoliberalisme global, keadilan tidak lagi hadir

sebagai prinsip kolektif, tetapi tereduksi menjadi wacana prosedural yang sering kali tidak menyentuh realitas ketimpangan struktural. Neoliberalisme, sebagaimana dikritik oleh David Harvey (2005), telah menciptakan rezim ekonomi-politik yang mengutamakan pasar bebas dan privatisasi, tetapi mengabaikan hak-hak dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pekerjaan yang layak. Dalam situasi ini, PMII dituntut untuk tidak netral, tetapi menegaskan keadilan sebagai *kompas perjuangan*—penentu arah gerakan, bukan sekadar jargon moral.

Menempatkan rakyat sebagai pusat orientasi gerakan berarti menjadikan keadilan sebagai prinsip dasar dalam semua dimensi gerakan PMII: advokasi kebijakan, pendidikan politik, kaderisasi, hingga aksi sosial. PMII tidak bisa hanya menjadi penyaksi ketimpangan, melainkan harus hadir sebagai kekuatan yang menggugat ketidakadilan dan membangun alternatif. Ini menuntut keberanian untuk bersikap dalam isu-isu konkret: menolak komersialisasi pendidikan, melawan perampasan tanah dan sumber daya, memperjuangkan ekologi yang berkelanjutan, dan mendampingi kelompok rentan.

Keadilan dalam perspektif Islam bukan sekadar distribusi materi, tetapi mencakup dimensi spiritual, sosial, dan struktural. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan (QS. Al-Ma'idah: 42). Dalam sejarah Islam klasik, keadilan (*al-'adl*) menjadi fondasi pemerintahan yang sah dan amanah. Pemikir kontemporer seperti Nurcholish Madjid (1992) menekankan bahwa keadilan sosial adalah manifestasi paling nyata dari tauhid dalam kehidupan sosial-politik. Maka, perjuangan atas nama Islam tidak akan bermakna jika abai terhadap ketidakadilan yang dialami rakyat.

Keadilan juga harus dipahami sebagai praksis kolektif, bukan idealisme abstrak. PMII harus mendorong

transformasi struktural melalui kerja-kerja nyata: mendirikan koperasi kader, menyelenggarakan pendidikan rakyat, membangun ekosistem digital yang adil, serta melahirkan kebijakan alternatif berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam bahasa Nancy Fraser (2009), keadilan harus simultan: *redistribution* (pemerataan sumber daya), *recognition* (pengakuan atas identitas dan martabat), dan *representation* (keterwakilan politik).

Maka, trisula gerakan PMII—Islam, rakyat, dan keadilan—harus bekerja dalam satu kesatuan dialektis. Islam memberikan basis nilai, rakyat menjadi orientasi praksis, dan keadilan adalah arah perjuangan. Inilah yang akan menjadikan PMII bukan sekadar gerakan yang bersuara, tetapi gerakan yang menggugah dan membebaskan.

Oleh karena itu, trisula gerakan PMII—Islam, rakyat, dan keadilan—tidak boleh berhenti sebagai wacana simbolik, tetapi harus mewujud sebagai praksis historis yang mengakar pada penderitaan dan aspirasi rakyat. Gerakan yang tercerabut dari denyut sosial, dari realitas kemiskinan, ketimpangan, dan ketertindasan, hanya akan melahirkan elitisme kampus: ruang diskusi yang nyaring di seminar, tetapi hening di lapangan; penuh wacana, tapi miskin keberpihakan.

Sebagaimana diingatkan Paulo Freire (1970) dalam *Pedagogy of the Oppressed*, intelektual yang tidak terlibat dalam pergulatan riil rakyat hanya menjadi bagian dari struktur penindasan, bukan alat pembebasan. PMII, sebagai gerakan mahasiswa berbasis Islam, harus menjawab tantangan itu: menjadi organisasi yang *turun ke bumi*, bukan sekadar *berteori dari menara gading*. Intelektualitas kader PMII harus berpijak pada praksis sosial—membaca realitas dengan kritis, namun juga hadir membentuknya secara aktif.

Islam memberikan energi spiritual dan moral; rakyat menghadirkan pijakan realitas dan arah orientasi; dan keadilan menjadi tujuan yang diperjuangkan. Ketiganya membentuk segitiga dinamis yang hanya memiliki makna jika dijalankan secara simultan. Gerakan yang mengusung Islam tapi mengabaikan rakyat adalah retorika kosong. Gerakan yang mengatasnamakan rakyat tapi tanpa nilai hanya akan terjebak dalam populisme. Gerakan yang menyerukan keadilan tanpa keterlibatan praksis hanya berakhir sebagai mimbar naratif.

PMII tidak boleh menjadi gerakan nostalgia yang hidup dari romantisme sejarah, tetapi harus menjadi kekuatan emansipatoris yang membentuk sejarah baru. Trisula gerakan ini adalah panggilan bagi generasi muda Islam Indonesia untuk menjadi bagian dari perubahan sosial yang lebih adil, manusiawi, dan berkeadaban. Di sinilah PMII akan menemukan relevansinya—bukan sebagai institusi semata, tetapi sebagai gerakan peradaban.

Keadilan sebagai Tujuan Sejarah

Di ujung trisula gerakan PMII, terdapat prinsip keadilan sebagai puncak nilai dan tujuan perjuangan. Keadilan (*al-'adl*) bukan sekadar terminologi politis yang bersifat pragmatis, tetapi merupakan nilai transenden yang menjadi inti dari ajaran Islam dan dasar dari seluruh visi perubahan sosial.

Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hadid:25, "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (mizan) supaya manusia dapat menegakkan keadilan." Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya tuntutan sosial, melainkan juga mandat spiritual. Ia adalah tujuan kenabian

dan amanah keniscayaan manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Konsep keadilan dalam Islam bersifat menyeluruh—*'adl* tidak hanya bermakna kesetaraan formal, tetapi juga keberpihakan substantif terhadap kelompok yang terpinggirkan. Seperti diungkapkan oleh Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*, keadilan adalah keseimbangan yang menciptakan harmoni sosial, di mana setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan maqam (posisi) dan kebutuhannya. Dalam kerangka ini, perjuangan PMII atas nama keadilan harus mencakup seluruh dimensi: ekonomi, hukum, gender, lingkungan, hingga epistemologi.

Dalam realitas kontemporer, keadilan menghadapi tantangan besar: neoliberalisme yang melahirkan jurang sosial, sistem hukum yang bias kelas, dan wacana keagamaan yang sering digunakan untuk melanggengkan dominasi. Maka, tugas PMII adalah menjadikan keadilan sebagai kompas gerakan—bukan hanya dalam advokasi kebijakan, tetapi juga dalam cara organisasi ini mengelola kader, menyusun wacana, dan menjalankan aktivitas sosial.

Seperti dikemukakan John Rawls (1971) dalam *A Theory of Justice*, keadilan adalah "the first virtue of social institutions." Namun, dalam konteks PMII, keadilan bukan hanya virtue institusional, melainkan energi moral-politik yang menggerakkan gerakan menuju transformasi sosial. Artinya, PMII tidak cukup berbicara keadilan sebagai wacana, tetapi harus menjadi agen keadilan dalam praktik.

Dengan menjadikan keadilan sebagai ujung trisula, PMII memperkuat posisinya sebagai gerakan transformatif yang tidak hanya mencita-citakan tatanan baru, tetapi juga bekerja secara nyata untuk mewujudkannya. Keadilan adalah cahaya nilai, pedoman aksi, dan tujuan akhir. Tanpa keadilan, Islam kehilangan ruh sosialnya; tanpa keadilan,

rakyat kehilangan harapan; dan tanpa keadilan, gerakan kehilangan arah.

Keadilan yang diperjuangkan oleh PMII tidak dapat direduksi menjadi keadilan formal semata—yakni keadilan yang terbatas pada persamaan hak dalam hukum atau prosedur administratif. Sebab, dalam masyarakat yang sarat ketimpangan historis dan struktural, keadilan formal justru bisa menjadi topeng dari status quo yang menindas. Sebagaimana dikritik oleh Nancy Fraser (1997), keadilan tidak bisa hanya dimaknai dalam bingkai distribusi, tetapi juga harus mencakup dimensi representasi dan rekognisi.

Oleh karena itu, PMII mendorong apa yang disebut sebagai *keadilan substantif*—yakni keadilan yang menyentuh akar masalah, membongkar relasi kuasa yang timpang, dan membangun tatanan baru yang inklusif. Keadilan substantif adalah wajah etis dari keberpihakan—ia menghendaki perubahan, bukan hanya pengakuan.

Empat pilar keadilan substantif yang menjadi bagian integral dari arah gerakan PMII di abad ke-21 adalah sebagai berikut:

Keadilan Sosial. PMII harus menjadi pelopor dalam melawan ketimpangan sosial yang bersumber dari sistem ekonomi yang eksploitatif dan oligarkis. Mengutip gagasan Karl Polanyi (1944), ekonomi pasar yang tak terkendali akan merusak tatanan sosial. Dalam konteks ini, PMII perlu mendorong ekonomi solidaritas, redistribusi sumber daya, dan penguatan komunitas akar rumput sebagai basis dari demokrasi ekonomi.

Keadilan Gender. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan dan kelompok rentan masih menjadi korban subordinasi, kekerasan, dan diskriminasi struktural. PMII sebagai gerakan Islam progresif harus mengembangkan teologi pembebasan gender, seperti yang diperjuangkan

oleh tokoh-tokoh seperti Amina Wadud (2006) dan Riffat Hassan. Keadilan gender bukan sekadar representasi perempuan dalam struktur, tetapi pembongkaran sistemik atas relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan.

Keadilan Ekologis. Krisis iklim dan kerusakan lingkungan adalah bentuk baru dari ketidakadilan global. Islam memandang alam sebagai *amanah* dan manusia sebagai *khalifah* (QS. Al-Baqarah: 30). Oleh karena itu, PMII harus membangun kesadaran ekologis dalam narasi gerakannya, mendorong praktik hidup berkelanjutan, serta melawan kapitalisme ekstraktif yang merusak bumi dan memiskinkan masyarakat lokal.

Keadilan Epistemik. Dalam dunia yang didominasi oleh pengetahuan hegemonik, banyak narasi lokal dan pengetahuan alternatif disingkirkan. Keadilan epistemik berarti mengakui dan mengangkat suara pengetahuan yang selama ini dimarjinalkan: tradisi pesantren, kearifan lokal, pengalaman komunitas, dan analisis kritis mahasiswa. Seperti diungkap oleh Boaventura de Sousa Santos (2014), perjuangan hari ini adalah juga perjuangan *epistemologis*—melawan kolonialisme pengetahuan.

Dengan menjadikan keadilan substantif sebagai kerangka gerak, PMII bergerak melampaui batasan-batasan simbolik dan masuk ke ruang praksis perubahan. Ini adalah keadilan yang hidup dalam kenyataan, bukan hanya dalam teks; keadilan yang berpihak pada manusia dan kehidupan, bukan hanya pada prosedur dan institusi.

Keadilan adalah puncak dari kerja-kerja Islam dan keberpihakan pada rakyat. Ia bukan sekadar prinsip normatif, tetapi fondasi moral yang memberi makna pada seluruh praksis keislaman dan pergerakan sosial. Tanpa keadilan, agama berisiko tereduksi menjadi ritual hampa yang tercerabut dari realitas penderitaan manusia. Tanpa

keadilan, gerakan kehilangan legitimasi historisnya sebagai alat pembebasan dan transformasi sosial.

Dalam perspektif Islam, keadilan (*al-'adl*) merupakan poros utama ajaran agama. QS. An-Nahl:90 menegaskan bahwa Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Keadilan bukan hanya nilai, tetapi tujuan ilahiyah dari seluruh misi kenabian. Seperti dijelaskan dalam QS. Al-Hadid:25, para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan agar manusia menegakkan keadilan (*li-yaquman-nāsu bil-qis*').

Sementara itu, dalam perspektif gerakan, keadilan adalah kompas arah sejarah. Gerakan mahasiswa seperti PMII tidak cukup hanya membentuk pemimpin, tetapi harus membentuk kepekaan terhadap ketimpangan dan keberanian melawan penindasan. Tanpa komitmen terhadap keadilan substantif, gerakan akan larut dalam ritualisme organisasi atau terkooptasi oleh kepentingan pragmatis yang menjauh dari rakyat.

Keadilan, dengan demikian, adalah titik temu antara spiritualitas dan praksis sosial; antara langit dan bumi; antara harapan dan perjuangan. PMII, jika ingin tetap relevan sebagai gerakan Islam dan kerakyatan, harus menempatkan keadilan sebagai orientasi ideologis, arah strategis, dan cita-cita praksis dalam seluruh lini pergerakannya.

Menegaskan Trisula: Jalan Menuju Gerakan Emansipatoris

Dengan menjadikan Islam, rakyat, dan keadilan sebagai *trisula gerakan*, PMII tidak hanya memperkuat akar ideologisnya, tetapi juga memperluas medan juangnya. Dalam dunia yang ditandai oleh *disrupsi teknologi*, *krisis identitas*, dan *komodifikasi nilai*, trisula ini menjadi panduan moral sekaligus strategi politis untuk tetap relevan dan transformatif.

Islam sebagai sumber etik transenden mengakar dalam spirit pembebasan; rakyat sebagai subjek sejarah menghadirkan agenda konkret perjuangan; dan keadilan sebagai prinsip normatif sekaligus praksis politik menjadi arah utama perubahan sosial. Ketiganya membentuk formasi ideologis yang membedakan PMII dari gerakan yang sekadar reaktif atau terjebak dalam simbolisme politik.

Seperti diingatkan oleh Edward Said (1994), dalam dunia pascakolonial, penting bagi intelektual dan gerakan sosial untuk tidak hanya *mewakili* realitas, tetapi *mengintervensi* dan *mentransformasikannya*. Dalam kerangka ini, trisula gerakan bukan hanya warisan ideologis, tetapi perangkat refleksi dan aksi untuk menghadapi zaman yang cair, kompleks, dan penuh ketidakpastian.

Maka, tugas PMII hari ini adalah menjadikan trisula itu sebagai *kompas nilai* dan *alat navigasi strategis*. Ia tidak boleh berhenti sebagai slogan atau retorika dalam dokumen organisasi, tetapi harus dihidupkan dalam kaderisasi, aksi sosial, narasi publik, hingga etika kepemimpinan. Hanya dengan cara itu, PMII akan tetap berdiri sebagai kekuatan moral-politik yang bukan hanya mengkritik ketidakadilan, tetapi juga menggugah kesadaran dan membentuk masa depan.

Seperti ditegaskan oleh Frantz Fanon (1961), gerakan yang sejati adalah mereka yang mampu "*mengubah kesadaran menjadi gerakan sosial, dan penderitaan menjadi proyek pembebasan*." Pernyataan ini bukan hanya refleksi atas kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan, tetapi juga seruan abadi bagi setiap gerakan yang ingin tetap bermakna di tengah realitas yang terus berubah.

PMII hari ini dan ke depan harus menjawab *panggilan zaman* dengan menghunus trisula gerakannya—dengan iman sebagai fondasi spiritual, keberpihakan pada rakyat sebagai orientasi praksis, dan keberanian memperjuangkan

keadilan sebagai puncak perjuangan moral-politik. Trisula ini bukan sekadar simbol ideologis, melainkan perangkat kritis untuk membaca zaman, merumuskan strategi, dan menggerakkan perubahan.

Dalam dunia yang ditandai oleh fragmentasi identitas, ketimpangan struktural, dan krisis makna, trisula Islam–rakyat–keadilan adalah titik pijak untuk menghindari dua ekstrem: kehilangan akar nilai atau kehilangan arah perjuangan. Ia adalah jalan tengah yang memungkinkan PMII tetap menjadi gerakan mahasiswa yang *progresif secara pemikiran, radikal secara nilai, dan kontekstual dalam gerak sosial.*

Dengan trisula ini, PMII bukan hanya menyuarakan perubahan, tetapi menjadi perubahan itu sendiri—melalui kader-kader yang tidak hanya cakap dalam wacana, tetapi juga tangguh dalam laku. Maka perjuangan PMII bukanlah nostalgia masa lalu, melainkan *ikhtiar terus-menerus* untuk menghadirkan masa depan yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih Islami.

C. MENYUSUN KEMBALI ROADMAP PERUBAHAN SOSIAL

Di tengah dunia yang terus berubah, setiap gerakan sosial dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk membaca ulang zamannya dan menata ulang jalannya. PMII, sebagai gerakan kader dan intelektual muda Islam, tidak terkecuali. Menyusun kembali *roadmap* perubahan sosial bukan sekadar agenda teknokratik atau reposisi struktural, tetapi sebuah proses refleksi historis dan penyusunan arah perjuangan yang lebih visioner dan berkeadilan.

Roadmap baru ini harus lahir dari kesadaran kontekstual bahwa lanskap sosial, politik, ekonomi, dan budaya telah mengalami transformasi fundamental. Dalam

konteks ini, PMII perlu meninggalkan pola lama yang reaktif dan seremonial, menuju pola gerakan yang *proaktif, sistemik, dan berakar pada kebutuhan riil masyarakat*. Ini berarti memperluas medan gerak—dari ruang-ruang formal kampus ke medan sosial yang lebih luas: desa, kota, dunia maya, dan jejaring global.

Menyusun kembali *roadmap* berarti juga menyusun kembali visi tentang perubahan itu sendiri: bahwa transformasi sosial bukanlah hasil dari agitasi sesaat atau retorika moral belaka, tetapi buah dari *proses jangka panjang* yang melibatkan konsolidasi ide, kaderisasi yang berkualitas, dan aksi kolektif yang berkelanjutan. Perubahan sosial harus dimaknai bukan sebagai lompatan revolusioner yang utopis, tetapi sebagai proses emansipasi bertahap yang membebaskan masyarakat dari ketimpangan, ketidaktahuan, dan keterpinggiran.

Seperti ditulis Paulo Freire (1970) dalam *Pedagogy of the Oppressed*, perubahan sejati hanya mungkin terjadi ketika rakyat menjadi subjek dari proses pembebasannya sendiri. Maka, roadmap baru PMII harus berpijak pada *participatory approach*—menggandeng masyarakat sebagai mitra, bukan objek; sebagai pengambil keputusan, bukan penerima manfaat pasif.

Dengan kerangka tersebut, PMII perlu menegaskan bahwa perjuangan bukan hanya soal memperjuangkan kuasa representasi, tetapi soal membangun struktur alternatif yang lebih adil. Roadmap ini mencakup: Konsolidasi ideologis melalui reaktualisasi nilai-nilai Islam progresif; Penguatan kapasitas kader sebagai intelektual organik dan penggerak sosial; Ekspansi medan gerakan ke isu-isu kontemporer seperti keadilan digital, iklim, dan ekonomi solidaritas; Revitalisasi basis massa melalui pendekatan kultural dan partisipatif yang menghargai kearifan lokal.

Pada akhirnya, menyusun kembali roadmap perubahan sosial adalah upaya PMII untuk *menemukan kembali misinya* di tengah zaman yang kompleks—yakni menjadi gerakan kader yang tidak hanya hadir dalam sejarah, tetapi ikut membentuk arah sejarah. PMII harus menjadi kekuatan yang konsisten menumbuhkan harapan, memperkuat keberdayaan rakyat, dan menegakkan nilai-nilai keadilan dalam wajah konkret kehidupan sehari-hari.

Perubahan Sosial: Dari Narasi ke Strategi

Perubahan sosial, sebagaimana dicatat oleh Karl Marx, "tidak muncul dari langit, tetapi dari kontradiksi internal masyarakat itu sendiri" (Marx, *Preface to A Contribution to the Critique of Political Economy*, 1859). Namun, kontradiksi itu tidak akan otomatis berubah menjadi transformasi tanpa intervensi sadar dan terorganisir. Di sinilah pentingnya roadmap: sebagai kompas ideologis, peta jalan strategis, dan rencana aksi kolektif untuk membebaskan manusia dari ketertindasan struktural.

Roadmap ini tidak boleh disusun secara top-down dan birokratis, melainkan melalui proses *dialogis dan partisipatif*—melibatkan suara-suara dari bawah, dari rakyat yang selama ini berada di pinggiran wacana pembangunan. Ia harus menjadi hasil refleksi kolektif yang menggabungkan pemahaman historis, kepekaan sosial, dan visi masa depan. PMII, sebagai gerakan intelektual, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa roadmap ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi menjadi *living strategy*—strategi hidup yang terus diperbarui dan diuji dalam praksis sosial.

Dalam konteks ini, roadmap bukan hanya alat teknis, melainkan juga manifes ideologis. Ia merepresentasikan pilihan nilai dan keberpihakan: kepada yang tertindas, kepada masa depan yang lebih adil, dan kepada perubahan

yang berakar, bukan hanya tambal sulam. Sebagaimana dikatakan Immanuel Wallerstein (2004), "perubahan dunia tidak terjadi karena keinginan semata, tetapi karena tindakan kolektif yang terorganisir dan visioner."

Maka, menyusun kembali roadmap perubahan sosial adalah tindakan politik dan moral sekaligus. Ia menuntut keberanian untuk membongkar yang mapan, menyusun yang baru, dan membumikan gagasan ke dalam praksis nyata. Bagi PMII, ini adalah panggilan sejarah—untuk tidak hanya menjadi penonton perubahan, tetapi menjadi *arsitek masa depan*.

Menghadapi Zaman Baru: Kompleksitas dan Fragmentasi

Kita hidup dalam dunia yang disebut Anthony Giddens (1990) sebagai *modernitas radikal*—sebuah fase ketika globalisasi, teknologi digital, dan desentralisasi otoritas memicu perubahan sosial yang berlangsung cepat, simultan, dan sulit diprediksi. Dalam kondisi ini, struktur-struktur lama kehilangan relevansi, sementara tatanan baru belum sepenuhnya terbentuk. Masyarakat hari ini menghadapi krisis multidimensi: ketimpangan ekonomi yang makin tajam, perusakan lingkungan yang sistematis, demoralisasi politik melalui banalitas kekuasaan, serta dekadensi budaya akibat komodifikasi nilai-nilai luhur.

Di tengah krisis ini, terjadi apa yang disebut Giddens sebagai "disembedding"—pemutusan hubungan antara ruang sosial dan keintiman tradisional. Akibatnya, individu mengalami keterasingan, masyarakat kehilangan solidaritas, dan nilai-nilai bersama tergantikan oleh kalkulasi individualistis. Dunia bergerak cepat, tetapi kehilangan arah moral dan makna kolektif.

PMII, dalam konteks ini, tidak cukup hanya hadir sebagai pelengkap wacana atau penjaga warisan lama.

Ia harus tampil sebagai agen perubahan historis, yang mampu menawarkan *counter-narrative* terhadap logika neoliberalisme dan fundamentalisme yang saling memperkuat. PMII mesti menjelma menjadi gerakan yang tidak hanya reaktif terhadap perubahan, tetapi juga proaktif dalam menyusun ulang arah zaman—berbasis nilai, berakar pada realitas, dan berpihak pada keadilan.

Tanpa roadmap yang kontekstual dan kritis, gerakan sosial akan kehilangan arah—baik secara ideologis maupun praksis. Ia akan terjebak dalam romantisme masa lalu atau terombang-ambing oleh arus perubahan tanpa pijakan nilai. Dalam kondisi ini, PMII dihadapkan pada keharusan historis: untuk keluar dari bayang-bayang glorifikasi masa lalu dan menjelma menjadi arsitek perubahan sosial yang merumuskan strategi perjuangan berdasarkan realitas kontemporer yang kompleks.

Keberanian ini tidak berarti meninggalkan akar, tetapi justru meneguhkan akar Islam Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai fondasi nilai yang dinamis dan terbuka terhadap pembaruan. Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, terdapat semangat *tajdid* (pembaruan) dan *ijtihad* (penggalian solusi kontekstual) yang harus terus dihidupkan. PMII harus mewarisi semangat ini: menyusun peta jalan transformasi yang responsif terhadap krisis ekologis, tantangan digitalisasi, disrupsi ekonomi, serta polarisasi identitas yang melanda masyarakat global.

Dengan demikian, roadmap PMII bukan sekadar dokumen strategis, tetapi juga manifesto ideologis yang menggabungkan visi spiritual, etika sosial, dan praksis transformatif. Inilah jalan panjang yang harus ditempuh: bukan jalan pintas populisme, tetapi jalan sunyi kaum pelopor—yang percaya bahwa perubahan sejati selalu lahir dari kerja intelektual, komitmen moral, dan keberpihakan yang konsisten terhadap rakyat dan keadilan.

Dari Kaderisasi ke Transformasi Sosial

Gerakan perubahan sejati tidak dapat dilepaskan dari proses kaderisasi yang ideologis, partisipatif, dan berbasis realitas sosial. Kaderisasi bukan sekadar proses mekanis untuk mencetak aktivis yang mahir secara teknis atau administratif, melainkan proses pembentukan subjek historis—individu yang memiliki kesadaran kritis, keberpihakan moral, dan visi transformatif terhadap masyarakatnya.

Dalam kerangka ini, kader bukan hanya pelaksana agenda organisasi, tetapi motor perubahan yang memahami akar struktural ketimpangan, serta memiliki keberanian untuk menantangnya melalui jalan intelektual dan praksis sosial. Proses kaderisasi harus menjadi ruang dialektika antara teori dan realitas, antara nilai-nilai Islam dan tantangan kontemporer.

Sebagaimana ditegaskan Paulo Freire (1970), pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang menjadikan manusia sebagai subjek, bukan objek. Maka, kaderisasi PMII harus menjadi pendidikan pembebasan—yang membangkitkan kesadaran, memperkuat karakter, dan menanamkan komitmen terhadap Islam, rakyat, dan keadilan sebagai trisula perjuangan.

Dalam hal ini, PMII harus menjadikan setiap tahapan kaderisasi bukan sekadar proses administratif atau ritual organisasi, melainkan sebuah laboratorium ide dan praksis—ruang pembentukan subjek historis yang sadar akan peran sosialnya dan bertanggung jawab terhadap perubahan zaman. Di sanalah pemikiran kritis ditempa, keberpihakan ideologis dirumuskan, dan kerja-kerja kerakyatan dikonkretkan dalam tindakan nyata. Kaderisasi harus mampu memfasilitasi perjumpaan antara teori dan realitas, antara teks dan konteks, antara iman dan pembebasan.

Hal ini sejalan dengan prinsip Islam tentang *amar ma'ruf nahi munkar* (QS. Ali Imran: 104), yang bukan sekadar seruan moral personal, tetapi juga panggilan kolektif untuk membangun tatanan sosial yang adil, manusiawi, dan bebas dari segala bentuk penindasan. Dalam konteks masyarakat modern, prinsip ini menuntut pengorganisasian sistemik, formulasi kebijakan yang berpihak, dan gerakan sosial yang membebaskan—bukan sekadar reaksi moral, tetapi strategi transformatif yang menuntun masyarakat menuju cita keadilan.

Kaderisasi yang berorientasi emansipatoris inilah yang akan menjadi fondasi dari gerakan PMII ke depan—sebuah gerakan yang tidak hanya menjawab tantangan intelektual, tetapi juga mengakar pada realitas rakyat, menyentuh problem struktural, dan mengusung keberpihakan sebagai prinsip ideologis yang hidup dan menyala.

Pilar Strategis Roadmap PMII Abad ke-21

Menyusun kembali roadmap gerakan berarti merumuskan ulang pilar-pilar strategis yang menjadi jangkar ideologis dan arah praksis PMII dalam menjawab tantangan zaman. Di tengah perubahan sosial yang kompleks dan sering kali membingungkan, keberadaan pilar ini penting sebagai pandu jalan, sekaligus penegas komitmen gerakan terhadap transformasi sosial yang berkeadilan. Lima pilar berikut menjadi fondasi utama:

Emansipasi Pengetahuan. PMII harus menjadi garda depan dalam membebaskan dunia pendidikan dari cengkeraman bias kelas, komersialisasi, dan hegemoni narasi tunggal. Pengetahuan harus dikembalikan kepada rakyat—sebagai alat pembebasan, bukan alat pelanggeng status quo. Ini berarti mendorong pendekatan kritis dalam pendidikan, merayakan keragaman epistemik, dan

membangun ruang belajar yang dialogis, partisipatif, dan membebaskan. *Sebagaimana ditegaskan Paulo Freire (1970), pendidikan sejati adalah proses memanusiakan manusia—bukan menindas dalam diam.*

Demokrasi Berbasis Nilai. Demokrasi yang diperjuangkan bukanlah demokrasi kosmetik yang hanya hadir dalam bilik suara, melainkan demokrasi substantif—yang menjamin partisipasi bermakna, keterlibatan kritis warga, dan keberpihakan pada kelompok marjinal. Nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan harus menjadi roh demokrasi; bukan sekadar prosedur legal-formal, tetapi ekspresi dari etika publik dan keberadaban politik.

Ekonomi Sosial Berkeadilan. PMII mesti mengambil posisi tegas menolak logika eksploitasi kapitalisme yang menyingkirkan rakyat dari akses atas sumber daya. Sebagai gantinya, perlu dibangun model ekonomi alternatif yang inklusif, partisipatif, dan berlandaskan prinsip keberlanjutan. Ekonomi kerakyatan yang berkeadilan bukan hanya soal distribusi kekayaan, tetapi juga soal demokratisasi akses, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap kerja manusia.

Keadilan Ekologis. Isu lingkungan tidak bisa lagi diposisikan sebagai pelengkap gerakan, tetapi harus menjadi jantung dari perjuangan sosial PMII. Krisis iklim, perusakan alam, dan eksploitasi sumber daya alam adalah bentuk baru dari kolonialisme dan ketimpangan global. Dalam konteks ini, keberpihakan terhadap lingkungan hidup adalah bentuk jihad sosial yang luhur—sebagai bagian dari amanah khalifah fi al-ardh untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama.

Kebudayaan Kritis. Gerakan PMII juga harus menjadi agen kebudayaan progresif. Di tengah arus budaya pasrah, dangkal, dan konsumeristik, PMII perlu membangun kebudayaan kritis yang mencerahkan dan membebaskan.

Kebudayaan tidak boleh dijadikan alat penjinakan, tetapi harus menjadi ruang kontestasi nilai dan arena pembentukan kesadaran. Di sinilah pentingnya menghidupkan seni, sastra, diskursus publik, dan narasi-narasi alternatif yang berakar pada nilai-nilai luhur dan keberanian berpikir.

Pilar-pilar strategis ini tidak boleh berhenti pada level wacana atau dokumen organisasi. Ia harus diterjemahkan secara konkret dalam praksis gerakan—melalui pemberdayaan komunitas, advokasi publik yang berkeadilan, penguatan kapasitas kader yang visioner, serta produksi pengetahuan alternatif yang membebaskan. Dengan begitu, PMII mampu hadir bukan hanya sebagai organisasi kaderisasi, tetapi sebagai *agent of change* yang membumi di tengah rakyat, berpikir kritis di tengah arus hegemoni, dan berjuang di garis depan perubahan sosial yang transformatif.

Menuju Gerakan Pembebasan yang Relevan dan Visioner

PMII perlu memposisikan diri sebagai agen pembaharuan sosial yang tidak hanya kritis terhadap ketimpangan, tetapi juga kreatif dalam merancang alternatif peradaban. Menyusun kembali roadmap berarti menata ulang masa depan dengan kesadaran historis dan imajinasi sosial—bukan dengan sekadar mengulang masa lalu yang usang, tetapi dengan keberanian membaca realitas secara dialektis dan melampaui zaman secara visioner.

Dalam dunia yang ditandai oleh krisis multidimensi—ekologis, epistemologis, hingga eksistensial—PMII dituntut untuk hadir sebagai gerakan yang mampu memadukan akar nilai-nilai Islam, analisis sosial yang tajam, dan praksis transformasi yang membebaskan. Di sinilah PMII menemukan urgensi barunya: menjadi pelopor gerakan intelektual-organik yang tidak hanya bertanya "apa yang

sedang terjadi", tetapi juga "apa yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya."

Sebagaimana ditegaskan oleh Frantz Fanon, "Setiap generasi harus, dalam keadaan kabur, menemukan misinya, dan mengkhianatinya atau memenuhinya" (*The Wretched of the Earth*, 1961). Kutipan ini bukan sekadar refleksi historis, tetapi panggilan eksistensial bagi setiap gerakan, termasuk PMII, untuk menemukan raison d'être-nya di tengah kabut zaman yang sarat ketidakpastian. *Roadmap* perubahan sosial bagi PMII hari ini bukanlah dokumen teknokratis belaka, melainkan ikhtiar ideologis dan spiritual untuk menjawab panggilan sejarah tersebut—sebuah misi peradaban yang harus dijalani dengan kejernihan akal, keteguhan iman, dan keberanian moral untuk berpihak pada keadilan. Di sinilah PMII diuji: apakah akan menjadi penonton perubahan, atau justru penggerak yang menyalakan obor emansipasi dalam gelapnya struktur ketimpangan.

D. PMII SEBAGAI KEKUATAN YANG TIDAK SEKADAR MENGKRITIK, TAPI MENGGUGAH

Dalam tradisi gerakan sosial, kritik merupakan *napas awal* dari kesadaran. Ia adalah titik mula dari kebangkitan akal dan nurani yang menandai lahirnya keberpihakan serta keberanian untuk tidak tunduk pada status quo yang menindas. Kritik, dalam pengertian ini, bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan, melainkan afirmasi terhadap nilai dan keberanian melawan ketidakadilan. Namun, kritik semata tidak cukup. Tanpa arah transformasi, kritik bisa menjelma menjadi keluhan—berisik namun tak menggugat, lantang namun tak menggerakkan.

Di sinilah letak urgensinya: PMII harus melampaui peran sebagai kekuatan pengkritik pasif menjadi kekuatan penggerak yang menggugah. Menggugah kesadaran kritis

di tengah apatisme kolektif; menggugah partisipasi aktif dalam struktur sosial-politik yang semakin terasing; dan menggugah harapan, bahwa perubahan bukanlah utopia, melainkan keniscayaan yang diperjuangkan. PMII bukan hanya suara di pinggiran, tetapi nyala api di pusat peradaban yang membangunkan umat dari kejumudan dan menyalakan harapan akan dunia yang lebih adil, manusiawi, dan bermartabat.

Gerakan yang menggugah adalah gerakan yang mampu membangkitkan kesadaran eksistensial rakyat—kesadaran akan diri, dunia, dan relasi kuasa yang membentuk keduanya. Dalam kerangka pemikiran Paulo Freire (1970) tentang *Pedagogi Kaum Tertindas*, pembebasan sejati tidak lahir dari kemarahan yang membabi buta, tetapi dari kesadaran kritis yang tumbuh melalui proses refleksi dan dialog. Pembebasan bukan sekadar membalik posisi kuasa, tetapi membongkar struktur ketertindasan dan membangun kesadaran yang transformatif.

PMII, dalam konteks ini, tidak cukup hadir sebagai organisasi yang hanya mengutuk ketidakadilan atau menyampaikan kritik keras kepada negara dan sistem. Ia harus menjadi *ruang pembebasan*—tempat di mana rakyat diajak berdialog, bukan didikte; diajak berpikir, bukan digurui; diajak bergerak, bukan dimobilisasi. PMII mesti menjadi penggerak pendidikan alternatif, fasilitator kesadaran kolektif, dan pelopor kebudayaan emansipatoris yang berakar pada pengalaman dan realitas rakyat. Dengan cara inilah, PMII tidak sekadar menjadi bagian dari sejarah, tetapi penulis sejarah itu sendiri—bersama rakyat, bukan di atas rakyat.

Sebagaimana dicontohkan oleh para *intelektual organik* dalam pemikiran Antonio Gramsci (1971), peran transformasional dalam sejarah tidak lahir dari menara gading kekuasaan, melainkan dari mereka yang hidup

dan bekerja di jantung problem sosial—yang mampu mengartikulasikan suara-suara yang selama ini dibungkam, dan membangkitkan kesadaran kolektif sebagai kekuatan transformatif. Intelektual organik bukan sekadar pemikir, tetapi pelaku sejarah yang merawat nalar kritis dan mengorganisir harapan rakyat menjadi gerakan yang terarah.

PMII, dalam konteks ini, tidak cukup hanya menjadi komentator politik atau pengulas isu-isu publik dari kejauhan. Ia harus menempatkan diri sebagai *katalis ideologis dan praksis*—mengubah gagasan menjadi gerakan, dan aspirasi menjadi aksi. PMII dituntut untuk menjadi penggerak yang memanusiakan: yang menolak dehumanisasi sistemik, melawan apatisme struktural, dan membangun ruang-ruang sosial yang adil, inklusif, dan transformatif. Inilah makna sejati dari gerakan: hadir bukan hanya untuk menjelaskan dunia, tetapi untuk mengubahnya.

PMII yang menggugah juga berarti PMII yang mampu menghadirkan alternatif—bukan hanya menjadi oposisi yang bersuara lantang, tetapi juga penyusun jalan keluar dari kebuntuan struktural. Dalam dunia yang semakin diliputi sinisme, kelelahan politik, dan ketidakpercayaan terhadap institusi, harapan menjadi bentuk radikalisme tersendiri. Sebagaimana ditegaskan oleh bell hooks (1994), *"hope is essential to any political struggle for radical change."* Harapan bukanlah eskapisme, melainkan keberanian untuk membayangkan dunia yang lebih adil, dan tekad untuk mewujudkannya melalui kerja kolektif.

Maka, gerakan yang menggugah adalah gerakan yang menyalakan harapan—bahwa dunia tidak harus tetap seperti ini, bahwa ketimpangan bukan takdir, dan bahwa perubahan dimungkinkan. Dan perubahan itu, sebagaimana sejarah kerap mencatat, tidak selalu lahir dari panggung besar, tetapi dari ruang-ruang kecil yang konsisten: diskusi yang

mencerahkan, aksi solidaritas yang menguatkan, advokasi komunitas yang membumi, dan pembelaan terhadap kaum marjinal yang terlupakan. PMII harus hadir sebagai penjaga api harapan itu—yang tak hanya mengkritik kegelapan, tetapi juga menyalakan lentera perubahan.

Dalam konteks ini, PMII harus menjadi rumah ideologis dan praksis bagi mereka yang gelisah terhadap ketimpangan sosial—mereka yang tidak bisa tinggal diam menyaksikan ketidakadilan, tetapi juga tidak ingin tenggelam dalam pesimisme. PMII harus menjadi ruang pembentukan kesadaran kritis sekaligus wadah kolektif untuk merancang perubahan. Ia bukan hanya pengingat akan luka-luka historis bangsa, tetapi juga bagian dari proses penyembuhannya.

PMII harus melampaui peran sebagai pembongkar kenyataan yang timpang; ia harus menjelma sebagai arsitek masa depan yang adil dan manusiawi. Seperti diungkapkan oleh Cornel West (2004), "Justice is what love looks like in public." Maka perjuangan PMII sejatinya adalah cinta yang diwujudkan dalam keberpihakan nyata: terhadap rakyat, terhadap keadilan, dan terhadap masa depan yang lebih bermartabat. Di sinilah PMII menemukan relevansi dan perannya—bukan sekadar sebagai organisasi mahasiswa, tetapi sebagai gerakan peradaban.

Sebagai gerakan mahasiswa berbasis nilai-nilai Islam, PMII memikul tanggung jawab moral dan historis yang tidak ringan: menjadikan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* bukan sekadar slogan dakwah normatif, tetapi sebagai strategi pembebasan sosial yang konkret dan transformatif. Seruan ini tidak cukup diwujudkan dalam ceramah atau poster aksi, melainkan harus menjelma dalam sistem nilai, kebijakan kaderisasi, dan orientasi gerakan yang berpihak kepada kaum tertindas.

Dalam QS Al-Baqarah ayat 143, Allah menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*—umat yang adil, seimbang, dan menjadi saksi atas kemanusiaan. Ini adalah mandat teologis sekaligus etis, yang menuntut PMII untuk hadir sebagai penjaga keseimbangan di tengah ekstremisme, sebagai penegak keadilan di tengah dominasi kekuasaan, dan sebagai jembatan dialog di tengah polarisasi sosial.

Maka menggugah, dalam kerangka ini, bukan hanya soal membakar semangat perlawanan, tetapi tentang menyalakan lentera perubahan—dengan kejujuran intelektual, keberanian moral, keluasan ilmu, dan kelembutan kasih sayang. Inilah jalan panjang yang mesti ditempuh PMII: menjadi pelita di tengah kabut zaman, menjadi suara di tengah bisu struktural, dan menjadi saksi atas perjuangan umat menuju tatanan yang lebih adil dan bermartabat.

PENUTUP

SERUAN KADER UNTUK MASA DEPAN RAKYAT

Setiap zaman melahirkan tantangannya sendiri, dan setiap generasi dipanggil untuk menjawabnya. Seperti yang dikemukakan oleh Frantz Fanon dalam *The Wretched of the Earth* (1961), "Setiap generasi harus menemukan misinya, memenuhinya atau mengkhianatinya." Fanon mengingatkan bahwa sejarah bukanlah panggung yang netral, melainkan arena pertarungan ide dan kepentingan, di mana generasi muda memiliki tugas historis untuk mentransformasikan realitas yang timpang menjadi tatanan yang lebih adil.

Di tengah derasnya arus ketimpangan sosial, krisis ekologis global, dekadensi moral-politik, dan alienasi budaya yang disebabkan oleh kapitalisme global dan disrupsi digital (Giddens, *Modernity and Self-Identity*, 1991), PMII tidak boleh menjadi penonton yang bungkam. Sebagai gerakan kader yang berakar pada nilai-nilai Islam, nasionalisme, dan kemanusiaan, PMII harus menjelma menjadi kekuatan emansipatoris yang mampu membumikan ajaran Islam sebagai pembebas, bukan pemaksa; sebagai penggerak, bukan penghias.

Seruan ini bukan sekadar ekspresi moral atau romantisme gerakan, tetapi panggilan sejarah yang mengharuskan keterlibatan aktif dalam membangun struktur sosial yang adil dan manusiawi. Kader PMII hari ini harus tampil sebagai subjek sejarah—bukan objek

penderitaan kolektif—yang dengan keberanian intelektual dan spiritual mampu menyalakan obor perubahan. Seperti dikatakan oleh Antonio Gramsci, "The challenge of modernity is to live without illusions and without becoming disillusioned" (*Prison Notebooks*, 1971). PMII harus menjawab tantangan ini dengan kesadaran kritis dan keberpihakan nyata.

Menjadi kader berarti mengambil peran dalam lakon sejarah, menolak menjadi penonton pasif dari tragedi rakyat. PMII tidak dilahirkan untuk menjadi komentator peristiwa, tetapi untuk menjadi penulis sejarah baru: sejarah yang ditulis dengan pena keadilan, tinta keberanian, dan kertas ketulusan iman.

Menjadi kader bukan sekadar menjalani proses administratif, tetapi mengemban misi peradaban. Sebuah misi yang tidak berhenti pada pelatihan teknis atau seremoni formal, melainkan memikul tanggung jawab historis untuk menghadirkan keadilan sosial, spiritualitas yang membebaskan, dan peradaban yang memuliakan manusia. Seperti dikatakan oleh Ali Shariati (1979), "Tugas intelektual bukan hanya menjelaskan dunia, tetapi juga mengubahnya." Maka menjadi kader adalah menjadi subjek aktif dalam pergulatan zaman, bukan hanya pewaris tradisi, tetapi penggubah masa depan.

Misi ini menuntut ketajaman nalar, kejernihan hati, dan keberanian untuk berpihak pada yang lemah. Dalam Islam, keberpihakan pada mustadh'afin (kaum tertindas) bukanlah sikap opsional, melainkan panggilan keimanan. QS. An-Nisa:75 menegaskan: *"Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang tertindas…?"* Ayat ini adalah seruan langsung untuk bertindak—bukan sekadar mendoakan, apalagi berdiam diri.

Masa depan rakyat tidak akan hadir karena belas kasih elite, melainkan melalui kerja-kerja kolektif mereka

yang memilih untuk berdiri bersama rakyat—dalam suka dan duka, dalam gagasan dan tindakan. Sebagaimana diyakini Paulo Freire (1970), transformasi sosial sejati lahir dari proses sadar dan partisipatif, bukan dari kemurahan hati kekuasaan. PMII, dengan seluruh jaringannya, harus menjadi bagian dari "kolektivitas yang tercerahkan"—sebuah jaringan kader yang bukan hanya fasih berbicara, tetapi siap berjalan kaki bersama rakyat, menyusun harapan dengan tangan sendiri.

Menjadi kader berarti menolak kenyamanan apatis, dan memilih jalan terjal perjuangan. Jalan yang barangkali sunyi, tetapi menjanjikan makna. Jalan yang tidak hanya membentuk pemimpin masa depan, tetapi juga pemikul tanggung jawab sejarah.

PMII harus melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berani secara etis dan tangguh secara sosial. Generasi yang tak sekadar piawai dalam wacana, tetapi siap berdiri di barisan terdepan untuk membela keadilan. Dalam dunia yang ditandai oleh polarisasi ekstrem, degradasi moral, dan komodifikasi ilmu, kader PMII dituntut untuk menjadi *jembatan peradaban*—yang mampu membangun jalan tengah di antara fanatisme ideologis dan kekosongan spiritual; yang mampu menyatukan ilmu dan amal di tengah terfragmentasinya pengetahuan modern.

PMII harus menjadi pelita dalam gelapnya apatisme publik, dan suara hati nurani di tengah kebisingan politik pragmatis. Sebagaimana diingatkan oleh Nurcholish Madjid (1992), "Kemerdekaan sejati adalah keberanian untuk berpikir bebas dan bertindak bertanggung jawab." Maka, kader PMII harus menjadi simbol dari kemerdekaan berpikir dan integritas bertindak—bukan pengikut buta kekuasaan, tetapi penggerak perubahan yang berakar pada nilai-nilai Islam dan keadaban publik.

Inilah saatnya PMII menyatakan bahwa keberpihakan kepada rakyat bukan sekadar pilihan politis, tetapi komitmen ideologis dan spiritual. Keberpihakan yang lahir dari kesadaran tauhid: bahwa keadilan adalah perintah Ilahi, dan ketimpangan adalah bentuk kemunkaran struktural yang harus dilawan. Dalam QS. Al-Ma'idah:8, Allah berfirman: "*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*." Maka keberpihakan kepada rakyat bukanlah bentuk permusuhan kepada kekuasaan, melainkan ibadah sosial yang luhur.

PMII hari ini tidak cukup hanya menjadi warisan sejarah, tetapi harus menjadi pembentuk sejarah baru—dengan gagasan yang hidup, keberanian yang membebaskan, dan cinta yang menyembuhkan. Saatnya PMII bukan hanya memperjuangkan posisi dalam struktur, tetapi memperjuangkan makna dalam kehidupan. Karena di tangan generasi yang sadar dan berkomitmenlah, masa depan rakyat dan bangsa akan menemukan harapan sejatinya.

Seruan ini adalah seruan dari kader untuk masa depan rakyat—bukan sekadar gema dari semangat perlawanan, tetapi ajakan tulus untuk melanjutkan perjuangan dengan cinta, kesadaran, dan tanggung jawab historis. Ini adalah panggilan untuk menanam harapan di tanah yang gersang, menyalakan cahaya di lorong-lorong gelap ketimpangan, dan membangun tatanan yang adil, setara, dan beradab bagi semua.

Karena sejatinya, cita-cita perjuangan kader PMII bukan sekadar menggenggam kekuasaan atau memenangkan kontestasi politik sesaat, melainkan membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, baik struktural maupun kultural. Seperti yang dikatakan Ali Syariati (1979), "*Tugas sejati para intelektual bukanlah mengikuti arus kekuasaan,*

tetapi membebaskan umat dari belenggu kebodohan, kezaliman, dan kemiskinan."

Sebab di ujung setiap gerakan, bukan sekadar kemenangan politik yang kita cari, tetapi ridha Tuhan dan keselamatan umat manusia. Inilah jihad yang hakiki—mewujudkan keadilan sosial sebagai manifestasi dari ibadah kepada Allah dan cinta kepada sesama. Dalam QS. Al-Hujurat:13, Allah mengingatkan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari status atau kekuasaan, tetapi dari ketakwaan dan kebermanfaatannya bagi kehidupan.

Maka perjuangan ini harus terus hidup—dalam ruang kelas dan jalanan, di podium dan perkampungan, di pikiran dan perbuatan. PMII bukan sekadar organisasi mahasiswa; ia adalah jalan panjang menuju perubahan, laboratorium masa depan, dan rumah besar bagi mereka yang percaya bahwa dunia ini masih bisa diperbaiki. Dan selama masih ada satu orang kader yang percaya pada keadilan dan bersedia berjuang demi rakyat, maka harapan itu tidak akan padam.

Daftar Pustaka

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1978. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC.

Al-Qur'an, Surah Al-A'raf [7]: 157

Al-Qur'an, Surah An-Nisa [4]:75; Surah Taha [20]:47.

Al-Qur'an: Surah Al-Hasyr: 7.

Ali Syari'ati. *On the Sociology of Islam*. Mizan Press, 1979.

Althusser, Louis. 1971. *Ideology and Ideological State Apparatuses*. In: Lenin and Philosophy and Other Essays. Monthly Review Press.

Arkoun, Mohammad. 2002. *Unthought in Contemporary Islamic Thought*. London: Saqi Books,

Barton, Greg. 2002. *Islam, Liberalism and the Future of the Muslim World*. UNSW Press.

Barton, Greg. 2002. *Islam, Liberalism and the Future of the Muslim World*. UNSW Press.

Bauman, Zygmunt. 2000. *Liquid Modernity*. Polity Press.

Bourdieu, P. 1990. *The Logic of Practice*. Stanford University Press.

Bourdieu, Pierre. 1991. *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press.

Butler, Judith. 2009. *Frames of War: When Is Life Grievable?* Verso.

Castells, Manuel. 1996. *The Power of Identity*. Wiley-Blackwell.

Dhakidae, Daniel. 2003. *Cendekiawan dan Kekuasaan*

dalam Negara Orde Baru. Gramedia

Diamond, Larry. 2008. *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*. Times Books.

Durkheim, Émile. 1893. *The Division of Labour in Society*.

Fanon, F. 1961. *The Wretched of the Earth*. London: Penguin Books.

Fanon, Frantz. 1961. *The Wretched of the Earth*. Grove Press.

Fraser, N. 2003. Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange. Verso.

Freire, Paulo. 1970. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.

Giroux, Henry A. (2014). *Neoliberalism's War on Higher Education*. Haymarket Books.

Gramsci, A. 1971. *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.

Habermas, Jürgen. 1984. *The Theory of Communicative Action*, Vol. 1. Beacon Press.

Habermas, Jürgen. 1989. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. MIT Press.

Hadis Nabi Muhammad SAW, HR. Ibnu Majah no. 224.

Harvey, David. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press.

Hooks, Bell. 1994. *Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom*. Routledge,

Illich, Ivan. *Deschooling Society*. Harper & Row, 1971.

King Jr., Martin Luther. *Letter from Birmingham Jail*, 1963.

Kuntowijoyo. 2006. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Bandung: Mizan.

Louis Althusser. 1971. *Ideology and Ideological State Apparatuses*.

Ma'arif, A. Syafi'i. 1995. *Islam dalam Perspektif Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: LKiS.

Madjid, Nurcholish. 2000. *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.

Mietzner, Marcus. 2013. *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. NUS Press.

Noor, Holil. 2010. *PMII dan Tantangan Zaman*. Jakarta: PB PMII Press.

PB PMII. 1991. *Nilai Dasar Pergerakan (NDP)*. Jakarta: PB PMII.

Piketty, T. 2014. Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press.

Qutb, S. 1953. Social Justice in Islam. American Council of Learned Societies.

Rahardjo, M. Dawam. 1985. *Agama dan Transformasi Sosial*. Jakarta: LP3ES,

Rahman, Fazlur. 1982. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.

Rawls, J. 1971. A Theory of Justice. Harvard University Press.

Said, Edward. 1994. *Representations of the Intellectual*. Vintage Books.

Scott, James C. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press.

Sen, Amartya. 2006. *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*. W.W. Norton & Company.

Syari'ati, Ali. 1979. *On the Sociology of Islam*. Trans. Hamid

Algar. Mizan Press.

Syariati, Ali. 1979. *What is to be Done: The Enlightened Thinkers and an Islamic Renaissance*. Islamic Publications.

Syariati, Ali. 2003. *Tugas Cendekiawan Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tarrow, Sidney. 1998. *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge University Press.

Tarrow, Sidney. 2011. *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Wahid, Abdurrahman. 2009. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. The Wahid Institute & Maarif Institute.

Wahid, Abdurrahman. 2009. *Ilusi Negara Islam*. The Wahid Institute.

Winters, Jeffrey A. 2011. *Oligarchy*. Cambridge University Press.

World Inequality Lab (2022). World Inequality Report.

BIODATA RINGKAS

Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si

Lahir 12 Maret 1974 di Situbondo, setamat Sekolah Dasar di Gunung Malang 1 Suboh, menempuh pendidikan SMP Suboh, SMA Negeri 1 Suboh dan S1 Program Pendidikan Sejarah nya ditempuh di Universitas Jember. Tahun 1998 menempuh Kursus Bahasa Inggris di Pare Kediri, tahun 1999 mulai mengajar di MAN I Situbondo di Demung, tahun 2001 mulai mengajar di SMA Negeri 1 Suboh. Pernah menjadi Pimpinan Umum majalah Mahasiswa Pijar Pendidikan FKIP Universitas Jember. Pendidikan S2 Program Pascasarjana Konsentrasi Program Kebijakan Publik di Universitas Jember diselesaikan pada tahun 2007. Tahun 2008 mendirikan SMA Negeri 1 Besuki. Tahun 2013-2017 menjabat sebagai Kepala Seksi SMA di Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Tahun 2017-2018 menjabat sebagai Kepala Seksi SMA, SMK, PK-PLK di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Situbondo. Selain itu tugas

kesehariannya dosen *freelance* di beberapa universitas swasta. Dan pada tanggal 2 Februari 2019, pindah kepegawaian nya dari Provinsi Jawa Timur ke Kementerian Agama sebagai Tenaga Pengajar di UIN KHAS Jember di FEBI, kuliah S3 di FISIP Universitas Jember dengan beasiswa 5000 Doktor Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan menjadi lulusan tercepat di program Doktor FISIP Unej. Saat ini diberi tugas untuk menjadi Wakil 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FEBI UIN KHAS jember.

Pria murah senyum ini adalah putra pertama dari tiga bersaudara, pasangan KH. Misbahul Munir dan Hj. Hamidatus Salamah (alm). Sampai saat ini ia telah menulis 25 judul buku, antara lain: Buku Growth Mindset (Diva Press, 2025), Buku Krisis Minat Belajar Mahasiswa: Analisis Psikologis dan Sosiologis (Pustaka Ilmu, 2025), Buku Ekonomi Makro Modern: Tantangan dan Peluang (Istana Agency, 2025), Buku Sistem Informasi Manajemen Perspektif Islam ((Diva Press, 2024), buku Administrasi Lembaga Bank dan Non Bank (Diva Press, 2024), buku Sistem Pengendalian Manajemen (Indigo Media, 2024), buku Birokrasi dan Publik Governance (Istana Agency, 2024), buku Strategies Success In Life (Diva Press, 2024), buku Perilaku Organisasi (UIN KHAS PRESS,

2023), buku Etika Bisnis & Profesi (Indigo Media, 2023) di Jakarta, buku Motivasi Ibuku Tangguh di antara Aku dan Tuhanku (Istana Agency, 2023), Buku Prophetic Governance (UIN KHAS PRESS, 2022), Manajemen Sumber Daya Insani Ala Pesantren (ASWAJA PRESSINDO Yogyakarta, 2021), Sistem Informasi Manajemen (Bildung Yogyakarta, 2020). Buku MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH Sebuah Pengantar (Bildung Yogyakarta, 2019). Buku Model Pembelajaran dalam Berbagai Pendekatan (LP3DI Press, 2019). Dan, juga menjadi editor beberapa buku karya dosen FEBI UIN KHAS dan Dosen Perguruan Tinggi Lain.

https://scholar.google.com/citations?user=BE_hhcAAAAAJ&hl=id

BIODATA PENULIS

Dr. Ubaidillah, S.Pd.I., M.Pd.I. lahir di Probolinggo, 4 Desember 1985. Ia merupakan dosen tetap di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember dengan jabatan fungsional Lektor (Penata III/c) dan saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat LP2M UIN KHAS Jember. Selain itu, beliau juga aktif sebagai Sekretaris Lakpesdam NU Kabupaten Bondowoso dan Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Kabupaten Bondowoso.

Dr. Ubaidillah menempuh pendidikan dasar di MI Tarbiyatus Sibyan Gending, Probolinggo (1997/1998), kemudian melanjutkan ke MTs Walisanga I Maron, Probolinggo (2000/2001), dan MAN 2 Kota Probolinggo (2002). Pendidikan tinggi ia selesaikan di STAIN Jember dengan gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) pada tahun 2008/2009, dilanjutkan dengan Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I.) di kampus yang sama pada tahun 2012. Gelar Doktor (Dr.) bidang

Pendidikan Islam diperoleh dari Universitas Islam Malang (UNISMA) pada tahun 2021.

Dalam dunia akademik dan organisasi, beliau memiliki rekam jejak panjang. Sebelum menjabat di UIN KHAS Jember, ia pernah menjadi Dosen Politeknik Negeri Jember (2011–2014), Dosen Universitas Panca Marga Probolinggo (2013–2014), serta Direktur Bimantara Institute Jawa Timur (2015–sekarang). Di lingkungan organisasi, ia aktif sebagai Ketua Senat STAI Al-Utsmani Bondowoso (2021–sekarang), Sekretaris PC Lakpesdam NU Bondowoso (2021–2026), Pengurus PC IKAPMII Jember (2021–2026), dan Pengurus KIBAR (Kajian Ilmiah Bersama Rakyat) (2017–sekarang).

Kiprah intelektualnya tercermin dari berbagai karya ilmiah, antara lain buku “Pendidikan Islam Multikultural Masyarakat Tengger” (ISBN 978-623-6527-3-9), “Khazanah Filsafat Pendidikan Barat dan Islam” (CV Humanis, ISBN 978-62390169-0-0), serta “Kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi” (Aswaja Press, ISBN 978-623-8035-07-6). Selain itu, ia juga aktif menulis artikel di jurnal nasional dan internasional, seperti dalam Review of International Geographical Education (RIGEO), dengan topik seputar akulturasi budaya dan nilai-nilai hukum adat di Jawa Timur.

Dr. Ubaidillah juga dikenal sebagai Instruktur Nasional Moderasi Beragama Kementerian Agama RI (2023) dan sering menjadi narasumber dalam seminar-seminar nasional, di antaranya bertema “Implementasi Pembelajaran Modern, Kreatif, dan Inovatif di Era Society 5.0” serta “Menelisik Peran Negara untuk Toleransi dan Perdamaian” yang diselenggarakan oleh PMII Jember.

Dalam kehidupan sosialnya, beliau tinggal di Perumahan Villa ITB II D-33, Tegal Besar, Kabupaten Jember, dan juga memiliki kediaman di Desa Liprak Wetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, serta Desa Grujugan Lor, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso.

📞Kontak: 08121 7777 333

📧Email:ubed21072011@gmail.com/ubed21072011@lecturer.uinkhas.ac.id

🔗Google Scholar: Klik di sini 🔗SINTA ID: Klik di sini

BIODATA RINGKAS

M. Riki Rahmatullah, S.E

M. Riki Rahmatullah aktivis muda yang akrab dipanggil Riki ini lahir di Jember, 27 November 2002. Alamatnya Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Ia menempuh pendidikan dasar di SDN Sumbersalak 04, kemudian melanjutkan ke jenjang menengah di MTS dan MA Al-Hidayah Silo Jember. Saat ini, ia tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah.

Sejak masa remaja, Riki dikenal aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Rayon Pagar Nusa Al-Hidayah pada tahun 2019–2020, kemudian memasuki dunia kampus ia melanjutkan kiprah organisasinya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Di organisasi ini, ia dipercaya menjadi Ketua Rayon PMII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember periode 2024–2025, dan saat ini

menjabat sebagai Ketua Komisariat PMII UIN KHAS Jember periode 2025–2026.
Dalam aktivitasnya, ia aktif menulis, berdiskusi, dan terlibat dalam aksi sosial serta pengembangan wacana ekonomi, keislaman dan keindonesiaan.
Aktivis muda ini dapat dihubungi melalui email: [rikirahmatullah1960@gmail.com]

الإدارة العالمية للصحة
N U
النهضة العلمية
١٣٤٤
1926

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Haji Achmad Siddiq

JEMBER – INDONESIA

Buku *PMII dan Dialektika Sosial: Antara Spirit Perlawanan dan Etika Perubahan* merupakan eksplorasi mendalam atas dinamika gerakan mahasiswa Islam di Indonesia, dengan fokus pada peran dan tantangan PMII dalam menjawab perubahan sosial kontemporer. Ditulis dengan pendekatan naratif-ilmiah dan filosofis, buku ini membedah berbagai isu strategis: dari godaan pragmatisme, stagnasi kaderisasi, hingga reformulasi ideologi dan strategi perjuangan di abad ke-21.

Di dalamnya, pembaca akan menemukan bagaimana PMII dituntut untuk tidak hanya menjadi kritikus kekuasaan, tetapi juga inovator sosial yang mampu menggugah kesadaran rakyat dan membangun alternatif sistemik yang berkeadilan. Buku ini menegaskan pentingnya membangun gerakan emansipatoris yang berakar pada nilai Islam, berpihak pada rakyat, dan berjuang demi keadilan sebagai trisula ideologis PMII.

Dengan merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh seperti Antonio Gramsci, Paulo Freire, bell hooks, hingga Ali Syariati dan Fazlur Rahman, buku ini memperkaya narasi perjuangan dengan refleksi teoretis yang mendalam. Sebuah bacaan penting bagi siapa pun yang percaya bahwa gerakan mahasiswa masih relevan sebagai agen perubahan, dan bahwa PMII tetap memiliki peran strategis dalam membentuk arah masa depan Indonesia.

UIN KHAS PRESS
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68136
Website: https://press.uinkhas.ac.id
Email: uinkhaspress@gmail.com / uinkhaspress@uinkhas.ac.id
Phone: (0331) 487550, (0331) 427005

ISBN 978-623-89762-6-3